



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2020–2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang signifikan dan mempengaruhi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perlu dilakukan perubahan atas rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 23-TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Renstra meliputi uraian tentang kondisi, potensi dan permasalahan, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, program, sasaran program, kegiatan dan sasaran kegiatan, keluaran kegiatan, target capaian, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan.
 - (2) Sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra harus dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan pada masing-masing unit kerja dan unit pelaksana teknis sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 118



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN
RAKYAT TAHUN 2020-2024

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Visi pembangunan nasional di dalam RPJMN 2015 – 2019, yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong telah dijabarkan dalam tiga dimensi strategi pembangunan nasional, yaitu Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang didukung oleh kondisi yang terkait dengan aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Di dalam pencapaian visi tersebut, selama periode 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) telah memberikan kontribusi yang signifikan pada upaya pencapaian kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas, penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan produktif, dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional serta peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan

kebutuhan generasi masa depan, dengan mempertimbangkan pada arah pembangunan yang pencegahan dan adaptif perubahan iklim, serta pengurangan resiko bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara umum tercermin dalam indikator-indikator antara lain: (1) indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan dampak ekonomi; (2) tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem (keanekaragaman hayati).

Selanjutnya, Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya) yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan infrastruktur beserta dukungan bagi penyelenggaraan pembangunan yang terdiri dari pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), penyelenggaraan jalan, pembangunan permukiman, pembangunan perumahan, fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan, pembinaan SDM, pengendalian dan pengawasan serta tata kelola penyelenggaraan pembangunan.

Secara makro pembangunan infrastruktur secara keseluruhan telah memberikan dampak ekonomi, baik pada tahap konstruksi pembangunan infrastruktur maupun pada operasi infrastruktur. Dampak ekonomi pada tahap konstruksi terlihat misalnya dari peningkatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan. Investasi infrastruktur pada tahun 2017 sebesar Rp 126,8 Triliun telah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,06% dengan nilai tambah yang dihasilkan Rp 146,9 Triliun. Sedangkan pada tahun 2018 investasi infrastruktur sebesar Rp 157,8 Triliun telah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,28% dengan nilai tambah yang dihasilkan Rp 184,4 Triliun. Adapun dampak ekonomi pada tahap operasi infrastruktur yaitu Investasi infrastruktur pada tahun 2017 sebesar Rp 49,3 Triliun telah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,38% dengan nilai tambah yang dihasilkan Rp 52,2 Triliun. Sedangkan pada tahun 2018 investasi infrastruktur sebesar Rp 92,3 Triliun telah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,65% dengan nilai tambah yang dihasilkan Rp 94,8 Triliun.

1.1.1

Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Selama periode 2015 – 2019, pengelolaan SDA secara umum ditujukan bagi tercapainya sasaran-sasaran untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi. Pengelolaan SDA dilaksanakan melalui konservasi SDA untuk menjaga fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air, pendayagunaan SDA untuk memenuhi kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari masyarakat serta kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, dan pengendalian daya rusak air untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA.

Konservasi SDA yang dilaksanakan melalui pembangunan dan rehabilitas/peningkatan bendung/waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta restorasi sungai, revitalisasi danau dan konservasi rawa. Capaian hingga akhir tahun 2019 meliputi: Bendungan/waduk yang telah terbangun sebanyak 61 buah, terdiri dari 16 bendungan lanjutan periode sebelumnya dan 45 bendungan baru; Embung dan bangunan penampung air lainnya yang telah terbangun sebanyak 1.212 buah; Bendungan/ waduk yang telah direhabilitasi/ditingkatkan sebanyak 16 buah; Embung dan bangunan penampung air lainnya yang telah direhabilitasi/ditingkatkan sebanyak 240 buah; dan Danau yang direvitalisasi sebanyak 21 buah.

Pendayagunaan SDA yang dilaksanakan melalui pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana air baku, beserta peningkatan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Capaian hingga akhir tahun 2019 meliputi: Sarana prasarana pengelolaan air baku yang terbangun dan telah ditingkatkan fungsinya sebanyak 30,70 m³/detik; Sarana dan prasarana pengelolaan air baku yang telah direhabilitasi sebanyak 11,07 m³/detik; Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat telah dibangun sepanjang 2163,87 Km; Jaringan irigasi rawa yang telah dibangun sepanjang 1.080,20 Km; Jaringan irigasi tambak yang telah dibangun sepanjang 119,90 Km; Jaringan irigasi air tanah yang telah dibangun sepanjang 295,80 Km; Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat telah direhabilitasi sepanjang 6.329,95 Km; Jaringan irigasi rawa yang telah direhabilitasi sepanjang 5.139,62 Km; Jaringan irigasi tambak yang telah direhabilitasi sepanjang 764,83 Km; Jaringan irigasi air tanah yang telah direhabilitasi sepanjang 720,11 Km; Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat yang dilakukan operasi dan pemeliharaan sepanjang 51.312 Km; Jaringan irigasi rawa yang dilakukan operasi dan pemeliharaan sepanjang 14.770 Km; Jaringan irigasi air tanah yang dilakukan operasi dan pemeliharaan sepanjang 478 Km.

Pengendalian daya rusak air telah dilaksanakan melalui penanganan pada kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai. Capaian hingga akhir tahun 2019 meliputi: *Breakwater / seawall* dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dipelihara sepanjang 174,30 Km; Jumlah sungai yang telah dinormalisasi dan tanggul

yang telah dibangun/ditingkatkan sepanjang 810,94 Km; dan kawasan yang terlindungi dari daya rusak air seluas 61.904,03 Ha.

Hasil pembangunan telah meningkatkan ketersediaan air, baik untuk kebutuhan irigasi maupun air baku, antara lain meliputi:

1. Kapasitas/daya tampung bangunan air sebanyak 13,80 miliar m³;
2. Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk mencapai 12,32%;
3. Kapasitas air baku nasional sebanyak 30,70 m³/detik.

Kontribusi hasil pembangunan SDA bagi pencapaian kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi tercermin dari pemanfaatan hasil pembangunan SDA, antara lain:

1. Peningkatan luas panen padi, menurut data BPS luas panen padi di Indonesia tahun 2018 diperkirakan mencapai sebesar 10,90 juta hektar.
2. Peningkatan kapasitas terpasang pada IPA SPAM yang disediakan melalui sarana dan prasarana air baku telah memberikan dampak bagi peningkatan cakupan pelayanan air minum bagi penduduk (Rumah Tangga/RT).
3. Pengembangan potensi PLTA pada waduk-waduk telah meningkatkan kapasitas PLTA pada waduk dan meningkatkan kontribusi pada kapasitas pembangkit terpasang. Secara keseluruhan kapasitas pembangkit terpasang pada tahun 2014 sebesar 53 GW meningkat menjadi 62,6 GW pada tahun 2018.
4. Sejumlah kawasan yang terlindungi dari bahaya dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai telah memberikan kontribusi bagi terlindunginya sejumlah lahan produktif, kawasan wisata, industri, perumahan, permukiman dan bangunan serta properti lainnya, termasuk perlindungan terhadap penduduk dalam melaksanakan aktivitas sosial dan ekonominya.

1.1.2 Penyelenggaraan Jalan

Selama periode 2015 – 2019, penyelenggaraan jalan yang meliputi pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan secara umum ditujukan bagi peningkatan konektivitas dan memperkuat daya saing infrastruktur, dan lebih khusus ditujukan untuk mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional mendukung sislognas dan konektivitas nasional serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri prioritas, kawasan strategis pariwisata nasional, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.

Pencapaian pembangunan penyelenggaraan jalan hingga akhir tahun 2019 meliputi:

1. Jalan Nasional yang dipelihara sepanjang 47.017 km.
2. Jalan Nasional yang ditingkatkan kapasitasnya sepanjang 3.277,21 Km.
3. Jalan Nasional baru yang dibangun berupa jalan paralel perbatasan, jalan akses ke kawasan strategis, dan jalan akses membuka isolasi di beberapa wilayah sepanjang 3.843,38 km.
4. Jembatan yang dipelihara sepanjang 445.875,00 m.
5. Jembatan yang ditingkatkan sepanjang 15.068,23 m.
6. Jembatan baru yang dibangun mencapai sepanjang 58.002,55 m
7. Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol) yang telah dibangun sepanjang 1.298,49 Km, sepanjang 115,53 km dikerjakan oleh Pemerintah dan selebihnya dikerjakan oleh swasta.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan hingga akhir tahun 2019 telah menghasilkan kondisi mantap jalan nasional mencapai 92,81% dan tingkat aksesibilitas jalan nasional mencapai 87%. Dengan kondisi tersebut maka arus transportasi, logistik, barang dan jasa antar wilayah semakin efisien. Di sisi lain dengan adanya pembangunan jalan baru, sejumlah wilayah telah memiliki akses transportasi yang dapat mempercepat arus dan menurunkan biaya logistic, di samping membuka isolasi beberapa wilayah. Gambaran singkat tentang hasil pembangunan jalan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejumlah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang telah terkoneksi Jalan Nasional dan Jalan Bebas Hambatan
2. Sejumlah Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi, seperti Kawasan Ekonomi Khusus, telah memiliki akses langsung dan/atau lebih cepat ke jalan nasional.
3. Hasil pembangunan jalan meningkatkan kontribusi terhadap daya saing global. Laporan yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF) tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat ke 50 dari 141 negara dalam indeks daya saing global. Pencapaian di dukung oleh salah satu pilar Infrastruktur yaitu *Quality of Roads* pada peringkat 60, meningkat dari tahun 2014 yang berada pada peringkat 72.

Hasil pembangunan jalan meningkatkan kontribusi terhadap *Logistic Performance Indeks* (LPI). Laporan yang dirilis oleh World Bank tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 46 dari 161 negara dengan peringkat infrastruktur pada peringkat ke 54, meningkat dari tahun 2014 yang berada pada peringkat ke 53 dengan infrastruktur pada posisi ke 56.

1.1.3 Pembangunan Permukiman

Selama periode 2015 – 2019, pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman ditujukan untuk pemenuhan layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan infrastruktur permukiman difokuskan pada pemenuhan akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat, pengembangan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat melalui penataan permukiman kumuh, dan pemenuhan akses layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Usaha pencapaian tujuan melalui fokus pembangunan tersebut dilakukan oleh kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Pencapaian pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman hingga akhir tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan pelayanan air minum nasional meningkat sebesar 5,21% yaitu dari 84,06% pada akhir tahun 2014 menjadi 89,27% (BPS, 2019 diolah Bappenas) di akhir tahun 2019. Dari angka tersebut, akses air minum layak pada jaringan perpipaan (JP) sebesar 20,18% secara nasional di akhir tahun 2019. Selain melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemenuhan akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat juga didukung dari peningkatan jumlah PDAM yang sehat. Sampai akhir tahun 2019, jumlah PDAM sehat meningkat dari 196 (53,3%) PDAM sehat di tahun 2015 menjadi 224 (58,9%) PDAM sehat pada tahun 2019.
2. Sampai akhir tahun 2019 kegiatan pengembangan kawasan permukiman telah mampu menurunkan luas kawasan permukiman kumuh perkotaan sebesar 32.222 hektar (83,84%) dari 38.431 hektar permukiman kumuh pada tahun 2014. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman juga dilaksanakan di kawasan Perdesaan Prioritas Nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pada kawasan permukiman perdesaan. Selain itu telah dilaksanakan pula dukungan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman di perbatasan negara, kawasan strategis pariwisata nasional, pulau-pulau kecil terluar, dan kawasan rawan bencana. Pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan juga dilakukan melalui pendampingan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
3. Pemenuhan akses layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat dilakukan melalui pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang berupa pengelolaan air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan. Pembangunan infrastruktur air limbah melalui kolaborasi multistakeholder telah berkontribusi bagi peningkatan cakupan pelayanan air limbah secara nasional sebesar 11,21% dari baseline 66,23% (BPS, 2014 diolah Bappenas) menjadi 77,44% (BPS, 2019 diolah Bappenas) di akhir tahun 2019. Selaras dengan pembangunan infrastruktur air limbah, akses persampahan perkotaan juga mengalami peningkatan dari baseline 46,40% (BPS, 2013 diolah Bappenas) menjadi

60,63% (BPS, 2016 diolah Bappenas). Selain itu, capaian penanganan drainase lingkungan juga telah mencapai 100% dari target luas genangan yang tertangani sebesar 4.655 hektar.

4. Kegiatan pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan bertujuan untuk mencapai terwujudnya bangunan gedung yang tertib dan andal meliputi pembinaan dan pengawasan penataan bangunan pada 507 Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri dari Bangunan Gedung Hijau, Bangunan Mitigasi Bencana serta Bangunan Pusaka, Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Fasilitasi Ruang Terbuka Publik, serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan dalam rangka dukungan pengembangan infrastruktur strategis antara lain Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Pendukung Asian Games 2018, dan penugasan strategis lainnya.
5. Dalam pencapaian tujuan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, pada tahun 2019 terdapat amanat pengembangan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan pasar untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia selaras dengan tujuan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman. Dukungan tersebut terdiri atas jumlah atas sarana prasarana sekolah sebanyak 1.467 sekolah, sarana prasarana madrasah sebanyak 143 sekolah, 14 lembaga PTN, 1 lembaga PTKIN, 4 venue olahraga PON Papua, 8 gedung pasar, dan 7.175 m² penanganan pasca bencana di Papua dan Maluku.

1.1.4 Pembangunan Perumahan

Selama periode 2015 – 2019, pembangunan perumahan ditujukan untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang. Pencapaian pembangunan perumahan hingga akhir tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyediaan rumah baru sejumlah 107.967 unit melalui kegiatan pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, dan bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya;
2. Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejumlah 700.641 unit;
3. Bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang melayani 119.612 unit rumah MBR; serta
4. Penurunan *backlog* rumah MBR dilakukan melalui fasilitasi pembiayaan hunian layak, melalui pemberian subsidi dan bantuan pembiayaan perumahan yang meliputi FLPP, SSB, BP2BT, dan SBUM. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Hunian Layak mencapai 1.014.825 unit (FLPP, SSB dan BP2BT) dan SBUM sejumlah 707,212 unit.

Kegiatan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR merupakan bagian dari capaian Program Sejuta Rumah yang di *launching* oleh Presiden pada tahun 2015. Secara kumulatif, dengan peran serta seluruh stakeholder, melalui pelaksanaan Program tersebut tercatat telah dilakukan penyediaan 4.800.170 unit rumah layak huni di Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019, 71,56% (3.434.804 unit) diantaranya merupakan rumah yang diperuntukkan bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Di samping melaksanakan pembangunan fisik, Kementerian PUPR juga melakukan upaya pengoptimalan peran *stakeholder* non-Pemerintah dan Pemda dalam melaksanakan penyediaan perumahan di Indonesia. Diantara upaya tersebut adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh pemda, pendampingan penerapan kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan, pembinaan kepada pemda yang melaksanakan pembangunan perumahan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), serta mendorong implementasi kebijakan hunian berimbang.

Pada periode tahun 2015-2019, antara lain terdapat 34 pemerintah provinsi dan 322 pemerintah kabupaten/kota yang telah membentuk/menerbitkan SK Pokja PKP, 19 pemerintah provinsi dan 136 pemerintah kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen RP3KP yang merupakan acuan Daerah dalam melaksanakan pembangunan PKP, serta telah dilaksanakan pembangunan 229.156 unit oleh pemerintah daerah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri atas pembangunan 654 unit Rumah Khusus dan dukungan penanganan 228.502 unit Rumah Swadaya.

1.1.5 Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Selama Periode 2015 – 2019 program pengembangan infrastruktur wilayah secara umum telah menjabarkan sasaran-sasaran kegiatan dalam mendukung pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu melalui pendekatan perencanaan Wilayah Pengembangan Strategis yang telah menghasilkan berbagai masterplan/development plan sebagai acuan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk kemudian dibahas secara detail melalui agenda Pra Konsultasi Regional. Adapun pencapaian Program Pengembangan Infastruktur Wilayah hingga akhir tahun 2019 meliputi:

1. BPIW sebagaimana tercantum dalam Revisi Renstra Kementerian PUPR 2015 -2019 memiliki kontribusi terhadap pencapaian Sasaran Program untuk tahun 2019 Meningkatnya keterpaduan perencanaan,

pemrograman, dan penganggaran dengan indikator tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR dengan capaian kinerja Sasaran Program tahun 2019 sebesar 96,77% dari target 100%.

2. Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 yang merupakan acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR pada tahun 2015 hingga 2019 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2015 – 2019;
3. Rancangan Teknokratis Renstra PUPR Tahun 2020-2024 sebagai acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR pada tahun 2020 hingga 2024 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2020 – 2024;
4. Rencana induk pengembangan infrastruktur PUPR sebagai arahan dan acuan dalam keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR di Pulau Kepulauan dalam rangka mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional untuk jangka menengah dan panjang dengan memperhatikan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kepulauan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Adapun Rencana induk pengembangan infrastruktur PUPR yang telah disusun yaitu: (a). Pulau Sumatera; (b). Pulau Jawa-Bali (c). Pulau Kalimantan; (d). Pulau Sulawesi; (e). Pulau Nusa Tenggara; (f). Pulau Maluku; (g). Pulau Papua.
5. 35 MP dan DP Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang digunakan sebagai *tools* dalam mengarahkan pengembangan infrastruktur wilayah, dimana pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan *market driven* yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memfokuskan pengembangan infrastruktur pada suatu wilayah strategis dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan kawasan strategis dan mengurangi disparitas antar kawasan;
6. 22 MP dan DP Kawasan Strategis sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur PUPR secara efektif dalam rangka mendukung Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan lain-lain dengan menterpadukan pengembangan konektivitas, sumber daya air, keciptakaryaan, dan perumahan, berdasarkan pengembangan wilayah;
7. 69 MP dan DP Kawasan Perkotaan yang merupakan kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur PUPR dalam rangka menciptakan keseimbangan kota dan meningkatkan kualitas hidup di perkotaan pada Kota Besar, Kota Sedang, Kota Baru, Kota Metropolitan, dan Kawasan Perkotaan sesuai potensi dan karakteristik kawasan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

8. 20 MP dan DP Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) merupakan kebijakan dan strategi perwujudan KPPN berbasis pengembangan wilayah yang berkelanjutan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan pengembangan kawasan sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru yang terintegrasi dengan kota-kota *outlet* sekitarnya dan *hinterland*-nya dengan dukungan infrastruktur PUPR dan Non-PUPR;
9. 2 Anjungan Cerdas (Gilimanuk-Denpasar-Padang Bai (Bali) dan Jogja-Prigi-Blitar-Malang) sebagai inkubasi kawasan dimana selain sebagai tempat beristirahat bagi pengguna jalan nasional juga diperuntukkan untuk memacu percepatan pengembangan wilayah melalui pengembangan pariwisata, pertanian, perikanan tangkap, agroindustri berbasis pemberdayaan masyarakat, dan industri sedang-kecil.
10. *Integrated Tourism Master Plan* (Danau Toba, Lombok dan Borobudur) sebagai kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan kualitas dan akses dari infrastruktur dasar dan layanan pariwisata, dalam rangka memperkuat ekonomi lokal yang terkait dengan pariwisata, dan menarik investasi swasta di destinasi wisata pada kawasan Danau Toba, Lombok, dan Borobudur.
11. Beberapa Sistem Informasi antara lain Sibas RIPI (Sistem Informasi Database *Online* Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR), SIPRO (Sistem Informasi Pemrograman), Simonah (Sistem Monitoring Pengadaan Tanah) serta Bank data BPIW yang dibangun untuk mengintegrasikan pemrograman yang tajam dan efektif.

Beberapa dokumen perencanaan BPIW tersebut di atas merupakan rumusan Kebijakan Teknis yang digunakan sebagai arahan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah yang setiap tahunnya dilakukan melalui agenda Pra Konreg yang telah diinisiasi BPIW sejak tahun 2016 hingga 2019 dengan turut melibatkan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Penyediaan Perumahan serta perwakilan Pemerintah Daerah dari Bappeda dan Dinas PUPR untuk menghasilkan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program yang sinergis antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan.

1.1.6 Pembinaan Jasa Konstruksi

Selama periode 2015–2019, pembinaan konstruksi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi (*man*), pendayagunaan *supply and demand material*, dan peralatan konstruksi (*machine and material*), tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (*methodology*), serta peningkatan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi melalui rasio kapitalisasi konstruksi (*money*).

Pada tahun 2019, terdapat perubahan struktur organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berdampak pada

penyesuaian atau perubahan sasaran kegiatan program pembinaan konstruksi, yaitu berpindahnya sasaran kegiatan peningkatan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta munculnya sasaran kegiatan baru yaitu peningkatan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi (metodologi) pada program pembinaan konstruksi.

Pencapaian pembinaan konstruksi hingga akhir tahun 2019 meliputi:

1. Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi yang diukur dari tingkat rasio kapitalisasi konstruksi selama kurun waktu 2015 –2018 telah mencapai 2.953 triliun (tercapai 88,2% dari target 88%).
2. Kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi PUPR di tahun 2019 mencapai 97,23% dari target 70%.
3. Peningkatan penerapan manajemen mutu, Keselamatan Ddan Kesehatan Kerja (K3), dan administrasi kontrak yang diukur melalui kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi pada 339 satker (tercapai 43,57% dari target 40%).
4. Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik sebanyak 1.749 BUJK (tercapai 256,83% dari target 184%).
5. Utilitas produk unggulan berupa produk industri beton pracetak yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur telah mencapai 41,28 juta m³ (baru tercapai 12,62% dari target 15%).
6. Kerjasama dan pemberdayaan dalam pelatihan tenaga kerja konstruksi terlaksana sebanyak 23.346 angkatan (tercapai 304,79% dari target 159%).
7. SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten mencapai 1.158.818 orang (tercapai 42,08% dari target 27%).

1.1.7 Pengawasan dan Akuntabilitas

Selama periode 2015 – 2019, pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah dilaksanakan secara maksimal untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan efek berganda (multiplier effects) untuk produktivitas sektor ekonomi dan kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu tercapainya tujuan tersebut melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pencapaian peningkatan pengawasan dan akuntabilitas hingga akhir tahun 2019, antara lain:

1. Level *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) telah mencapai Level 3 dengan catatan berdasarkan Quality Assurance oleh BPKP.
2. Kualitas pengawasan kinerja dan keuangan di Kementerian PUPR telah mencapai 88,43%.

Pencapaian tersebut diukur dari rata-rata hasil Skor Hasil Peer Review Internal proses AREPP terhadap Inspektorat, Skor Hasil Evaluasi PKPT, LHA (Audit Kinerja) yang ditindaklanjuti tepat waktu, LHA (Audit Kinerja) yang ditindaklanjuti tuntas, Persentase jumlah satker di wilayah Inspektorat dengan Nilai Temuan Kerugian Negara < 1% Nilai DIPA pada LHA (Audit Kinerja/Audit Ketaatan), Persentase jumlah satker dengan hasil Evaluasi Pelaksanaan SPIP "memadai" berdasarkan Form 10, KMA Audit Kinerja, Rata-Rata Skor Hasil Evaluasi SAKIP terhadap Unit Eselon I.

1.1.8 Penelitian dan Pengembangan

Selama periode 2015 – 2019, penelitian dan pengembangan difokuskan pada upaya untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR dalam menciptakan dan mengembangkan teknologi dan rekomendasi kebijakan untuk digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur PUPR seiring dengan tuntutan pembangunan infrastruktur PUPR yang semakin meningkat. Kondisi capaian penelitian dan pengembangan hingga akhir tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan rekomendasi kebijakan mencapai 75%
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi terapan sebanyak 147 unit
3. Peningkatan pemanfaatan rekomendasi kebijakan sebanyak 53 naskah
4. Peningkatan kualitas layanan teknis kepada stakeholders mencapai 80%.

1.1.9 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selama periode 2015 – 2019, pengembangan sumber daya manusia ditujukan bagi terwujudnya ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten, profesional, qualified, dan berintegritas melalui pengembangan karir dan kompetensi. Pengembangan difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Persyaratan Jabatan. Pencapaian pengembangan sumber daya manusia hingga akhir tahun 2019 meliputi:

1. Peningkatan ASN yang Terdidik telah mencapai 894 orang;
2. Peningkatan ASN yang Terlatih telah mencapai 29.619 orang;
3. Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja telah mencapai 15.874 orang.

1.1.10 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Selama periode 2015 – 2019, peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya difokuskan peningkatan kualitas administrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien untuk mendukung kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pencapaian peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya hingga akhir tahun 2019 meliputi:

1. Nilai Laporan Kinerja Pemerintah sebesar 72,90 yang merupakan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB tahun 2019.
2. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian mendapatkan Opini WDP pada tahun 2015 dan 2018, serta Opini WTP pada tahun 2016, 2017, dan 2019.
3. Transparansi Pelaksanaan Program mencapai 100% dengan outcome yang diukur dari publikasi profil informasi anggaran Kementerian PUPR di website www.pu.go.id berupa *Midterm Review Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019*, *Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019*, *Rencana Kerja*, *DIPA*, *Perjanjian Kinerja*, *RKA-KL* dan *Laporan Kinerja Kementerian PUPR* yang dapat diakses oleh semua pihak.
4. Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai mencapai 96,54% dengan *outcome* yang diukur dari adanya sistem informasi pegawai yang bisa diakses oleh semua pegawai, keterbukaan dalam seleksi jabatan, tingkat ketepatan layanan mutasi pegawai, dan sistem rekrutmen pegawai secara terbuka.
5. Fasilitasi Produk Hukum dan Bantuan Hukum mencapai 95,47% dengan *outcome* yang diukur dari persentase peraturan yang berhasil diproses melalui mekanisme yang telah diatur dan persentase perkara yang menang di pengadilan
6. Tingkat layanan informasi publik mencapai 143,79% dengan *outcome* yang diukur dari Penilaian Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat, Survey persepsi publik, Survey Kepuasan Pengguna Layanan Informasi Publik Kementerian PUPR, Survey persepsi publik terhadap kinerja Kementerian PUPR, dan Media Monitoring".

1.1.11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada akhir tahun 2019, pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR meliputi:

1. Tingkat kenyamanan bekerja mencapai 92,80% dengan *outcome* yang diukur dari survei yang telah dilakukan kepada para pegawai sebagai pengguna sarana dan prasarana mengenai 4 (empat) kriteria yaitu kepuasan kebersihan, kepuasan keamanan, ketertiban parkir, serta

penggunaan energi dan air. Untuk tahun 2020 -2024, ditambahkan 1 (satu) kriteria yaitu Pemanfaatan Ruang Kerja Kantor untuk mengukur IKP/IKU (Outcome) Tingkat Kenyamanan Bekerja"

2. Tingkat Layanan Data dan Teknologi Informasi mencapai 131.84% yang diukur dari tingkat pemanfaatan data (spasial, statistik dan audio visual) dan tingkat layanan teknologi informasi (*Virtual Private Server*, email PU-Net, PU-Net Hotspot, pengunjung domain pu.go.id, aplikasi yang dilakukan asesmen). Pencapaian tersebut melebihi dari target 100% disebabkan adanya himbuan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi kepada setiap Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di seluruh provinsi agar seluruh pelaku pengadaan wajib menggunakan email resmi @pu.go.id dan semakin banyak Unit Organisasi yang menggunakan PU-Net *Hotspot* sebagai media aplikasi yang dikembangkan.

1.2

POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1

Lingkungan Strategis dan Amanat Pembangunan

1. Pertambahan Jumlah Penduduk dan Urbanisasi

Berdasarkan proyeksi BPS, penduduk Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 284,829,000 jiwa dengan populasi terbanyak masih tetap berada di Pulau Jawa yang diperkirakan akan mencapai 158,738,000 jiwa, disusul oleh Pulau Sumatera (62,898,600 jiwa), Pulau Sulawesi (21,019,800 jiwa), Pulau Kalimantan (18,082,600 jiwa), Pulau Bali dan Nusa Tenggara (15,932,400 jiwa), Pulau Papua (4,793,900 jiwa), dan Kepulauan Maluku (3,363,700 jiwa).

Penduduk Indonesia diprediksi akan berkembang di wilayah perkotaan, artinya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan akan tumbuh lebih banyak dibanding penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan. Penduduk perkotaan pada tahun 2025 akan mencapai 60% dari seluruh populasi. Hal ini juga sebagai dampak adanya pertumbuhan urbanisasi di Indonesia yang saat ini mencapai 4,1%.

Urbanisasi diklaim dapat mendorong konsumsi rumah tangga, investasi, hingga pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi. Namun demikian urbanisasi harus dikelola dengan baik, pertumbuhan urbanisasi yang relatif tinggi harus diiringi dengan kemampuan tata kelola dan infrastruktur yang memadai.

2. Indeks Daya Saing yang Masih Rendah

Indeks Daya Saing Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian indeks daya saing infrastruktur mengalami sedikit penurunan yaitu pada peringkat 50 di tahun 2019 bila dibandingkan pada tahun 2014 -2015 yang berada pada peringkat 34. Di Kawasan ASEAN saja, indeks daya saing infrastruktur masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Perkembangan Peringkat *Ease of Doing Business* Indonesia terus meningkat sejak tahun 2015 yang berada pada peringkat 114 menjadi peringkat 72 pada tahun 2018 dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 pada peringkat 73.

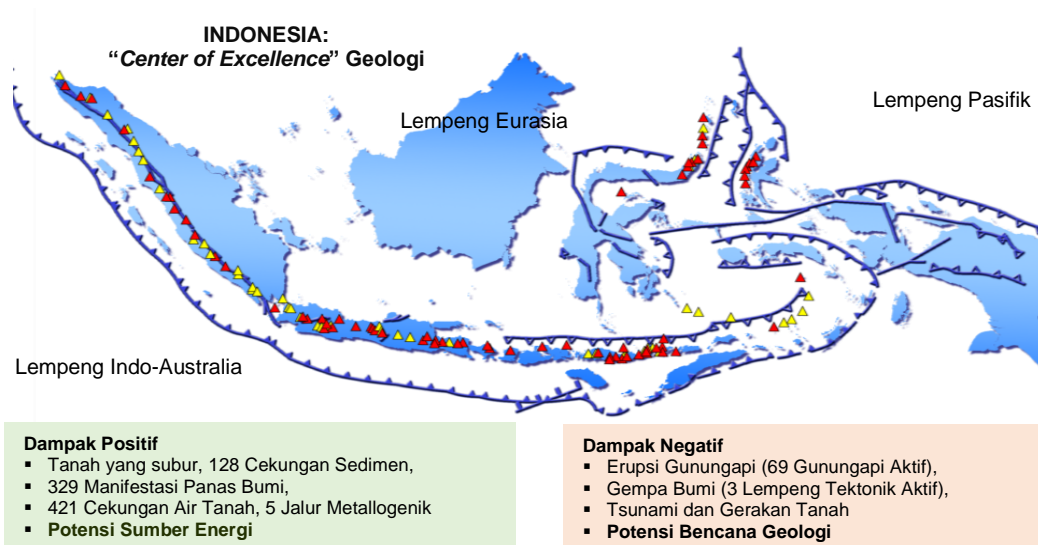
Berdasarkan *World Happiness Report* yang diterbitkan oleh UN SDSN (*United Nation Sustainable Development Solutions Network*) pada tahun 2015, Indeks Kebahagiaan Masyarakat Indonesia masuk dalam peringkat 74. Namun pada tahun 2016 peringkat Indonesia menurun menjadi peringkat 79. Hingga pada tahun 2018, peringkat Indonesia semakin menurun pada peringkat 96 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu peringkat 92.

3. Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana

Perubahan iklim yang terus terjadi telah menimbulkan berbagai bencana yang berdampak lebih luas dan trennya terus mengalami peningkatan, seperti banjir, longsor, kekeringan, badai dan kebakaran lahan. Sebagai contoh, banjir di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan tahun 2019 dipicu oleh cuaca ekstrem, yaitu curah hujan yang sangat tinggi (di atas 300 milimeter per hari). Dampak perubahan iklim terhadap kejadian bencana juga ditambah dengan perubahan tutupan lahan di daerah hulu yang mengakibatkan banjir bandang dan perubahan pola debit aliran sungai.

Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada pada *Ring of Fire* (Cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik) yang merupakan area tumbuhnya 75% seluruh gunung api di dunia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat rentan terhadap bencana dari aktivitas geologi yaitu gempa bumi, tsunami dan gunung meletus.

Gambar 1.1 Indonesia 'Center of Excellence' Geologi



Sumber: Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi, 2018

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 jumlah kejadian bencana sebanyak 7.996 kejadian. yaitu tahun 2015 (1.694 kejadian), 2016 (2.306 kejadian), 2017 (2.862 kejadian), 2018 (1.134 kejadian), terdiri dari bencana Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang/Abrasi, Puting Beliung, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gempa Bumi, Tsunami, dan Letusan Gunung Api.

Laporan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR) berdasarkan data dari *Center for Research on The Epidemiology of Disasters* (CRED), *International Disaster Database* (EM-DAT) menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah korban jiwa akibat bencana alam tertinggi sepanjang tahun 2018. Dari total 10.373 korban jiwa di seluruh dunia, 4.535 orang diantaranya dari Indonesia. Data

ini menunjukkan tingginya kerentanan bencana di Indonesia sekaligus masih lemahnya upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Kejadian bencana alam tidak hanya merenggut korban jiwa namun juga menimbulkan kerusakan infrastruktur yang telah terbangun yang berdampak pada terganggunya kehidupan masyarakat baik secara sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Terlebih, bencana yang terjadi di Indonesia tidak hanya bencana alam, namun juga bencana non alam seperti wabah penyakit, kegagalan teknologi serta bencana sosial seperti kerusuhan, dan lainnya.

4. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (termasuk orang lanjut usia, pemuda, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya), yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

Tujuan umum dari pelaksanaan PUG-PUPR adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan Perumahan Rakyat telah responsif gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur PU dan Perumahan Rakyat serta dalam meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PU dan Perumahan Rakyat.

Kementerian PUPR telah melaksanakan pemenuhan 7 prasyarat pelaksanaan PUG, yang terdiri dari: (1) Komitmen; (2) Penyusunan Kebijakan; (3) Penyusunan Kelembagaan; (4) Peningkatan Sumber Daya (SDM dan PPRG); (5) Analisis Gender; (6) Data Terpilah; (7) Peran Masyarakat. Selain itu juga telah melaksanakan inovasi pelaksanaan PUG.

Permasalahan keadilan dan kesetaraan gender dapat diidentifikasi dari isu kesenjangan gender. Isu kesenjangan gender dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR dapat kita lihat di masing-masing unit organisasi dari aspek “Turbinbanglakwas” yaitu pada aspek pengaturan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria), aspek pembinaan/pemberdayaan (a.l. pelatihan, sosialisasi), pembangunan/pelaksanaan (a.l. perencanaan Teknik, rehabilitasi, peningkatan pembangunan), aspek pengawasan (a.l. monitoring-evaluasi, manajemen pengendalian).

5. Pembangunan Kewilayahan

Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan: (a) tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indoneisa (KTI) sebesar 18,0 persen, hampir dua kali lipat dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang sebesar 10,3 persen; (b) adanya ketipangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392; (c) terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa; (d) terbatasnya sarana dan Prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa, dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; dan (e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa, dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

Tabel 1.1 Capaian Beberapa Indikator Makro Pembangunan

No	Wilayah Pembangunan	Kemiskinan*		Tingkat Pengangguran** (%)	Kesenjangan antarprovinsi Dalam Wilayah (Indeks Wiliamson)***
		Jumlah (ribu jiwa)	%		
1	Papua	1,137.3	26.34	4.2	0.15
2	Maluku	402.2	13.21	7.6	0.08
3	Nusa Tenggara	1,882.3	17.94	3	0.19
4	Sulawesi	2,009.9	10.23	4.9	0.17
5	Kalimantan	974.2	5.93	5	0.69
6	Sumatera	5,851.1	10.03	5.2	0.48
7	Jawa Bali	12,886.9	8.31	5.8	0.73

Sumber: RPJMN 2020-2024

Lebih lanjut, faktor penyebab ketimpangan antarwilayah antara lain belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang ditandai dengan (1) rendahnya kemajuan operasional Pusat Pertumbuhan Wilayah (KEK, KI, Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas, dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas); (2) lemahnya konektivitas dari dan menuju Pusat Pertumbuhan; dan (3) belum berkembangnya kawasan strategis kabupaten.

Selain itu kesenjangan antarwilayah di daerah perkotaan disebabkan oleh pengelolaan urbanisasi yang belum optimal, ditandai dengan 1 persen pertambahan jumlah populasi penduduk perkotaan hanya dapat meningkatkan 1,4 persen PDB. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini memberikan tekanan pada kawasan perkotaan, menurunkan kesejahteraan, dan menyebabkan sebagian wilayah perkotaan tidak layak huni.

Penurunan kesenjangan antarwilayah dan kondisi perkotaan dapat diatasi melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, kondisi saat ini belum tercapai, karena: (1) baru sekitar 3 persen dari target 1.838 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang; (2) belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR; (3) belum

berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; dan (4) masih adanya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.

6. Visi Indonesia 2045

Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari: (i) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (iii) Pemerataan pembangunan; serta (iv) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pilar ketiga “Pemerataan Pembangunan” tersebut diimplementasikan salah satunya melalui “Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi”, di mana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah secara fisik dan virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi ditandai dengan kondisi sebagai berikut:

1. Konektivitas darat diwujudkan dengan penyelesaian ruas utama jalan di seluruh pulau, jalan tol Jawa dan Sumatera, jalan perbatasan, kereta api di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, serta transportasi perkotaan berbasis rel dan kereta cepat untukantisipasi mega urban dan urbanisasi di Jawa
2. Biaya logistik tahun 2045 turun menjadi 8% PDB
3. Stok Infrastruktur meningkat menjadi 70% PDB pada tahun 2045
4. Akses masyarakat terhadap prasarana dasar dipenuhi untuk kebutuhan perumahan, air minum, sanitasi, irigasi, dan perlindungan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim

7. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's)

Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang selanjutnya dituangkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Terdapat 17 Tujuan Global dan Sasaran Global serta Sasaran Nasional yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan yang terdiri dari:

- Tujuan 1 - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
- Tujuan 2 - Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
- Tujuan 3 - Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
- Tujuan 4 - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- Tujuan 5 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
- Tujuan 6 - Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- Tujuan 7 - Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- Tujuan 8 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- Tujuan 9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
- Tujuan 10 - Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
- Tujuan 11 - Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
- Tujuan 12 - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- Tujuan 13 - Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- Tujuan 14 - Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
- Tujuan 15 - Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati.
- Tujuan 16 - Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- Tujuan 17 - Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

8. UN Habitat III

Agenda Baru Perkotaan diadopsi pada saat Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat III) di Quito, Ekuador pada tanggal 20 Oktober 2016. Agenda ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada saat rapat pleno yang ke-68 dari 71 sesi pada tanggal 23 Desember 2016.

Implementasi Agenda Baru Perkotaan mendukung pelaksanaan dan penerapan *The 2030 Agenda for Sustainable Development* di daerah secara terpadu, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk Tujuan 11 menciptakan perkotaan dan permukiman inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

Komitmen-komitmen Transformatif untuk Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan meliputi:

- (1) Pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk inklusi sosial dan mengakhiri kemiskinan.
- (2) Kemakmuran dan peluang perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif untuk semua.
- (3) Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan kota yang berketahanan.

9. Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030:

- a. Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m³/kapita/tahun;
- b. Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi *recycle*;
- c. 100% *Smart living* (Hunian Cerdas).

Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 tersebut, dicapai melalui tahapan:

Tahun 2017 – 2019

1. Bendungan multi fungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 57,75 m³/kapita/tahun. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 306 Triliun.
2. Kondisi Jaringan jalan: Kondisi Jalan Mantap 94%; Pembangunan Jalan Tol 824 Km; Pembangunan Jalan Baru 1.320 Km; Pembangunan Jembatan Baru/*Fly Over* 39.000 m. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 183 Triliun (ditambah Rp 202 Triliun dari investasi swasta).

3. 78% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 1,5% (menjadi 27.000 ha), dan 75% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 45 Triliun.
4. *Backlog* rumah bagi MBR sebesar 6,46 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 814 ribu unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 165 Triliun melalui 17% APBN/APBD dan 83% swasta/masyarakat.

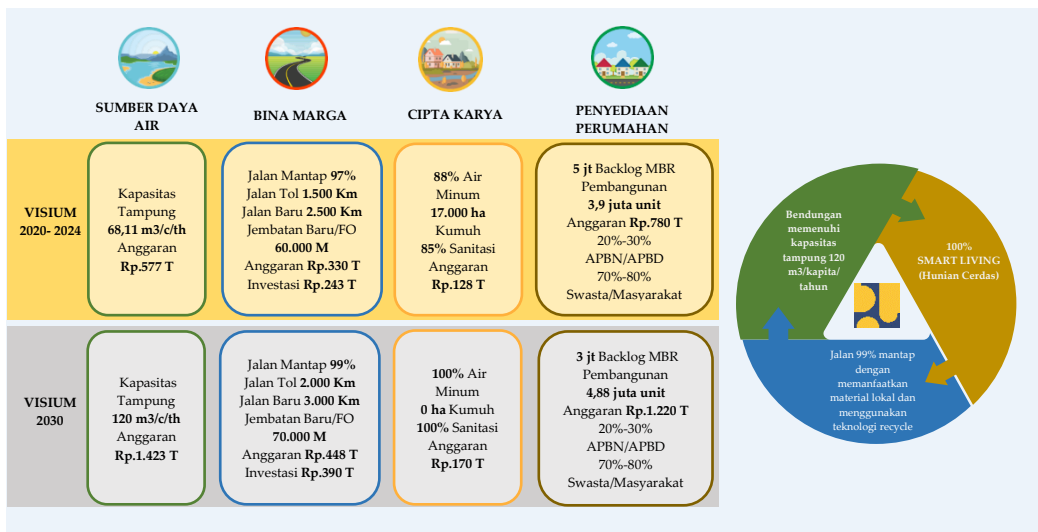
Tahun 2020 – 2024

- 1) Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 68,11 m³/kapita/tahun. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 577 Triliun.
- 2) Kondisi Jaringan jalan: Kondisi Jalan Mantap 97%; Pembangunan Jalan Tol 1.500 Km; Pembangunan Jalan Baru 2.500 Km; Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 60.000m. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 330 Triliun (ditambah Rp 243 Triliun dari investasi swasta).
- 3) 88% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha), dan 85% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 128 Triliun
- 4) *Backlog* rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

Tahun 2025 – 2030

- 1) Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m³/kapita/tahun. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1.423 Triliun.
- 2) Kondisi Jaringan Jalan: Kondisi Jalan Mantap 99%; Pembangunan Jalan Tol 2.000 Km; Pembangunan Jalan Baru 3.000 Km; Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 70.000 m. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 448 Triliun (ditambah Rp 390 Triliun dari investasi swasta).
- 3) 100% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4% (menjadi 0 ha), dan 100% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 170 Triliun.
- 4) Zero *Backlog* rumah bagi MBR 3 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 4,88 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1.220 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

Gambar 1.2 Target Visium Tahun 2020 – 2024 dan 2030



1.2.2 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan

1. Pengelolaan Sumber Daya Air

Tiga kegiatan Pengelolaan SDA sesuai Undang-Undang no 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yaitu Konservasi, Pendayagunaan dan Pengendalian Daya Rusak dengan didukung oleh Sistem Informasi SDA serta Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dituangkan dalam tiga Kegiatan Prioritas yaitu Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan, Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur serta Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi. Ketiga Program prioritas tersebut mempunyai isu strategis dan tantangan berbeda yang memerlukan pendekatan khusus.

Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan

Pengelolaan air tanah dan air baku di Indonesia masih diliputi beberapa tantangan mendasar: tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: *Too much, Too little, Too dirty*), dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan.

Kapasitas layanan infrastruktur penyedia air baku yang aman dan layak di Indonesia hingga tahun 2019 hanya mencakup 30% dari total kebutuhan air baku nasional. Kondisi ini mendorong maraknya pemanfaatan sumber air baku lain yang belum tentu aman dan layak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Permasalahan timbul ketika sering dijumpai kualitas air tanah maupun air sungai yang digunakan masyarakat kurang memenuhi syarat sebagai air bersih, bahkan di beberapa tempat tidak layak untuk diminum karena terkontaminasi oleh bakteri dan zat kimia tertentu. Sebagai contoh, 45% air tanah di Jakarta tercemar oleh bakteri *E.coli*. Selain itu, layanan infrastruktur air baku pada daerah 3T, pulau-pulau kecil terluar (PPKT), dan

daerah-daerah rawan air juga masih memerlukan pengembangan yang lebih intensif.

Peningkatan tekanan populasi dan aktivitas ekonomi di daerah-daerah aglomerasi dan kutub pertumbuhan seperti perkotaan dan kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) juga perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan air bakunya melalui infrastruktur penyedia air baku. Jika ketersediaan air baku pada kawasan-kawasan tersebut tidak mencukupi kebutuhan yang ada, akan terdapat potensi ekstraksi air tanah dalam skala besar. Hal ini juga menjadi perhatian besar karena selain terdapat potensi permasalahan kualitas air tanah, permasalahan lain akibat ekstraksi air tanah dalam skala besar adalah penurunan muka tanah yang cukup signifikan di beberapa wilayah, seperti di pesisir utara Jawa.

Pemanfaatan teknologi cerdas juga dinilai masih minim untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. Perlu adanya pengembangan teknologi cerdas yang tepat guna seperti pengembangan SIH3 (sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi), sistem informasi sumber daya air, dan teknologi integrasi pemanfaatan aneka sumber air. Penguatan kelembagaan dan regulasi pengelolaan sumber daya air secara terpadu antara lain dengan pengembangan *Decision Support System and Forecasting* juga masih harus dikembangkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan penyediaan air baku yang terus berkembang, termasuk pengembangan skema kerjasama pembiayaan pemerintah dan swasta.

Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

Kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya. Kapasitas tampungan air baru mencapai 13,8 miliar m³ dari target 14,7 miliar m³ pada tahun 2019. Optimalisasi bendungan menghadapi tantangan tata kelola akibat ancaman sedimentasi dan penurunan tingkat keamanan. Hal ini terkait dengan usia bendungan yang semakin tua, operasi dan pemeliharaan yang belum memadai, serta instrumen keamanan bendungan yang masih belum lengkap dan sesuai dengan standar keamanan. Rata-rata penurunan volume tampungan waduk akibat sedimentasi hingga tahun 2019 mencapai 19%, bahkan di pulau Jawa mencapai 31%.

Dari sisi pemanfaatan, fungsi multiguna bendungan belum optimal. Sebagai contoh, pemanfaatan potensi energi listrik baru mencapai 28% dari total potensi yang dapat dihasilkan. Selain itu, pasokan air irigasi dari bendungan hingga tahun 2019 baru mencapai 12,3% dari keseluruhan luas daerah irigasi.

Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Hal ini disebabkan, antara lain belum optimalnya sistem pemantauan dan pencatatan kerusakan infrastruktur dan pemanfaatan air secara *online* dan *real time*. Kinerja sistem irigasi juga masih rendah, terutama pada daerah irigasi yang merupakan kewenangan daerah. Rendahnya kinerja tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi air irigasi. Upaya penyediaan

infrastruktur irigasi belum diselaraskan dengan lahan pertanian baru, yang difokuskan terutama pada lahan pertanian di luar Pulau Jawa. Hal ini mempertimbangkan tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lain dan terbatasnya lahan baru di Pulau Jawa. Walaupun di luar Pulau Jawa juga terjadi alih fungsi lahan dari pertanian padi menjadi perkebunan. Permasalahan kurangnya keahlian dan kemauan masyarakat untuk bertani juga merupakan permasalahan umum pada beberapa daerah di luar Pulau Jawa.

Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir; gempa bumi; tanah longsor; dan letusan gunung berapi, dibutuhkan infrastruktur ketahanan bencana yang memadai. Dengan dukungan sistem informasi yang handal, *decision support system, forecasting, early warning, mitigation dan risk management*. Kerugian finansial akibat bencana alam dalam kurun waktu 2002-2015 di Indonesia mencapai 1,26 miliar USD per tahun (*International Disaster Database, 2018*). Risiko bencana juga semakin meningkat seiring tren urbanisasi serta perubahan iklim. Kawasan perkotaan seperti Jakarta, kota-kota pesisir utara Jawa, serta beberapa wilayah sungai prioritas menghadapi kerawanan bencana yang semakin tinggi akibat perkembangan kota dan posisinya yang berada pada zona rawan bencana. Perkembangan kota memberikan dampak ekonomi yang positif secara nasional. Namun di sisi lain, hal ini menyebabkan tingkat keterpaparan masyarakat dan aset ekonomi terhadap bencana semakin tinggi. Fenomena ini belum didukung oleh upaya penataan ruang yang memperhatikan risiko bencana. Selain itu, tingkat keamanan infrastruktur vital perkotaan seperti transportasi, energi, dan sumber daya air masih belum memadai dalam menghadapi risiko bencana, sehingga perlu untuk disusun peta risiko bencana yang terbaru.

Secara khusus, pengembangan kawasan pesisir utara (Pantura) Pulau Jawa sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh sumbangan lebih dari 20% GDP Indonesia di 3 kawasan aglomerasi perkotaan, masih menghadapi beberapa tantangan. Pengembangan kawasan ini menghadapi potensi kenaikan muka air laut, banjir rob dan penurunan tanah terutama di DKI Jakarta, Pekalongan, Semarang, dan kota-kota lain khususnya di Pantai Utara Jawa. Selain itu, kawasan Pantura Jawa juga mengalami abrasi yang mengakibatkan kehilangan lahan dan degradasi ekosistem.

Selain kerentanan terhadap bencana alam, Indonesia juga dihadapkan pada meningkatnya risiko bencana lingkungan. Proses pemulihan kondisi lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat bergantung pada pemulihan kondisi daerah tangkapan air (*catchment area*). Upaya rehabilitasi hutan dan lahan belum mampu mengatasi laju kerusakan lahan. Di samping itu, kinerja pemulihan 15 DAS kritis dan 15 danau prioritas, serta pengelolaan kawasan rawa dan gambut masih rendah.

Mitigasi risiko bencana melalui pengembangan industri konstruksi menghadapi kendala akibat keterbatasan SDM dan belum berkembangnya ekosistem industri konstruksi. Pada sisi SDM, kemampuan mengadopsi teknologi infrastruktur tahan bencana masih terbatas. Sedangkan untuk ekosistem industri konstruksi, infrastruktur terbangun belum memenuhi standar infrastruktur yang tahan bencana.

2. Penyelenggaraan Jalan

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Total Panjang jaringan jalan mencapai 582.546 km, yang terdiri dari yang berstatus jalan nasional sepanjang 47.017 km, dan yang berstatus jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sepanjang 481.529 km. Dari aspek kualitas, terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional yang memiliki proporsi 8% dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 92,81%, sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92% dari seluruh jaringan jalan, baru mencapai kondisi mantap sebesar 68,49% untuk provinsi, dan 58,8% untuk kabupaten/kota. Kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air.

Pada sisi lain, ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistik terlihat dari kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau yang baru mencapai 2,3 jam per 100 km. Ketersediaan jalan tol pada jalur utama logistik masih terbatas di sepanjang jalur Pantura Jawa. Ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan industri maupun pariwisata juga masih terbatas. Masih terdapat sejumlah simpul transportasi (bandara, pelabuhan, dan terminal) yang belum memiliki akses jalan yang memadai. Ketersediaan jaringan jalan pada daerah 3T termasuk pada pulau tertinggal, terluar, dan terdepan, juga masih belum memadai untuk mendukung aksesibilitas masyarakat.

3. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Isu strategis utama yang akan dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman

- b. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan;
- c. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- d. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun;
- e. Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
- g. Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

4. Penyediaan Perumahan

Isu strategis penyediaan perumahan:

- a. Terdapat 43,49% rumah tangga di Indonesia pada tahun 2019 yang menempati rumah tidak layak huni;
- b. Semakin meningkatnya jumlah kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan sebagai implikasi dari semakin dominannya jumlah penduduk perkotaan/urbanisasi;
- c. Kebutuhan penyediaan perumahan untuk mendukung pengembangan ibu kota negara (IKN), pusat pengembangan ekonomi baru (Kawasan Industri/KI, Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN, dan lain-lain), serta pemerataan pembangunan;
- d. Kebutuhan pengembangan penyediaan dan pengelolaan *public housing* yang merupakan salah satu *Major Project* dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang difokuskan di 6 (enam) kawasan metropolitan untuk memudahkan akses penduduk perkotaan (terutama kelompok MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau, termasuk penyediaan badan pengelola dan ekosistem pendukung lainnya;
- e. Belum tersedianya sistem *rental housing* yang terintegrasi dan mendukung pengembangan sistem *public housing*;
- f. Regulasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan cenderung sentralistik;
- g. Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh para *stakeholder*;

- h. Belum terdapat data sebaran dan potensi pasar perumahan MBR;
- i. Pemda belum secara konsisten menerapkan kebijakan kemudahan penerbitan izin pembangunan perumahan untuk kelompok MBR;
- j. Keterbatasan lahan yang terjangkau dan berada di sekitar pusat aktivitas/hub transportasi masal, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan milik pemerintah/pemda/BUMN/BUMD untuk pembangunan perumahan bagi MBR;
- k. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang terintegrasi dengan sistem infrastruktur perkotaan/wilayah;
- l. Masih kurang terintegrasinya upaya penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan;
- m. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi konstruksi, material lokal, dan terbatasnya kemitraan antara lembaga penelitian teknologi perumahan dengan pengembang perumahan;
- n. Keterbatasan kapasitas pembiayaan/pendanaan pemerintah dan belum optimalnya pemanfaatan *creative financing* (KPBU, SBSN/Sukuk) untuk mengurangi *financial gap* dalam penyediaan perumahan, terutama untuk kelompok MBR.
- o. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap desain dan kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko kegagalan konstruksi, antisipasi kerawanan bencana, serta internalisasi konsep pengarusutamaan gender dalam pembangunan perumahan.

5. Pembiayaan Infrastruktur

Isu strategis dan tantangan pembiayaan infrastruktur meliputi isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bidang pekerjaan umum dan perumahan, dan isu strategis yang terkait dengan bidang pembiayaan perumahan.

Isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan KPBU bidang pekerjaan umum dan perumahan meliputi:

- a. Perencanaan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan masih belum mengakomodasi pendanaan di luar skema Non APBN;
- b. Belum adanya kriteria proyek KPBU untuk semua sektor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- c. Belum efektifnya kelembagaan simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU;
- d. Keterbatasan dokumen KPBU yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas proyek KPBU;

- e. Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama;
- f. Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU;
- g. Proyek KPBU mayoritas diikuti dan dilaksanakan oleh BUMN;
- h. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPK;
- i. Ketersediaan lahan yang *clear* dan *clean* untuk proyek KPBU.

Isu strategis bidang pembiayaan perumahan meliputi:

- a. Akses MBR terutama sektor informal masih terbatas terhadap pembiayaan perumahan;
- b. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan belum terintegrasi;
- c. Skema bantuan dan/kemudahan perolehan rumah yang ada belum sesuai dengan profil dan karakteristik MBR;
- d. Kenaikan harga lahan dan rumah tidak sesuai dengan daya beli MBR;
- e. Kualitas bangunan rumah bersubsidi masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Masih besarnya gap pembiayaan antara kebutuhan pembiayaan dan ketersediaan dana jangka panjang;
- g. *Supply stock* rumah bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan rumah MBR;
- h. Tingginya laju urbanisasi tidak diikuti dengan penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni, sehingga menimbulkan permukiman kumuh.

6. Perencanaan Pembangunan Kewilayahan

Beberapa hal yang menjadi catatan berdasarkan pengalaman periode lalu dalam hal efektivitas tugas dan fungsi BPIW, antara lain terdapat *overlapping* pekerjaan antar pusat-pusat yang ada di BPIW (Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan), dimana instrumen perencanaan terlalu banyak (nasional, pulau, WPS, kawasan strategis, metropolitan, perkotaan, perdesa

an) Implikasinya antara lain:

- Keterkaitan perencanaan makro-meso-mikro seringkali tidak kuat karena dijalankan secara paralel dan oleh unit kerja yang berbeda.
- Keterkaitan program dan justifikasi pemrograman belum kuat dan sering terjadi duplikasi program.
- Penguasaan materi wilayah dalam konreg masih terbatas.

Penyelesaian isu klasik pembangunan di Indonesia yaitu dengan menyeimbangkan pembangunan di seluruh wilayah untuk meminimalisir terjadinya ketimpangan antar wilayah, baik antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan (mengembangkan *urban-rural linkage*) maupun fokus pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa, dll. Untuk itu perlu untuk dilakukan penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah dan pengembangan kawasan strategis-tematik (kawasan pariwisata, perbatasan, industri, kawasan ekonomi khusus untuk percepatan pertumbuhan).

Penanganan kawasan perkotaan untuk menyelesaikan pertumbuhan ekonomi dan masalah lingkungan termasuk gagasan pemindahan ibukota menuju Pulau Kalimantan, merupakan langkah yang sangat strategis dalam mengembangkan pusat pertumbuhan baru di Indonesia.

7. Pembinaan Jasa Konstruksi

Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja Kontruksi (TKK)

Kondisi tenaga kerja konstruksi Indonesia saat ini masih didominasi oleh TKK berpendidikan SMA ke bawah yaitu sebanyak 70% berdasarkan data BPS dari tahun 2015-2019. Sedangkan bila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang bersertifikat masih jauh dari kebutuhan, terutama untuk proyek-proyek PUPR. Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat sebanyak 712.262 orang, dengan rincian tenaga terampil (TT) sebanyak 520.844 orang dan tenaga ahli/insinyur (TA) adalah 191.418 orang. Sedangkan kebutuhan TKK pada proyek PUPR adalah 994.000 orang TKK bersertifikat, sehingga masih terdapat gap kebutuhan sebanyak 281.738 orang. Jumlah tenaga ahli tersebut juga relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Selanjutnya dilihat dari persebarannya, tenaga kerja konstruksi, baik ahli maupun terampil, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan belum tersebar merata di seluruh Indonesia sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa.

Melihat kondisi tersebut maka tantangan terbesar pembinaan SDM adalah melatih tenaga tidak terampil yang merupakan porsi paling besar dari profil angkatan kerja di sektor konstruksi, di samping peningkatan kualitas materi dan penyelenggaraan pelatihan serta penyederhanaan dan kemudahan di dalam proses sertifikasi yang harus mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis. Di sisi lain masih banyak SDM konstruksi yang belum menyadari pentingnya *Continuing Professional Development* (CBD) atau pengembangan pengetahuan dan pengalaman selama masa bekerja dalam rangka meningkatkan keterampilan dan keahlian untuk efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilakukannya.

Kurangnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Kurangnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain: transparansi penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa belum maksimal, kurang maksimalnya pembinaan penerapan

standar kontrak kerja konstruksi, belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan penerapan SMM dan SMK3 dan peningkatan kasus kecelakaan kerja konstruksi. Berdasarkan hasil evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi (K2), kecelakaan tersebut disebabkan utamanya oleh 2 faktor yaitu permasalahan SDM dan permasalahan peralatan. Permasalahan SDM khususnya disebabkan karena kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi. Sedangkan permasalahan peralatan utamanya disebabkan karena masih rendahnya pelaksanaan *safety factor*.

Pada bidang pengadaan barang dan jasa, terdapat banyak perubahan pengaturan sebagaimana diamanatkan oleh Perpres Nomor 16 tahun 2018. DJBK sebagai induk pembinaan konstruksi di Indonesia juga didorong untuk melakukan perubahan pengaturan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Pengadaan yang semula dilaksanakan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang bersifat fungsional, berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang bersifat struktural dan DJBK juga telah membentuk Balai PBJ di setiap provinsi mulai tahun 2019 yang bertujuan agar pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian PUPR dapat berjalan dengan lebih transparan, bersaing, dan akuntabel. Tantangan lain terkait pengadaan barang/jasa adalah proses pengadaan dapat berlangsung dengan cepat, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Dalam hal pengadaan barang/jasa, terdapat beberapa permasalahan antara lain ditemukannya *fraud* dan penyimpangan pada pelaksanaan lelang atau seleksi paket sehingga kurang transparan dalam penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa.

Ketidakmapanan Kelembagaan Jasa Konstruksi

Ketidakmapanan kelembagaan jasa konstruksi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu masih lemahnya sumber daya manusia aparatur lembaga masyarakat konstruksi, rendahnya jumlah asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang tersertifikasi, serta pengembangan kerja sama antar lembaga yang belum optimal.

Kapasitas dan Kemampuan Badan Usaha Belum Optimal

Kapasitas dan kemampuan badan usaha yang masih belum optimal yang disebabkan antara lain oleh menurunnya jumlah BUJK konstruksi besar, belum terciptanya kondisi persaingan BUJK yang sehat, BUJK pelaksanaan proyek infrastruktur di luar negeri mengalami penurunan, serta rendahnya rasio BUJK spesialis terhadap BUJK umum. Persaingan antar BUJK masih kurang sehat, terutama antara BUJK berkualifikasi besar, menengah, dan kecil. Komposisi jumlah BUJK saat ini berbentuk piramida, dengan BUJK besar di bagian atas (BUJK kecil lebih banyak), meskipun pada periode tahun 2015-2018, jumlah BUJK berkualifikasi besar menurun 15%. Piramida tersebut mengindikasikan belum terwujudnya secara optimal kemitraan yang

sinergis antar kualifikasi BUJK. BUJK kecil cenderung memiliki daya saing yang rendah dan belum mandiri, sehingga mereka tidak memiliki daya tawar yang kuat.

Selanjutnya berdasarkan jenisnya, pada tahun 2019, jumlah BUJK generalis (129.113 BUJK) masih lebih banyak dibandingkan dengan BUJK spesialis (6.042 BUJK). Perbandingan BUJK generalis-spesialis yang masih timpang tersebut mengindikasikan masih perlunya didorongnya pembentukan BUJK spesialis yang dapat lebih fokus dan profesional dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi.

BUJK Nasional juga harus di dorong untuk meningkatkan daya saing agar mampu menguasai pangsa pasar konstruksi di dalam negeri, antara lain dengan melakukan pengembangan BUJK agar memiliki kualifikasi yang setara dalam persaingan pasar. Di sisi lain dengan semakin terbukanya peluang pasar di luar negeri, maka industri konstruksi dan BUJK Nasional juga diharapkan mampu bersaing untuk meningkatkan ekspor jasa konstruksi.

Kapasitas Rantai Pasok, Material Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang Belum Optimal

Terkait dengan kapasitas rantai pasok, material peralatan dan teknologi konstruksi yang belum optimal, masih memiliki kelemahan antara lain ketidakseimbangan antara *supply-demand* beberapa material seperti semen, baja, aspal, dan alat berat; persebaran material dan peralatan belum merata; kurang optimalnya pelaksanaan dan penerapan teknologi *green construction*; dan lemahnya penguasaan teknologi konstruksi.

Terkait *supply* dan *demand* material konstruksi, berdasarkan data, Ditjen Bina Konstruksi, jumlah MPK utama berupa aspal, baja, beton pracetak prategang, semen, dan alat berat cenderung mengalami penurunan sekitar 6% setiap tahunnya. Sebagai contoh, tingkat pemenuhan kebutuhan material semen pada tahun 2018 baru 68,13 juta ton dari kebutuhan 69,30 juta ton. Contoh lain adalah untuk material aspal tahun 2018 yang baru tersedia 344,15 ribu ton dari kebutuhan 1.872 ribu ton. Berbagai kebutuhan material tersebut akan semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Bila dilihat dari persebarannya, material dan peralatan konstruksi di Indonesia masih belum merata ke seluruh penjuru negeri. Produksi material dan peralatan terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera saja. Hal ini menyebabkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia memerlukan biaya yang lebih besar untuk distribusi material dan peralatan.

Isu lain terkait pemanfaatan Material Konstruksi adalah terkait dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri Pasal 61 ayat 2, terkait penggunaan Produk Dalam Negeri bahwa produk dalam negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%. Berdasarkan pada

PP tersebut, Kementerian PUPR akan mengeluarkan Permen yang mengatur TKDN tersebut dengan kemungkinan nilai TKDN minimal 80%. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri sehingga untuk ke depannya proyek-proyek di lingkungan Kementerian PUPR harus didorong untuk menggunakan produk dalam negeri.

Aspek lain yang harus diperhatikan terkait rantai pasok adalah pemetaannya. Pemetaan rantai pasok sektor konstruksi di setiap provinsi di Indonesia menjadi hal yang krusial karena sistem tersebut dapat memetakan hubungan antara pemasok bahan baku, proses produksi, transportasi, sistem distribusi, termasuk di dalamnya masalah keuangan dan arus informasi dari produk. Urgensi pemetaan rantai pasok industri konstruksi dalam rangka efisiensi *supply-demand* dan distribusi material serta peralatan konstruksi. Dalam hal ini hubungan antara produsen dan pemasok menjadi *highlight* dari proses ini.

Berbagai permasalahan manajemen rantai pasok tersebut setidaknya dapat ditangani oleh beberapa pendekatan seperti penyederhanaan alur rantai pasok material dan peralatan, mengurangi variabilitas yang terdapat pada sistem rantai pasok, perbaikan data dan informasi dalam sistem rantai pasok, dan pemanfaatan material dan peralatan produksi dalam negeri. Beberapa pendekatan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam manajemen rantai pasok.

Dari segi peralatan konstruksi, permasalahan yang ditemukan adalah masih rendahnya kesadaran untuk melakukan registrasi alat berat. Berdasarkan data, dari 70.000 unit alat berat utama yang beredar, baru 28.000 unit yang teregistrasi di Kementerian PUPR atau baru 40%. Rendahnya registrasi tersebut disebabkan karena proses tersebut dirasa belum memiliki dampak yang berarti bagi pemilik alat berat sehingga pemilik enggan untuk melakukan registrasi. Untuk ke depannya, diharapkan bisa disusun kebijakan yang mendorong pemilik untuk melakukan registrasi alat berat.

Sedangkan dari segi teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan salah satu sumber daya utama dalam industri dan bisnis konstruksi sehingga perlu adanya pengembangan pemanfaatan teknologi konstruksi seperti *green construction*. Pengembangan dan inovasi teknologi baik material, peralatan maupun perangkat lunak lainnya selama ini telah dilakukan dan ke depan perlu terus ditingkatkan dan juga harus dibarengi dengan upaya peningkatan dalam pemanfaatannya.

Berbagai permasalahan terkait rantai pasok material dan peralatan konstruksi tersebut akan berdampak pada memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia dan menyebabkan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran dari material dan peralatan konstruksi.

Ketimpangan PDRB Sektor Jasa Konstruksi Antar Daerah

Secara nasional, PDB Sektor Konstruksi pada tahun 2018-2019 mengalami pertumbuhan dengan laju 5,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun bila dirinci ke dalam PDRB antar provinsi, masih terlihat adanya kesenjangan yang cukup tinggi antar provinsi. Ketimpangan PDRB sektor jasa konstruksi antar provinsi dapat mengindikasikan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sebagai contoh pada tahun 2018, PDRB sektor konstruksi tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 314 Triliun, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Maluku Utara yang hanya sebesar Rp 2,4 Triliun.

Ketimpangan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dan perbedaan kondisi masing-masing daerah. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dipengaruhi oleh persebaran tenaga kerja, material, peralatan konstruksi yang tidak merata serta aksesibilitas yang sulit menuju daerah tertentu. Untuk perbedaan kondisi masing-masing daerah dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya alam di beberapa daerah sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah tersebut, terbatasnya kondisi demografis yang terkait dengan produktifitas kerja masyarakat, tidak lancarnya mobilitas barang dan jasa, serta terbatasnya alokasi dana pembangunan di daerah.

Stok Konstruksi yang Cenderung Stagnan

Stok infrastruktur adalah angka yang menunjukkan nilai total investasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak swasta dalam membangun infrastruktur, dikurangi depresiasi. Pada periode tahun 2010-2014 nilai pembiayaan infrastruktur pemerintah adalah 679 Triliun dan meningkat 3 kali lipat pada periode tahun 2015-2019 menjadi 1.820 Triliun sedangkan stok infrastruktur Indonesia kurun 2015-2017 menunjukkan gambaran yang cenderung stagnan. Jika dibandingkan dengan nilai PDB senilai 43 %. Menurut *World Bank* (1994) peningkatan stok infrastruktur secara rata-rata sebesar 1% akan berdampak pada peningkatan PDB sebesar 1%. Hal ini berarti semakin besar pembangunan infrastruktur maka semakin besar pula potensi peningkatan PDB.

Stok infrastruktur Indonesia dengan nilai sebesar 43 % dari PDB ini masih di bawah rata-rata negara maju yaitu 70%. Sejumlah negara maju yang dimaksud seperti Amerika Serikat 64%, sedangkan Cina 76 % dan Jerman 71%. Untuk itu, peningkatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan dalam jangka menengah dan panjang agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju pada tahun 2045.

8. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghadapi sejumlah isu strategis

dan tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal yang antara lain meliputi:

a. Tantangan SDM Global:

- 1) *Competitive global (comfort zone menjadi competitive zone)*;
- 2) Era Revolusi Industri 4.0 (digitalisasi, kebutuhan *big data*, *internet of things*);
- 3) Kebutuhan SDM terampil (*skilfull*).

b. Perwujudan *World Class Government* diperlukan *SMART ASN* yang berwawasan global, menguasai IT/digital dan berbahasa asing, serta daya *networking* tinggi.

c. Pemenuhan Visi Indonesia 2020-2024, meliputi:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta (Sistem Merit);
- 2) Percepatan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur melalui interkoneksi infrastruktur dengan kawasan/sebaran pembangunan infrastruktur membutuhkan lebih banyak SDM Aparatur terampil dan berkeahlian.

d. *Mismatch* kompetensi lulusan program pendidikan magister dengan kebutuhan Kementerian PUPR (program studi pendidikan magister tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi masih didominasi dengan program studi non teknik).

e. Transformasi Pendidikan dan Pelatihan ke Pengembangan Kompetensi.

9. Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan

Isu strategis dan tantangan dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan terdiri dua faktor utama yaitu internal dari pihak penyelenggaran pengawasan dan faktor eksternal.

a. Isu Strategis Internal:

- (1) Masih banyaknya temuan hasil audit terlihat dari menurunnya opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR;
- (2) Pengawasan Internal PUPR belum optimal memberikan nilai tambah bagi organisasi;
- (3) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- (4) Keterbatasan jumlah SDM;
- (5) Pengembangan teknologi informasi *CACM* untuk mendukung pengawasan.

b. Isu Strategis Eksternal:

- (1) Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di tingkat Unor di Kementerian PUPR untuk mencapai *Road Map* RB Tahun 2020-2024;

- (2) Banyaknya pengaduan proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur bidang PUPR mengindikasikan masih rendahnya persepsi masyarakat atas kepatuhan terhadap peraturan PBJ di Lingkungan Kementerian PUPR;
- (3) Kegiatan pengawasan belum memanfaatkan Teknologi Informasi sesuai revolusi industri jilid 4.0 (*Making Indonesia 4.0*);
- (4) Adanya penugasan baru, penugasan tambahan dan direktif Presiden;
- (5) Belum adanya dukungan dan sinergi yang optimal dengan APH sebagai upaya pengawasan dan investigasi.

10. Tata Kelola Penyelenggaraan Pembangunan

Isu strategis dan tantangan dalam tata kelola penyelenggaraan pembangunan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat utamanya terkait dengan pemenuhan nilai-nilai dalam penyelenggaraan pembangunan yang harus dipenuhi sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi yang antara lain meliputi:

- a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 masih BB (72,90). Pada periode 2015 – 2019, nilai SAKIP terus meningkat tiap tahun, namun belum bisa mencapai target Renstra 2019 dengan nilai 78. Perlu upaya konkret untuk meningkatkan nilai SAKIP terutama penerapan SAKIP sampai entitas Unit Kerja, Balai, Satker sampai dengan individu pegawai.
- b. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2019 sebesar 74,06 (BB), mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 73,42, namun masih jauh dari target nilai A (>80). Perlu upaya peningkatan penerapan Reformasi Birokrasi (RB) pada 8 area perubahan birokrasi.
- c. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian menjadi dasar pemberian Opini Laporan Keuangan. Bila merujuk pada tren hasil penilaian, sejak tahun 2012 Kementerian PUPR telah memperoleh predikat Opini WTP. Namun tren ini mengalami perubahan, turun menjadi WDP di tahun 2015 dan tahun 2018, meskipun Opini WTP berhasil diraih kembali pada tahun 2019. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta peningkatan kualitas penatausahaan asset, agar terwujud Laporan Keuangan yang andal, berkualitas, dan akuntabel, sehingga Opini WTP dapat tetap dipertahankan.
- d. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) rata-rata Kementerian Tahun 2018 baru mencapai 3,05 atau pada level “Terdefinisi”. Nilai SPIP merupakan tingkat kematangan (maturitas) implementasi SPIP pada skala 1 – 5 berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Level “terdefinisi” yaitu telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Diperlukan upaya-upaya agar

level SPIP pada tingkat 5 atau “Optimum” yaitu telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. *Self assessment* atas pengendalian intern dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2.2 MISI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.3 TUJUAN

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

2.4

SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR.

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

- a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) *Global Competitiveness Index* dan Pilar Infrastruktur; (3) *Logistic Performance Index*.
- b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat *Ease of Doing Bussiness*.
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 - (3) Kapasitas tampung per kapita;
 - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.

2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).

3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
 - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;

4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 - (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 - (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.

5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
 - (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
 - (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
 - (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
 - (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
 - (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

2.5

Target Utama Kementerian PUPR 2020-2024 (Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan)

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, berikut merupakan target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR di bidang sumber daya air, konektivitas, keciptakaryaan, dan perumahan.

Tabel 2.1 Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan

SUMBER DAYA AIR	KONEKTIVITAS	PERMUKIMAN	PERUMAHAN
<p>58,5 m³/kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung</p> <p>64 Unit Bendungan</p> <p>500 Unit Pembangunan Embung</p> <p>500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi</p> <p>2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi</p> <p>50 m³/detik Ketersediaan Air Baku</p> <p>2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai</p> 	<p>2.500 Km Pembangunan Jalan Tol</p> <p>3.000 Km Pembangunan Jalan Baru</p> 	<p>100% Akses Air Minum Layak <i>30% Jaringan Perpipaan</i></p> <p>90% Akses Sanitasi Layak <i>15% Termasuk Aman</i></p> <p>10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh</p> <p>100% Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan</p> <p>5.555 Unit Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar</p> 	<p>51.340 Unit Rumah Susun</p> <p>10.000 Unit Rumah Khusus</p> <p>813.660 Unit Rumah Swadaya</p> <p>262.345 Unit PSU Perumahan</p> 

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Visi Dan Misi Presiden 2020 - 2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Agenda Pembangunan

Di dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang merupakan Prioritas Pembangunan (PN) yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan:

PN_1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

PN_2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

PN_3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

PN_4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

PN_5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

PN_6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan mitigasi perubahan iklim.

PN_7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakan kedaulatan negara.

Sasaran Makro Pembangunan 2020 – 2024

RPJMN ke IV tahun 2020 – 2024 diformulasikan dengan menjadikan faktor kesejahteraan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan lima tahun kedepan. Komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan dasar yang merata kepada seluruh masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan yang tercermin dari peningkatan dan perbaikan beragam indikator sosial dan budaya masyarakat.

1. Tingkat Inflasi 2,7%;
2. Pertumbuhan Investasi 6,6 – 7,0%;
3. Pertumbuhan Ekspor Non Migas 7,4%;
4. *Share* Industri Pengolahan 21,0%;
5. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas 6,6 – 7,0%;
6. Defisit Transaksi Berjalan (persen PDB) 1,7%;
7. Rasio Pajak (persen PDB) 10,7 – 12,3%;
8. Tingkat Kemiskinan 6,0 - 7,0%;
9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,6 – 4,3%;
10. Rasio Gini 0,360-0,374;
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54;.
12. Penurunan Emisi GRK 27,3%.

Prinsip Dasar Pembangunan Nasional

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2020-2024 terdapat beberapa prinsip dasar yaitu:

1. Membangun Kemandirian, yaitu dengan melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.
2. Menjamin Keadilan, dimana pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
3. Menjaga Keberlanjutan, yaitu dengan memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti.

Pengarusutamaan Dalam RPJMN 2020 – 2024

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).
2. Pengarusutamaan gender (PUG) yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.
3. Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.
4. Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Proyek Prioritas Strategis (Major Project)

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Berikut daftar *Major Project* yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya, melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 3.1 Kontribusi Kementerian PUPR dalam Major Project RPJMN 2020-2024

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
MENDORONG PERTUMBUHAN				
1	10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado- Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kedatangan (2024) 	161 (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)	a.1 Kemenparekraf, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
2	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun 	25 • APBN: 3,3 • Swasta: 21,7	a.1 KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
3	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,2 miliar pada tahun 2024 	30 • APBN: 7,2 • KPBU dan Swasta: 22,8	a.1 Kemen KP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	Pembangunan Wilayah Batam- Bintan	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pertumbuhan industri dan pariwisata Batam- Bintan 	69,9 ▪ APBN: 6,4 ▪ KPBU: 9,5 ▪ Badan Usaha 54,0	a.1 BP Batam, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
5	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya share PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota didalam wilayah metropolitan 	229,9 (APBN, KPBU & Swasta)	a.i KemenPUPR, Kemenhub, Kominfo, Kemen ESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
6	Ibu Kota Negara (IKN)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah 	466,04 ▪ APBN: 90,35 ▪ KPBU: 252,46 ▪ Badan Usaha: 123,33	a.1 KemenPPN/ Bappenas, KemenATR/BPN, KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
7	Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk Kab. Lebak (Maja), Kab. Bulungan (Tanjung Selor), Kota Tidore Kepulauan (Sofifi), Kota Sorong (Sorong) 	134,6 (APBN, Badan Usaha & Swasta)	a.1 KemenPUPR, Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
8	Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di Wilayah 	27,5 (APBN)	a.1 KemenPUPR, Kemen ESDM, Kemendes, Kementan, Kementerian

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
		Adat Laa Pago dan 11 Kabupaten di Wilayah Adat Domberay		PDTT, Kemenhub, Pemda
9	Pemulihan Pascabencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas unggulan Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Percepatan pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana 	15,2 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 14,8 APBD: 0,4 	a.1 BNPB, Kemensos, KemenPUPR, Masyarakat, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
10	Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga Sebagai Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya 	3,4 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 3,0 KPBU: 0,4 	a.1 KemenPUPR, Kemenhub, Kemen KP
11	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> Menurunkan angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup Menurunnya prevalensi <i>stunting</i> hingga 14% 	87,1 (APBN)	a.1 Kemenkes, BKKBN, KemenPUPR, Kemendagri, Kemendikbud, Pemda
12	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam 	308,5 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 105,5 KPBU: 203,0 	a.1 KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
13	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta –Bandung)	Berkurangnya waktu tempuh: <ul style="list-style-type: none"> Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam. Jakarta-Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit 	63,6 <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 58 Badan Usaha: Rp42 	a.1 Kemenhub, KemenPUPR, BPPT, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
14	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan 	118,8 (APBN, APBD, Badan Usaha).	a.1 Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
15	Pembangkit Listrik 27.000 MW dan Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	<ul style="list-style-type: none"> Berlanjutnya penyelesaian target program 35.000 MW Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5% Tersedianya pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024 Penurunan Emisi CO2 Pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO2 pada 2024 Menurunnya tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024 Terpenuhinya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional 	1.121,0 <ul style="list-style-type: none"> (Badan Usaha) 	a.1 KemenPUPR, Kementan, Kemen ESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
16	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	<ul style="list-style-type: none"> Mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon Menurunkan waktu tempuh Semarang –Demak (1 jam menjadi 25 menit) 	54,9 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 31,4 KPBU: 18,7 APBD: 4,8 	a.1 KemenPUPR, KemenESDM, KemenLHK, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
17	18 Waduk Multiguna	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,5 m3/detik dan pasokan listrik 2.438 MW Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan Meningkatnya efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI 	92,9 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 12,9 KPBU: 24,0 Swasta: 60,0 	a.l KemenPUPR, Swasta
18	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas 	12,4 (APBN)	a.l KemenPUPR, Pemda
19	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah perdalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua Berkurangnya biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%. 	15,4 (APBN)	a.l KemenPUPR,
20	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% 	140 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 73,5 APBD: 1,7 Masyarakat:/Swasta 65,7 	a.l KemenPUPR, Kemkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta), dan Masyarakat
21	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100% 	123,5 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 77,9 APBD: 15,6 KPBU: 29,9 	a.l KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha
22	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, aman dan terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan mencegah terbentuknya permukiman kumuh 	397,9 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 18,0 APBD: 109,2 BUMN: 28,0 Swasta: 237,5 Masyarakat: 5,0 	a.l Kemen PUPR, Pemda, BUMN, Swasta dan Masyarakat
23	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara 	30,9 (APBN)	a.l. KemenPUPR, Kemen LHK,

Sasaran Pembangunan Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar Pada Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang oleh Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian pembangunan infrastuktur nasional adalah:

Tabel 3.2 Sasaran Pembangunan PN 1 & PN 5 (Kementerian PUPR) dalam RPJMN 2020-2024

PN	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		
	1. Peningkatan Persentase Irigasi Premium (%)	12,3	16,4
	2. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru (Ha)	1.000.000	500.000

PN	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Target 2024
	3. Peningkatan Ketersediaan Air Baku Domestik dan Industri (m ³ /detik)	81,4	131,4
	4. Pembangunan Bendungan Multiguna (kumulatif) (unit)	46	64
5	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar		
	5. Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	54,1 (2018)	70
	6. Rasio KPR terhadap PDB (%)	2,9 (2017)	4%
	7. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)	87,8 layak dan 6,7 aman (2018)	100 layak dan 15 aman
	8. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20 (2018)	30
	9. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	74,6 layak, termasuk 7,42 aman (2018)	90 layak termasuk 15 aman
	10. Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional (Rumah Tangga)	1,3 juta (2015-2019)	3 juta
	11. Jumlah rumah tangga yang terlayani instalasi pengolahan lumpur tinja (Rumah Tangga)	N/A	6,5 juta
	12. Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	9,36 (2018)	0
	13. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%)	59,45 penanganan dan 1,19 pengurangan (2016)	80 penanganan dan 20 pengurangan
	14. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar metode lahan urug saniter (Rumah Tangga)	N/A	19 juta
	15. Pembangunan jaringan irigasi baru (kumulatif) (Ha)	1 juta	500 ribu
	16. Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	65
	17. Peningkatan ketersediaan air baku domestik dan industri (m ³ /detik)	81,36	131,36
	18. Pembangunan bendungan multiguna (unit)	45	63
	19. Peningkatan produktivitas pemakaian air untuk produksi padi (m ³ /kg)	N/A	3
	20. Penurunan resiko bencana dengan resiko bencana tinggi (provinsi)	N/A	20
5	Meningkatnya konektivitas wilayah		
	1. Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)	2,3	1,9
	2. Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi (Km)	1.461	2.500
	3. Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	3.387	3.000
	4. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota (%)	92/68/57	97/75/65

Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam lima tahun ke depan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam rangka pemerataan pertumbuhan wilayah, maka direncanakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan. Pembangunan Ibu kota Negara

di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan permintaan agregat, mendorong diversifikasi ekonomi Pulau Kalimantan, sumber pertumbuhan ekonomi baru jangka panjang terutama untuk Wilayah Pulau Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti jasa, pemerintahan, transportasi, perdagangan, pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan. Selain itu juga diharapkan terjadi peningkatan perdagangan antarwilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional.

Pembangunan ibu kota baru akan menempati lahan seluas 5.600 Ha dan diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 466 Triliun yang bersumber dari APBN, KPBU & Swasta serta pengembangan PNB*P-earmark* untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan ibu kota negara baru.

Sejumlah regulasi juga perlu disiapkan dalam pemindahan Ibu Kota Negara, antara lain:

1. RUU tentang Ibu Kota Negara;
2. RPP tentang Insentif untuk Swasta dalam Pembangunan Ibu Kota Negara;
3. RPP tentang Skema Pembiayaan Ibu Kota Negara;
4. RPerpres tentang Badan Otorita Ibu Kota Negara;
5. RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara (RTR KSN IKN);
6. RPerpres tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pusat Pemerintahan IKN;
7. RPerpres tentang RDTR Pusat Ekonomi IKN.

3.2

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Kementerian 2020 – 2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor.

3.2.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Lintas Sektor

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antarwilayah dengan sasaran antara lain : (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (Kawasan Barat Indonesia (KBI), Kawasan Timur Indonesia (KTI), Jawa – Luar Jawa), (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, (iii) meningkatnya kualitas, dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah, (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Hal tersebut sejalan dengan Visi Misi Presiden 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dimana **wilayah menjadi basis pembangunan**.

Gambar 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Arah Presiden dan 7 Agenda Pembangunan



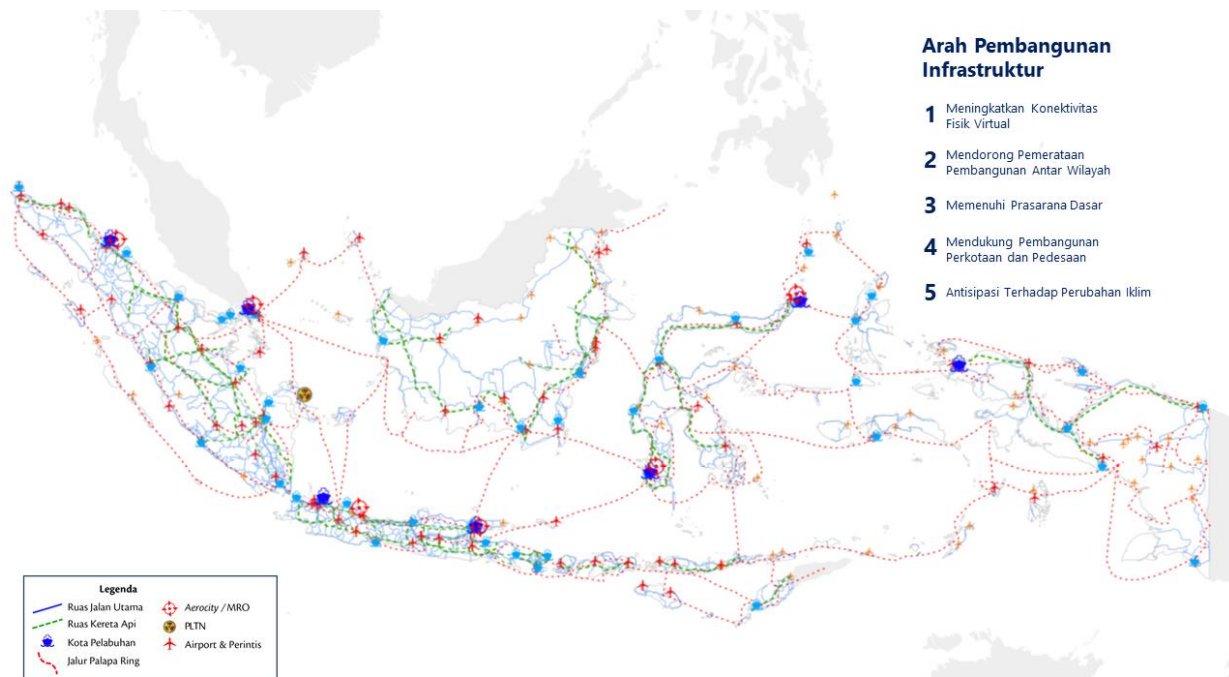
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Pembangunan berbasis wilayah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti SDM yang berkualitas dan berdaya saing, transformasi ekonomi, dengan memperhatikan/mempertimbangkan lingkungan hidup dan kerentanan bencana serta kondisi Polhukhankam yang kondusif. Peningkatan SDM yang

berkualitas dan berdaya saing dicapai melalui revolusi mental dan pembangunan kebudayaan serta pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai rata – rata pertumbuhan 5,7–6% per tahun dengan struktur yang lebih baik. Kondisi Polhukhankam yang kondusif dapat diwujudkan dengan penyederhanaan regulasi, birokrasi dan stabilitas politik dan pertahanan keamanan.

Pembangunan kewilayahan tahun 2020 – 2024 menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan pada data, informasi yang baik, akurat, dan lengkap, skenario pembangunan nasional, serta lokasi rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang juga mengutamakan pendekatan holistik dan tematik berdasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan. Pengembangan wilayah yang terintegrasi sebagai suatu skenario dalam pembangunan kewilayahan merupakan perpaduan dari konsep spasial yang mencakup kawasan strategis, infrastruktur wilayah, koridor pertumbuhan dan Koridor Pemerataan, kondisi Keterbatasan SDA dan Lingkungan (*Tutupan Lahan/ Development Constraint*).

Gambar 3.2 Arah Pembangunan Infrastruktur



Sumber: Visi Indonesia 2045

Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan

Sumatera”. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan dan strategis Pembangunan wilayah tahun 2020-2024 antara lain:

1. Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan;
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan (i) optimalisasi kawasan strategis prioritas seperti KEK, KI, DPP, dan kawasan lainnya; (ii) optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa; (iii) pembangunan kota baru dan pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah;
4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Pemanfaatan ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membutuhkan adanya kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dan juga antardaerah sehingga dalam melaksanakan pengelolaan ruang NKRI dapat terselenggara secara transparan, efektif dan terpadu. Dalam pengelolaan ruang tersebut dibentuk suatu wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya yang disebut sebagai kawasan, antara lain: 1) kawasan perdesaan; 2) kawasan agropolitan; 3) kawasan perkotaan; 4) kawasan metropolitan; 5) kawasan megapolitan; 6) kawasan strategis nasional; 7) kawasan strategis provinsi dan 8) kawasan strategis kabupaten/kota. Selanjutnya, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terkait dengan pembangunan infrastruktur, maka pembangunan infrastruktur dilanjutkan dengan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat yang dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau.

Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kota-desa serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

Kementerian PUPR turut mengambil peran penting dalam mendukung terlaksananya pengelolaan ruang wilayah NKRI dimana salah satu fungsinya adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pengembangan wilayah. Untuk melaksanakan

keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah, Kementerian PUPR menggunakan **pendekatan wilayah pengembangan strategis** yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan pengembangan wilayah yang dibagi menurut wilayah pulau/kepulauan yang dikelompokkan ke dalam beberapa tipe wilayah pengembangan dimana didalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan maritim berdasarkan pada tema atau potensi per pulau. Pendekatan pengembangan wilayah tersebut berazaskan pada efisiensi yang berbasis daya dukung, daya tampung dan fungsi lingkungan fisik terbangun, manfaat dalam skala ekonomi (*economic of scale*) serta sinergitas dalam menyediakan infrastruktur transportasi untuk konektivitas dalam lingkup nasional maupun internasional; mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi terbarukan untuk tenaga listrik; pemenuhan kebutuhan layanan dasar permukiman yang layak bagi masyarakat; dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; serta meningkatkan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang.

Gambar 3.3 Esensi Pembangunan Wilayah



Sumber: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2020.

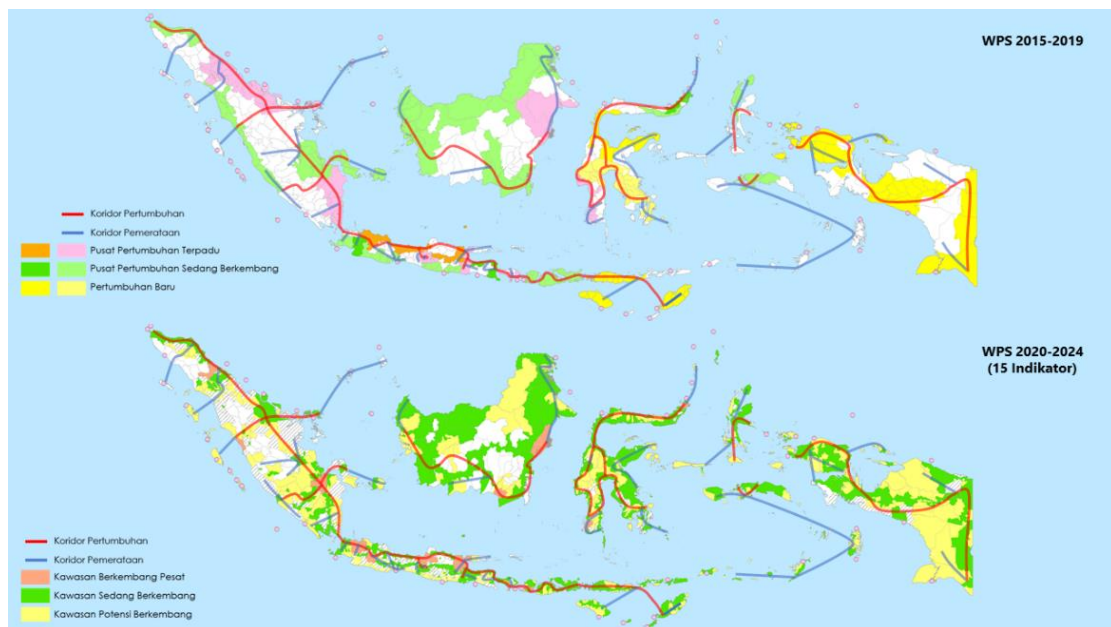
Konsepsi pengembangan wilayah diilustrasikan sebagai pembangunan infrastruktur wilayah PUPR yang terpadu dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai dengan klusternya, terutama pengembangan wilayah di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antar kawasan, maupun antar wilayah.

Manfaat yang diharapkan dari pendekatan pengembangan wilayah tersebut antara lain: (i) menghasilkan **Sinergitas** yang ditunjukkan dengan kolaborasi

pengembangan infrastruktur untuk mendukung wilayah-wilayah pertumbuhan dari beberapa sektor seperti sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat serta dari berbagai tingkatan seperti pusat dan daerah; (ii) adanya **Spesialisasi** yaitu wilayah pertumbuhan memiliki kekhususan potensi yang berbeda dari wilayah lainnya. Misalnya, spesialisasi industri, pariwisata dan lain-lain; (iii) adanya **Komplementaritas** yaitu suatu keadaan dimana wilayah-wilayah pertumbuhan dapat saling melengkapi yang ditunjukkan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memberikan *multiplier effect*; (iv) memunculkan **Aglomerasi** yaitu suatu pengembangan yang terfokus dan terpadu sehingga memungkinkan adanya perkembangan antara pusat kegiatan atau pusat kota dengan kawasan-kawasan *hinterland* di sekitarnya yang membentuk suatu kawasan metropolitan hingga megapolitan; (v) adanya peningkatan **Skala Ekonomi** karena perubahan fokus yang awalnya hanya satu wilayah pertumbuhan kemudian berkembang menjadi beberapa wilayah pertumbuhan lainnya dalam satu koridor wilayah pengembangan yang mengakibatkan produktivitas yang efektif dan efisien mendorong daya saing yang lebih kompetitif; dan (vi) merupakan alat **Pendukung** pengembangan **Kawasan Strategis**.

Pendekatan pengembangan wilayah menjadi media untuk mengintegrasikan *Major Project* RPJMN 2020-2024 dalam rangka mendukung pembangunan Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan menjadi lebih efektif dengan mengakselerasi pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan meliputi PKN, PKW, KEK, KI, KSPN, PKL serta Kota-Desa sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan membentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang dapat menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas pada kabupaten/kota.

Gambar 3.4 Pengembangan Wilayah yang Terintegrasi



Sumber: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2020.

Dalam mengakomodir dinamika ekonomi dan politik di Indonesia, pendekatan pengembangan wilayah kembali disempurnakan untuk periode

2020-2024 dengan mempertimbangkan beberapa isu-isu utama, yaitu: (a) *Major Project* RPJMN 2020-2024; (b) Renstra PUPR 2020-2024; (c) Tematik kawasan strategis; (d) Usulan Ibu Kota Negara; (e) Kawasan Metropolitan; (f) Koridor pengembangan jalan tol dan jalan utama nasional (Trans/lintas pulau, baik terbangun maupun belum); (g) Bendungan terbangun dan terencana; (h) Isu konektivitas multimoda; (i) Ibukota Provinsi; (j) Kawasan Perbatasan/PKSN Perbatasan; (k) Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT); (l) Daerah Tertinggal; (m) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN); (n) Lokasi Prioritas Perbatasan; (o) Kota Baru dan Kota Kecil.

Pendekatan pengembangan wilayah difungsikan sebagai alat acuan dalam menentukan arah pembangunan wilayah per pulau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan **yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor** dengan memperhatikan karakter geografis, potensi wilayah, karakteristik nilai-nilai sosial, budaya dan adat daerah, daya dukung lingkungan, serta resiko bencana di setiap wilayah.

A. Wilayah Pulau Papua.

Kebijakan dan prioritas pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya, dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, dan berbasis ekologis dan wilayah adat. Strategi pembangunan Wilayah Papua mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Lingkup kegiatan prioritas mendukung pembangunan tersebut antara lain:

1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:

- a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Papua yaitu sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, kopi, emas, tembaga, batubara, minyak, dan gas bumi, serta perikanan tangkap. Pengembangan sektor unggulan seperti perkebunan (sentra produksi jagung dan sagu), pertanian, pertambangan dan mineral, serta perikanan;
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
- c. Pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).

2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:

- a. Pengembangan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan Kawasan Industri (KI) Teluk Bintuni;
- b. Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Raja Ampat, dan DPP Biak – Teluk Cenderawasih;
- c. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan Jalan Baru di jalan Trans Papua, jalan

akses KEK Sorong, jalan akses DPP Raja Ampat, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Moor, Pelabuhan Merauke, Bandara Rendani Manokwari, Bandara Nabire Baru, Bandara Elelim, Bandara Sobaham, dan Bandara Oksibil.

- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Jayapura dan Kota Baru Sorong, serta Penguatan keterkaitan desa – kota dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis ekonomi digital.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: KPPN Jayapura, KPPN Manokwari, KPPN Raja Ampat, dan KPPN Merauke. Pengembangan ekonomi Kawasan perbatasan di PKS N Jayapura, PKS N Tanah Merah, dan PKS N Merauke.

B. Kepulauan Maluku.

Kebijakan pembangunan Wilayah Maluku dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah sebagai lumbung ikan nasional dan kawasan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Strategi pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan kesehatan dan pendidikan), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi, serta pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Maluku dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan :

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Maluku yaitu kelapa, lada, cengkeh, emas, batubara, minyak, dan gas bumi, nikel, dan perikanan tangkap dan budidaya yang berpotensi memiliki nilai tambah tinggi;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 - c. Pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di SKPT Morotai, SKPT Moa, dan SKPT Saumlaki.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
 - a. Pengembangan kawasan strategis dan pengeolahan sumber daya alam, berupa pertambangan yang difokuskan pada KI Teluk Weda;
 - b. Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP/KEK Morotai;
 - c. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan Konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan jalan lingkar/Trans Pulau Morotai, jalan lingkar/Trans Seram, jalan lingkar/Trans Pulau Kei Besar, jalan lingkar/Trans Pulau Buru, jalan

lingkar/Trans Moa, jalan lingkar/Trans Pulau Wetar, Pelabuhan Ambon, Bandara Taliabu, dan Bandara Weda.

- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Ambon, Kota Tual, Kota Ternate, dan pembangunan Kota Baru Sofifi serta Penguatan keterkaitan desa – kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKS N Saumlaki, dan PKS N Daruba, KPPN Maluku Tengah, dan KPPN Morotai.

C. Pulau Nusa Tenggara.

Kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020 – 2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE), industri kreatif berbasis budaya, percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung, serta pengembangan industri mangan dan tembaga.

Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi, serta pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan :

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN, kawasan transmigrasi, dan PKS N;
 - c. Pengolahan sumber daya alam dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis
 - a. Pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan yang difokuskan pada KI Sumbawa Besar;
 - b. Destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah sebagai salah satu motor

- penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP Lombok – Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo;
- c. Pengembangan kawasan Bandar Kayangan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
 - d. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan Konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain Jalan Akses Samota, Jalan Akses KEK Mandalika, Jalan Akses DPP Labuan Bajo, Jalan Paralel Perbatasan Sektor Timur Pos Perbatasan Motaain dan Motamasin, pembangunan Jalan Perbatasan Sektor Barat NTT, pengembangan Pelabuhan Gili Trawangan, Pelabuhan Labuan Bajo, dan Bandara Labuan Bajo.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Kota Mataram dan Kota Kupang, penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
 - 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Atambua dan Kefamenanu, Pengembangan KPPN di Manggarai Barat, Sumbar Timur, Sumbawa, Dompus, Lombok Timur, dan Lombok Tengah.

D. Pulau Sulawesi.

Kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi berbasis kakao, padi, jagung; pengembangan industri berbasis logistik; pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel dan bijih besi dan gas bumi; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan wisata bahari.

Strategi pembangunan Wilayah Sulawesi yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi, peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa.

Prioritas pembangunan Wilayah Sulawesi dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan :

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sulawesi antara lain kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan

- budidaya;
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN, kawasan transmigrasi, dan PKSN;
 - c. Pengolahan sumber daya alam dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT Talaud.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
- a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur yang difokuskan di KEK dan KI antara lain KEK/KI Palu, KEK Bitung, dan KI Takalar;
 - b. Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu DPP dan/atau KEK antara lain : DPP Manado – Likupang/KEK Likupang, DPP Baru Toraja – Makassar – Selayar, dan DPP Wakatobi;
 - c. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lintas Gorontalo, Jalan Trans Sulawesi, Tol Manado Bitung, Jalan Lintas Tengah dan Tenggara Sulawesi, Jalan Trans/Lingkar Pulau Buton, Jalan Trans/Lingkar Pulau Muna, Jalan Lingkar Pulau Wangi – Wangi (Wakatobi), Jalan Akses Wisata Likupang, Pengembangan Pelabuhan Bitung, Pengembangan Bandara Pohnpei, Bandara Bolaang Mongondow, Bandara Banggai Laut, Bandara Bumbu Kunik, dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Metropolitan Makassar.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar dan WM Manado sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi serta Kota Palu, Pare – Pare, Palopo, Kendari, Mamuju, dan Gorontalo.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane, Pengembangan KPPN Buol, Poso, Mamuju, Pinrang, Morowali, Mamuju Tengah, Konawe Selatan, Wakatobi, Muna, Barru, Luwu Timur, Bone, Minahasa Utara, Gorontalo, Boalemo, dan KPPN Gorontalo.

E. Pulau Kalimantan.

Kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dalam 5 (lima) tahun mendatang antara lain mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (*Heart of Borneo*) dengan menjaga Kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis; hilirisasi pertanian (sentra produksi padi), perkebunan (sentra produksi jagung), dan pertambangan untuk mempercepat transformasi ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekaligus meningkatkan daya ekonomi wilayah terhadap fluktuasi harga komoditas; penguatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi terhadap bencana kebakaran hutan dan banjir; pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan timur; percepatan pembangunan kawasan perbatasan. **Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)** dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan

peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti pemerintahan, transportasi, perdagangan, pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan.

Strategi pembangunan Wilayah Kalimantan yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Kalimantan dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan:

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Kalimantan antara lain kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap;
 - b. Pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN Kotawaringin Barat, Berau, Kutai Timur, Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, Barito Kuala, Banjar, Nunukan, dan KPPN Sambas;
 - c. Pengolahan sumber daya alam dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT Sebatik.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang serta pertambangan yang difokuskan pada KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Jorong, KI Batulicin, KI Tanah Kuning, dan KI Batanjung dan/atau KEK MBTK;
 - b. Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata alam, budaya, dan sejarah antara lain DPP Baru Sambas – Singkawang dan DPP Baru Derawan – Berau;
 - c. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Akses KIPI Tanah Kuning, Jalan Akses KI Ketapang, Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan (Kalbar, Kaltim, dan Kaltara), Jalan Akses Pelabuhan Pelaihari, Jalan Akses KI Batu Licin, Tol Balikpapan – Jembatan Penajam, Jalan Tol Samarinda – Bontang, Jalan Akses KEK Maloy, Pengembangan Pelabuhan Pelaihari, Pelabuhan Tanjung Selor, Bandara Baru Singkawang, Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, dan KA IKN.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, serta pengembangan Kota Pontianak, Singkawang, Palangka Raya, Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan **Pembangunan IKN di Kalimantan Timur**.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Long Nawang, Tou Lumbis, Paloh Aruk, Jagoi Babang, Nunukan, dan PKSN Long Midang.

F. Pulau Sumatera.

Kebijakan pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; dan menjadi lumbung energi nasional dan salah satu lumbung pangan nasional seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Thailand (*Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle*) dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global.

Strategi pembangunan Wilayah Sumatera yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan:

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera antara lain kakao, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN dan PKSNI;
 - c. Pengembangan sentra produksi perikanan SKPT Sabang, Natuna, dan SKPT Mentawai.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan di beberapa KEK seperti KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api – Api, rencana pengembangan KEK Pulau Baai, KEK/KI Sei Mangke, KEK/KI Galan Batang, KI Kuala Tanjung, KI Bintan *Aerospace*, KI Tanjung Enim, KI Kemingking, KI Sadai, KI Tenayan, KI Tanjung Buton, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, dan KI Ladong, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) antara lain KPBPB Batam – Bintan – Karimun dan KPBPB Sabang;
 - b. Pengembangan pariwisata daerah sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Danau Toba, DPP Baru Padang – Bukittinggi, DPP Baru Batam – Bintan, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kalayang;
 - c. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Penanganan Lalu Lintas Timur Riau, Penanganan Lintas Barat Sumatera, Jalan Lintas Tengah Lampung, Jalan Akses DPP Sabang, Jalan Trans Pulau Simelu, Jalan Akses DPP Danau Toba.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Palembang dan Medan seefektif pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan Peningkatan kualitas transportasi perkotaan multimoda di WM Medan (Mebidangro) serta penguatan keterkaitan desa – kota yang mendukung

pusat pertumbuhan wilayah.

- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Sabang, Bengkalis, dan PKSN Ranai, KPPN Aceh Timur, Toba Samosir, Samosir, Agam, Banyuasin, Muaro Jambi, Belitung, Bangka Selatan, Belitung Timur, Bintan Kepulauan, Karimun, Tulang Bawang, dan KPPN Mesuji.

G. Pulau Jawa dan Bali.

Arah Pembangunan wilayah Pulau Jawa dan Bali yang relatif maju dan berkembang diarahkan untuk memantapkan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global dengan bertumpu pada industri manufaktur, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0, serta pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya. Pembangunan wilayah Jawa akan bertumpu pada peran swasta yang semakin besar dengan dukungan fasilitasi pemerintah secara terpilih untuk menjamin terciptanya iklim investasi yang terbuka dan efisien.

Strategi pembangunan Wilayah Jawa - Bali yaitu pemindahan pusat pemerintahan dan Ibu Kota Negara (IKN) ke luar Pulau Jawa, peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), pertahanan pertumbuhan Jawa - Bali, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Jawa - Bali dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan:

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Jawa - Bali antara lain kakao, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan, yang tersebar di KPPN dan PKSN;
 - c. Pengembangan agropolitan Kawasan Selingkar Wilis dan pertahanan peran sebagai lumbung pangan nasional.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan di beberapa KEK seperti KEK Kendal, Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung dan di beberapa KI seperti KI Batang, Brebes, Madura, dan kawasan ekonomi kreatif dan digital;
 - b. Pengembangan pariwisata DPP Baru Bandung - Halimun - Ciletuh, DPP Borobudur, DPP Bromo - Tengger - Semeru, DPP Banyuwangi, dan DPP Revitalisasi Bali;
 - c. Preservasi, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang, Jalan Tol

- Yogya – Bawen, Solo – Yogyakarta, Cilacap – Yogyakarta, Tol Probolinggo – Banyuwangi, Jalan lintas Pansela, dan Jalan lintas Penghubung Utara.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, serta WM Denpasar, pembangunan Kota Baru Maja.
 - 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di KPPN Pandeglang, Sukabumi, Magelang, Kendal, Pamekasan, Banyuwangi, Klungkung, dan KPPN Buleleng.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi per pulau, diperlukan keterpaduan infrastruktur PUPR antar sektor di Lingkungan Kementerian PUPR (keterpaduan perencanaan, keterpaduan program, dan keterpaduan pelaksanaan), keterpaduan spasial (antar daerah) dan Keterpaduan antar tingkat pemerintah. Keterpaduan kebijakan dan strategi per pulau diharapkan dapat mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi serta dapat memberikan manfaat untuk dapat meningkatkan kehandalan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender di bidang pekerjaan umum dan perumahan dilaksanakan sesuai arahan pengarusutamaan pembangunan di dalam RPJMN 2020 – 2024, di mana strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Kebijakan pengarusutamaan gender akan meliputi: (1) Perkuatan komitmen Kementerian PUPR dalam pelaksanaan PUG; (2) Peningkatan integrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kementerian PUPR; (3) Peningkatan pelaksanaan “*infrastructure for all*” yang memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan” bagi semua kelompok baik perempuan dan laki-laki-laki, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, generasi muda, suku-suku terasing dan kelompok rentan lainnya secara setara dan adil; (4) Peningkatan pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yang terdiri dari peningkatan di bidang: komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan (POKJA dan *Focal Point*) di tingkat pusat dan daerah; kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia sumber dana; data terpilah; alat analisa gender (*Gender Analyst Pathway/GAP*) untuk penyusunan PPRG; peran serta masyarakat dengan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan multi pihak; (5) Peningkatan lingkungan dan fasilitas kerja yang responsif gender; dan (6) Peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender terutama dalam aspek manfaat hasil-hasil pembangunan, termasuk melakukan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan PUG.

Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui strategi: (1) Peningkatan penyusunan produk kebijakan/pengaturan yang responsif gender (NSPK); (2) Peningkatan dan pengembangan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai alat pemetaan data, identifikasi isu dan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender dan membuat kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender; (3) Peningkatan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); (4) Pengembangan kelembagaan dengan pembentukan Kelompok kerja (POKJA) dan *Focal Point*, serta peningkatan kapasitas SDM, melalui berbagai program pelatihan gender, PUG dan PPRG di tingkat pusat dan daerah; (5) Peningkatan penyebarluasan informasi dan kerjasama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas sektor dengan melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media cetak, elektronik, pameran, pertemuan-pertemuan, dan lain-lain; (6) Pengembangan inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan yang responsif gender berdasarkan penelitian, kajian-kajian dan fakta-fakta lapangan; (7) Peningkatan kerjasama dengan multi pihak (K/L), pemerintah provinsi, kabupten/kota, lembaga-lembaga nasional dan internasional, donor, pihak swasta, masyarakat sipil dan pihak pemangku kepentingan lainnya) melalui perjanjian Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* (MoU), dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS); dan (8) Peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif gender secara berkala sebagai masukan dan umpan balik untuk penyusunan kebijakan serta keberlangsungan program kegiatan yang responsif gender.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur PUPR Tangguh Bencana

Arah kebijakan dalam pengarusutamaan infrastruktur PUPR tangguh bencana ditempuh upaya untuk mengakomodasi kondisi kebencanaan di Indonesia yang ditujukan untuk menghasilkan infrastruktur PUPR yang tangguh dan bisa mengurangi risiko bencana serta dapat mengurangi jumlah kerusakan infrastruktur dan lingkungan, yang akan dilaksanakan melalui: (1) Penyediaan NSPK dan peningkatan implementasi standar keamanan bangunan infrastruktur termasuk didalamnya antisipasi terhadap bencana seperti pada gedung, jalan, jembatan bentang panjang, dan bendungan; (2) Menerapkan SNI/*uniform building code* keamanan struktural bangunan tahan gempa pada jalan dan jembatan, dengan kategori *safety critical objective* yang tetap harus dapat beroperasi meskipun terjadi bencana dengan kategori kuat, sebagai jalur evakuasi dan jalur logistik; (3) Pembangunan infrastruktur konektivitas dengan memperhatikan zona rawan bencana, sesuai kondisi *hazard* dan karakteristik wilayah rawan bencana; (4) Pembangunan infrastruktur transportasi yang sekaligus dapat difungsikan sebagai bangunan mitigasi bencana (misal: jalan yang dibangun sebagai tanggul di daerah pesisir untuk mengurangi dampak bencana banjir rob atau tsunami); (5) Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berada di lokasi rawan bencana; (6) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di

sekitar daerah aliran sungai (DAS); (7) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (*shelter*/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat; (8) Pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana; (9) Pengembangan teknologi ramah bencana pada setiap pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; (10) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data ketahanan kebencanaan infrastruktur PUPR; (11) Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (12) Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, longsor, banjir serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; (13) Peningkatkan kecepatan respon/tanggap bencana untuk pemulihan, dan penyelasan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur PUPR pasca bencana.

3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Utama

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan

Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.

Strategi untuk percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi antara lain: (1) Penambahan kapasitas air baku dari bendungan dan sumber air lainnya didukung oleh pengamanan kualitas air; (2) Rehabilitasi dan peningkatan efisiensi infrastruktur penyedia air baku; (3) Pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku serta didukung oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah. Strategi tersebut perlu dikembangkan secara bersamaan dengan peningkatan kinerja Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan sistem distribusi air bersih. Percepatan sistem penyediaan air baku juga perlu melibatkan badan usaha. Ketersediaan air secara berkelanjutan juga perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hemat air; dan (4) Penyusunan Indeks Ketahanan Air dimana Kementerian PUPR mendukung penyusunan Indeks Ketahanan Air Nasional bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Strategi untuk peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu antara lain: (1) Peningkatan Penyelesaian peraturan pemerintah terkait UU Sumber Daya Air; (2) Peningkatan kinerja pengelolaan wilayah sungai melalui optimalisasi pola rencana SDA dalam jejaring air, pangan, dan energi; (3) Perkuatan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas

BUMN/D/S dan KPBU air baku/air minum; (4) Penyusunan Indeks Ketahanan Air.

Strategi untuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air antara lain: (1) Pengembangan sistem informasi sumber daya air; (2) Pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya air (*DSS, forecasting, early warning*) dengan memanfaatkan teknologi baru (satelit, radar, *real-time system, water accounting systems*)

Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi

Arah kebijakan dalam rangka optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi adalah penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks risiko bendungan, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.

Strategi untuk penambahan kapasitas tampungan air antara lain: (1) Perencanaan bendungan multiguna dengan protokol berkelanjutan; (2) Perencanaan pemanfaatan tampungan alami; (3) Rehabilitasi bendungan kritis; (4) Pembangunan bendungan multiguna dengan melibatkan badan usaha. Strategi tersebut didukung oleh pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi berbasis bendungan multiguna serta penerapan skema investasi bendungan baru yang melibatkan badan usaha.

Strategi untuk peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air adalah: (1) Pemanfaatan bendungan untuk berbagai keperluan secara terpadu seperti air baku, irigasi, dan pengendali banjir; (2) Pengembangan potensi waduk untuk penyediaan energi terbarukan; (3) Revitalisasi danau kritis; (4) Pemanfaatan potensi danau untuk air baku, dan kebutuhan lainnya. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan dan pemulihan kondisi waduk serta pengembangan skema kerjasama dengan BUMN dan badan usaha dalam optimalisasi fungsi waduk.

Strategi untuk peningkatan kinerja bendungan dan penurunan risiko bendungan antara lain: (1) Peningkatan tingkat keamanan bendungan dengan risiko tinggi; (2) Konservasi daerah tangkapan air bendungan; (3) Peningkatan kapasitas SDM bidang pengelolaan bendungan; (4) Peningkatan kinerja operasi bendungan yang sesuai standar dan didukung oleh unit pengelola bendungan yang kompeten. Strategi tersebut didukung oleh penataan aset bendungan sebagai barang milik negara.

Strategi untuk peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi antara lain: (1) Pembangunan jaringan irigasi baru dengan konsep modern; (2) Rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan efisiensi air; (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi; (4) Peningkatan efektivitas alokasi air irigasi; (5) Pemanfaatan lahan sub-optimal melalui revitalisasi.

Strategi untuk penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi antara lain: (1) Pembangunan tampungan air dan sistem irigasi untuk

komoditas perkebunan, peternakan, hortikultura dan perikanan; (2) Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat; (3) Pengembangan mikro irigasi terutama untuk lahan belum termanfaatkan dengan optimal.

Strategi tersebut didukung oleh peningkatan peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan irigasi.

Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketahanan bencana mencakup pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.

Strategi untuk pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital terhadap risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, lumpur, dan sedimen antara lain: (1) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur Tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana; (2) Penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana; (3) Penetapan standar bangunan tangguh bencana; (4) Pengembangan infrastruktur hijau. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan kualitas industri konstruksi serta pengawasan mutu dan manajemen rantai pasok industri konstruksi. Kolaborasi antara lembaga penelitian dan pelaku industri dalam penguasaan teknologi juga perlu ditingkatkan serta didukung oleh peningkatan kualitas SDM di bidang konstruksi. Selain itu, perlu adanya inovasi pendanaan untuk meningkatkan efisiensi penganggaran dalam upaya peningkatan ketahanan bencana.

Strategi untuk mendukung pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana antara lain: (1) Peningkatan Program terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya risiko banjir pada daerah perkotaan, dengan kombinasi pendekatan struktural dan non-struktural termasuk infrastruktur hijau; (2) Penetapan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana; (3) Penyusunan peta risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah; (4) Pengembangan sistem pemantauan penurunan tanah; (5) Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor; (6) Koordinasi yang kuat dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Strategi untuk mendukung restorasi dan konservasi daerah aliran sungai antara lain: (1) Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai; (2) Konservasi kawasan rawa dan gambut; (3) Pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi; (4) Koordinasi dan kerjasama dengan KLHK dan Pemda setempat untuk konservasi dan restorasi daerah hulu.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan

Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan jalan dirumuskan sebagai upaya untuk dijadikan acuan dalam pencapaian agenda pembangunan infrastruktur konektivitas 2020-2024. Arah kebijakan infrastruktur

konektivitas adalah melalui Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional yang dicapai melalui program Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional. Peningkatan konektivitas jaringan jalan nasional menggunakan pendekatan indikator waktu tempuh pada 52 koridor terpilih (dalam jam per 100 km) yang tersebar di 5 pulau di Indonesia. Sedangkan program peningkatan kinerja pelayanan jalan nasional diukur menggunakan pendekatan aksesibilitas, rating kondisi jalan nasional, dan rating keselamatan jalan nasional. Adapun kegiatan Ditjen Bina Marga sebagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan jalan nasional dilaksanakan melalui pelaksanaan preservasi, peningkatan dan pembangunan jalan nasional yang dijabarkan dalam kegiatan:

- (i) Preservasi jalan dan jembatan;
- (ii) Pembangunan jalan nasional tol dan non tol;
- (iii) Pembangunan jembatan termasuk fly over dan underpass. Adapun pembiayaan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui APBN dan Pemenuhan Gap Funding melalui Skema Pembiayaan Alternatif.

Preservasi Jalan dan jembatan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin, jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Pemeliharaan kondisi jalan melalui preservasi jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan nasional yang diukur menggunakan rata-rata nilai kekasaran jalan (IRI), indeks perkerasan jalan (PCI), sisa umur perkerasan jalan (RSL), dan nilai kondisi drainase jalan. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan dan jembatan didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Untuk pemeliharaan jembatan itu sendiri, difokuskan dengan pengelolaan nilai kondisi jembatan berdasarkan pengamatan struktur atas dan bawah jembatan.

Mengenai kegiatan pembangunan jalan nasional tol dan non tol yang merupakan upaya peningkatan ketersediaan jaringan jalan dan jembatan, difokuskan untuk mendukung pengembangan wilayah yang dilaksanakan melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama pulau, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi berskala nasional (pelabuhan, bandara, terminal), jalan lingkaran/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan, baik berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 maupun pelaksanaan peraturan presiden, pelaksanaan undang-undang percepatan pembangunan wilayah, pelaksanaan instruksi presiden, serta pelaksanaan pengembangan jaringan jalan di IKN. Sebagai contoh, penyelesaian jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Aceh – Lampung menjadi program prioritas untuk menurunkan waktu tempuh dan menyediakan akses ke pelabuhan utama Kuala Tanjung sehingga mendorong berkembangnya kawasan industri di sepanjang koridor tersebut.

Pembangunan jalan nasional non-tol diikuti dengan pembangunan jembatan. Penataan jalan nasional pada kawasan perkotaan, dilakukan melalui pemeliharaan jalan perkotaan yang efektif dan efisien serta peningkatan

kapasitas jalan perkotaan berkeselamatan yang mendukung keterpaduan transportasi masal perkotaan, diantaranya:

- (i) Revitalisasi jaringan jalan perkotaan terutama penataan jalan nasional dengan konsep jalan lingkaran agar tidak mengganggu lalu lintas dalam kota;
- (ii) Penataan simpang sebidang untuk mengurangi kemacetan jalan di persimpangan;
- (iii) Dukungan jalan pada pengembangan moda transportasi angkutan masal;
- (iv) Pengembangan jaringan jalan baru di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan ROW jalan eksisting berupa *elevated/submerged road* untuk meminimalisir pengadaan lahan yang biayanya sangat tinggi di perkotaan;
- (v) Perbaikan kondisi jalan perkotaan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih untuk mencegah banjir dan trotoar yang ramah pejalan kaki;
- (vi) Optimalisasi metode pembangunan simpang tak sebidang (*fly over/under pass*) terutama lintasan kereta api dengan pemanfaatan lahan seminimal mungkin.

Selain itu tinggi nya keterlibatan Ditjen Bina Marga pada kegiatan internasional menjadi tugas khusus dalam hal pengembangan infrastruktur konektivitas yang perlu dilaksanakan dengan sungguh. Melihat dari tingginya target agenda pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan namun dihadapkan dengan ruang fiskal APBN Ditjen Bina Marga yang sempit, mendorong pergeseran kebijakan anggaran menggunakan pembiayaan alternatif. Sumber pembiayaan alternatif yang dapat diterapkan pada kegiatan infrastruktur konektivitas diantaranya PINA/KPBU, DAK Jalan Daerah. Penggunaan pembiayaan alternatif diantaranya dapat digunakan untuk meningkatkan optimalisasi sistem preservasi jalan nasional, pembangunan jembatan Calender Hamilton dan jembatan bentang panjang, pengembangan jaringan jalan tol, dan pengembangan jaringan jalan non tol yang dapat dilengkapi dengan pembangunan jembatan timbang sebagai upaya pengelolaan beban kendaraan yang melintas, dan menghindari *overload*.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Smart living yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta

penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:

- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat *return of investment*, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
- b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
- c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman

Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;
- b. Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM;
- c. Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan;

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, yaitu:

- a. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau kecil terluar melalui penurunan kebocoran (*Non-Revenue Water/NRW*), pemanfaatan *idle capacity*, dan pembangunan kapasitas;
- b. Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;
- c. Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;
- d. Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;
- e. Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/ *Water Safety Plan* (WSP) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;
- f. Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan pulau kecil terluar;
- g. Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Pemerintah Daerah.

Selain itu, strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM ialah:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah;
- b. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam penyelenggaraan SPAM;

- c. Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;
- d. Memperkuat peran *stakeholders* termasuk masyarakat dan Badan Usaha;
- e. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/lembaga;
- f. Menerapkan prinsip *Good Governance* untuk penyelenggaraan SPAM;
- g. Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Lalu, strategi peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen *stakeholder* terkait pendanaan ialah:

- a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM;
- b. Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan;
- c. Meningkatkan peran dan komitmen penyelenggara SPAM dalam alokasi pendanaan.

Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Layak dan Aman

Kebijakan peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilakukan dengan:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi;
- b. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi;
- c. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi;
- e. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat dan persampahan khususnya pada Kabupaten/Kota Prioritas;
- b. Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana terbangun;
- c. Fasilitasi penyiapan *readiness criteria* pada Kabupaten/Kota Prioritas;
- d. Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;
- e. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan *platform database* sanitasi lainnya;
- f. Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi (pengelolaan dan berkelanjutan).

Selain itu, strategi peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi ialah:

- a. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan, pengembangan sistem pengelolaan sanitasi;
- b. Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sanitasi.

Adapun strategi pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi adalah:

- a. Penyusunan NSPK yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
- b. Mendorong penguatan regulasi pengelolaan sanitasi di daerah.

Adapun strategi penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi adalah:

- a. Mendorong dan menjaga komitmen kepala daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pengarusutamaan pembangunan sanitasi di daerah;
- b. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola sanitasi di daerah;
- c. Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola sanitasi ditingkat masyarakat;
- d. Mengembangkan dan mengkoordinasikan mekanisme serah terima aset sarana prasarana terbangun kepada daerah yang lebih efektif.

Adapun strategi pengembangan alternatif sumber pembiayaan adalah:

- a. Mendorong peningkatan pemulihan biaya (*circular economy*) dalam pengelolaan sanitasi;
- b. Sinkronisasi pemrograman pada berbagai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan sanitasi;
- c. Mendorong kerjasama pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang sanitasi.

Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman:

Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;
- b. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
- c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:

- a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
- b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
- c. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.

Selain itu, strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu adalah:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
- b. Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.

Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan:

- a. Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
- b. Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
- c. Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, dukungan peningkatan pendapatan masyarakat, dan dukungan pengembangan fungsi strategis lainnya; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang mendapatkan subsidi pembiayaan perumahan, serta perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan *land banking* untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan *millennials*; (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan

kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.

- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (2) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD; (3) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (*public housing*) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan perumahan nasional dan daerah, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (*rental housing*), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (4) Pengoptimalan potensi masyarakat serta pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema kredit lainnya) untuk mendukung pengembangan perumahan swadaya bagi MBR; (5) Pengembangan klinik perumahan di daerah; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi.

5. Arah Kebijakan dan Strategi Perencanaan Pembangunan Kewilayahan

Fokus utama yang akan menjadi kebijakan BPIW dimasa mendatang dalam rangka menjawab tugas dan fungsi BPIW adalah berikut:

- a. Kebijakan Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah yang didukung oleh perangkat yang memadai termasuk mencakup panduan penyusunan rencana induk dan legalitas produk. Adapun Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu dilakukan melalui pendekatan: (1) Penyusunan Kebijakan Strategi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Perencanaan Pemrograman dan Pembiayaan) antara lain Kerangka Spasial Renstra PUPR, Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang (RPIJP); Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) yang menurunkan arahan pengembangan wilayah dari RPJMN 2020 – 2024; (2) Penyusunan Database untuk simulasi kebijakan, antara lain Sibas RIPI (Sistem Informasi Database *Online* Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR) dan SIPRO (Sistem Informasi Pemrograman); (3) Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur yang merupakan agenda rutin pemrograman PUPR yang akan diinisiasi oleh BPIW setiap tahunnya dalam bentuk: (i) Agenda Forum Rakorbangwil sebagai media komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya guna menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Penanganan Kawasan Prioritas; serta (ii) Agenda Pra Konsultasi Regional dengan

melibatkan Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR sebagai proses lanjutan Forum Rakorbangwil guna memastikan perwujudan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (4) Analisa Manfaat perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk mengukur kebermanfaatan pembangunan infrastruktur PUPR sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia sekaligus memproyeksikan kebermanfaatan ekonomi dan sosial dari pengembangan infrastruktur PUPR agar dapat menjawab Visi dan Misi Presiden untuk menjalankan RPJMN 2020-2024.

- b. Kebijakan Peningkatan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah. Adapun Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah dilakukan melalui pendekatan: (1) Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR berbasis Pengembangan Wilayah yang merupakan arahan program Program Jangka Menengah (PJM)/(MP/DP) baik pada level Kawasan maupun level Perkotaan yang dilakukan analisis prioritas kawasan dengan mengacu arahan RPJMN 2020-2024 (termasuk *Major Project* 2020-2024) serta dokumen perencanaan lainnya seperti RTRWN (PP Nomor 13 Tahun 2017), Peraturan Perundang-undangan Sektoral (PP Nomor 50 Tahun 2011 Tentang RIPARNAS 2010-2025; PP tentang KEK; PP 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN 2015-2035, dll.) termasuk MP/DP yang telah disusun BPIW sejak 2015 – 2019; (2) Pelaksanaan Kerjasama (termasuk inkubasi kawasan); (3) Evaluasi Kinerja Kawasan sebagai alat ukur kebutuhan infrastruktur atau gap infrastruktur bidang PUPR; (4) Pengembangan *database* wilayah.
- c. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya: (1) Penyusunan NSPK dalam rangka Penyusunan Peraturan Perundangan Lingkup PIW; (2) Pengembangan SDM dan Ortala untuk penguatan sumber daya manusia perencanaan termasuk upaya peningkatan kualitas jabatan fungsional; (3) Pemrograman dan Monitoring dan Evaluasi yang merupakan agenda rutin tahunan untuk melakukan penyusunan program internal serta pemantuan dan evaluasi pemrograman internal BPIW; (4) Perencanaan umum sebagai acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur BPIW pada tahun 2020 hingga 2024 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2020 – 2024 dan Fasilitasi Instrumen Simulasi Kebijakan dalam bentuk studio peta; (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya termasuk, Layanan Umum, Keuangan, dan BMN termasuk Penyelesaian BMN Tata Ruang (Aset tanah, bangunan, dan gedung/anjungan cerdas) serta tindak lanjut audit; (6) Kehumasan, dan layanan informasi untuk memperkenalkan eksistensi organisasi perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR sekaligus menyajikan data dan informasi produk-produk perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah.

6. Arah Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur

Kebijakan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan meliputi: (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan; (2) Peningkatan keterpaduan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS); (3) Penataan dan peningkatan peran simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan; (4) Peningkatan kontribusi pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam mendukung pencapaian Visium 2020–2024; (5) Peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU; (6) Pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel; (7) Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya; (8) Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan; (9) Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (*refinancing*); (10) Percepatan operasionalisasi BP Tapera; (11) Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan, melalui: sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

Adapun strategi yang akan ditempuh meliputi: (1) Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (2) Peningkatan koordinasi antara simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU; (3) Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020 – 2024; (4) Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan; (5) Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur PU dan Perumahan melalui *bundling* infrastruktur; (6) Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai *bridging finance* KPBU bidang PUPR dan *vehicle* dalam menjalankan tugas dan fungsi DJPI; (7) Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek *unsolicited*; (8) Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa; (9) Percepatan tahap penyiapan KPBU melalui penggabungan Studi Pendahuluan (SP) dan *Outline Business Case* (OBC) menjadi dokumen permohonan PDF (DPP); (10) *Refocusing* kegiatan penyiapan proyek KPBU bidang PU dan Perumahan; (11) Alokasi APBN untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya ungkit dan *scale up* pembiayaan infrastruktur; (12) Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum; (13) Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan skema pembiayaan perumahan untuk rumah umum dan rumah swadaya dari sisi *demand* dan *supply*; (14) Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan; (15) Peningkatan

peran Badan Usaha dalam penyediaan perumahan; (16) Mempercepat penyiapan infrastruktur operasionalisasi BP TAPERA; (17) Mendorong peran serta Pemda dalam Pembiayaan Perumahan; (18) Mendorong kerjasama dan investasi Badan Usaha untuk mendukung *major project* perumahan publik.

7. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan Jasa Konstruksi

Arah kebijakan dan strategi pembinaan konstruksi ditujukan untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi (1) meningkatnya pengelolaan sumber daya air, (2) meningkatnya konektivitas jalan nasional, dan (3) meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi. Untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program tersebut maka disusun 5 arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

- a. Peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, melalui:
 - (1) Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur dan asesor bidang konstruksi;
 - (2) Pengembangan SKKNI dan modul pelatihan konstruksi;
 - (3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi, termasuk SDM vokasional.
- b. Mendorong peningkatan kinerja penyedia jasa dan kemitraan usaha antar kualifikasi dan klasifikasi melalui penerapan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Jasa pada seluruh paket pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR.
- c. Menyediakan informasi material, peralatan, dan teknologi konstruksi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur, mendorong efisiensi biaya logistik, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
- d. Peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui:
 - (1) Peningkatan penerapan manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan dan pembinaan kontrak konstruksi;
 - (2) Peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa.
- e. Peningkatan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sub bidang jasa konstruksi, melalui:
 - (1) Mengoptimalkan potensi masyarakat jasa konstruksi untuk pembinaan konstruksi;
 - (2) Peningkatan pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi;
 - (3) Mendorong peningkatan kinerja OPD sub bidang jasa konstruksi;
 - (4) Pengembangan kerja sama antar Lembaga.

8. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan SDM

Kebijakan dan strategi pengembangan SDM Aparatur meliputi:

- a. Akselerasi pengembangan *talent pool* untuk menyiapkan calon suksesor sebagai calon pemimpin yang i-ProVe yang akan dilaksanakan melalui: (1) Pengembangan pelaksanaan *talent mapping* (pemetaan pegawai); (2) Internalisasi manajemen talenta sebagai upaya penanaman *talent mindset*; (3) Peningkatan implementasi manajemen kinerja melalui pengembangan sistem pemantauan kinerja operasional SDM; (4) Integrasi talenta PUPR dengan talenta nasional.
- b. Pengembangan kompetensi ASN yang akan dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan proporsi praktek pada pelatihan; (2) Pelaksanaan OJT/program magang pada proyek infrastruktur; (3) Peningkatan pelaksanaan sertifikasi profesi; (4) Mengembangkan jalur pengembangan kompetensi melalui jalur non klasikal/non pelatihan; (5) Penyesuaian proporsi penganggaran pengembangan kompetensi melalui jalur non klasikal/non pelatihan; dan (6) Peningkatkan kolaborasi dengan unit organisasi untuk implementasi jalur non klasikal/non pelatihan.
- c. Akselerasi pengembangan kompetensi ASN yang akan dilaksanakan melalui: (1) Pengembangan berbagai metode dan media pembelajaran yang modern dan adaptif dengan kebutuhan di lapangan; (2) Transformasi pelatihan ke arah digital; (3) Pengembangan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan yang bersertifikasi level internasional; (4) Pengembangan *Human Resource Development System*; (5) Modernisasi sarana dan prasarana pengembangan kompetensi; (6) Pembangunan kompetensi kolektif SDM melalui pelaksanaan *coaching, mentoring, dan counseling* (CMC) oleh unit organisasi untuk mendorong produktifitas inovasi.
- d. Pengembangan *vocational school* yang akan dilaksanakan melalui: (1) Pengembangan Politeknik PU yang berkelas internasional; (2) Pengembangan Politeknik PU di beberapa wilayah; (3) Akselerasi proses akreditasi Politeknik PU terakreditasi A; (4) Membekali lulusan Politeknik PU yang bersertifikasi profesi di bidang strategis.
- e. Peningkatan kualitas program pendidikan lanjutan lebih aplikatif yang akan dilaksanakan melalui: (1) *Quality Assurance* proses rekomendasi peserta program magister dan doktoral; (2) Peningkatan kerja sama dengan institusi lembaga pendidikan terbaik; (3) Peningkatan kerja sama dengan lembaga donor dalam dan luar negeri; (4) Pembentukan Program Magister Super Spesialis.
- f. Akselerasi pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN bidang PUPR di Daerah yang akan dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan proporsi jumlah peserta/kuota untuk ASN PUPR di Daerah; (2) Pengembangan pola dan meningkatkan kerjasama dengan Badan atau Lembaga Diklat/Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah; dan (3) Peningkatan pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah Daerah.
- g. Penguatan kelembagaan yang akan dilaksanakan melalui: (1) Akreditasi Balai Penilaian Kompetensi dan Balai-Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah sebagai referensi Balai di Pemerintah Daerah; (2) Penguatan sistem dan tata kelola BPSDM berbasis teknologi; (3) Modernisasi prasarana sarana dan peningkatan kapabilitas SDM penyelenggaraan pelatihan untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi; (4)

Peningkatan jejaring dan forum kerjasama dengan *stakeholder* nasional dan internasional; (5) *Branding* pengembangan SDM PUPR untuk komunikasi publik dan menarik talenta, dan (6) Pengembangan BPSDM sebagai LSP.

9. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan

Arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan pembangunan yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja dan Keuangan yang akan dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal kinerja dan keuangan Pemerintah (SPIP); (2) Peningkatan Pengendalian penyelenggaraan infrastruktur melalui implementasi *Continous Audit Continous Monitoring* (CACM); (3) Mendorong efektivitas unit kepatuhan internal; (4) Pengembangan SDM yang profesional dan berintegritas; (5) Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui kebijakan *roadmap* RB tahun 2020-2024; (6) Penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); (7) Berperan aktif dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) untuk meningkatkan kualitas pengawasan; (8) Pengembangan NSPK dalam kegiatan pengawasan.

10. Arah Kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pembangunan

Kebijakan tata kelola penyelenggaraan pembangunan diarahkan pada upaya mendorong penerapan Inovasi Tata Kelola Administrasi Kementerian PUPR dengan strategi: (1) Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE); (2) Mewujudkan birokrasi yang profesional, tepat, cepat dan akuntabel; (3) Peningkatan kualitas tata kelola keuangan, administrasi penganggaran dan BMN Kementerian PUPR yang transparan dan akuntabel; (4) Peningkatan kualitas pelayanan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR kewenangan daerah yang transparan dan akuntabel; (5) Penataan layanan hukum (fasilitasi produk hukum dan advokasi yang adaptif); (6) Peningkatan penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik; (7) Peningkatan kenyamanan bekerja bagi pegawai Kementerian PUPR; (8) Peningkatan kualitas layanan kajian dan pemantauan kebijakan Menteri.

3.2.3

Program dan Kegiatan Pembangunan

Arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui 5 program dan 50 kegiatan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Gambar 3.5 Redesain Program Kementerian PUPR

	PROGRAM EKSTING	REDESAIN PROGRAM
SETJEN	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Peningkatan Sarpas ASN KemenPUPR 	Program Dukungan Manajemen
ITJEN	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	Program Dukungan Manajemen
BPSDM	Program Pengembangan SDM Bidang PUPR	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
BPIW	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Program Dukungan Manajemen
DJBK	Program Pembinaan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
DJPI	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJCK	Program Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJP	Program Pengembangan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJSDA	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo 	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Ketahanan Sumber Daya Air
DJBM	Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Infrastruktur Konektivitas

- Program Ketahanan Sumber Daya Air**, terdiri dari kegiatan: (1) Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku; (2) Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai; (3) Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya; (4) Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi; (5) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana; (6) Layanan Teknis SDA; (7) Pengendalian Lumpur Sidoarjo; (8) Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi; (9) Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; (10) Layanan Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN).
- Program Infrastruktur Konektivitas**, terdiri dari kegiatan: (1) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional; (2) Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol; (3) Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**, terdiri dari kegiatan: (1) Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung; (2) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan; (3) Penyelenggaraan Air Minum yang Layak; (4) Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak; (5) Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman; (6) Penyediaan Akses Rumah Layak Huni; (7) Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan.
- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** terdiri dari kegiatan: (1) Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi; (2) Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum.

5. **Program Dukungan Manajemen**, terdiri dari kegiatan: (1) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum; (2) Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana; (3) Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Advokasi Hukum; (4) Penyelenggaraan Fasilitas Infrastruktur Daerah; (5) Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik; (6) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Bidang PUPR; (7) Pengkajian dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan; (8) Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal; (9) Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air; (10) Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga; (11) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman; (12) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan; (13) Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Tugas Teknis Lainnya; (14) Pengembangan Infrastruktur Wilayah; (15) Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (16) Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; (17) Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi; (18) Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi; (19) Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi; (20) Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; (21) Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia; (22) Penyelenggaraan Pengembangan Talenta; (23) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Bidang PUPR; (24) Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan; (25) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR; (26) Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; (27) Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan; (28) Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

3.3

KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

Pada periode 2020 – 2024 terdapat 96 buah kerangka regulasi yang akan disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri dari: 1 Undang-Undang (UU); 13 Peraturan Pemerintah (PP); 4 Peraturan Presiden (Perpres); 59 Peraturan Menteri (Permen PUPR); dan 22 dokumen kerangka regulasi lainnya yang berbetuk (Keputusan Menteri, SK Dirjen/Kepala Badan, Manual/Pedoman/Standar, dan Regulasi lainnya. Adapun jumlah regulasi yang akan disusun per bidang/sektor terdiri dari:

Sumber Daya Air 3 peraturan; Jalan dan Jembatan 22 peraturan; Permukiman 12 peraturan; Perumahan 11 peraturan; Perencanaan Wilayah 7 peraturan; Pembiayaan Infrastruktur 17 peraturan; Pembinaan Konstruksi 9 peraturan; Pengawasan Pembangunan 4 peraturan; dan Tata Kelola Administrasi Pembangunan 11 peraturan.

Daftar regulasi yang akan disusun selengkapny terdapat pada Lampiran 1.

3.4

KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kerangka kelembagaan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang merupakan arahan dalam penataan birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.

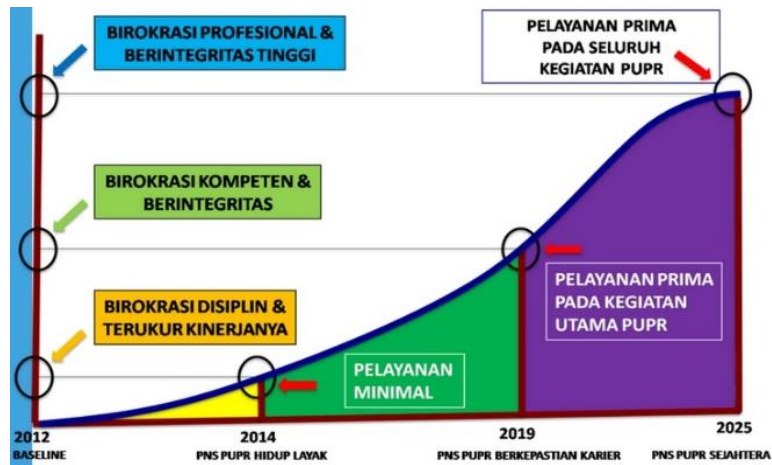
Tabel 3.3 Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan Grand Reformasi Birokrasi 2010 – 2024

AREA	HASIL YANG DIHARAPKAN
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
Peraturan Perundangundangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan *Grand Skenario* Perubahan Birokrasi 2012 – 2025, di mana pada periode 2020 – 2024 birokrasi di Kementerian telah menjadi birokrasi yang

profesional dan berintegritas tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan prima pada seluruh kegiatan.

Gambar 3.6 Grand Skenario Perubahan Birokrasi Kementerian PUPR 2012-2025



3.4.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2020 - 2024 disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dalam mencapai Sasaran Strategis. Struktur organisasi disusun berdasarkan prinsip *right size* dan *right function* (organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi) sehingga terwujud organisasi kerja yang efektif dan efisien.

Penataan organisasi pada tingkat unit organisasi dilakukan dengan menggabungkan fungsi-fungsi yang menangani pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang selama ini tersebar di beberapa unit organisasi menjadi 1 (satu) unit organisasi yaitu pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Unit yang digabungkan meliputi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Bina Investasi Infrastruktur yang semula berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Unit Organisasi Penelitian dan Pengembangan dilakukan restrukturisasi dengan meniadakan unit ini dan menggabungkan pelayanan ke-litbangan pada masing-masing Unit Organisasi teknis. Dengan demikian, maka organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi lebih ramping dengan 10 Unit Organisasi yang semula 11 Unit Organisasi.

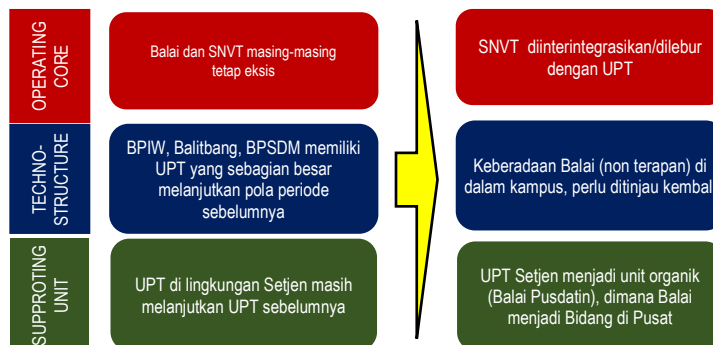
Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas fasilitasi pembangunan infrastruktur di daerah ditambahkan unit kerja yaitu Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal.

Gambar 3.7 Skema Perubahan Organisasi Kementerian PUPR



Penataan organisasi pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) disesuaikan dengan perannya sebagai satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Agar lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas, penataan UPT distrukturkan kembali pembagian kerjanya berdasarkan pola kewilayahan.

Gambar 3.8 Skema Perubahan Organisasi UPT dan Satker SNVT



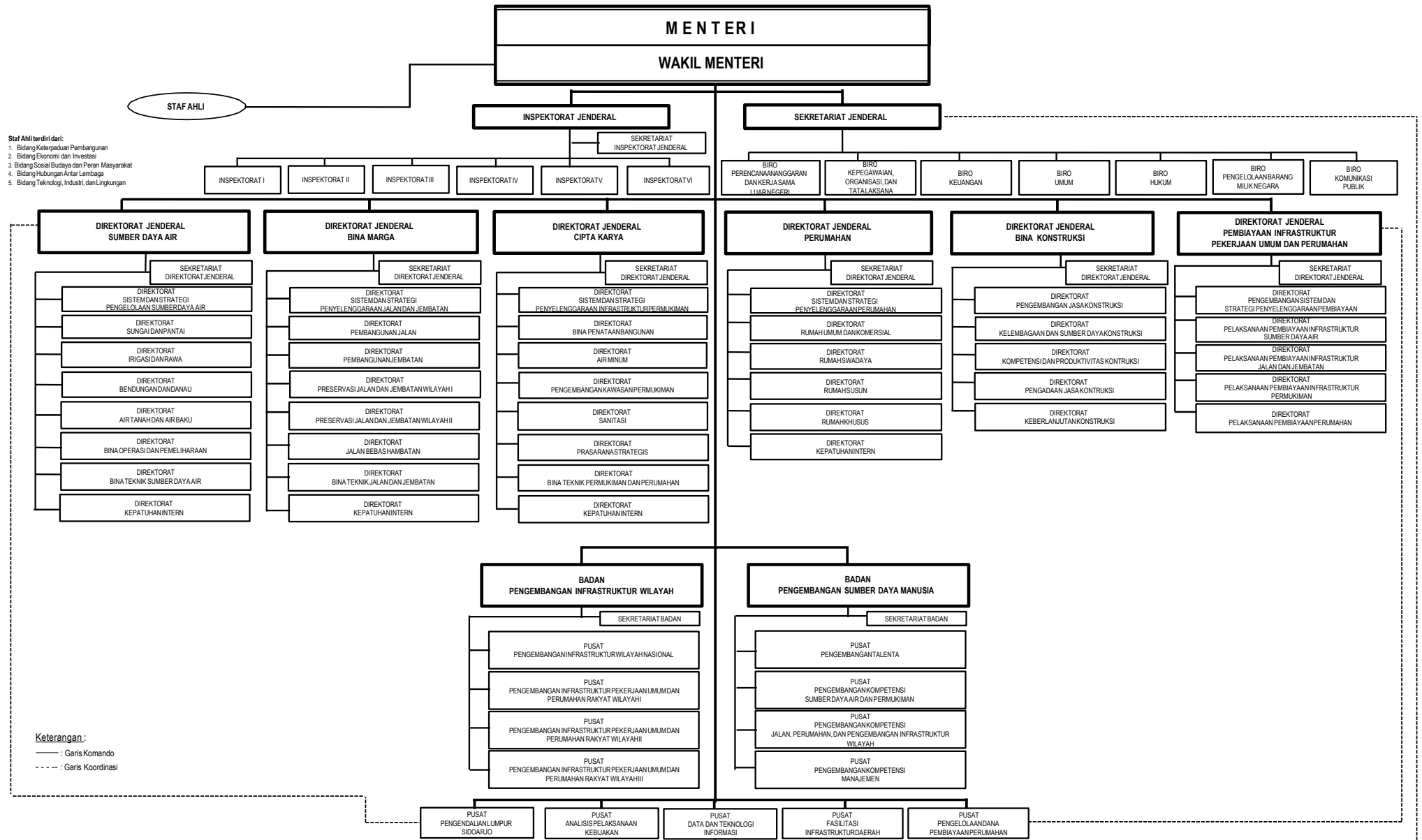
Untuk meningkatkan kinerja pelayanan jalan tol dan pelayanan akses air minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 2 (dua) lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2016. Akan tetapi, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menetapkan pembubaran 18 lembaga termasuk BPPSPAM, sehingga fungsi dan output BPPSPAM dialihkan untuk dilaksanakan oleh Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur

Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memiliki Politeknik yang merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pekerjaan umum. Politeknik dibentuk melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum.

Politeknik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Politeknik mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum.

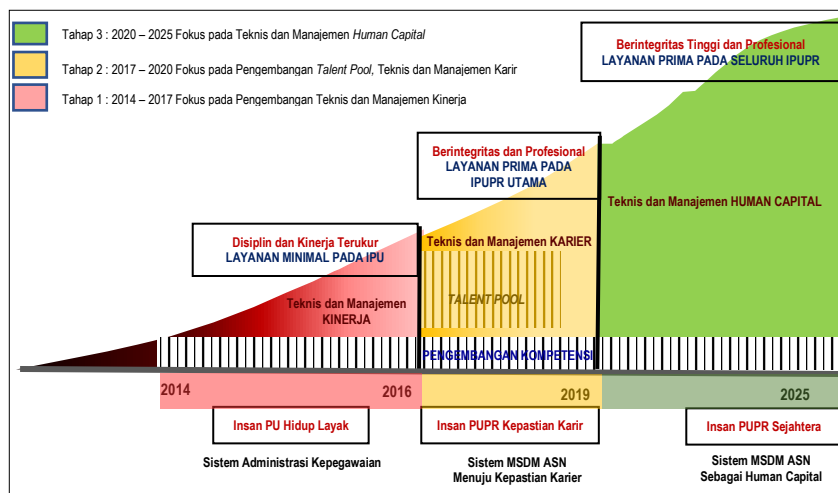
Gambar 3.9 Struktur Organisasi Kementerian PUPR



3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

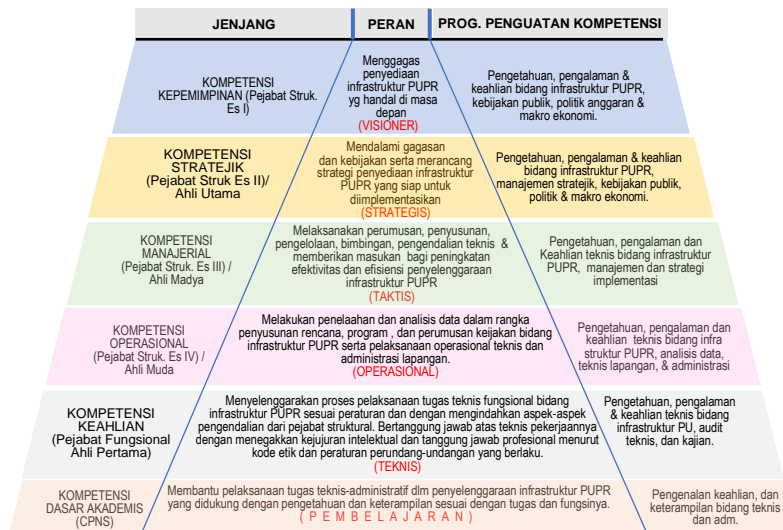
Pengelolaan SDM aparatur ditujukan bagi terwujudnya SDM aparatur yang memiliki integritas tinggi dan professional dalam pelaksanaan tugas yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam pencapaian Sasaran Strategis. Untuk mencapai kondisi tersebut telah ditetapkan strategi dan milestone manajemen SDM Kementerian PUPR menuju layanan prima 2025, di mana pada tahap ke 3 (2020 – 2025) difokuskan pada Teknis dan Manajemen *Human Capital*.

Gambar 3.10 Strategi dan Milestone Manajemen SDM PUPR Menuju Pelayanan Prima 2025



Arah kebijakan dalam pengelolaan SDM yaitu melanjutkan hasil pemetaan gap kompetensi (standar kompetensi vs hasil assesmen), penerapan kode etik dan perilaku, pengembangan budaya integritas, optimasi SDM IT secara massif, penguatan kompetensi SDM melalui sertifikasi profesi untuk jafung/kepakaran prioritas PUPR, penguatan budaya integritas, penguatan talent management, dan pengelolaan posisi kunci. Penguatan kompetensi SDM dilakukan sesuai dengan jenjang kompetensi dan peran masing-masing.

Gambar 3.11 Tahapan Penguatan Kompetensi SDM Penyelenggara Infrastruktur PUPR

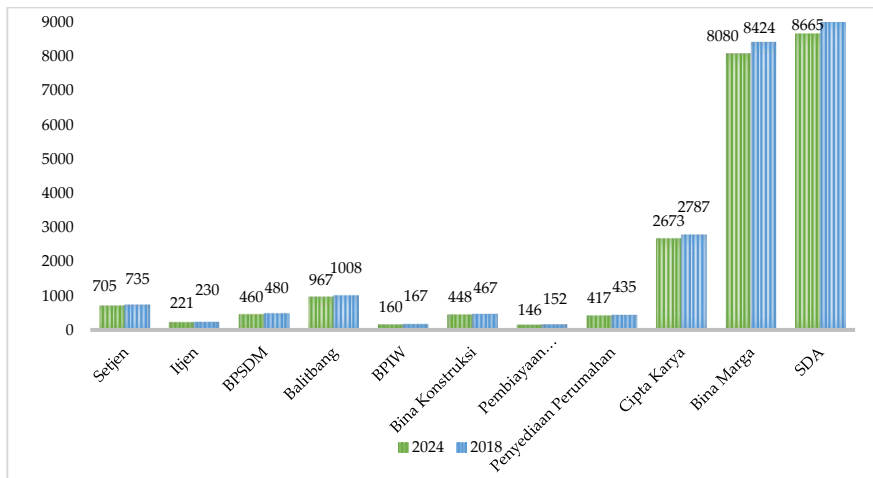


Pada Tahun 2018, jumlah pegawai Kementerian PUPR sebanyak 22.864 orang, terdiri dari Jabatan Struktural dan Fungsional. Seluruh pegawai terdistribusi ke dalam Unit Organisasi yang dikelompokkan menjadi (1) Unit Organisasi *Core Process*, yaitu unit organisasi yang memiliki tugas-fungsi yang secara langsung membangun infrastruktur; (2) Unit Organisasi *Techno-Structure* yang memiliki tugas-fungsi pendukung terhadap terhadap proses penyediaan infrastruktur; dan (3) Unit Organisasi *Supporting* yang memiliki tugas-fungsi manajemen umum.

Pada kategori *Core-Process*, jumlah pegawai terbanyak di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (8.665 orang) dan Direktorat Jenderal Bina Marga (8.080 orang). Selanjutnya Direktorat Jenderal Cipta Karya (2.673 orang), Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan (417 orang), dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan relatif sangat sedikit (146 orang). Dari kategori *Techno-Structure*, Balitbang memiliki pegawai 967 orang, BPSDM (460 orang), Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (448 orang), dan BPIW (160 orang). Dari kategori *Supporting*, pegawai Sekretariat Jenderal (705 orang) dan Inspektorat Jenderal (312 orang).

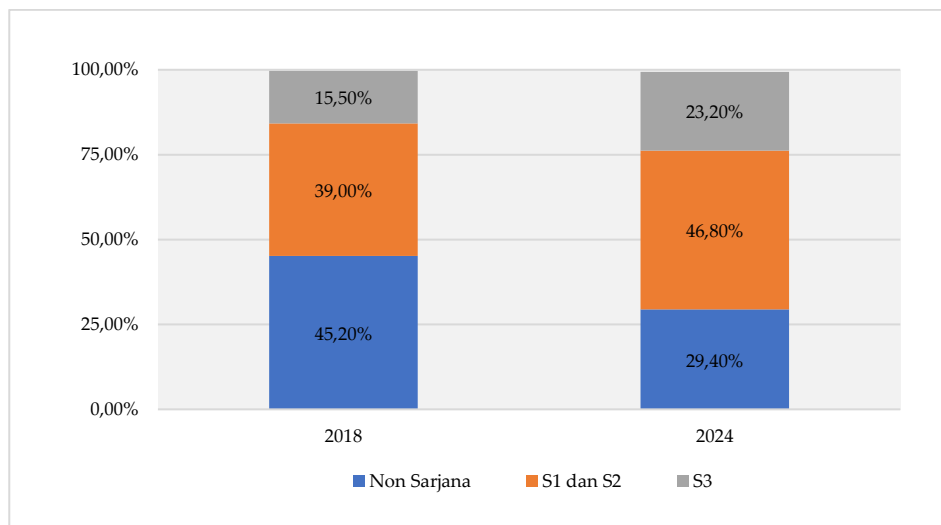
Untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian PUPR, pegawai Kementerian PUPR pada tahun 2024 diproyeksikan berjumlah 24.109 orang dengan komposisi yaitu: Unit Organisasi *Core Process* terdiri dari: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (9.034 orang), Direktorat Jenderal Bina Marga (8.424 orang), Direktorat Jenderal Cipta Karya (2.787 orang), Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sebanyak 435 orang dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan sebanyak 152 orang. Unit Organisasi *Techno-Structure* terdiri dari: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebanyak 467 orang, BPIW sebanyak 167 orang, fungsi Balitbang yang tersebar saat ini di unit organisasi teknis sebanyak 1.008 orang dan BPSDM sebanyak 480 orang. Unit Organisasi *Supporting* yaitu Sekretariat Jenderal sebanyak 735 orang dan Inspektorat Jenderal sebanyak 379 orang.

Gambar 3.12 Komposisi SDM Kementerian PUPR Per Unit Organisasi Tahun 2018 - 2024



Komposisi SDM Kementerian PUPR dari tingkat Pendidikan pada tahun 2018, terdiri dari non sarjana 10.831 orang (45,2%), sarjana S1 9.235 orang, sarjana S2 3.552 orang (39,0%), dan sarjana S3 56 orang (15,5%). Secara bertahap komposisi SDM diupayakan peningkatan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga pada tahun 2024, komposisi pegawai untuk non sarjana menjadi 29,4%, untuk sarjana S1 dan S2 menjadi 46,8%, dan untuk sarjana S3 sebanyak 23,2%.

Gambar 3.13 Komposisi Tingkat Pendidikan SDM Kementerian PUPR Tahun 2018 - 2024

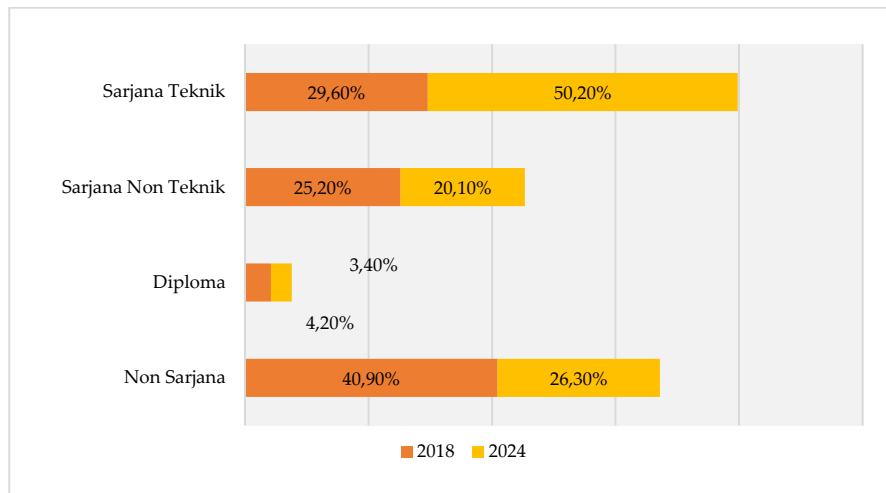


Seiring dengan beban tugas yang semakin meningkat, maka komposisi kompetensi SDM Aparatur perlu disesuaikan antara kompetensi Teknik dan Non Teknik. Pada tahun 2018 jumlah Sarjana Teknik 29,6%, Sarjana Non Teknik 25,2%, Diploma 4,2% dan Bukan Sarjana 40,9%. Berdasarkan hasil proyeksi hingga tahun 2024, maka jumlah SDM terbanyak ialah Sarjana Teknik 50,2%. Jumlah Sarjana non teknik akan relatif stabil dan jumlah SDM non-sarjana akan berkurang drastis menjadi hanya 26,3%. Dalam situasi tersebut,

pekerjaan yang bersifat klerikal atau administratif perlu dilakukan dengan proses otomatisasi, sehingga kapasitas dan produktivitas organisasi akan tetap meningkat.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ditempuh 2 (dua) strategi yaitu: (1) Komposisi penerimaan CPNS, pegawai mutasi dari luar Kementerian PUPR, dan perpanjangan BUP SDM untuk kualifikasi pendidikan Teknik; dan (2) Redistribusi SDM eksisting, permintaan formasi non teknis khusus dari Kementerian/Lembaga lain, dan tidak menggantikan SDM kualifikasi non teknik yang pensiun.

Gambar 3.14 Jumlah dan Komposisi Kompetensi SDM Kementerian PUPR Tahun 2018 – 2024



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Kementerian PUPR menetapkan 5 Tujuan dan 5 Sasaran Strategis. Setiap Sasaran Strategis memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2020 – 2024.

**Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Kementerian PUPR Tahun 2020-2024**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					TOTAL	UIC
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.								
	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	(1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%)	67	70	73	76	79	79	DJSDA
		(2) Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat (%)	54,4	64	77	89	100	100	
		(3) Kapasitas tampung per kapita (m ³ /kapita)	52,5	55,2	57,1	58,1	58,5	58,5	
		(4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi (m ³ /tahun/ha)	19.845	20.554	21.263	21.971	22.680	22.680	
2	Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.								
	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 km)	2.21	2.19	2.09	2.08	1.90	1.90	DJBM
3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya <i>smart living</i> , dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat								
	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	(1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> (%)	60,29	70,08	80,07	89,93	98,57	98,57	DJCK
		(2) Persentase pemenuhan	57,25	57,83	58,37	59,05	59,79	59,79	DJP dan DJPI

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					TOTAL	UIC
			2020	2021	2022	2023	2024		
		kebutuhan rumah layak huni (%)							
4	Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional								
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional (%)	5,3	5,6	6,0	5,1	3,4	7,7¹	DJBK
		Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Yang Kompeten dan Siap Kerja (%)	25	27,5	80	85	90	90	BPSDM
5	Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.								
		Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya (%)	72,39	75,61	77,97	84,50	87,81	87,81	Semua Unor
		Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif (%)	100	100	100	100	100	100	DJPI
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur (%)	72	75	82	88	91	91	Itjen
		Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR	70	71	72	74	76	76	BPSDM
		Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis	60	65	70	82	82,5	82,5	BPIW
		Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi	43	51	57	69	76	76	DJBK

4.2

KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dibutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, baik berupa prasarana, dukungan regulasi, maupun sumber pendanaan. Sumber pendanaan diperoleh dari APBN maupun Non APBN.

¹ Merupakan rata-rata kenaikan 2020 - 2024

Indikasi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 882.777.656.000.000.

**Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian PUPR 2020 – 2024
Per Unit Organisasi (Rp. juta)**

NO	UNIT ORGANISASI	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL (Juta Rp)
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	43.975.216	87.878.956	91.858.651	89.470.243	84.018.457	397.201.523
2	Direktorat Jenderal Bina Marga	40.120.999	56.230.775	60.940.505	66.769.012	66.453.307	290.514.598
3	Direktorat Jenderal Cipta Karya	22.009.966	31.348.413	26.107.819	17.264.595	22.957.049	119.687.842
4	Direktorat Jenderal Perumahan	7.926.694	7.686.851	11.127.287	14.763.792	15.652.629	57.157.253
5	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	199.396	331.500	353.300	367.900	392.800	1.644.896
6	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.544.237	2.001.581	38.392	382.472	394.183	4.360.865
7	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	725.510	900.000	906.541	913.345	920.354	4.365.750
8	Inspektorat Jenderal	111.744	120.081	123.729	90.265	92.933	538.752
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	525.188	563.788	933.412	1.028.720	1.128.313	4.179.421
10	Sekretariat Jenderal	520.056	665.203	695.853	595.881	600.602	3.077.595
TOTAL							882.777.656

Indikasi kebutuhan pendanaan pada masing-masing program pembangunan tertera dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian PUPR 2020 – 2024
Per Program (Rp. juta)**

PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Program Ketahanan Sumber Daya Air	41,599,240	85,388,956	89,277,147	86,850,460	81,245,710	384,361,514
Program Infrastruktur Konektivitas	37,225,702	53,122,807	57,588,640	63,191,098	62,633,658	273,761,907
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	29,706,385	38,938,073	35,403,320	38,175,437	33,893,935	176,117,151
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	177,680	207,033	299,488	331,087	341,169	1,356,470
Program Dukungan Manajemen	7.913.373	8.602.598	9.399.847	7.339.525	7.778.975	41.034.318
Total						876.631.360

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis akan digunakan sebagai acuan di dalam perencanaan tahunan melalui penyusunan Rancangan Rencana Kerja yang selanjutnya setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi Renja untuk kemudian digunakan sebagai pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR. Rencana Strategis juga akan dijadikan sebagai acuan di dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai penilaian terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini selanjutnya digunakan oleh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR untuk menyusun Renstra Unit Eselon I dan Renstra entitas di bawahnya. Selanjutnya, kebijakan beserta target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra akan dievaluasi pada pertengahan (Tahun 2022) dan akhir periode 5 tahun (Tahun 2024) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rincian Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 tercantum sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

A. KERANGKA REGULASI

1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RPP Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	Amanat UU No. 17 Tahun 2019 Tentang SDA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2024
2	PRPP Tentang Irigasi	Amanat UU No. 17 Tahun 2019 Tentang SDA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2023
3	RPP Tentang Sumber Air	Amanat UU No. 17 Tahun 2019 Tentang SDA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2023

2. Direktorat Jenderal Bina Marga

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1. Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Jalan Nasional					
1.1	Penyusunan SK Dirjen Bina Marga tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga	Merupakan pelaksanaan dari amanat Permen PAN RB No 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024
2. Penguatan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Jalan					
2.1	Peninjauan Kembali Permen PU 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan	Amanat PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan pada pasal 61 dan pasal 62 Diperlukan penajaman dan penambahan dalam pengaturan tentang: 1. Kerangka waktu dalam penetapan fungsi dan status agar tidak terjadi jeda waktu terlalu panjang antara SK Menteri dengan SK Gubernur dan SK Bupati/Walikota	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		2. Konsekuensi logis terhadap administrasi dan hukum dari penetapan fungsi dan status jalan daerah 3. Pertimbangan teknis dan administratif pengusulan perubahan fungsi dan status jalan agar tidak terlalu politis			
2.2	Revisi SK No. 77/KPTS/Db/1990 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten	SK No. 77/KPTS/DB/1990 masih menggunakan sejumlah asumsi perhitungan yang belum disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan terkait penyelenggaraan jalan (idealnya disediakan pula petunjuk teknis untuk jalan provinsi dan jalan kota)	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024
2.3	Penyusunan konsep Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Penugasan Penanganan Ruas Jalan daerah dengan Pendanaan APBN	Amanat PP 34 Tahun 2006 Tentang Jalan pada pasal 85 1. Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program. 2. Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri</p>			
3	Penguatan Penyelenggaraan Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol)				
3.1	Revisi Permen PUPR 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol	Belum ada pengaturan atau dasar hukum terkait penunjukkan BUMN untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian jalan tol, serta mekanisme pengambilalihan pengusahaan jalan tol	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2021
3.2	Revisi Permen PUPR 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol	Belum diatur tentang konsekuensi serta kewajiban para pihak mengenai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol (jika harus penilaian terbukti SPM di suatu ruas jalan tol tidak terpenuhi)	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3.3	Penetapan Permen PUPR tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha	Belum diatur tata cara penetapan pengusahaan jalan tol atas rencana badan usaha di dalam Peraturan Menteri PUPR	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2021
3.4	Revisi Permen PUPR 10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol	Perlu adanya penyesuaian peraturan tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol terkait dengan pengembangan Tempat Istirahat	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2021
3.5	Revisi Permen PUPR no 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol	Perlu adanya penyesuaian atas transaksi tol non tunai di jalan tol terkait dengan MLFF	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2020
4	Standarisasi teknis dan pedoman penyelenggaraan jalan				
4.1	Peninjauan Kembali Permen PU Nomor 02/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan	Merupakan pelaksanaan amanat Pasal 72 dan Pasal 74 PP 34/2006 tentang Jalan. 1. Pedoman ini berkaitan dengan bagaimana teknis dan prosedural pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan jalan, serta kedudukannya di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dokumen perencanaan lainnya, namun: 2. Diperlukan review terkait pemangku kepentingan dalam pelaksanaan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>konsultasi publik untuk menghindari usulan yang sifatnya politis.</p> <p>3. Diperlukan review terkait acuan dalam penyusunan usulan rencana mengingat kondisi kebijakan saat ini yang cukup dinamis.</p> <p>4. Diperlukan penjelasan terkait hubungan dan sinergitas antara rencana umum dan rencana strategis (K/L maupun unit organisasi).</p>			
4.2	<p>Penyiapan Rakepmen PUPR tentang Penetapan Rencana umum Jangka Panjang dan Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan</p>	<p>Merupakan pelaksanaan amanat Pasal 72 dan Pasal 74 PP 34/2006 tentang Jalan. Rakepmen ini berisi daftar rencana penanganan ruas jalan pada periode jangka panjang (indikasi 5 tahunan) maupun jangka menengah (indikasi tahunan).</p>	<p>Direktorat Jenderal Bina Marga</p>	<p>Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</p>	<p>2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4.3	Penetapan Permen PUPR tentang Penetapan Rencana Umum Jalan Tol	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 12 PP 15/2005 tentang Jalan Tol. Rakepmen ini berisi daftar rencana penanganan ruas jalan tol pada periode waktu sesuai yang akan ditetapkan dalam Rakepmen.	Direktorat Jenderal Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> •Direktorat Jalan Bebas Hambatan •Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 	2024
4.4	Penyusunan Permen PU Standar Pelayanan Minimal Jalan Nasional	Belum ada SPM untuk bidang jalan sesuai ketentuan dalam PP 34/2006 tentang Jalan Pasal 113	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4.5	Penyiapan Rakepmen PUPR tentang Penetapan Kelas Jalan Nasional	Amanat UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta PP 79/2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Direktorat Jenderal Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> •Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan •Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan •Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I •Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II 	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4.6	Revisi Permen PU No. 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 102 PP 34/2006 tentang Jalan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Bina Teknik	2024
4.7	Revisi Permen PU 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan	Merupakan pelaksanaan amanat Pasal 101, Pasal 104, dan Pasal 106 dalam PP 34/2006 tentang Jalan	Direktorat Jenderal Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> •Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan •Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I •Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II 	2024
4.8	Revisi Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997	Manual ini perlu dilakukan pembaruan karena telah cukup lama diterbitkan (1997).	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5	Kebijakan pendukung pelaksanaan penyelenggaraan jalan				
5.1	Penyusunan PP tentang Dana Preservasi Jalan (<i>Road fund</i>)	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 32 UU 22/2009 tentang LLAJ dan pasal 123 PP 79/2013 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perpres ini mengatur tentang mekanisme pengelolaan serta organisasi dan tata kerja unit pengelola Dana Preservasi Jalan. Dalam penyusunan PP ini, diperlukan Kerjasama dan koordinasi bersama Kementerian perhubungan dan Kementerian keuangan.	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan	2024
5.2	Penyusunan Perpres Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 3 pada PP 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	2022
5.3	Penyusunan Regulasi Tentang penerapan <i>Green Road</i>	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 93 pada PP 15 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan pasal 7 pada Permen PU 05 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	2021

3. Direktorat Jenderal Cipta Karya

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Air Minum Dan Sanitasi				
1.1	RPP tentang Sistem Penyediaan Air minum	UU Nomor 17/2019 tentang Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Air Minum, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2024
1.2	Rapermen PUPR tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang Sistem Penyediaan Air Minum	Perpres 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Air Minum, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2020
2	Permukiman Dan Penataan Bangunan				
2.1	Revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Pembaharuan sebagian materi sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Penataan Bangunan, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2021
2.2	RPP Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan	UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Pengembangan Kawasan	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas			Permukiman, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	
2.3	Revisi PP Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Pembaruan sebagian materi sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, serta mengangkat pengaturan Bangunan Gedung yang diatur dalam Permen ke Peraturan Pemerintah	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Penataan Bangunan, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2021
2.4	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	UU Nomor 6/2017 tentang Arsitek	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Penataan Bangunan, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2021
2.5	Rapermen PUPR tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Permukiman dan Kawasan Permukiman	UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Teknik Permukiman	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
				dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	
2.6	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bangunan Gedung Cerdas	Sebagai pedoman dalam implementasi Bangunan Gedung Cerdas	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Bina Penataan Bangunan	2023
2.7	Rancangan Keputusan Presiden tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nasional	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2024
2.8	Revisi Kepmen PUPR No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat)	Permohonan Ditjen Perumahan	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2024

4. Direktorat Jenderal Perumahan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RPP tentang Rumah Susun	Amanat UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Susun	2021
2	RPP tentang Badan Pelaksana Rumah Umum	Amanat UU No. 20 Tahun 2011 dan UU No. 1 tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	2021
3	Raperpres Kebijakan dan Strategi Nasional bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Amanat PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	2022
4	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 19/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun juncto Permen PUPR No. 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun	Amanat UU No.20 Tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Susun	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 3/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Permen PUPR No. 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Rakyat	Amanat UU No.1 Tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial	2022
6	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus	Amanat UU No.1 Tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Khusus	2022
7	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Amanat UU No.1 Tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Swadaya	2022
8	Rapermen PUPR tentang Perumahan Skala Besar	Amanat UU No.1 Tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	2021
9	Rapermen PUPR tentang Rencana Pembangunan dan	Amanat PP 14 Tahun 2016	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)			Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	
10	Rapermen PUPR tentang Pembentukan Badan Pelaksana Rumah Umum	Amanat UU No.1 Tahun 2011, mendukung pelaksanaan <i>Major Project 1.000.000 Public Housing</i>	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	2021
11	Rapermen PUPR tentang Perencanaan dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Susun	Amanat UU No.20 Tahun 2011, mendukung pelaksanaan <i>Major Project 1.000.000 Public Housing</i>	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Susun	2021

5. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan	Peraturan Menteri terkait Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Unor di Kementerian PUPR	2020
2	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Revisi Permen PUPR No. 21 Tahun 2018	Reorganisasi dan Perubahan Simpul KPNU	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
3	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan	Perubahan skema dan mekanisme pembiayaan perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Jenderal Perumahan	2020-2024
4	Standar dan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU Bidang SDA	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	PT PII, LKPP, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5	Standar dan Pedoman Dokumen Perjanjian Kerja Sama KPBU Sektor SDA	Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	PT PII, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
6	Pedoman Pengelolaan Aset Investasi Infrastruktur SDA	Tata Cara Pengelolaan Aset Investasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Bappenas, Kemenkeu, Ditjen SDA, PT PII, dan BUP	2020
7	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pembiayaan Infrastruktur SDA	Amanat Permen PUPR No. 03 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen SDA, Setjen PIPR, DJPI	2021
8	Kriteria Usulan Proyek KPBU Sektor SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen SDA, Setjen PIPR, DJPI, PT PII	2021
9	Pedoman Pelaksanaan Program Penggabungan Infrastruktur SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Bappenas, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT PII	2021
10	Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
11	Pedoman Pemantauan Investasi Infrastruktur SDA	Tata Cara Pemantauan Investasi Infrastruktur	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Bappenas, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT PII	2021
12	Pedoman Bimbingan Teknis dan Supervisi Penyiapan Proyek KPBU Sektor SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen. SDA, Setjen PUPR, DJPI, PT. PII	2022

6. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi, Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lainnya untuk Satuan Kerja di Kementerian PUPR	Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2018	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Unit Organisasi di lingkungan PUPR	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
2	Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah	a. Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 b. Menghindari perbedaan pandangan dan kesetaraan terkait muatan materi Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang selanjutnya disingkat RPIW"	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, II, III	Internal BPIW dengan melibatkan Unor	2021
3	Rancangan Peraturan Menteri tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR	a. Rencana Aksi PUPR sebagaimana Agenda PUPR dengan Komisi Penyedikan Korupsi (KPK) untuk mengintegrasikan suatu proses perencanaan dan pemrograman yang terkendali b. Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022	Sekretariat BPIW	Unit Organisasi di lingkungan PUPR	2022
4	Standar Pelayanan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Acuan teknis bagi BPIW terkait prosedur pelayanan permintaan data dan informasi bidang	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, II, III	Internal BPIW dengan melibatkan Unor	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		pengembangan infrastruktur wilayah			
5	Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, II, III	Internal BPIW dengan melibatkan Unor	2023
6	Pedoman Penyelenggaraan Rakorbangwil	Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Internal BPIW	2023
7	Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Internal BPIW	2024
8	Standar Kompetensi PIW	Penyesuaian terhadap standar kompetensi eksisting akibat adanya penyesuaian organisasi	Sekretariat BPIW	Internal BPIW dengan melibatkan eksternal	2024
9	Rancangan Keputusan Menteri tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022	Sekretariat BPIW	Internal BPIW	2024

7. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Kemendagri, Kemenlu, Kemenkeu, OJK, BKPM, LKPP, kemenaker, Kemenkumham, Setneg, Setkab, Kemen ESDM, Kemen Perhubungan	2020
2	Rapermen tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia	Tindak lanjut Perpres no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.dan Putusan Judicial Review Mahkamah Agung	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, LKPP, Kemenkumham	2020
3	Rapermen tentang Subklasifikasi, Kualifikasi, Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, BPS, Kemenkumham	2020
4	Rapermen tentang Registrasi Pengalaman, Pengembangan Usaha Berkelanjutan, Kinerja	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Kemenkumham	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	dan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi				
5	Rapermen tentang Penilai Ahli, Tata Cara Pelaporan Kegagalan Bangunan	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan Kemenkumham	2021-2022
6	Rapermen tentang Tata Cara Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja, Tata Cara Permohonan Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, BNSP, Kemenaker, Kemenkumham	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
7	Rapermen tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Badan Akreditasi Nasional, Kemenkumham	2020-2021
8	Rapermen Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi, Registrasi Tanda Daftar Pengalaman Profesional, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Kemnaker, BNSP, Kemenkumham	2020-2021
9	Rapermen tentang Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Pusdatin, Kominfo, Kemendagri, Kemenkumham	2020-2021

8. Inspektorat Jenderal

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Permen PUPR Nomor 25/PRT/M/2017	Reorganisasi Inspektorat Jenderal dan Klasifikasi jenis penugasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia	Inspektorat Jenderal	Unor di Kemen PUPR	2022
2	a. Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2017 b. Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum	Perubahan Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System Perubahan Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat	Inspektorat Jenderal	Unor di Kemen PUPR	2023
3	Rapermen Audit Khusus dan Audit Investigatif	Pedoman pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Unor di Kemen PUPR	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4	Revisi Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2016	Penyesuaian dengan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi	Inspektorat Jenderal	Unor di Kemen PUPR	2022

9. Sekretariat Jenderal

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Rapermen PUPR tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<p>Peraturan Menteri ini merupakan turunan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. ▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. ▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. <p>Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan SPBE untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi di Kementerian.</p>	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
2.	Rapermen PUPR tentang Perubahan Permen Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yg efektif & efisien, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan & akses arsip”. ▪ Peraturan Kepala ANRI Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas <p>Peraturan Menteri PUPR tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR (saat ini sedang direvisi)</p>	Biro Umum	Unit Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Kementerian PUPR	2020
3.	Rapermen PUPR tentang Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip; yang mengatur	Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; kewajiban bagi Unit Kearsipan Kementerian/Lembaga/BUMN/Perguruan Tinggi Negeri untuk	Biro Umum	Arsip Nasional RI dan Unit-Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	tentang jadwal retensi/masa simpan arsip dan klasifikasi keamanan akses arsip dinamis	<p>menyusun 4 (empat) pilar Kearsipan, yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ JRA sebagai prasarana penyusutan arsip, yang menentukan masa simpan arsip dan nasib akhir arsip (Permanen atau Musnah) ▪ SKKAAD sebagai prasarana pemberian hak akses arsip oleh pejabat yang berwenang, sekaligus untuk publik mana yang dapat melihat arsip. 			
4.	Rapermen PUPR tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri ini merupakan turunan dari: <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang 	Biro Komunikasi Publik	Seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Umum dan Perumahan Rakyat	<p>Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)</p> <p>- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik dibuat untuk melengkapi dan mengganti Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum.▪ Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah		Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		dalam memberikan layanan informasi publik.			
5.	Rapermen PUPR tentang Pengamanan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. ▪ Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pengguna barang perlu meningkatkan tertib pengamanan barang milik negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2020
6.	Rapermen PUPR tentang Perubahan Permen Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem	Perubahan struktur organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR dengan pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI)	Biro Keuangan	BPKP, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	
7.	Keputusan Menteri PUPR tentang Nomenklatur Organisasi dan Jabatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Bahasa Inggris	Perubahan Struktur Organisasi Kementerian PUPR berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Biro PAKLN	Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
8.	Rakepmen PUPR tentang Perubahan Keputusan Menteri PUPR Nomor 896/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR Tahun 2020-2024	Terbitnya Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024	Biro PAKLN	Kementerian PAN dan RB, Bappenas, Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2023
9	Rancangan SE PUPR tentang Proses Administrasi Penugasan dan Perizinan Tenaga Ahli Warga Negara Asing (TA-WNA) Dalam Rangka Kerjasama Teknik Luar Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Permensetneg No. 15 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Penugasan Tenaga Asing dalam Kerangka Kerja Sama Teknik Luar Negeri	Biro PAKLN	Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
10.	Rakepmen PUPR tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Kementerian PUPR	Amanat PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah	Biro PAKLN	Kementerian Keuangan, Bappenas, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2024
11.	Keputusan Menteri PUPR tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri di Kementerian PUPR	Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri	Biro PAKLN	Kementerian Keuangan, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
12.	Peraturan Menteri PUPR tentang Kriteria Pertimbangan Tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Uang Kuliah Tunggal atas Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Mahasiswa Politeknik Pekerjaan Umum	Amanat Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Amanat Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2019 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Uang Kuliah Tunggal yang Berlaku pada Politeknik Pekerjaan Umum	Biro Keuangan	Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM	2021
13.	Peraturan Menteri PUPR tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain	Amanat Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Biro Keuangan	Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
14.	Rapermen PUPR tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Kementerian PUPR	Amanat dari Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Biro Keuangan	Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM	2023

B. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Matriks Kinerja Dan Pendanaan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 2020 – 2024

1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (O: Highlight Sasaran RPJMN 2020-2024)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air									43,975,216	87,878,956	91,858,651	89,470,243	84,018,457	397,201,523
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air									41,599,240	85,388,956	89,277,147	86,850,460	81,245,710	384,361,514
1	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat	%	67%	70%	73%	76%	79%	79%						
2	Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat	%	54,4%	64%	77%	89%	100%	100%						
3	Kapasitas tampung per kapita	m ³ /kapita	52.5	55.2	57.1	58.1	58.5	58.5						
4	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/hektar	19,845	20,554	21,263	21,971	22,680	22,680						
PROGRAM: KETAHANAN SUMBER DAYA AIR									41,599,240	85,388,956	89,277,147	86,850,460	81,245,710	384,361,514
SASARAN PROGRAM : MENINGKATNYA KETERSEDIAAN AIR MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SECARA TERINTEGRASI														
1	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	m ³ /detik	4.10	9.00	12.00	14.90	10.00	50.00						
2	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	hektar	10.260	19.500	24.950	25.540	21.250	101.500						
3	Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo	%	52%	52%	67%	67%	53,87%	53,87%						
4	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun	juta m ³	14,351	15,011	15,731	16,123	16,500	16,500						
5	Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	MW	24,43	36,53	13,54	60,97	4,97	140,44						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6	Jumlah DAS yang direvitalisasi		DAS	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00						
7	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD dan DAK		hektar	45,000	80,000	135,000	120,000	120,000	500,000						
8	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK		hektar	80,000	402,500	502,500	512,500	502,500	2,000,000						
9	Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi		DAS	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00						
10	Tingkat layanan prasarana SDA		%	30%	35%	40%	45%	50%	50%						
KEGIATAN 1: LAYANAN KESEKRETARIATAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL (DSDAN)										17,357	15,938	17,532	19,285	21,214	91,326
PELAKSANA : SEKRETARIAT DEWAN SDA NASIONAL															
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional (DSDAN)															
1	Tingkat layanan kesekretariatan manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
OUTPUT KEGIATAN:															
1	Kegiatan kesekretariatan Dewan SDA Nasional yang dilaksanakan														
		Jumlah kegiatan kesekretariatan Dewan SDA Nasional yang dilaksanakan	Kegiatan	5	2	2	2	2	13	17,357	15,938	17,532	19,285	21,214	91,326
KEGIATAN 2: PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI										84.216	1.991.463	1.989.618	1.987.462	84,216	1,991,463
KOORDINATOR : DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR															
PELAKSANA : 1. DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR															
2. BBWS/BWS DAN BALAI TEKNIK															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi														
1	Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan UPT	%	25%	24%	23%	22%	20%	20%						
2	Persentase penurunan jumlah revisi anggaran UPT	%	5%	5%	5%	5%	5%	25%						
3	Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Wilayah Kerja UPT	%	72%	80%	88%	95%	100%	100%						
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya pembinaan perencanaan, pemrograman, penganggaran, evaluasi, dan pengadaan tanah														
1	Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan Ditjen SDA	%	25%	24%	23%	22%	20%	20%						
2	Persentase penurunan jumlah revisi anggaran di lingkungan Ditjen SDA	%	5%	5%	5%	5%	5%	25%						
3	Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Kewenangan Pusat di lingkungan Ditjen SDA	%	72%	80%	88%	95%	100%	100%						
4	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Ditjen SDA	nilai	77,6	77,7	77,8	80,0	80,1	80,1						
5	Persentase progres pengadaan tanah untuk infrastruktur SDA	%	0%	10%	10%	10%	10%	10%						
6	Persentase pencapaian target wilayah Sungai yang dinilai indeks penilaian kinerjanya	%	0	0	1	3	5	5						
7	Indeks evaluasi kinerja anggaran	Nilai	-	85,26	75,77	80	80	80						
Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya pengadaan tanah untuk infrastruktur														
1	Jumlah luas tanah yang dibebaskan	Hektar	-	200	200	200	200	800						
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan pembinaan perencanaan, pemrograman, penganggaran, kerjasama, evaluasi program, dan													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	fasilitasi pengadaan tanah SDA yang dilaksanakan													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	layanan	1	1	1	1	1	1	25,759	25,800	27,090	28,380	29,670	136,699
2	Rencana, anggaran, evaluasi kerja UPT Ditjen SDA yang disusun											-		
	Jumlah dokumen rencana, anggaran, evaluasi kerja UPT Ditjen SDA yang disusun	Dokumen	183	200	200	200	200	983	45,994	50,594	55,653	61,218	67,340	280,799
3	Pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direview													
	Jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direview	Dokumen	25	20	20	20	20	105	12,463	15,000	15,000	15,000	15,000	72,463
4	Layanan pengadaan tanah infrastruktur SDA yang dilaksanakan											-		
	Jumlah dokumen layanan pengadaan tanah infrastruktur SDA yang disusun	Dokumen	0	400	400	400	400	1600	0	80,000	80,000	80,000	80,000	320,000
5	Pengadaan tanah infrastruktur SDA yang dilaksanakan													
	Jumlah luas pengadaan tanah infrastruktur SDA yang dilaksanakan	Hektar	0	240	240	240	240	960	0	1,820,069	1,811,875	1,802,864	1,792,950	7,227,758
KEGIATAN 3 : PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN, RAWA, DAN NON-PADI									8,436,346	25,436,800	31,824,105	33,943,010	8,436,346	25,436,800
KOORDINATOR: DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA														
PELAKSANA : 1. BBWS/BWS, BALAI TEKNIK IRIGASI, BALAI TEKNIK RAWA														
2. DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA														
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya layanan jaringan irigasi														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah tambahan panjang jaringan irigasi yang dibangun	Km	407.85	600	800	1,000	750	3,557.85						
2	Jumlah panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	Km	1285.66	3900.00	4450.00	4450.00	4400.00	18485.66						
3	Jumlah lokasi prasarana irigasi nonpadi yang dibangun	Lokasi	0	5	6	7	7	25						
4	Jumlah daerah irigasi yang dimodernisasi	Daerah Irigasi	0	2	5	7	9	9						
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya layanan pembinaan bidang irigasi permukaan, rawa, dan pertanian nonpadi														
1	Persentase pencapaian target kumulatif luas pembangunan irigasi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	%	9%	25%	52%	76%	100%	100%						
2	Persentase pencapaian target kumulatif luas rehabilitasi irigasi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	%	4%	24%	49%	75%	100%	100%						
3	Jumlah luas layanan irigasi yang terjamin airnya dari bendungan	hektar	117,605	45,606	53,095	60,128	66,115	342,549						
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya layanan teknis bidang irigasi dan rawa														
1	Jumlah layanan teknis bidang irigasi	Layanan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
2	Jumlah layanan teknis bidang rawa	Layanan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang disusun													
	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang disusun	Dokumen	129	140	145	150	130	694	291,657	316,600	327,900	339,200	294,000	1,569,357
2	Jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa yang dibangun													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Panjang jaringan irigasi permukaan dan rawa yang dibangun	Km	407.85	600	800	1000	750	3557.85	4,022,929	8,489,600	13,527,100	12,813,200	11,250,900	50,103,729
3	Jaringan irigasi nonpadi yang dibangun/ditingkatkan													
	Panjang jaringan irigasi nonpadi yang dibangun/ditingkatkan	Km	287.80	315	265	265	265	1397.8	150,231	164,200	139,200	189,200	189,200	832,031
4	Jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa yang direhabilitasi													
	Panjang jaringan irigasi permukaan dan rawa yang direhabilitasi	Km	1,286	3,900	4,450	4,450	4,400	18486	3,789,428	16,168,300	17,497,100	20,261,300	20,117,800	77,833,928
5	Kawasan rawa yang dikonservasi													
	Jumlah lokasi kawasan rawa yang dikonservasi	Lokasi	6.00	10	15	15	10	56	32,842	54,800	82,200	82,200	54,800	306,842
6	Prasarana Irigasi nonpadi yang dibangun													
	Jumlah prasarana irigasi nonpadi yang dibangun	unit	0	5	6	7	7	25		94,000	94,000	94,000	94,000	376,000
7	Layanan pembinaan irigasi, rawa, dan tambak yang dilaksanakan													
	Jumlah BBWS/BWS yang dibina	BBWS/BWS	37	37	37	37	37	37	146,060	146,100	153,405	160,710	168,015	774,290
8	Layanan teknis bidang irigasi dan rawa yang dilaksanakan													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	16,000
KEGIATAN 4 : PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR, PENGELOLAAN DRAINASE UTAMA PERKOTAAN, DAN PENGAMAN PANTAI									6,755,257	13,105,300	14,979,790	15,828,980	14,567,970	65,237,297
KOORDINATOR : DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI														
PELAKSANA :1. BBWS/BWS, BALAI TEKNIK SUNGAI, BALAI TEKNIK PANTAI														
2. DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan layanan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana														
1	Jumlah panjang bangunan pengendali daya rusak air yang dibangun	Km	205.21	390.00	499.00	510.79	495.00	2100.00						
2	Jumlah bangunan pendukung pengendali daya rusak air yang dibangun	Unit	15.00	10.00	15.00	12.00	10.00	62.00						
3	Jumlah bangunan pengendali lahar dan sedimen yang dibangun	Unit	26.00	32.00	42.00	49.00	35.00	184.00						
4	Jumlah kumulatif kawasan strategis di pesisir utara Jawa yang infrastruktur ketahanannya dibangun	Kawasan	2.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
5	Jumlah sungai pada empat DAS yang direvitalisasi	Sungai	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00						
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan layanan pembinaan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana														
1	Tingkat pencapaian target penurunan luas kawasan banjir	%	10%	29%	54%	79%	100%	100%						
2	Tingkat pencapaian target perlindungan pantai rawan abrasi	%	20%	40%	60%	80%	100%	100%						
3	Tingkat pencapaian target pembangunan pengendali sedimen dan lahar gunung berapi	%	20%	40%	60%	80%	100%	100%						
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatkan layanan teknis bidang sungai														
1	Persentase layanan advis teknis dan pendampingan bencana banjir	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
2	Persentase layanan data, informasi dan diseminasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
3	Persentase layanan pengujian laboratorium	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
4	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan balai	Nilai	A	A	A	A	A	A						
Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatkan layanan teknis bidang pantai														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase layanan advis teknis dan pendampingan bencana pesisir	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
2	Persentase layanan data, informasi dan diseminasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
3	Persentase layanan pengujian laboratorium	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
4	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan balai	Nilai	A	A	A	A	A	A						
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai yang disusun													
	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai yang disusun	Dokumen	87	115	125	130	120	577	196,479	265,800	288,400	299,700	277,100	1,327,479
2	Bangunan pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan													
	Panjang bangunan pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan	Km	156.87	345	445	455.79	450	1,853	3,511,364	10,092,900	11,116,100	11,316,100	11,306,800	47,343,264
3	Bangunan pendukung pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan													
	Jumlah bangunan pendukung pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan	Unit	15	10	15	12	10	62	595,772	250,000	400,000	300,000	350,000	1,895,772
4	Saluran drainase utama perkotaan yang dibangun/ditingkatkan													
	Panjang saluran drainase utama perkotaan yang dibangun / ditingkatkan	Km	28.81	20	25	25	20	118,8	648,454	253,600	342,000	352,000	293,600	1,889,654
5	Bangunan pengendali lahar yang dibangun													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah bangunan pengendali lahar yang dibangun	Unit	12	12	12	12	10	58	243,669	243,700	243,700	243,700	243,700	1,218,469
6	Bangunan pengendali sedimen yang dibangun													
	Jumlah bangunan pengendali sedimen yang dibangun	Unit	14	20	30	37	25	126	174,893	249,900	374,800	499,700	312,400	1,611,693
7	Bangunan pengaman pantai yang dibangun													
	Panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun	Km	19.52	25	29	30	25	129	1,277,056	1,518,500	1,822,200	2,429,600	1,518,500	8,565,856
8	Bangunan pengendali banjir yang direhabilitasi													
	Panjang bangunan pengendali banjir yang direhabilitasi	Km	12.3	15	20	20	15	82	30,000	52,400	69,800	69,800	52,400	274,400
9	Bangunan pendukung pengendali banjir yang direhabilitasi													
	Jumlah bangunan pengendali banjir yang direhabilitasi	Unit		2	3	2	2	9	-	5,000	8,000	6,000	6,500	25,500
10	Saluran drainase utama perkotaan yang direhabilitasi													
	Panjang saluran drainase utama perkotaan yang direhabilitasi	Km	2	4	10	10	4	30	5,000	50,000	150,000	150,000	60,000	415,000
11	Bangunan pengendali lahar yang direhabilitasi													
	Jumlah bangunan pengendali lahar yang direhabilitasi	Unit	0	2	2	2	2	8		10,000	11,000	13,000	15,000	49,000
12	Bangunan pengendali sedimen yang direhabilitasi													
	Jumlah bangunan pengendali sedimen yang direhabilitasi	Unit	1	5	10	10	8	34	6,000	30,000	60,000	60,000	48,000	204,000
13	Bangunan pengaman pantai yang direhabilitasi													
	Panjang bangunan pengaman pantai yang direhabilitasi	Km	3.16	7	9	7	5	31	9,600	26,500	34,100	27,000	18,900	116,100

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	14	Layanan pembinaan pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai yang dilaksanakan													
		Jumlah BBWS/BWS yang dibina	BBWS/BWS	37	37	37	37	37	37	53,770	53,800	56,490	59,180	61,870	285,110
	15	Layanan teknis bidang sungai dan pantai yang dilaksanakan													
		Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	16,000
KEGIATAN 5 : PENGEMBANGAN BENDUNGAN, DANAU, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA										8,709,952	34,326,571	29,294,636	23.267,767	20,181,246	115,780,172
KOORDINATOR : DIREKTORAT BENDUNGAN DAN DANAU															
PELAKSANA : 1. BBWS/BWS, BALAI TEKNIK BENDUNGAN															
2. DIREKTORAT BENDUNGAN DAN DANAU															
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya layanan tampungan air															
1		Jumlah tampungan air yang dibangun	Unit	46	39	31	24	29	70						
2		Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan dimanfaatkan	Unit	8	8	10	10	15	15						
3		Jumlah tampungan air berpotensi listrik yang dibangun	Unit	2	5	5	5	5	22						
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya layanan pembinaan bidang bendungan, danau, bangunan tampungan lainnya															
1		Tingkat pencapaian target kumulatif kapasitas tampung bangunan penampung air	%	87%	91%	95%	98%	100%	100%						
2		Tingkat pencapaian target tampungan air alami prioritas yang direvitalisasi dan dimanfaatkan	%	53%	53%	67%	67%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya layanan teknis bidang bendungan															
1	Jumlah layanan teknis keamanan bendungan yang diselenggarakan		Layanan	1	1	1	1	1	1						
2	Jumlah bimbingan teknis dan penyebarluasan informasi (diseminasi) keamanan bendungan yang diselenggarakan		Dokumen	11	11	8	4	6	40						
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan dan bangunan penampung air lainnya yang disusun														
		Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan dan bangunan penampung air lainnya yang disusun	Dokumen	124	130	140	125	125	644	489,515	513,300	552,700	493,500	493,500	2,542,515
2	Bendungan lanjutan periode 2015-2019 yang dibangun														
		Jumlah bendungan yang dibangun	Bendungan	46 (46 lanjutan , 11 diantara nya selesai)	35 (35 lanjutan , 11 diantara nya selesai)	24 (24 lanjutan , 12 diantara nya selesai)	11 (11 lanjutan , 7 diantara nya selesai)	5 (5 lanjutan , 5 diantara nya selesai)	46 (46 lanjutan , 46 diantara nya selesai)	7,881,215	31,615,656	26,146,240	19,536,999	16,190,202	101,369,811
3	Bendungan baru yang dibangun														
		Jumlah bendungan yang dibangun	Bendungan	0	4 (4 baru)	7 (3 baru, 4 lanjutan)	13 (6 baru, 7 lanjutan)	24 (11 baru, 13 lanjutan)	24 (11 baru, 13 lanjutan)	4,950	79,050	375,971	866,883	1,485,081	2,811,936

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Bendungan yang direhabilitasi													
	Jumlah bendungan yang direhabilitasi	Bendungan	2	1	1	1		5	74,253	308,582	308,582	308,582		1,000,000
5	Tampungan air alami yang direvitalisasi													
	Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi	Unit	5	12	12	12	10	51	243,669	1,084,083	1,084,083	1,084,083	1,084,083	4,580,000
6	Tampungan air alami yang dimanfaatkan													
	Jumlah tampungan air alami yang dimanfaatkan	Unit		1	1	1	1	4	-	500,000	500,000	500,000	500,000	2,000,000
7	Kawasan konservasi daerah tangkapan air bendungan yang dikembangkan													
	Jumlah kawasan konservasi daerah tangkapan air yang dikembangkan	Kawasan		12	15	15	13	55	-	210,000	310,000	460,000	410,000	1,390,000
8	Layanan pembinaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan													
	Jumlah BBWS/BWS yang dibina	BBWS/BWS	37	37	37	37	37	37	13,150	13,200	13,860	14,520	15,180	69,910
9	Layanan teknis bidang bendungan yang dilaksanakan													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	16,000
KEGIATAN 6 : PENGEMBANGAN JARINGAN AIR TANAH DAN AIR BAKU									3.655.939	5.076.800	5.668.640	6.232.280	6.672.720	27.306.379
KOORDINATOR : DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU														
PELAKSANA : 1. BBWS/BWS, BALAI AIR TANAH														
2. DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU														
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah panjang prasarana air baku yang dibangun	Km	398.34	500.00	500.00	500.00	600.00	2498.34						
2	Jumlah panjang jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun	Km	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	485.00						
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku														
1	Tingkat pencapaian target tambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku	%	8%	18%	24%	30%	20%	100%						
2	Jumlah penambahan kapasitas air baku yang bersumber dari bendungan	m ³ /detik	2.90	6.81	6.26	5.64	1.99	23.60						
3	Persentase BBWS/BWS yang melaksanakan konservasi air tanah dan air baku	%	0%	24%	47%	76%	100%	100%						
4	Jumlah penerapan sistem integrasi air permukaan dan air tanah untuk air baku yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS	WS	6	10	15	22	34	34						
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatkan layanan teknis bidang air tanah														
1	Persentase layanan advis teknis dan pendampingan bencana Terkait Air Tanah	%	n.a	100	100	100	100	100						
2	Persentase layanan Sistem Informasi Air Tanah dan Air Baku (SIATAB) serta Diseminasi	%	n.a	100	100	100	100	100						
3	Persentase layanan survey, investigasi, desain, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan sumur pantau di lokasi konstruksi/bangunan PUPR	%	n.a	100	100	100	100	100						
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Balai	nilai	n.a	A	A	A	A	A						
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku yang disusun													
	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup	Dokumen	82	100	110	125	115	532	112,461	137,200	150,900	171,500	157,800	729,861

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	untuk konstruksi air tanah dan air baku yang disusun													
2	Prasarana air tanah dan air baku komunal yang dibangun													
	Jumlah prasarana air tanah dan air baku komunal yang dibangun	Titik	358	400	450	550	550	2308	484,504	541,400	676,700	676,700	609,100	2,988,404
3	Prasarana air baku yang dibangun													
	Panjang prasarana air baku yang dibangun	Km	398	500	500	500	600	2498	1,427,511	2,194,700	2,593,800	3,093,000	3,692,100	13,001,111
4	Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang dibangun/ditingkatkan													
	Panjang jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun/ditingkatkan	Km	85	100	100	100	100	485	145,715	173,900	173,900	173,900	173,900	841,315
5	Prasarana air tanah dan air baku komunal yang direhabilitasi													
	Jumlah prasarana air baku komunal yang direhabilitasi	Titik	25	50	50	50	50	225	43,406	43,500	43,500	43,500	43,500	217,406
6	Prasarana air baku yang direhabilitasi													
	Panjang prasarana air baku yang direhabilitasi	Km	34.69	40	45	50	40	210	272,656	313,300	352,400	391,600	313,300	1,643,256
7	Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang direhabilitasi													
	Panjang jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang direhabilitasi	Km	85	100	100	100	100	485	66,333	76,800	80,800	84,800	84,800	393,533
8	Konservasi air tanah dan air baku yang dilaksanakan													
	Jumlah kegiatan konservasi air tanah dan air baku yang dilaksanakan	Unit		8	8	10	8	34	-	3,000	3,000	3,000	3,300	12,300
9	Cekungan air tanah yang dipantau													
	Jumlah cekungan air tanah yang dipantau	Titik		8	8	10	8	34	-	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10	Layanan pembinaan air tanah dan air baku yang dilaksanakan													
	Jumlah BBWS/BWS yang dibina	BBWS/BWS	37	37	37	37	37	37	12,800	12,800	13,440	14,080	14,720	67,840
11	Layanan teknis bidang air tanah yang dilaksanakan													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	16,000
12	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun													
	Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun	Unit	70	100	100	100	100	470	918,259	1,275,400	1,275,400	1,275,400	1,275,400	6,019,859
13	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi													
	Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi	unit	29	50	50	50	50	229	169,094	291,600	291,600	291,600	291,600	1,335,494
KEGIATAN 7 : OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA									4,939,630	5,023,319	5,081,824	5,141,929	5,206,633	25,393,337
KOORDINATOR : DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN			15											
PELAKSANA : 1. BBWS/BWS														
2. DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN														
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya kinerja layanan OP sarana prasarana SDA														
1	Persentase jumlah prasarana SDA yang di OP	%	50%	60%	70%	80%	90%	90%						
2	Indeks RBO Benchmarking BBWS/BWS	Indeks	3.15	3.20	3.25	3.30	3.35	3.35						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya layanan pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA														
1	Persentase pencapaian target layanan prasarana SDA	%	56%	67%	78%	89%	100%	100%						
2	Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen	%		9%	13%	19%	25%	25%						
3	Persentase perizinan bidang sumber daya air yang diproses	%	90%	92%	94%	96%	100%	100%						
4	Persentase pencapaian target indeks RBO Benchmarking yang dicapai	%	94%	96%	97%	99%	100%	100%						
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara													
	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	km	25,182	25,864	26,547	27,230	27,913	27,913	2,686,667	1,336,667	1,336,667	1,336,667	1,336,667	8,033,335
2	Unit pengelola irigasi yang difungsikan													
	Jumlah unit pengelola irigasi yang difungsikan	Unit	1	5	11	21	34	34	5,537	5,537	5,537	5,537	5,537	27,685
3	Bangunan pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara													
	Panjang bangunan pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara	Km	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	255,461	255,461	255,461	255,461	255,461	1,277,305
4	Bangunan pendukung pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara													
	Jumlah bangunan pendukung pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	50	50	50	50	50	50	22,944	22,944	22,944	22,944	22,944	114,720
5	Bangunan pengendali lahar dan pengendali sedimen yang dipelihara													
	Jumlah bangunan pengendali lahar dan pengendali sedimen yang dipelihara	Unit	544	544	544	544	544	544	51,376	51,376	51,376	51,376	51,376	256,880

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6	Bangunan pengaman pantai yang dipelihara													
	Panjang bangunan pengaman pantai yang dipelihara	Km	150	150	150	150	150	150	82,941	82,941	82,941	82,941	82,941	414,705
7	Sumber air alami yang dipelihara													
	Jumlah sumber air alami yang dipelihara	Lokasi	200	200	200	200	200	200	480,845	480,845	480,845	480,845	480,845	2,404,225
8	Tampungan air yang dioperasikan dan dipelihara													
	Jumlah tampungan air yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	1290	1290	1290	1290	1290	1290	445,066	445,066	445,066	445,066	445,066	2,225,330
9	Unit pengelola bendungan yang difungsikan													
	Jumlah unit pengelola bendungan yang difungsikan	Unit	10	16	23	30	34	34	8,982	35,255	35,255	35,255	35,255	150,002
10	Jaringan Irigasi Air Tanah yang dioperasikan dan dipelihara													
	Panjang jaringan Irigasi Air Tanah yang dioperasikan dan dipelihara	Km	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595	72,907	72,907	72,907	72,907	72,907	364,535
11	Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara													
	Jumlah unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	440	440	440	440	440	440	112,657	112,657	112,657	112,657	112,657	563,285
12	Alokasi air yang disusun													
	Jumlah alokasi air yang disusun	Dokumen	5	10	18	26	34	34	18,321	18,321	18,321	18,321	18,321	91,605
13	Kegiatan tanggap darurat akibat bencana yang difasilitasi													
	Jumlah kegiatan tanggap darurat akibat bencana	Kegiatan	68	68	68	68	68	68	33,641	33,641	33,641	33,641	33,641	168,205
14	Peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	340	340	340	340	340	340	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	245,000
15	Kegiatan infrastruktur partisipatif yang dilaksanakan													
	Jumlah kegiatan infrastruktur partisipatif yang dilaksanakan	Lokasi	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	5,406,000
16	Kelembagaan pengelolaan SDA yang difungsikan													
	Jumlah lembaga pengelolaan SDA yang difungsikan	Lembaga	3	6	9	12	15	15	59,246	80,000	95,000	110,000	128,214	472,460
17	Pemantauan pemanfaatan SDA yang dilaksanakan													
	Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan SDA	Dokumen	34	34	34	34	34	34	0	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
18	Dukungan modernisasi daerah irigasi yang dilaksanakan													
	Jumlah Daerah Irigasi yang melaksanakan dukungan modernisasi irigasi	DI	0	2	4	7	9	9	0	23,500	23,500	23,500	23,500	94,000
19	Layanan pembinaan operasi dan pemeliharaan, kelembagaan, dan pemanfaatan SDA yang dilaksanakan													
	Jumlah BBWS/BWS yang dibina	BBWS/BWS	37	37	37	37	37	37	47,330	47,400	49,770	52,140	54,510	251,150
20	Penyediaan peralatan pendukung OP yang difasilitasi													
	Jumlah alat pendukung OP yang difasilitasi	Alat	67	70	75	80	85	377	200,000	209,000	235,095	262,790	291,870	1,198,755
21	Layanan tanggap darurat akibat bencana yang difasilitasi													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	300,707	300,800	315,840	330,880	345,920	1,594,147

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 8 : PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO									256,131	282,477	287,580	292,878	298,392	1,417,458
KOORDINATOR : PUSAT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO														
PELAKSANA : PUSAT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO														
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo														
1	Jumlah panjang tanggul penahan lumpur Sidoarjo yang direhabilitasi atau ditingkatkan	Km	2	2	2	2	1	9						
2	Jumlah volume luapan lumpur yang dialirkan ke Kali Porong	Juta m ³	31	31	40	40	25	25						
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya pembinaan layanan pengendalian lumpur Sidoarjo														
1	Persentase pencapaian target pengendalian lumpur sidoarjo	%	78	78	100	100	100	100						
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk pengendalian lumpur Sidoarjo yang disusun													
	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk pengendalian lumpur Sidoarjo yang disusun	Dokumen		1	1	1	1	4		10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
2	Sarana prasarana pengendali lumpur yang dibangun/ditingkatkan													
	Panjang sarana prasarana pengendali lumpur yang dibangun/ditingkatkan	Km	2	2	2	2	1	9	62,832	62,900	66,045	69,190	72,335	333,302
3	Sarana prasarana pengendali lumpur yang dioperasikan dan dipelihara													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jumlah layanan sarana prasarana pengendali lumpur yang dioperasikan dan dipelihara	Layanan	1	1	1	1	1	1	175,744	189,000	189,000	189,000	189,000	931,744
	4	Dampak semburan lumpur yang ditangani													
		Jumlah kegiatan penanganan dampak semburan lumpur	Kegiatan		5	5	5	5	20	14,880	16,974	18,571	20,329	22,261	93,015
	5	Layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo													
		Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	2,675	3,603	3,963	4,360	4,796	19,397
KEGIATAN 9 : LAYANAN TEKNIS SDA										63,200	98,950	98,950	98,950	98,950	459,000
PELAKSANA : 1. DIREKTORAT BINA TEKNIK SUMBER DAYA AIR															
2. BBWS/BWS, BALAI TEKNIK SABO, BALAI HIDROLIKA DAN GEOTEKNIK KEAIRAN, BALAI HIDROLOGI DAN LINGKUNGAN KEAIRAN															
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kesiapan teknis infrastruktur SDA															
1	Jumlah laporan hidrologi yang diintegrasikan pada SIH3		Laporan	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	170.00						
2	Tingkat nilai layanan SISDA Unit Pelaksana Teknis (UPT)		Nilai	4.00	4.30	4.60	4.90	5.00	5.00						
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya pembinaan layanan teknis bidang SDA															
1	Persentase pencapaian target layanan SISDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air		%	80%	86%	92%	98%	100%	100%						
2	Persentase layanan teknis bidang SDA		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya layanan teknis bidang sabo															
1	Jumlah layanan advis/pendampingan teknis bidang sabo yang dilaksanakan		Layanan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
2	Jumlah layanan sistem informasi dan basis data bidang sabo yang dilaksanakan		Layanan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Jumlah layanan pengujian mekanisme tanah, beton, dan hidrolika yang dilaksanakan	Layanan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatkan layanan teknis bidang hidrolika dan geoteknik keairan														
1	Jumlah layanan advis/pendampingan teknis bidang hidrolika dan geoteknik yang dilaksanakan	Layanan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
2	Jumlah layanan uji model fisik hidrolik yang dilaksanakan	Layanan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
3	Jumlah layanan laboratorium mektan dan batuan yang dilaksanakan	Layanan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatkan layanan teknis bidang hidrologi dan lingkungan keairan														
1	Jumlah layanan advis/pendampingan teknis bidang hidrologi dan lingkungan keairan yang dilaksanakan	Layanan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
2	Jumlah layanan sistem informasi dan basis data bidang hidrologi dan lingkungan keairan yang dilaksanakan	Layanan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan data dan sistem informasi yang dikelola													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	200,000
2	Layanan hidrologi, kualitas air, dan lingkungan SDA yang dikelola													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000
3	Flood Forecasting & Warning System (FFWS) yang dibangun/ditingkatkan													
	Jumlah Flood Forecasting & Warning System (FFWS) yang dibangun/ditingkatkan	Unit	0	5	10	10	10	35	-	35,750	35,750	35,750	35,750	143,000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	NSPK bidang sumber daya air yang disusun													
	Jumlah N/S/P/K yang disusun	N/S/P/K	10	10	10	10	10	50	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
5	Pembinaan layanan teknis bidang Sumber Daya Air													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000
6	Pembinaan pengelolaan SISDA, hidrologi, kualitas air, dan lingkungan SDA yang dilaksanakan													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
7	Pembinaan pengelolaan jabatan fungsional dan fasilitasi pengembangan profesi bidang SDA													
	Jumlah layanan pembinaan pengelolaan jabatan fungsional dan fasilitasi pengembangan profesi bidang SDA	Layanan	1	1	1	1	1	1	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
8	Layanan teknis bidang sabo, hidrolika, geoteknik, hidrologi dan lingkungan keairan yang dilaksanakan													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	16,000
KEGIATAN 10: KEPATUHAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR									8,681,213	31,337	34,472	37,918	41,710	8,826,650
PELAKSANA : 1. DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN														
2. BBWS/BWS														
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Sumber Daya Air														
1	Nilai tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko	Nilai	-	70	72	73	74	74						
OUTPUT KEGIATAN :														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	SPK pembinaan dan pengendalian internal yang disusun													
	Jumlah S/P/K yang disusun	S/P/K	5	5	5	5	5	25	2,864,800	10,341	11,376	12,513	13,764	2,912,794
2	Pembinaan layanan pengembangan dan pengendalian manajemen resiko yang dilaksanakan													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	5,816,413	20,996	23,096	25,405	27,946	5,913,856
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR		%	72,39	75,61	77,97	84,50	87,81	87,81	2,375,975	2,490,000	2,581,504	2,619,783	2,772,747	12,840,010
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya		%	55,92	63,35	71,54	90,44	94,58	94,58	2,375,975	2,490,000	2,581,504	2,619,783	2,772,747	12,840,010
KEGIATAN 1 : DUKUNGAN MANAJEMEN DITJEN SUMBER DAYA AIR									2,375,975	2,490,000	2,581,504	2,619,783	2,772,747	12,840,010
KOORDINATOR : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SDA														
PELAKSANA : 1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SDA dan Seluruh UKE 2														
2. BBWS/BWS														
3. BALAI TEKNIK SDA														
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Sumber Daya Air														
1	Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan ketatausahaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	n.a	100%	100%	100%	100%	100%						-
3	Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai	Nilai	100	100	100	100	100	100						-
4	Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran	Nilai IKPA	91	92	93	94	95	95						
5	Tingkat layanan komunikasi publik	Nilai	100	100	100	100	100	100						
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Pelaksana Teknis														
1	Tingkat kualitas pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
2	Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
3	Tingkat kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan administrasi kebencanaan yang dilaksanakan													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
2	Layanan dukungan manajemen Eselon I													
	Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I	Layanan	4	4	4	4	4	4	37,386	54,400	56,120	57,840	59,560	265,306
3	Layanan sarana dan prasarana internal													
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	139,729	150,899	151,143	151,398	151,664	744,834
4	Layanan dukungan manajemen Satker													

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah layanan dukungan manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	1	726,347	752,877	768,569	729,753	804,268	3,781,814
	5		Layanan perkantoran													
			Jumlah layanan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	1,471,513	1,530,824	1,604,671	1,679,792	1,756,255	8,043,056

2. Direktorat Jenderal Bina Marga

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA									40.120.999	56.230.775	60.940.505	83.247.434	63.638.594	304.178.298
PROGRAM : INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS														
SASARAN STRATEGIS (SS) : Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional														
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) : Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)	Jam/100Km	2,21	2,19	2,09	2,08	1,90	1,90	37.225.702	53.122.807	57.588.640	80.817.008	61.206.086	252.734.533
SASARAN PROGRAM (SP) : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) :														
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)	%	81,8	82,8	84,6	83,75	83,95	83,95						
2	Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)	Nilai	2.70	2.63	2.61	2.57	2.50	2.50						
3	Rating keselamatan jalan nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik blackspot per populasi)	Nilai	3,51	3,14	2,95	2,89	2,82	2,82						
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional														
SASARAN KEGIATAN (SK 1): Peningkatan pelaksanaan preservasi dan tingkat kapasitas jalan														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK 1): Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	%	100	100	100	100	100	100	35.585.708	50.314.333	55.497.069	79.788.641	58.505.192	279.690.943
KOORDINATOR: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
PELAKSANA: Balai Pelaksana Jalan														
	PARAMETER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1													
	1. Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	81,8	82,8	84,6	83,75	83,95	83,95						
	2. Rating kondisi jalan nasional	Nilai	2,7	2,75	2,61	2,57	2,50	2,50						
	3. Rating keselamatan jalan nasional	Nilai	3,512	3,14	2,95	2,89	2,82	2,82						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUA N	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	OUTPUT KEGIATAN 1:														
	Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional									2.010.673	2.151.420	2.302.020	2.773.554	2,635,582	11.562.856
	1.1. Jumlah dokumen perencanaan penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan	Dok	33	33	33	33	33	165							
	1,2. Jumlah dokumen pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan	Dok	33	33	33	33	33	165							
	1,3. Jumlah dokumen pengendalian sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan	Dok	26	26	26	26	26	130							
	Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan jalan nasional														
	2,1. Panjang jalan yang terpelihara	km	47.017	47.017	47.017	47.603	47.603	47.603	5.037.345	5.389.959	5.821.261	3.619.697	3.696.397	23.564.659	
	2,2. Panjang jalan yang ditingkatkan	km	6.717	11.910	5.520,40	7.276,28	2.501,90	33.926,23	14.918.260	18.357.710	19.362.880	30.636.108	14.068.460	97.343.419	
	2,3. Panjang jembatan yang terpelihara	meter	436.947	435.709	511.241,4	511.241,4	511.241,4	511.241,4	492.923	519.456	504.567	434.080	437.511	2.388.537	
	2,4. Panjang Jembatan yang ditingkatkan	meter	83.162	102.265	47.129	123.035,62	102.921,7	458.515,2	2.898.904	4.290.245	4.449.598	2.923.361	2.228.761	16.790.869	
	2,5. Panjang Jalan Strategis Lintas Utama Pulau yang dibangun	km	396	495,4	620,9	603,4	526,7	2.642,4	4.054.310	5.736.329	8.749.634	9.060.699	8.691.748	36.292.722	
	2,6. Panjang Jalan yang mendukung Kawasan Prioritas yang dibangun	km	46,5	68,6	52,8	50,2	35,1	253,2	765.082	1.221.018	589.677	799.850	691,850	4.067.477	
	2,7. Panjang Jalan Akses simpul transportasi yang (Pelabuhan, Bandara) yang dibangun	km	16,1	26,9	21,6	46,99	21,5	104,5	224.287	416.600	353.320	308.120	318.360	1.620.687	
	2,8. Panjang jalan bebas hambatan yang akan dibangun dengan dukungan pemerintah	km	4,71	7,83	30,4	31,02	20,64	94,6	596.352	4.422.396	4.422.396	7.454.910	4.544.841	21.440.895	
	2,9. Panjang Jembatan yang Dibangun	meter	7.354,19	3.374,9	5.090,2	10.881,36	5.109,31	31.809,96	3.976.705	1.859.960	3.049.190	3.743.359	3.155.567	15.784.781	
	2,10. Panjang Flyover dan Underpass yang dibangun	meter	2.815,00	8.948,9	8.705,9	141,66	472,66	21.083,6	610.867	2.693.240	2.636.526	750.902	193.741	6.885.276	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUA N	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
	2,11 Dukungan Jalan Daerah	km	0	250	250	3.155,93	2.956,07	6.612,00		3.256.000	3.256.000	17.594.394	17.842.372	41.948.767
KEGIATAN 2: Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol														
SASARAN KEGIATAN (SK 2): Pencapaian pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK2): Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan	%	100	100	100	100	100	100	789.073	849.708	10.387	61.864	61.702	1.772.734
KOORDINATOR: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
PELAKSANA: Badan Pengatur Jalan Tol														
	PARAMETER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2													
	1. Panjang Jalan Tol yang beroperasi	km	338,41	346,15	262,8	646,82	919,27	2513,45						
	OUTPUT KEGIATAN 2:													
	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol								9.073	9.708	10.387	61.864	61.702	152.734
	1 Jumlah Dokumen Kajian dan evaluasi Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol	Dok	1	1	1	1	1	5						
	2 Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyiapan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan Tol	Dok	1	1	1	1	1	5	*780,000	*840,000				
	3 Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol	Dok	1	1	1	1	1	5						
	4 Jumlah Laporan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	Laporan	12	12	12	12	12	60						
KEGIATAN 3: Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
SASARAN KEGIATAN (SK3): Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK3) :														
KOORDINATOR: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal														
	IKK3 .1 Tingkat layanan penanggulangan darurat akibat bencana	%	100	100	100	100	100	100	200.000	204.000	208.000	75.650	196.245	883.895
	Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.1													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUA N	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	1. Tingkat Penyaluran Bantuan Tanggap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100						
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan															
	Tingkat kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan	%	100	100	100	100	100	100	100	82.677	88.464	94.657	111.470	921.733	1.299.001
	Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.2														
	1. Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan jalan	%	95	95	95	95	95	95	95						
	2. Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP	Nilai	80	81	82	84	85	85	85						
PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Jalan															
	Tingkat pencapaian pembangunan jalan	%	100	100	100	100	100	100	100	28.121	30.089	32.196	48.183	18.853	157.443
	Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.3														
	1. Panjang jalan yang dibangun	km	458,6	590,9	672,0	428,66	583,3	3,000.1							
	2. Panjang jalan yang dilebarkan (14 m)	km	38	49,4	39,1	14,34	66,9	246,7							
PELAKSANA: Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I															
	Tingkat pencapaian kualitas kondisi jalan dan jembatan wilayah 1	%	100	100	100	100	100	100	100	29.978	32.076	34.321	13.858	16.297	126.530
	Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.4														
	1. Rating kondisi jalan		2,73	2,64	2,61	2,50	2,49	2,49							
	2. Presentase jembatan dalam kondisi baik	%	90	94	96	97,0	99,0	99,0							
PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Jembatan															
	Tingkat pencapaian pembangunan jembatan	%	100	100	100	100	100	100	100	27.606	37.606	39.500	171.485	821.190	1.097.387
	Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.5														
	1. Panjang jembatan yang dibangun	m	18.624,3	3.374,9	5.090,2	10.881,36	5.109,31	43080,07							
	2. Panjang Fly Over/Underpass Terbangun	M	2.815,00	8.948,90	8.705,90	141,66	472,14	21.083,60							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUA N	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
PELAKSANA: Direktorat Jalan Bebas Hambatan															
	IKK3 .6	Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan	%	100	100	100	100	100	100	381.704	1.457.935	1.555.612	355.836	504.653	4.255.740
		Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.6													
		1. Panjang Jalan Tol yang beroperasi	km	338,41	346,15	262,8	646.82	919.27	2.513,45						
PELAKSANA: Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II															
	IKK3 .7	Tingkat pencapaian kualitas kondisi jalan dan jembatan wilayah 2	%	100	100	100	100	100	100	32.043	34.986	38.136	14.598	15.262	135.025
		Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.7													
		1. Rating kondisi jalan		2,65	2,63	2,62	2,62	2,51	2,51						
		2. Presentase jembatan dalam kondisi baik	%	82	90	92	95.0	98.0	98.0						
PELAKSANA: Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan															
	IKK3 .8	Tingkat kualitas layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	100	100	100	100	100	100	35.222	37.688	40.326	135.053	105.615	353.904
		Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.8													
		1. NSPK bidang Jalan dan Jembatan yang diterbitkan	Jumlah	10	10	10	10	10	10	50					
		2. Pencapaian rating keselamatan jalan	Nilai	3,5	3,1	3	2,9	2,8	2,8						
		3. Tingkat kualitas data dan sistem informasi jalan dan jembatan	%	100	100	100	100	100	100	100					
		- Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral													
		- Indeks SPBE													
		- Tingkat Penerapan Transformasi Digital													
		4. Tingkat fasilitasi layanan peningkatan kompetensi fungsional	%	100	100	100	100	100	100						
PELAKSANA: Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan															
	IKK3 .9	Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	100	100	100	100	100	100	18.565	19.864	21.255	28.452	28.748	116.884
		Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.9													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUA N	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	1. Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Jumlah	4	4	4	4	4	20							
	2. Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	%	100	100	100	100	100	100							
PELAKSANA: Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan															
	Tingkat kepatuhan intern dalam penyelenggaraan jalan	%	100	100	100	100	100	100	15.000	16.050	17.173	11.918	10.596	70.737	
	Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.10														
	1. Presentase NSPK pembinaan dan pengendalian kepatuhan intern yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100							
	2. Tingkat fasilitasi penyusunan dokumen SPIP	Jumlah	30	30	30	30	30	30							
	3. Tingkat pelayanan penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100							
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal															
	OUTPUT KEGIATAN 3:														
	OUTPUT KEGIATAN 3.1:														
	Penanggulangan Darurat Akibat Bencana														
	1 Jumlah bantuan tanggap darurat kebutuhan mendesak yang disalurkan	Dok	12	12	12	12	12	60							
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan															
	OUTPUT KEGIATAN 3.2:														
	Pengaturan dan pembinaan sistem dan strategi penyelenggaraan jalan dan jembatan														
	1 Jumlah Dokumen Keterpaduan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	Dok	1	1	1	1	1	5							
	2 Jumlah Dokumen Penyusunan Strategi, Program, dan Anggaran	Dok	1	1	1	1	1	5							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUA N	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	3	Jumlah Dokumen Pembinaan Jalan Daerah	Dok	1	1	1	1	1	5						
	4	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	Dok	1	1	1	1	1	5						
	5	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dok	1	1	1	1	1	5						
	2	Pengelolaan Pengendalian Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri													
	1	Layanan pengendalian pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri	Layanan	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Jalan															
		OUTPUT KEGIATAN 3.3:													
		Pengaturan dan pembinaan pembangunan jalan													
	1	Jumlah Dokumen Pembinaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Dok	1	1	1	1	1	5						
	2	Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jalan Wilayah I	Dok	1	1	1	1	1	5						
	3	Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jalan Wilayah II	Dok	1	1	1	1	1	5						
	4	Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jalan Wilayah III	Dok	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I															
		OUTPUT KEGIATAN 3.4:													
		Pengaturan dan pembinaan preservasi jalan dan jembatan wilayah I													
	1	Jumlah Dokumen Pembinaan Perencanaan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Dok	1	1	1	1	1	5						
	2	Jumlah Dokumen Pembinaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I.A	Dok	1	1	1	1	1	5						
	3	Jumlah Dokumen Pembinaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I.B	Dok	1	1	1	1	1	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUA N	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	4	Jumlah Dokumen Pembinaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I.C	Dok	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Jembatan															
		OUTPUT KEGIATAN 3.5:													
		Pengaturan dan pembinaan pembangunan jembatan													
	1	1	Jumlah Dokumen Pembinaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	Dok	1	1	1	1	5						
	1	2	Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jembatan Wilayah I	Dok	1	1	1	1	5						
	1	3	Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jembatan Wilayah II	Dok	1	1	1	1	5						
	1	4	Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jembatan Wilayah III	Dok	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Direktorat Jalan Bebas Hambatan															
		OUTPUT KEGIATAN 3.6:													
		Pembinaan Teknik Penyelenggaraan jalan bebas hambatan								48.154	51.525	55.132	51.346	31.616	237.773
	1	1	Jumlah Dokumen Pembinaan Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan	Dok	1	1	1	1	5						
	1	2	Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	Dok	1	1	1	1	5						
	1	3	Jumlah Dokumen Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Jalan Bebas Hambatan	Dok	1	1	1	1	5						
	2		Layanan Pengadaan Tanah							333.550	1.406.410	1.500.480	304.489	473.037	4.017.966
	2	1	Jumlah Hektar Pembebasan Tanah	Ha	13	43	43	43	185						
	2	2	Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah	Dok	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II															
		OUTPUT KEGIATAN 3.7:													
	1	Pengaturan dan pembinaan preservasi jalan dan jembatan wilayah II													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUA N	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	1	Jumlah Dokumen Pembinaan Perencanaan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Dok	1	1	1	1	1	5						
	2	Jumlah Dokumen Pembinaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II.A	Dok	1	1	1	1	1	5						
	3	Jumlah Dokumen Pembinaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II.B	Dok	1	1	1	1	1	5						
	4	Jumlah Dokumen Pembinaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II.C	Dok	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan															
		OUTPUT KEGIATAN 3.8:													
		Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan													
	1	Jumlah Dokumen pelaksanaan pengelolaan aset dan laboratorium jalan dan jembatan	Dok	1	1	1	1	1	5						
	2	Jumlah Dokumen penyusunan dan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria	Dok	1	1	1	1	1	5						
	3	Jumlah dokumen pelaksanaan keselamatan dan keamanan jalan dan jembatan	Dok	1	1	1	1	1	5						
	4	Jumlah dokumen pengaturan data dan pengembangan sistem informasi jalan dan jembatan	Dok	1	1	1	1	1	5						
	5	Jumlah dokumen pengembangan keahlian dan profesi dan pengelolaan jabatan fungsional	Dok	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan															
		OUTPUT KEGIATAN 3.9:													
	1	Layanan keteknikan bidan jalan dan jembatan													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUA N	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	1	Jumlah dokumen pengembangan teknologi bidang Jalan dan Jembatan	Dok	4	4	4	4	4	20						
	2	Jumlah dokumen layanan pengujian laboratorium dan advis teknik bidang jalan dan jembatan	Dok	4	4	4	4	4	20						
PELAKSANA: Direktorat Kepatuhan Internal															
OUTPUT KEGIATAN 3.10:															
Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, perencanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengendalian kepatuhan internal															
	1	Jumlah dokumen penyusunan dan pembinaan teknis pelaksanaan NSPK pembinaan dan pengendalian kepatuhan internal	Dok	1	1	1	1	1	5						
	2	Jumlah dokumen pembinaan dan pengendalian kepatuhan internal	Dok	1	1	1	1	1	5						
	3	Jumlah dokumen pemantauan dan pengendalian kepatuhan internal	Dok	1	1	1	1	1	5						
	4	Jumlah dokumen pelaporan pembinaan dan pengendalian kepatuhan internal	Laporan	12	12	12	12	12	60						
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN															
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya															
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR		%	72,39	75,61	77,97	84,50	87,81	87,81						
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya															
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya		%	55,92	63,35	71,54	90,44	94,58	94,58						
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga															
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan															
										2.895.296	3.107.968	3.351.864	2.370.430	2.391.431	14.116.989
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUA N	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Nilai SAKIP (masuk ke Dit SSPJJ program konektivitas)														
	1 Tingkat pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN & Umum	%	98,69	99,3	98,58	99,80	100	100							
	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (Tingkat pengelolaan Keuangan)	Nilai	93,7	94,3	94,6	94,08	95	95							
	Tingkat Kualitas Layanan Perbendaharaan dan PNBP (Indikator Berupa Ketepatan Waktu Penyampaian Proposal PNBP)	%	100	100	100	100	100	100							
	Tingkat Kualitas Laporan Keuangan (Opini tingkat Kementerian, indikator berupa ketepatan waktu penyampaian laporan)	%	100	100	100	100	100	100							
	Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP (hanya ada di Kementerian, di tingkat unor: Penilaian Mandiri Maturitas SPIP). Jika dimasukkan, masuk IKK Kepegawaian	Nilai	n.a.	n.a.	3,75	4	4	4							
	2 Tingkat fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum	jumlah	2	8	7	2	3	22							
	Tingkat layanan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100							
	Tingkat efektifitas penyelesaian produk hukum	%	100	100	100	100	100	100							
	Tingkat efektifitas advokasi hukum	%	100	100	100	100	100	100							
	Jumlah laporan layanan komunikasi publik														
	Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat SP4N LAPOR	%	70	72	73	74	100	100							
	Tingkat Persepsi/sentimen positif dan netral pemberitaan di media massa	%	65	67	69	71	72	72							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUA N	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total		
	3	Persentase Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara	%	100	100	100	100	100	100							
		Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Negara														
		Tingkat Efektifitas Pengelolaan BMN (Penatausahaan, Pemanfaatn, dan Penertiban)														
	4	Persentase Tingkat Pelayanan Kepegawaian DJBM	%	100	100	100	100	100	100							
		Jumlah laporan kepegawaian dan umum														
		Kualitas Layanan Manajemen SDM (Ditjen BM dapat mengeluarkan angka di tahun 2022-2023-2024)	%	n.a.	n.a.	n.a.	83	86	86							
		Tingkat Kesesuaian Kelembagaan (Ditjen BM dapat mengeluarkan angka di tahun 2022-2023-2024)	%	n.a.	n.a.	n.a.	84	85	85							
		Tingkat Maturitas SPIP (hanya ada di Kementerian, di tingkat unor: Penilaian Mandiri Maturitas SPIP)														
		Tingkat Digitalisasi Arsip (DPSI)														
KOORDINATOR : Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga																
PELAKSANA: Balai Pelaksana Jalan																
	OUTPUT KEGIATAN :										2.377.989	2.544.449	2.722.560	1.209.607	3.117.059	11.971.664
	1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														-
	1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1								-
	2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														-
	1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1								-
	3	Layanan Perkantoran														-
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1								-

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR			SATUA N	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)					
					2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan															
	OUTPUT KEGIATAN :									45.339	48.513	51.909	55.543	59.431	260.735
	1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													-
	1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1							-
	2	Layanan Dukungan Manajemen Satker													-
	1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1							-
	3	Layanan Perkantoran													-
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1							-
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal															
	OUTPUT KEGIATAN :									206.750	231.223	173.747	281.945	945.550	1.839.215
	1	Layanan dukungan manajemen Eselon 1													-
	1	Jumlah laporan kepegawaian dan umum	Layanan	1	1	1	1	1							-
	2	Jumlah laporan keuangan													-
	3	Jumlah dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum	Layanan	1	1	1	1	1							-
	4	Jumlah laporan layanan komunikasi publik													-
	5	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Negara													-
	2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1						-

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUA N	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)							
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total		
	1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal														-
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1									-
	1	Jumlah Layanan Perkantoran														-
PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Jalan																
OUTPUT KEGIATAN :											24.019	25.701	27.500	7.100	31.485	115.805
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal															-
	1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1								-
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker															-
	1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1								-
3	Layanan Perkantoran															-
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1								-
PELAKSANA: Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I																
OUTPUT KEGIATAN :											10.429	11.157	11.940	6.482	13.670	53.678
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal															-
	1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1								-
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker															-
	1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1								-
3	Layanan Perkantoran															-

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUA N	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1							-
PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Jembatan															
	OUTPUT KEGIATAN :									21.230	22.716	24.306	16.669	27.828	112.749
	1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													-
	1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1							-
	2	Layanan Dukungan Manajemen Satker													-
	1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1							-
	3	Layanan Perkantoran													-
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1							-
PELAKSANA: Direktorat Jalan Bebas Hambatan															
	OUTPUT KEGIATAN :									61.160	65.441	70.022	77.864	80.169	354.656
	1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													-
	1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1							-
	2	Layanan Dukungan Manajemen Satker													-
	1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1							-
	3	Layanan Perkantoran													-
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1							-
PELAKSANA: Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUA N	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	OUTPUT KEGIATAN :									14.601	15.623	16.716	5.684	19.139	71.763
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														-
	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1								-
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														-
	1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1								-
3	Layanan Perkantoran														-
	1 Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1								-
PELAKSANA: Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan															-
	OUTPUT KEGIATAN :									42.022	44.963	48.111	48.752	55.082	238.930
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														-
	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1								-
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														-
	1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1								-
3	Layanan Perkantoran														-
	1 Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1								-
PELAKSANA: Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan															-
	OUTPUT KEGIATAN :									27.874	29.826	31.913	15.410	36.538	141.561
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														-

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUA N	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)							
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total		
	1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1								-
	2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														-
	1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1								-
	3	Layanan Perkantoran														-
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1								-
PELAKSANA: Direktorat Kepatuhan Internal																-
	OUTPUT KEGIATAN :									5.000	5.350	5.724	7.166	6.554	29.794	
	1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														-
	1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1								-
	2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														-
	1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1								-
	3	Layanan Perkantoran														-
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1								-
PELAKSANA: Badan Pengatur Jalan Tol																-
	OUTPUT KEGIATAN :									58.879	63.000	67.410	15.451	77.178	281.918	
	1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														-
	1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1								-
	2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														-

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUA N	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1							-
	3	Layanan Perkantoran													-
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1							-

3. Direktorat Jenderal Cipta Karya

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA															
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau															
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau															
1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	%	47,00	60,29	70,08	80,07	89,17	98,57	98,57	22.009.965	31.334.951	26.107.819	8.705.122	24.117.392	122.275.250
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman															
INDKATOR KINERJA PROGRAM: Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> ---- dihitung dari rerata gabungan indikator:															
1	Persentase rumah tangga dengan akses <i>air minum layak</i>	%	89,27 (JP: 20,18)	91,80 (JP: 23,60)	93,80 (JP: 25,40)	95,90 (JP: 27,10)	97,90 (JP: 28,90)	100 (JP: 30,40)	100 (JP: 30,40)						
2	Persentase rumah tangga dengan akses <i>air limbah domestik layak dan aman</i>	%	77,44	78,1	79,43	82,07	86,03	90	90						
			Akses Layak (Termas uk 7,5%	Akses Layak (Terma suk 9,65%	Akses Layak (Terma suk 11%	Akses Layak (Termas uk 13%	Akses Layak (Termas uk 14%	Akses Layak (Terma suk 15%	Akses Layak (Terma suk 15%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Akses Aman)	Akses Aman)	Akses Aman)	Akses Aman)	Akses Aman)	Akses Aman)	Akses Aman)						
3	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan	%	60.64 (BPS 2016, diolah Bappenas)	76.62	79.21	84.41	92.21	100.00	100.00						
4	Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	%	1.62	17.35	41.15	64.41	82.03	100.00	100.00						
5	Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
6	Persentase inisiasi penerapan bangunan gedung hijau	%	0,00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00						
7	Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan kualitasnya	%	0,00	38,18	56,94	73,68	86,04	100,00	100.00						
KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG										7.729.038	8.090.086	7.039.657	7.241.763	11.855.105	41.955.649
SASARAN KEGIATAN 1.1: Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan permukiman										3.353.895	4.003.429	4.134.775	4.982.363	2.851.016	19.325.478
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan permukiman ---- dihitung dari rerata gabungan indikator:															
1	Persentase dokumen keterpaduan perencanaan kawasan permukiman	%	0	15	42	62	80.77	100	100						
2	Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman	%	1.62	17.35	41.15	64.41	83.29 (ditambah 245.32 Direktif)	100.00 (ditambah 269 direktif)	100.00 (ditambah 269 Direktif)						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
SASARAN KEGIATAN 1.2: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan										2,527,526	3,302,022	2,149,216	941.455	7.242.346	16.162.565	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan ---- dihitung dari rerata gabungan indikator:	%		60.00	70.00	80.00	89.25	97.50	97.50							
1	<i>Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal</i>	%	100	100	100	100	100	100	100							
2	<i>Persentase dukungan pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung</i>	%	0	20.00	40.00	60.00	80.00 (Ditambah 1452.26 direktif)	100.00 (Ditambah 1452.95 direktif)	100.00 (Ditambah 1452.95 direktif)							
3	<i>Persentase dukungan pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan</i>	%	0	20.00	40.00	60.00	77.00	90.00	90.00							
SASARAN KEGIATAN 1.3: Meningkatnya kualitas sarana prasarana olahraga dan pasar										1.847.617	784.635	755.666	1.317.945	1.761.743	6.467.606	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga dan pasar yang tertib dan andal --- dihitung dari rerata gabungan indikator:	%		50,74	66,67	79,26	83,20	100,00	100,00							
1	<i>Persentase sarana prasarana olahraga yang tertib dan andal</i>	%		90.00	100.00	100.00	71,43	100.00	100.00							
2	<i>Persentase sarana prasarana pasar yang tertib dan andal</i>	%		42.22	60.00	77.78	78,18	100.00	100.00							
3	<i>Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang tertib dan andal</i>	%		20,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00							
KOORDINATOR: DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN																

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														
	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman	Kab/Kota		509	509	509	509	509	509	101,837	106,929	112.275	242,778	90,247	654,066
2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman														
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman	Dok		8	14	10	6	10	48	32.000	56.000	40.000	13,740	20,000	161,740
3	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman														
	Luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Hektar		920	2.471	2.385	440	5,174	11,390	2,059,888	3.090.500	3.232.500	3,740,096	2,205,564	14,328,548
4	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat														
	Luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat	Hektar		1.813	1.280	1.280	1,410	1,410	7,193	1,160,170	750,000	750,000	985,749	535,205	4,181,124
PELAKSANA: DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan														
	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	Kab/Kota		509	509	509	509	509	509	216,049	236,048	236,048	50.432	55.743	794.320

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	bangunan gedung dan penataan bangunan														
2	Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara														
	Jumlah unit rumah negara yang mendapatkan pembinaan dan pengelolaan	Unit Rumah Negara		1.800	1.800	1.800	1.818	1.800	9.018	13,575	15,231	15,679	15.211	16.459	76.155
3	Pengembangan Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
	Luas pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung	M2		10.000	10.000	10.000	11.534	10.348	51.882	1,039,806	1,809,175	972,675	368.655	636.050	4.826.362
4	Pengembangan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan														
	Jumlah kawasan pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan		20	20	20	16	20	96	1,258,096	1,241,567	924,815	507.157	6.534.094	10.465.729
PELAKSANA: DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga														
	Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga	Gedung		9	1	0	30	16	56	260,717	28,969	-	776.724	600.706	1.667.116
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar														
	Jumlah pasar yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pasar	Pasar		19	8	8	8	12	55	1.581.900	750.666	750.666	520.718	1.161.037	4.764.987

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya Bidang Permukiman														
	Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana strategis lainnya Bidang Permukiman	Gedung		2	2	2	0	0	6	5.000	5.000	5.000	20.504	0	35.504
KEGIATAN 2: PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA PENDIDIKAN										4.418.000	3.498.411	2.887.474	3.068.637	3.149.607	17.022.128
SASARAN KEGIATAN 2.1: Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan										4.418.000	3.498.411	2.887.474	3.068.637	3.149.607	17.022.128
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang tertib dan andal --- <i>dihitung dari indikator:</i>	%		25,63	47,21	68,11	88,87	100,00	100,00						
1	<i>Persentase sarana prasarana pendidikan yang tertib dan andal</i>	%		25,63	47,21	68,11	88,87	100,00	100,00						
KOORDINATOR: DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS															
PELAKSANA: DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah														
	Jumlah sekolah yang mendapatkan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah	Sekolah		1.191	1.000	998	406	412	4007	2.487.441	2.088.532	2.084.532	1.058.558	1.246.728	8.965.791
2	Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Baru														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah baru	Sekolah		0	0	2	46	0	48	-	-	4.000	167.829	-	171.829
3	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan														
	Jumlah sekolah yang mendapatkan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan	Sekolah		171	150	128	75	90	614	379.880	333.228	284.798	607.477	444.378	2.049.762
4	Pembangunan Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan Baru														
	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan baru	Sekolah		0	0	2	0	0	2	-	-	4.000	-	-	4.000
5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri														
	Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi negeri	Gedung		33	30	15	52	34	164	874,317	794,834	397,417	1.183.294	1.329.145	4.579.006
6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri														
	Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi keagamaan islam negeri	Gedung		12	5	2	2	2	23	676,361	281,817	112,727	51.478	21.987	1.144.370

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya Bidang Pendidikan***														
	Jumlah Gedung yang Mendapatkan Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya Bidang Pendidikan	Gedung		N/A	N/A	N/A	N/A	3	3					107.369	107.369
KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN AIR MINUM YANG LAYAK										5,470,862	12,151,782	6,793,351	3,498,628	3,573,579	31,488,202
SASARAN KEGIATAN 3.1: Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan										5,470,862	12,151,782	6,793,351	3,498,628	3,573,579	31,488,202
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan---- dihitung dari indikator:	%		20,97	22,02	22,92	22,42	22,82	22,82						
1	<i>Persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan (JP)</i>	%	20,18	20,97	22,02	22,92	22,42	22,82	22,82						
KOORDINATOR: DIREKTORAT AIR MINUM															
PELAKSANA: DIREKTORAT AIR MINUM															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM														
	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kab/Kota		509	509	509	509	509	509	241,597	280,300	294,294	209,644	179,780	1,205,615
2	Pembangunan SPAM														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik		1.530	4.600	1.530	765	765	9.190	2,677,500	8,050,000	2,677,500	1,338,750	1,338,750	16,082,500
3	Peningkatan SPAM														
	Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik		75	375	375	187	188	1.199	90,000	449,600	449,600	224.700	224.900	1.438.800
4	Perluasan SPAM														
	Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan perluasan SPAM	SR		110.000	192.000	192.000	2.480	19.888	516.368	1,261,765	2,162,369	2,162,369	1,232,075	1,275,439	8,094,017
5	SPAM Berbasis Masyarakat														
	Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat	SR		400.000	400.000	400.000	170.080	189.256	1.559.336	1,200,000	1,200,000	1,200,000	486,211	544,111	4,630,322
6	Pembinaan Teknis Bidang Air Minum*														
	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan teknis bidang air minum	Orang		0	800	800	800	800	3,200	0	8,513	8,538	4,740	7,712	29,503
7	Fasilitasi Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Peralatan Bidang Air Minum*														
	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang air minum	Laporan		0	1	1	1	1	4	0	1,000	1,050	2,508	2,887	7,445
*) Target kinerja dan pendanaan pada TA 2020 berada di Sekretariat Direktorat Jenderal dan dialihkan pada Direktorat Air Minum sejak TA 2021. Belum diamanatkan dalam Tugas dan Fungsi Direktorat Air Minum sesuai Permen PUPR No. 13 Tahun 2020															
KEGIATAN 4: PENYELENGGARAAN SANITASI YANG LAYAK										2,946,892	6,005,185	7,688,319	3,769,354	3,806,915	24,216,668
SASARAN KEGIATAN 4.1: Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi										2,946,892	6,005,185	7,688,319	3,769,354	3,806,915	24,216,668

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi ---- dihitung pada masing-masing indikator:															
1	Persentase rumah tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak dan aman	%	77,44% Akses Layak (Termasuk 7,5% Akses Aman)	77,50 Akses Layak (Termasuk 7,88% Akses Aman)	77,57 Akses Layak (Termasuk 8,31% Akses Aman)	77,64 Akses Layak (Termasuk 8,77% Akses Aman)	78,25 Akses Layak (Termasuk 8,67% Akses Aman)	78,35 Akses Layak (Termasuk 8,68% Akses Aman)	78,35 Akses Layak (Termasuk 8,68% Akses Aman)						
2	Persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola (baik melalui penanganan maupun pengurangan) di perkotaan	%	60,64% (BPS 2016, diolah Bappenas)	63,20%	64,46%	65,96%	66,58%	66,97%	66,97%						
3	Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan	%	0	15%	35%	55%	45,40%	46,42%	46,42%						
KOORDINATOR: DIREKTORAT SANITASI															
PELAKSANA: DIREKTORAT SANITASI															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi														
	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi	Kab/Kota		509	509	509	509	509	509	464.704	487.940	512.337	172.003	165.160	1.802,144
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	KK		104.000	331.000	407.000	45.732	2.000	889.732	973.000	3.116.000	3.835.119	1.955,137	2,237,221	12,116,477
3	Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan														
	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK		2.625	3.500	3.500	100	100	9.825	48.563	64.750	64.750	8,214	8,214	194,492
4	Sistem Pengelolaan Persampahan														
	Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	KK		411.000	684.000	1.003.000	739.390	91.000	2.928.390	1.199.000	2.000.000	2.934.699	331,485	355,778	6,820,962
5	Sanitasi Berbasis Masyarakat														
	Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis masyarakat	KK		50.800	62.800	62.800	22.319	86.820	285.539	261.625	327.415	327.415	1,293,129	1,015,542	3,225,126
6	Pembinaan Teknis Bidang Sanitasi*														
	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan teknis bidang sanitasi	Orang		0	240	300	350	450	1.340	0	4.581	6.000	4,324	15,000	29,905
7	Fasilitasi Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Peralatan Bidang Sanitasi*														
	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang sanitasi	Laporan (2020- 2022) Layanan (2023- 2024)		0	18	27	1	1	45 / 1	0	4.500	8.000	5,062	10,000	27,562
*) Target kinerja dan pendanaan pada TA 2020 berada di Sekretariat Direktorat Jenderal dan dialihkan pada Direktorat Sanitasi sejak TA 2021. Belum diamanatkan dalam Tugas dan Fungsi Direktorat Sanitasi sesuai Permen PUPR No. 13 Tahun 2020															
KEGIATAN 5: PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN										149.922	227.885	228.653	211,337	639,818	1,457,613

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SASARAN KEGIATAN 5.1: Meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman										35.896	36.837	35.105	66,040	401,740	575,618
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman ---- dihitung dari rerata gabungan indikator:	%		73,33	80,00	86,67	85,16	86	86						
1	Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman	%		100	100	100	90	90	90						
2	Nilai kinerja anggaran	%		100	100	100	95,43	96	96						
3	Nilai realisasi penyiapan kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri	%		20	40	60	80	80	80						
4	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Cipta Karya	%		N/A	N/A	N/A	75,21	76,11	76,11						
SASARAN KEGIATAN 5.2: Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman										57,380	122,500	122,500	100,000	165,000	567,380
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase dukungan layanan kebencanaan bidang permukiman ---- dihitung dari indikator:	%		4,76	28,57	52,38	94,56	100	100,00						
1	Persentase dukungan layanan tanggap bencana bidang permukiman	%		4,76	28,57	52,38	94,56	100,00	100,00						
SASARAN KEGIATAN 5.3: Meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan infrastruktur permukiman										41.646	53.548	56.048	36,100	60,820	248,161
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan infrastruktur permukiman - -- dihitung dari rerata gabungan indikator:	%		39,63	54,72	70,28	91,68	100,00	100,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase NSPK bidang permukiman dan perumahan	%		19	39	61	80	100	100						
2	Persentase rekomendasi teknis keandalan bangunan gedung dan kawasan permukiman	%		20	40	60	80	100	100						
3	Persentase penyediaan data dan sistem informasi yang berkualitas	%		100	100	100	100	100	100						
4	Persentase dukungan pengembangan kompetensi dan kontribusi jabatan fungsional bidang permukiman	%		20	40	60	89	100	100						
SASARAN KEGIATAN 5.4: Meningkatnya kepatuhan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman										15,000	15,000	15,000	7,765	12,258	66,454
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman --- dihitung dari rerata gabungan indikator:	%		20.00	40.00	60.00	80.00	100	100						
1	Persentase pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman	%		20.00	40.00	60.00	80.00	100	100						
2	Persentase pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman	%		20.00	40.00	60.00	80.00	100	100						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko --- Dihitung dari hasil penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko	Nilai		N/A	N/A	N/A	73	75	75						
KOORDINATOR: DIREKTORAT BINA TEKNIK PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman														
	Jumlah laporan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman	Laporan		1	1	1	1	1	5	6,250	6,250	7,500	5,929	135,810	161,739
2	Program dan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Permukiman														
	Jumlah laporan program dan anggaran pembangunan infrastruktur permukiman	Laporan		1	1	1	1	1	5	6,250	6,250	7,500	36,175	177,160	233,335
3	Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Pembangunan Infrastruktur Permukiman														
	Jumlah laporan penyusunan program dan pengelolaan PHLN bidang pembangunan infrastruktur permukiman	Laporan		1	1	1	1	1	5	17,146	18,087	12,605	17,791	15,223	80,852
4	Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program, dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Permukiman														
	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan, kinerja program dan koordinasi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur permukiman	Laporan		2	2	2	2	2	10	6,250	6,250	7,500	6,145	73,547	99,692
PELAKSANA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak														
	Jumlah paket/laporan tanggap darurat/kebutuhan mendesak	Paket/Laporan		7	35	35	35	35	147	57,380	122,500	122,500	100,000	165,000	567,380
PELAKSANA: DIREKTORAT BINA TEKNIK PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Peraturan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman*														
	Jumlah NSPK penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	NSPK	15	10	11	12	6	11	50	9,913	11,048	11,048	6,700	9,947	48,655
2	Peningkatan Kompetensi Teknis dan Profesi Bidang Permukiman dan Perumahan														
	Jumlah laporan pengembangan profesi bidang permukiman dan perumahan	Laporan	0	2	2	2	2	2	10	4,500	5,000	5,500	9,000	6,588	30,588
3	Fasilitas Keandalan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman														
	Jumlah rekomendasi teknis keandalan bangunan gedung dan kawasan permukiman	Rekomen dasi Teknis	0	40	40	40	55	40	215	6,233	9,000	9,500	2,500	10,900	38,133
4	Fasilitas Pengembangan Teknologi Dan Pengelolaan Peralatan Infrastruktur Permukiman Dan Perumahan														
	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan infrastruktur Permukiman dan Perumahan	Laporan	0	5	5	5	5	5	25	4,000	4,000	4,500	6,200	5,445	24,145

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Infrastruktur Permukiman **														
	Jumlah laporan pengolahan data dan pengembangan sistem informasi	Laporan	0	3	4	4	4	4	19	2,000	5,000	5,500	5,000	6,650	24,150
6	Bimbingan Teknik Bidang Permukiman dan Perumahan														
	Jumlah bimbingan teknik bidang permukiman dan perumahan	Angkatan	0	9	9	9	9	9	45	6,000	9,500	10,000	2,500	11,390	39,390
7	Penyelenggaraan Habitat**														
	Jumlah laporan penyelenggaraan habitat	Laporan	0	1	1	1	1	1	5	9.000	10.000	10.000	4,200	9,900	43,100
*) Pendanaan pada TA 2020 berada di direktorat sektor dan dialihkan pada Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan sejak TA 2021 sesuai dengan tugas, fungsi, dan penugasan unit kerja terkait.															
**) Pendanaan pada TA 2020 berada di Dit. SSPIP dan dialihkan pada Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan sejak TA 2021 sesuai dengan tugas, fungsi, dan penugasan unit kerja terkait.															
PELAKSANA: DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pembinaan Teknis Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman														
	Jumlah laporan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko penyelenggaraan infrastruktur permukiman	Laporan		1	1	1	1	1	5	7,500	7,500	7,500	3,710	6,531	33,741
2	Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman														
	Jumlah laporan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko penyelenggaraan infrastruktur permukiman	Laporan		1	1	1	1	1	5	7,500	7,500	7,500	4,055	5,727	32,282

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN															
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya															
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR			72,39	75,61	77,97	84,50	87,81	87,81						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya															
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%		55,92	63,35	71,54	90,44	94,58	94,58						
KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan infrastruktur permukiman															
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	%													
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	%		90	90	90	90	90	90						
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%		100	100	100	100	100	100						
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Pengadministrasian Pegawai	%		87,50	87,60	87,70	87,80	87,90	87,90						
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%		100	100	100	91	91	91						
5	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%		N/A	N/A	N/A	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KOORDINATOR: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA															
										1,000,998	1,044,626	1,122,652	693,786	735,954	4,598,016
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pembinaan Teknis Bidang Cipta Karya														
	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan teknis bidang cipta karya	Orang		5.261	4.380	4.480	2.752	2.752	19.625	60,749	49,204	50,327	13,091	13,091	186,462
2	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I														
	Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I	Layanan		1	1	1	1	1	5	11,897	12,135	12,377	48,830	57,492	142,730
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	37,807	37,333	39,200	32,907	66,413	213,659
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker	Layanan		1	1	1	1	1	5	377,179	396,038	415,840	62,635	62,635	1,314,328
5	Layanan Perkantoran														
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	513,366	549,917	604,908	536,323	536,323	2,740,837
PELAKSANA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN										28,652	31,358	34,327	22,453	22,450	139,239
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	1,523	1,599	1,679	1,298	1,298	7,397
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker	Layanan		1	1	1	1	1	5	1,650	1,733	1,819	1,000	1,000	7,202
3	Layanan Perkantoran														
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	25,478	28,026	30,829	20,155	20,152	124,640
PELAKSANA: DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN										53,073	24,573	25,801	28,258	33,910	165,615
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	1,564	1,564	1,642	1,000	1,200	6,969
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker	Layanan		1	1	1	1	1	5	32,240	3,740	3,927	7,454	8,945	56,305
3	Layanan Perkantoran														
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	19,269	19,269	20,233	19,804	23,765	102,340
PELAKSANA: DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS										43,597	52,317	62,780	29,345	29,345	217,384
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	375	450	540	778	778	2,921

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker	Layanan		1	1	1	1	1	5	33,350	40,020	48,024	11,266	11,266	143,926
3	Layanan Perkantoran														
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	9,872	11,847	14,216	17,301	17,301	70,537
PELAKSANA: DIREKTORAT AIR MINUM										42,283	54,608	58,956	39,674	43,641	239,161
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	3,131	3,269	3,390	3,753	4,128	17,672
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker	Layanan		1	1	1	1	1	5	2,023	2,110	2,202	3,295.0	3,625	13,254
3	Layanan Perkantoran														
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	37,128	49,229	53,364	32,626	35,889	208,235
PELAKSANA: DIREKTORAT SANITASI										23,390	32,536	34,445	26,496	90,404	207,272
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	1,200	3,604	3,784	1,470	778	10,836
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker	Layanan		1	1	1	1	1	5	3,737	3,924	4,120	2,477	69,155	83,413
3	Layanan Perkantoran														
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	18,453	25,009	26,541	22,549	20,471	113,023
PELAKSANA: DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN										32,583	37,581	40,600	25,567	27,434	163,764
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	2,161	3,600	3,600	1,300	1,300	11,961
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker	Layanan		1	1	1	1	1	5	10,724	12,000	12,000	5,040	5,483	45,246
3	Layanan Perkantoran														
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	19,698	21,981	25,000	19,227	20,651	106,557
PELAKSANA: DIREKTORAT BINA TEKNIK PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN										60,677	74,003	80,803	39,064	95,900	350,447
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	1,216	6,000	6,000	5,940	5,940	25,096
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker	Layanan		1	1	1	1	1	5	8,652	12,113	13,324	624	15,960	50,673
3	Layanan Perkantoran														
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	50,809	55,890	61,479	32,500	74,000	274,678
PELAKSANA: DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN										10,000	10,000	10,000	10,760	13,330	54,090
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	1,500	1,500	1,500	579	300	5,379
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker	Layanan		1	1	1	1	1	5	500	500	500	2,474	4,646	7,424
3	Layanan Perkantoran														
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	8,000	8,000	8,000	6,953	8,200	38,237

4. Direktorat Jenderal Perumahan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN														
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau														
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:														
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	%	57,25	57,83	58,37	59,05	59,79	59,79	7.926.694,18	7.686.851	11.127.287	14.763.792	15.652.629,26	57.157.253,44
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :														
1	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	56,80	56,91	57,07	57,31	57,58	57,58	7.564.479	6.883.109	9.877.612	13.283.132	13.905.991	51.514.323
2	Persentase rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	%	3,24	18,49	39,45	66,13	100,00	100,00	91,620.00	400,000.00	804,320.00	1,015,690.00	1,280,320.00	3,591,950.00
KEGIATAN 1: Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
		Unit	232,543	91,422	134,047	195,963	221,025	875,000	7,656,099.00	7,283,109.00	10,681,932.00	14,298,822.00	15,186,311.00	55,106,273.00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah rumah Umum yang mendapat bantuan PSU	Unit	8,500	40,000	55,000	70,000	88,845	262,345	91,620.00	400,000.00	804,320.00	1,015,690.00	1,280,320.00	3,591,950.00
2	Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Fasilitas Rumah Swadaya bagi MBR	Unit	230,550	81,000	118,960	177,925	205,225	813,660	5,270,000.00	2,500,000.00	4,767,710.00	7,035,800.00	8,175,790.00	27,749,300.00
3	Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui melalui Pembangunan Rumah Khusus	Unit	822	2,440	2,300	2,138	2,300	10,000	654,129.00	597,362.00	562,700.00	525,104.00	564,700.00	2,903,995.00
4	Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun	Unit	1,171	7,982	12,787	15,900	13,500	51,340	1,568,250.00	3,604,500.00	4,357,790.00	5,524,240.00	4,967,680.00	20,022,460.00
5	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	119	122	122	122	122	607	66,700.00	166,247.00	173,812.00	181,768.00	180,921.00	769,448.00
6	Jumlah Laporan Kepatuhan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	9	9	9	9	9	45	5,400.00	15,000.00	15,600.00	16,220.00	16,900.00	69,120.00
KOORDINATOR : Direktorat Sistem dan Strategi Penyediaan Perumahan														
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Penyediaan Perumahan														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	119	122	122	122	122	607	66,700.00	166,247.00	173,812.00	181,768.00	180,921.00	769,448.00
1	Jumlah laporan keterpaduan penyelenggaraan perumahan	Laporan	5	4	4	4	4	21	13,770.00	15,147.00	16,662.00	18,328.00	10,161.00	74,068.00
2	Jumlah laporan strategi, program, dan penganggaran	Laporan	9	9	9	9	9	45	11,400.00	32,520.00	33,820.00	35,170.00	36,750.00	149,660.00
3	Jumlah laporan kemitraan dan kelembagaan	Laporan	5	9	9	9	9	41	6,230.00	17,210.00	17,900.00	18,620.00	19,450.00	79,410.00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	penyelenggaraan perumahan													
4	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	100	100	100	100	100	500	35,300.00	101,370.00	105,430.00	109,650.00	114,560.00	466,310.00
PELAKSANA: Direktorat Rumah Umum dan Komersial														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pengembangan Kebijakan dan Evaluasi Rumah Umum dan Komersial	Laporan	26	25	25	25	25	126	25,580.00	33,000.00	34,320.00	35,690.00	37,120.00	165,710.00
1	Jumlah laporan perencanaan teknik dan evaluasi rumah umum dan komersial	Laporan	10	7	7	7	7	38	12,620.00	8,500.00	8,840.00	9,190.00	9,560.00	48,710.00
2	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan pembinaan rumah umum dan komersial Wilayah I	Laporan	5	6	6	6	6	29	4,320.00	8,000.00	8,320.00	8,650.00	9,000.00	38,290.00
3	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan pembinaan rumah umum dan komersial Wilayah II	Laporan	7	6	6	6	6	31	4,320.00	8,200.00	8,530.00	8,870.00	9,220.00	39,140.00
4	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan pembinaan rumah umum dan komersial Wilayah III	Laporan	4	6	6	6	6	28	4,320.00	8,300.00	8,630.00	8,980.00	9,340.00	39,570.00
2	Pembangunan PSU Rumah Umum	Unit	8,500	40,000	55,000	70,000	88,845	262,345	66,040.00	367,000.00	770,000.00	980,000.00	1,243,200.00	3,426,240.00
1	Jumlah rumah umum yang mendapat fasilitasi layanan bantuan PSU	Unit	8,500	40,000	55,000	70,000	88,845	262,345	66,040.00	367,000.00	770,000.00	980,000.00	1,243,200.00	3,426,240.00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA:														
Direktorat Rumah Swadaya														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Rumah Swadaya	Laporan	16	10	10	10	10	56	27,000.00	37,100.00	26,210.00	27,450.00	28,740.00	146,500.00
1	Jumlah laporan perencanaan teknik dan evaluasi rumah swadaya	Laporan	5	4	4	4	4	21	16,590.00	19,100.00	10,480.00	10,980.00	11,710.00	68,860.00
2	Jumlah laporan penyiapan dan pelaksanaan bantuan dan kemudahan perumahan swadaya Wilayah I	Laporan	4	2	2	2	2	12	3,520.00	5,700.00	4,930.00	5,170.00	5,340.00	24,660.00
3	Jumlah laporan penyiapan dan pelaksanaan bantuan dan kemudahan perumahan swadaya Wilayah II	Laporan	3	2	2	2	2	11	3,430.00	5,400.00	4,620.00	4,840.00	5,010.00	23,300.00
4	Jumlah laporan penyiapan dan pelaksanaan bantuan dan kemudahan perumahan swadaya Wilayah III	Laporan	4	2	2	2	2	12	3,460.00	6,900.00	6,180.00	6,460.00	6,680.00	29,680.00
2	Bantuan dan Kemudahan Perumahan Swadaya		230,550	81,000	118,960	177,925	205,225	813,660	5,243,000.00	2,462,900.00	4,741,500.00	7,008,350.00	8,147,050.00	27,602,800.00
1	Jumlah bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya	Unit	800	-	-	-	-	800	30.860,00	-	-	-	-	30,860.00
2	Jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya	Unit	227.000	80.100	118.010	176.500	203.750	805.360	4,782,910.00	2,385,350.00	4,445,600.00	6,654,500.00	7,837,100.00	26,105,460.00
3	Jumlah bantuan pengembangan sarana hunian pendukung KSPN	Unit	2.750	900	950	1.425	1.475	7.500	429,230.00	67,550.00	115,900.00	173,850.00	179,950.00	966,480.00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa rumah swadaya	Unit	-	10.000	180.000	180.000	130.000	500.000	-	10,000.00	180,000.00	180,000.00	130,000.00	500,000.00
PELAKSANA: Direktorat Rumah Khusus														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pengembangan kebijakan, dan evaluasi penyelenggaraan rumah khusus	Laporan	20	16	16	16	16	84	16,850.00	24,000.00	25,000.00	25,150.00	27,000.00	118,000.00
1	Jumlah laporan perencanaan teknik rumah khusus	Laporan	10	6	6	6	6	34	7,817.00	7,500.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	46,317.00
2	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah khusus Wilayah I	Laporan	3	3	3	3	3	15	1,592.00	4,350.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,942.00
3	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah khusus Wilayah II	Laporan	3	3	3	3	3	15	1,675.00	4,050.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	18,725.00
4	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah khusus Wilayah III	Laporan	4	4	4	4	4	20	5,766.00	8,100.00	6,000.00	6,150.00	6,000.00	32,016.00
2	Pembangunan rumah khusus	Unit	822	2,440	2,300	2,138	2,300	10,000	631,634.00	568,142.00	535,900.00	498,154.00	535,900.00	2,769,730.00
1	Jumlah rumah khusus yang dibangun	Unit	822	2,440	2,300	2,138	2,300	10,000	631,634.00	568,142.00	535,900.00	498,154.00	535,900.00	2,769,730.00
3	Pemeliharaan dan perawatan rumah khusus	Unit	320	290	100	100	100	910	5,645.00	5,220.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	16,265.00
1	Jumlah rumah khusus yang dipelihara	Unit	320	290	100	100	100	910	5,645.00	5,220.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	16,265.00
PELAKSANA: Direktorat Rumah Susun														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pengembangan kebijakan, dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun	Laporan	18	27	27	27	27	126	20,180.00	33,500.00	34,840.00	36,240.00	37,680.00	162,440.00
	1 Jumlah laporan perencanaan teknik rumah susun	Laporan	7	9	9	9	9	43	8,030.00	11,650.00	12,190.00	12,680.00	13,190.00	57,740.00
	2 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun Wilayah I	Laporan	3	6	6	6	6	27	4,850.00	8,000.00	8,360.00	8,700.00	9,040.00	38,950.00
	3 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun Wilayah II	Laporan	5	6	6	6	6	29	3,900.00	6,800.00	6,970.00	7,250.00	7,540.00	32,460.00
	4 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun Wilayah III	Laporan	3	6	6	6	6	27	3,400.00	7,050.00	7,320.00	7,610.00	7,910.00	33,290.00
2	Pembangunan rumah susun	Unit	1,171	7,982	12,787	15,900	13,500	51,340	1,407,380.00	3,466,500.00	3,963,700.00	5,088,000.00	4,590,000.00	18,515,580.00
	1 Jumlah rumah susun yang dibangun	Unit	1,171	7,982	12,787	15,900	13,500	51,340	1,407,380.00	3,466,500.00	3,963,700.00	5,088,000.00	4,590,000.00	18,515,580.00
3	Pemeliharaan dan perawatan rumah susun	Tower	154	116	350	380	300	1,300	140,690.00	104,500.00	359,250.00	400,000.00	340,000.00	1,344,440.00
	1 Jumlah rumah susun yang dipelihara	Tower	154	116	350	380	300	1,300	140,690.00	104,500.00	359,250.00	400,000.00	340,000.00	1,344,440.00
PELAKSANA:														
Direktorat Kepatuhan Intern														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pembinaan dan pengendalian kepatuhan internal		9	9	9	9	9	45	5,400.00	15,000.00	15,600.00	16,220.00	16,900.00	69,120.00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	5	5	5	5	5	25	3,000.00	8,000.00	8,320.00	8,650.00	9,000.00	36,970.00
2	Jumlah laporan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	4	4	4	4	4	20	2,400.00	7,000.00	7,280.00	7,570.00	7,900.00	32,150.00
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	%	72,39	75,61	77,97	84,5	87,81	87,81						
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%	55.92	63.35	71.54	90,44	94,58	94,58						
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan a. Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara; b. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran; c. Tingkat penatausahaan Barang Persediaan Bencana; d. Tingkat layanan pembentukan Produk Hukum; e. Tingkat layanan advokasi hukum; f. Tingkat layanan komunikasi public; g. Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan, jabatan fungsional, dan pengadministrasian pegawai; h. Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan; i. Jumlah layanan internal; j. Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan; k. Jumlah layanan gaji dan tunjangan; dan l. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran.	%	89,69	87,06	85,56	90,19	93,38	89,18	270.595,18	403.742,00	445.355,00	464.970,00	466.318,26	2.050.980,44
		Layanan	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00						
KOORDINATOR : Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan														
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan									148.904,18	170.065,00	179.585,00	187.300,00	195.388,26	881.242,44
OUTPUT KEGIATAN :														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Layanan dukungan manajemen Eselon I									45.782,18	37.000,00	39.300,00	40.468,75	41.676,95	204.227,88
	1	Jumlah Layanan dukungan manajemen Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	5	45.782,18	37.000,00	39.300,00	40.468,75	41.676,95	204.227,88
2	Layanan sarana dan prasarana internal		Layanan	1	1	1	1	1	5	3.911,00	3.500,00	3.760,00	3.870,00	4.000,00	19.041,00
	1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	3.911,00	3.500,00	3.760,00	3.870,00	4.000,00	19.041,00
3	Layanan dukungan manajemen satker		Layanan	1	1	1	1	1	5	8.682,00	6.365,00	7.390,00	7.610,00	7.840,00	37.887,00
	1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1	5	8.682,00	6.365,00	7.390,00	7.610,00	7.840,00	37.887,00
4	Layanan Perkantoran		Layanan	2	2	2	2	2	10	90.529,00	123.200,00	129.135,00	135.351,25	141.871,31	620.086,56
	1	Jumlah layanan gaji dan tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1	5	68.789,00	100.500,00	105.525,00	110.801,25	116.341,31	501.956,56
	2	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	21.740,00	22.700,00	23.610,00	24.550,00	25.530,00	118.130,00
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Penyediaan Perumahan										75,760,00	201,577,00	227,120,00	236,200,00	226,740,00	967,397,00
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan sarana dan prasarana internal		Layanan	1	1	1	1	1	5	1.850,00	1.867,00	19,420,00	20,200,00	2,100,00	45,437,00
	1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,850,00	1,867,00	19,420,00	20,200,00	2,100,00	45,437,00
2	Layanan dukungan manajemen satker		Layanan	1	1	1	1	1	5	16,100,00	107,550,00	111,850,00	116,320,00	120,970,00	472,790,00
	1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1	5	16,100,00	107,550,00	111,850,00	116,320,00	120,970,00	472,790,00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Layanan Perkantoran	Bulan	1	1	1	1	1	5	57,810.00	92,160.00	95,850.00	99,680.00	103,670.00	449,170.00
1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	57,810.00	92,160.00	95,850.00	99,680.00	103,670.00	449,170.00
PELAKSANA: Direktorat Rumah Umum dan Komersial									10,540.00	6,500.00	6,800.00	7,100.00	7,410.00	38,350.00
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	370.00	300.00	350.00	400.00	450.00	1,870.00
1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	370.00	300.00	350.00	400.00	450.00	1,870.00
2	Layanan dukungan manajemen satker	Layanan	1	1	1	1	1	5	4,570.00	2,400.00	2,500.00	2,600.00	2,700.00	14,770.00
1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1	5	4,570.00	2,400.00	2,500.00	2,600.00	2,700.00	14,770.00
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	5,600.00	3,800.00	3,950.00	4,100.00	4,260.00	21,710.00
1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	5,600.00	3,800.00	3,950.00	4,100.00	4,260.00	21,710.00
PELAKSANA: Direktorat Rumah Swadaya									13,260.00	6,900.00	7,230.00	7,570.00	7,910.00	42,870.00
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	430.00	400.00	450.00	500.00	550.00	2,330.00
1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	430.00	400.00	450.00	500.00	550.00	2,330.00
2	Layanan dukungan manajemen satker	Layanan	1	1	1	1	1	5	4,380.00	2,000.00	2,100.00	2,200.00	2,300.00	12,980.00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1	5	4,380.00	2,000.00	2,100.00	2,200.00	2,300.00	12,980.00
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	5	8,450.00	4,500.00	4,680.00	4,870.00	5,060.00	27,560.00
	1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	8,450.00	4,500.00	4,680.00	4,870.00	5,060.00	27,560.00
PELAKSANA: Direktorat Rumah Khusus										12,341.00	6,400.00	7,150.00	7,400.00	7,650.00	40,941.00
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	5	664.00	200.00	750.00	800.00	850.00	3,264.00
	1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	12	200.00	750.00	800.00	850.00	3,264.00
2	Layanan dukungan manajemen satker	Layanan	1	1	1	1	1	1	5	2,477.00	2,000.00	2,100.00	2,200.00	2,300.00	11,077.00
	1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1	5	2,477.00	2,000.00	2,100.00	2,200.00	2,300.00	11,077.00
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	5	9,200.00	4,200.00	4,300.00	4,400.00	4,500.00	26,600.00
	1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	9,200.00	4,200.00	4,300.00	4,400.00	4,500.00	26,600.00
PELAKSANA: Direktorat Rumah Susun										8,690.00	7,300.00	12,240.00	13,900.00	15,500.00	57,630.00
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	5	100.00	200.00	300.00	400.00	500.00	1,500.00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	100.00	200.00	300.00	400.00	500.00	1,500.00
	2	Layanan dukungan manajemen satker	Layanan	1	1	1	1	1	5	3,990.00	2,600.00	5,690.00	6,500.00	7,000.00	25,780.00
	1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1	5	3,990.00	2,600.00	5,690.00	6,500.00	7,000.00	25,780.00
	3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	4,600.00	4,500.00	6,250.00	7,000.00	8,000.00	30,350.00
	1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	4,600.00	4,500.00	6,250.00	7,000.00	8,000.00	30,350.00
PELAKSANA: Direktorat Kepatuhan Intern									1,100.00	5,000.00	5,230.00	5,500.00	5,720.00	22,550.00	
OUTPUT KEGIATAN :															
	1	Layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	-	1	1	1	1	5	-	500.00	550.00	600.00	600.00	2,250.00
	1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	-	500.00	550.00	600.00	600.00	2,250.00
	2	Layanan dukungan manajemen satker	Layanan	-	1	1	1	1	5	-	1,500.00	1,560.00	1,650.00	1,720.00	6,430.00
	1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1	5	-	1,500.00	1,560.00	1,650.00	1,720.00	6,430.00
	3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,100.00	3,000.00	3,120.00	3,250.00	3,400.00	13,870.00
	1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,100.00	3,000.00	3,120.00	3,250.00	3,400.00	13,870.00

5. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									1,544,237	2,001,581	383,920	305.076	314.466	4.549.280
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:														
1	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	100	100	100	100	100	90.484	221.221	196.472	202.658	205.872	916.707
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :														
1	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	100	100	100	100	100	90.484	221.221	196.472	202.658	205.872	916.707
KEGIATAN 1: Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan	%	100	100	100	100	100	100	40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan													
KOORDINATOR: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan														
PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan									40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	3	2	0	0	0	3	16,316	10,877	-	-	-	27,193
1	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	1	4,500	2,625	-	-	-	7,125
2	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar dan Kriteria Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	1	5,004	2,700	-	-	-	7,704
3	Jumlah Dokumen Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	1	6,812	5,553	-	-	-	12,365
2	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	6	5	6	10	10	37	4,317	21,734	6,000	6,000	6,000	44,051
1	Jumlah Draft Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	2	2	4	4	16	3,203	1,600	2,500	2,500	2,500	12,303
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	3	3	12	1,114	19,357	1,500	1,500	1,500	24,971
3	Jumlah Dokumen Pengembangan Sumber Dana dan Pola Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	0	1	3	3	7	-	-	1,000	1,000	1,000	3,000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Jumlah Dokumen Pengembangan Kemitraan dan Koordinasi Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	0	0	2	-	777	1,000	1,000	1,000	3,777
3	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	5	6	6	2	2	21	3,871	5,000	6,000	6,000	6,000	26,871
1	Jumlah Profil Risiko Penyusunan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	2	2	16	2,531	3,400	4,000	4,000	4,000	17,931
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	0	0	2	-	750	1,000	1,000	1,000	3,750
3	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	0	0	3	1,340	850	1,000	1,000	1,000	5,190
4	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	NSPK	2	0	1	0	0	3	1,575	-	2,000	2,000	2,000	7,575
1	Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	NSPK	2	0	1	0	0	3	1,575	-	2,000	2,000	2,000	7,575
5	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	0	0	1	7,144	6,610	1,102	-	-	14,856
1	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	0	0	1	7,144	6,610	1,102	-	-	14,856
6	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	3	3	3	3	12	-	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan													
2	Jumlah Laporan Layanan dan konsultasi Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
3	Jumlah Laporan Pengendalian dan pemantauan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
7	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	4	4	4	4	4	20	3,127	2,000	3,000	3,000	3,000	14,127
1	Jumlah Dokumen pengelolaan Data Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	1	2	2	2	2	9	949	1,000	1,000	1,000	1,000	4,949
2	Jumlah Dokumen pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	2	1	1	1	1	6	1,622	500	1,000	1,000	1,000	5,122
3	Jumlah Dokumen pengelolaan Konsultasi dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	1	1	1	1	1	5	556	500	1,000	1,000	1,000	4,056
8	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	7	3	3	3	3	19	3,890	2,000	2,500	2,500	2,500	13,390
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	3	1	1	1	1	7	1,866	900	1,000	1,000	1,000	5,766
2	Jumlah Laporan dan Informasi pimpinan di bidang Pelaksanaan	Laporan	2	1	1	1	1	6	1,274	700	1,000	1,000	1,000	4,974

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan													
3	Jumlah Laporan Kinerja Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	2	1	1	1	1	6	750	400	500	500	500	2,650
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		%	100	100	100	100	100	100	50,244	170,000	172,870	180,158	183,372	756,644
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%	25	25	25	25	25	25	11,042	22,000	47,290	43,125	44,050	167,507
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	%	25	25	25	25	25	25	17,779	113,150	31,921	32,870	33,847	229,567
3	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	%	25	25	25	25	25	25	12,273	20,600	33,500	33,500	30,500	130,373
4	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	%	25	25	25	25	25	25	9,150	14,250	60,159	70,663	74,975	229,197
KOORDINATOR: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan														
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan									17,779	113,150	31,921	32,870	33,847	229,567
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1,790	1,000	1,050	1,070	1,100	6,010

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1,790	1,000	1,050	1,070	1,100	6,010
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	6	1	1	0	0	8	1,789	2,000	2,050	2,100	2,150	10,089
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	6	1	1	0	0	8	1,789	2,000	2,050	2,100	2,150	10,089
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	3	2	1	14	4,500	92,250	9,471	9,800	9,647	125,668
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	0	0	4	2,250	46,125	3,050	3,100	3,120	57,645
2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	3	2	2	1	10	2,250	46,125	6,421	6,700	6,527	68,023
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	1	2	9	1,800	4,000	3,600	3,700	3,800	16,900
1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	1	2	9	1,800	4,000	3,600	3,700	3,800	16,900
5	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan	Kesepakatan	4	13	10	2	2	31	3,800	6,600	7,700	7,900	8,600	34,600
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Dokumen	2	2	2	1	2	9	1,800	3,000	4,100	4,200	4,300	17,400
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Kesepakatan	4	13	10	2	2	31	2,000	3,600	3,600	3,700	4,300	17,200
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1,050	1,100	1,150	4,100

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1,050	1,100	1,150	4,100
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	4	4	4	5	6	23	3,800	6,200	6,700	6,900	7,100	30,700
1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	4	4	4	5	6	23	3,800	6,200	6,700	6,900	7,100	30,700
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	1	1	0	0	3	300	300	300	300	300	1,500
1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	1	1	0	0	3	300	300	300	300	300	1,500
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air									11,042	22,000	47,290	43,125	44,050	167,507
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	4	2	3	2	2	13	1,894	1,200	3,100	4,725	5,150	16,069
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	6	1,368	600	600	700	800	4,068
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	1	1	7	525	600	2,500	4,025	4,350	12,000
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	2	1	1	1	6	946	2.100	600	2,400	2,400	8,446
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	2	1	1	1	6	946	2.100	600	2,400	2,400	8,446
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	3	5	4	2	2	16	3,603	11.550	31,900	23,600	23,600	94,253

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	1	1	7	2,803	1.500	14,400	20,000	14,000	52,703
2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	4	2	1	1	9	800	10.050	17,500	3,600	9,600	41,550
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	457	700	1,000	1,000	1,200	4,357
1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	457	700	1,000	1,000	1,200	4,357
5	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan	Kesepakatan	1	2	2	4	4	13	1,469	4,000	5,090	5,500	5,800	21,859
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen	2	1	2	2	1	8	980	1,000	2,440	2,600	2,750	9,770
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Kesepakatan	1	2	2	4	4	13	489	3,000	2,650	2,900	3,050	12,089
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK	4	2	2	0	0	8	1,539	1,200	1,800	1,800	1,800	8,139
1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK	4	2	2	0	0	8	1,539	1,200	1,800	1,800	1,800	8,139
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	3	2	4	4	4	17	960	950	3,500	3,800	3,800	13,010
1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	3	2	4	4	4	17	960	950	3,500	3,800	3,800	13,010
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	1	1	1	0	0	3	176	300	300	300	300	1,376

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	1	1	1	0	0	3	176	300	300	300	300	1,376
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman									12,273	20,600	33,500	33,500	30,500	130,373
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	3	2	2	3	3	13	1,807	1,800	1,800	1,800	1,800	9,007
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	2	2	8	1,207	800	800	800	800	4,407
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	600	1,000	1,000	1,000	1,000	4,600
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0	4	762	2,000	1,000	1,000	1,000	5,762
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0	4	762	2,000	1,000	1,000	1,000	5,762
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	0	2	8	1,673	5,500	19,000	19,000	16,000	61,173
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	0	1	4	700	4,000	10,000	10,000	10,000	34,700
2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	0	1	4	973	1,500	9,000	9,000	6,000	26,473
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	5	1	9	900	1,500	1,000	1,000	1,000	5,400
1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	5	1	9	900	1,500	1,000	1,000	1,000	5,400
5	Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan	Kesepakatan	3	4	4	2	2	15	3,781	6,800	5,100	5,100	5,100	25,881

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	3	3	3	1	1	11	1,454	2,800	2,500	2,500	2,500	11,754
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Kesepakatan	3	4	4	2	2	15	2,326	4,000	2,600	2,600	2,600	14,126
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	0	1	1	2	1	5	0	500	500	500	500	2,000
1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	0	1	1	2	1	5	0	500	500	500	500	2,000
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	4	3	3	4	4	18	3,113	2,200	4,800	4,800	4,800	19,713
1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	4	3	3	4	4	18	3,113	2,200	4,800	4,800	4,800	19,713
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	1	0	0	3	237	300	300	300	300	1,437
1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	1	0	0	3	237	300	300	300	300	1,437
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan									9,150	14,250	60,159	70,663	74,975	229,197
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	0	5	600	500	750	1,000	1,000	3,850
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0	4	300	500	750	1,000	1,000	3,550
2	Jumlah Penyusunan identifikasi Proyek KPBU Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	1	300	0	0	0	0	300
2	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	0	0	3	400	1,000	2,750	3,000	3,000	10,150

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	0	0	3	400	1,000	2,750	3,000	3,000	10,150
3	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	3	2	2	1	1	9	1,750	5,750	30,000	35,000	36,500	109,000
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	1	0	0	5	875	5.750	15,000	17,500	18,250	57,575
2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	1	1	1	4	875	0	15,000	17,500	18,250	51,625
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	2	2	9	1,250	750	2,500	3,000	4,000	11,500
1	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	2	2	9	1,250	750	2,500	3,000	4,000	11,500
5	Proyek KPBUPerumahan yang siap dikerjasamakan	Kesepakata n	1	2	2	2	2	9	4,000	4,096	21,000	25,000	26,307	80,403
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Dokumen	3	2	2	2	2	11	3,500	2,096	17,000	20,000	20,307	62,903
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Kesepakatan	1	2	2	2	2	9	500	2,000	4,000	5,000	6,000	17,500
6	NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	1,000	500	500	500	2,500
1	Jumlah Perumusan NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	1,000	500	500	500	2,500
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	1	4	4	11	1,000	854	2,359	2,863	3,500	10,576
1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	1	4	4	11	1,000	854	2,359	2,863	3,500	10,576
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	1	0	0	3	150	300	300	300	168	1,218

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Laporan	1	1	1	0	0	3	150	300	300	300	168	1,218
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	%	72,39	75,61	77,97	84,50	87,81	87,81						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%	55,92	63,35	71,54	90,44	94,58	94,58						
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	100	100	100	100	100	100	118,182	112,207	91,258	75,938	80,266	477,850
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	%	15	15	15	15	15	15						
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%	15	15	15	15	15	15						
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	%	10	10	10	15	15	15						
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	10	10	10	15	15	15						
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	%	15	15	15	15	15	15						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	%	10	10	10	15	15	15						
7	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP	%	10	10	10	0	0	0						
8	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP	%	15	15	15	0	0	0						
9	Nilai SAKIP Unit Organisasi	%	0	0	0	10	10	10						
KOORDINATOR : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan														
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan									74,068	67,094	71,859	75,938	80,266	369,224
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	5	403	300	318	338	358	1,718
1	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	1	1	1	5	403	300	318	338	358	1,718
2	Manajemen Transformasi Organisasi	Layanan	2	2	2	1	1	10	1,372	1,200	1,273	1,351	1,433	6.629
1	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	Laporan	2	2	2	1	1	10	1,372	1,200	1,273	1,351	1,433	6.629
3	Pengelolaan Pegawai	Orang	260	260	260	260	260	260	1,671	1,500	1,592	1,689	1,792	8,243
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	Laporan	3	3	3	2	2	13	1,671	1,500	1,592	1,689	1,792	8,243
4	Tata Kelola TNDE dan Arsip	Layanan	1	1	1	1	1	5	498	500	531	563	597	2,689
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	Laporan	1	1	1	1	1	5	498	500	531	563	597	2,689

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)		3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	Kerumahtangaan		Layanan	3	2	2	2	2	11	2,810	1,000	1,061	1,126	1,194	7,191
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtangaan	Laporan	3	2	2	2	2	11	2,810	1,000	1,061	1,126	1,194	7,191
6	Advokasi Hukum		Layanan	2	2	2	1	1	8	1,109	800	849	901	956	4,614
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	Laporan	2	2	2	1	1	8	1,109	800	849	901	956	4,614
7	MOU dengan APH dan Instansi Lain Terkait		Layanan	1	1	1	1	1	5	461	400	424	450	478	2,214
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	Laporan	1	1	1	1	1	5	461	400	424	450	478	2,214
8	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		Layanan	3	3	3	2	2	13	1,724	1,500	1,592	1,689	1,792	8,296
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	3	3	2	2	3	13	1,724	1,500	1,592	1,689	1,792	8,296
9	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I		Layanan	1	1	1	1	1	5	774	890	944	1,002	1,063	4,672
	1	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Laporan	1	1	1	1	1	5	774	890	944	1,002	1,063	4,672
10	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I		Layanan	4	2	2	2	3	13	2,395	1,300	1,448	1,536	1,630	8,308
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	Laporan	4	2	2	2	3	13	2,395	1,300	1,448	1,536	1,630	8,308
11	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI		Layanan	1	1	1	1	1	5	287	500	590	627	666	2,671
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	Laporan	1	1	1	1	1	5	287	500	590	627	666	2,671
12	Strategi Komunikasi		Layanan	2	2	2	1	1	8	1,516	1,100	1,379	1,463	1,553	7,011

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	Laporan	2	2	2	1	1	8	1,516	1,100	1,379	1,463	1,553	7,011
13	Publikasi	Layanan	3	2	2	2	4	13	1,406	800	1,061	1,126	1,194	5,587
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	Laporan	3	2	2	2	4	13	1,406	800	1,061	1,126	1,194	5,587
14	Laporan Keuangan Unit Eselon I	Laporan	1	1	1	2	3	8	1,651	500	955	1,013	1,075	5,194
1	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	1	1	1	2	3	8	1,651	500	955	1,013	1,075	5,194
15	Laporan Kinerja Unit Eselon II	Laporan	1	1	1	1	1	5	158	300	318	338	358	1,472
1	Jumlah Laporan Kinerja	Laporan	1	1	1	1	1	5	158	300	318	338	358	1,472
16	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	Laporan	2	1	1	2	2	8	1,074	1,000	1,061	1,126	1,194	5,455
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	2	1	1	2	2	8	1,074	1,000	1,061	1,126	1,194	5,455
17	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	Unit	1	1	1	1	1	5	2,366	500	531	563	597	4,557
1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	1	1	1	1	5	2,366	500	531	563	597	4,557
18	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	Unit	1	1	1	1	1	5	1,728	500	531	563	597	3,919
1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	Unit	1	1	1	1	1	5	1,728	500	531	563	597	3,919
19	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	1	1	1	1	2	6	410	410	435	462	490	2,206
1	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	1	1	1	1	2	6	410	410	435	462	490	2,206

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)		3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
20	Gaji dan Tunjangan DJPI		Layanan	1	1	1	1	1	5	29,714	26,292	27,896	29,597	31,403	144,902
1	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan		Layanan	1	1	1	1	1	5	29,714	26,292	27,896	29,597	31,403	144,902
21	Operasionalisasi Kantor DJPI		Layanan	1	1	1	1	1	5	15,540	20,802	22,071	23,417	24,846	106,676
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor		Layanan	1	1	1	1	1	5	15,540	20,802	22,071	23,417	24,846	106,676
PELAKSANA: Direktorat Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan										1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat		Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PSSPP		Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan										1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat		Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIJJ		Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air										1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat		Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPI SDA	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIP	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)									44,113	45,113	19,399	0	0	135,693
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran BLU PPDPP	Unit	1	1	1	0	0	3	100	100	0	0	0	303
1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	1	1	0	0	3	100	100	0	0	0	303
2	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BLU PPDPP	Unit	1	1	1	0	0	3	400	400	0	0	0	1,212
1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	Unit	1	1	0	0	0	3	400	400	0	0	0	1,212

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)		3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Gaji dan Tunjangan BLU PPDP		Layanan	1	1	1	0	0	3	23,290	29,290	8,034	0	0	82,749
1	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan		Layanan	1	1	0	0	0	3	23,290	29,290	8,034	0	0	82,749
4	Operasionalisasi Kantor BLU PPDP		Layanan	1	1	1	0	0	3	16,869	13,844	11,365	0	0	44,816
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran		Layanan	1	1	1	0	0	3	16,869	13,844	11,365	0	0	44,816
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BLU PPDP		Layanan	1	1	1	0	0	3	3,455	1,480	0	0	0	6,615
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Layanan	1	1	1	0	0	3	3,455	1,480	0	0	0	6,615
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau															
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:															
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni		%	57,25	57,83	58,37	59,05	59,79	59,79	1,335,572	1,668,152	69,123	26,480	28,328	3,127,655
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman															
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :															
1	Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		%	100	100	100	100	100	100	1,335,572	1,668,152	69,123	26,480	28,328	3,127,655
KEGIATAN 1: Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan		%	100	100	100	100	100	100	1,335,572	1,668,152	69,123	26,480	28,328	3,127,655
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	%	50	50	50	100	100	100	1,307,732	1,640,312	40,448	26,480	28,328	3,043,299
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	%	50	50	50	0	0	0	27,840	27,840	28,675	0	0	84,355
KOORDINATOR : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan														
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan									1,307,732	1,640,312	40,448	26,480	28,328	3,043,299
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	5	5	5	23	3,250	3,250	7,100	7,760	8,486	29,846
1	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	3	2	2	2	2	11	2,500	1,500	4,400	4,840	5,324	18,564
2	Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	2	2	8	750	1,000	2,200	2,420	2,662	9,032
3	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1	4	0	750	500	500	500	2,250
2	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	NSPK	1	1	2	3	1	8	750	750	2,200	2,420	2,662	8,782
1	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	NSPK	1	1	2	3	1	8	750	750	2,200	2,420	2,662	8,782

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Laporan	4	2	2	6	30	44	3,850	1,750	8,648	8,800	9,680	32,728
1	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Laporan	4	2	2	6	30	44	3,850	1,750	8,648	8,800	9,680	32,728
4	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Rumah Tangga	31,823	39,684	312	0	0	71,819	1,289,782	1,624,562	10,000	0	0	2,924,343
1	Jumlah Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Rumah Tangga	31,823	39,684	312	-	-	71,819	1,289,782	1,624,562	10,000	0	0	2,924,343
5	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Layanan	1	1	1	1	1	5	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	23,000
1	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Layanan	1	1	1	1	1	5	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	23,000
	SSB (BA.999.07)	Rumah Tangga	175,000	0	0	0	0	175,000	4,657,982	5,969,486	4,930,376	4,865,899	4,804,866	25,228,609
	SBUM (BA.999.07)	Rumah Tangga	263,000	157,500	200,000	220,000	220,000	1,060,500	1,064,000	945,000	1,200,000	1,320,000	1,320,000	5,849,000
6	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Layanan	1	1	1	1	1	5	4,500	5,000	5,000	0	0	14,500
1	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Layanan	1	1	1	1	1	5	4,500	5,000	5,000			14,500
7	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	600	500	3,000	3,000	3,000	10,100
1	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	600	500	3,000	3,000	3,000	10,100
	SMF (Dana Masyarakat)	Rumah Tangga	8.460	10.000	10.000	10.000	11.540	50.000						
	Tapera (Dana Masyarakat)	Rumah Tangga	50.000	75.000	100.000	10.000	7.251	242.251						
2	FLPP (BA.999.03)	Rumah Tangga	0	0	0	220.000	220.000	440.000	600	500	3.000	3.000	3.000	10.100

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)									27,840	27,840	28,675	0	0	84,355
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Fasilitasi Penyaluran FLPP	Layanan	3	3	0	0	0	6	8,550	5,600	0	0	0	19,918
1	Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi	Laporan	2	2	0	0	0	4	5,500	3,550	0	0	0	12,707
2	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Kelembagaan	Lembaga	30	30	0	0	0	60	1,500	1,500	0	0	0	4,545
3	Jumlah Pelaksanaan Verifikasi Permohonan Bantuan Pembiayaan	Rumah Tangga	102,500	157,500	200,000	0	0	900,000	1,550	550	0	0	0	1,118
	FLPP (BA.999.03)	Rumah Tangga	102,500	157,500	200,000	0	0	900,000	9,000,000	12,000,000	14,500,000	0	0	69,500,000
2	Rencana Kerja Anggaran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Layanan	3	2	3	0	0	12	2,354	1,436	0	0	0	5,269
1	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bantuan Pembiayaan	Layanan	3	2	3	0	0	12	2,354	1,436	0	0	0	5,269
3	Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan	Layanan	40	45	45	0	0	220	2,788	2,788	0	0	0	8,447
1	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan	Layanan	40	45	45	0	0	45	2,788	2,788	0	0	0	8,447
4	Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja	Layanan	45	45	45	0	0	225	1,355	1,115	0	0	0	3,618
1	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja	Layanan	45	45	45	0	0	225	1,355	1,115	0	0	0	3,618
5	Teknologi dan Informasi Bantuan Pembiayaan Perumahan	Layanan	1	1	1	0	0	5	1,800	1,800	0	0	0	5,454
1	Jumlah Pelayanan Sistem, Teknologi, dan Informasi Pembiayaan Perumahan	Layanan	1	1	1	0	0	5	1,800	1,800	0	0	0	5,454
6	Pendayagunaan Database Bantuan Pembiayaan Perumahan	Layanan	2	2	2	0	0	10	1,000	1,000	0	0	0	3,030
1	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pendayagunaan Database	Layanan	2	2	2	0	0	10	1,000	1,000	0	0	0	3,030

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Layanan	1	1	1	0	0	5	2,900	2,900	0	0	0	8,787
1	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan	Layanan	1	1	1	0	0	5	2,900	2,900	0	0	0	8,787
8	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	Layanan	3	3	3	0	0	15	1,500	2,600	0	0	0	6,778
1	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	Layanan	3	3	3	0	0	15	1,500	2,600	0	0	0	6,778
9	Publikasi dan Kehumasan	Layanan	2	2	2	0	0	10	3,135	6,144	0	0	0	15,607
1	Jumlah Pelaksanaan Publikasi dan Kehumasan	Layanan	2	2	2	0	0	10	3,135	6,144	0	0	0	15,607
10	Pengelolaan Aset BLU	Layanan	3	3	3	0	0	15	200	200	0	0	0	606
1	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Aset BLU	Layanan	3	3	3	0	0	15	200	200	0	0	0	606
11	Hukum dan Kepatuhan	Layanan	1	1	1	0	0	5	260	260	0	0	0	788
1	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Bidang Hukum dan Kepatuhan	Layanan	1	1	1	0	0	5	260	260	0	0	0	788
12	Pengawasan Internal	Layanan	24	24	24	0	0	120	800	800	0	0	0	2,424
1	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan	24	24	24	0	0	120	800	800	0	0	0	2,424
13	Pembinaan Manajemen	Layanan	2	2	2	0	0	10	1,197	1,197	0	0	0	3,627
1	Pembinaan Manajemen	Layanan	2	2	2	0	0	10	1,197	1,197	0	0	0	3,627

6. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH									199,396	331,500	353,300	367,900	392,800	1,644,896
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis	%	60	65	70	82	82.5	82.5						
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	%	60	65	70	100	100	100						
KEGIATAN 1: Pengembangan Infrastruktur Wilayah									103,274	228,300	246,800	258,700	280,200	1,117,274
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
1	Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR	%	60	65	70	80	85	85						
2	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan	%	60	65	70	100	100	100						
3	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara	%	60	65	70	100	100	100						
4	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku	%	60	65	70	100	100	100						
KOORDINATOR : Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional														
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional									22,961	48,000	48,800	52,100	58,900	230,761

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Kebijakan Teknis dan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR	Dokumen	8	7	8	5	6			14,000	16,700	16,900	19,100	66,700
2	Keterpaduan Rencana Dan Sinkronisasi Program	Dokumen	2	6	6	2	2			19,500	20,000	22,500	24,500	86,500
3	Kinerja dan Dampak Manfaat	Dokumen	5	5	4	2	2			10,500	9,100	9,700	12,300	41,600
4	Kepatuhan Internal	Dokumen	1	4	3	2	2			4,000	3,000	3,000	3,000	13,000
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I									19,300	53,000	59,800	61,400	68,700	262,200
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Rencana dan Program pengembangan infrastruktur wilayah di Wilayah I	Dokumen	15	15	17	8	7			48,000	54,000	55,600	62,500	220,100
2	Kinerja program di Wilayah I	Dokumen	2	3	3	3	3			5,000	5,800	5,800	6,200	22,800
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II									42,776	52,000	57,500	61,500	65,700	279,476
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Rencana dan Program pengembangan infrastruktur wilayah di Wilayah II	Dokumen	16	16	18	9	7			45,700	51,000	55,000	59,000	210,700
2	Kinerja program di Wilayah II	Dokumen	2	3	3	3	3			6,300	6,500	6,500	6,700	26,000
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III									18,237	75,300	80,700	83,700	86,900	344,837
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Rencana dan Program pengembangan infrastruktur wilayah di Wilayah III	Dokumen	17	15	17	6	5			69,000	74,000	77,000	80,000	300,000
2	Kinerja program di Wilayah III	Dokumen	3	3	3	3	3			6,300	6,700	6,700	6,900	26,600

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	%	72,39	75,61	77,97	84,50	87,81	87,81						
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	%	55,92	63,35	71,54	90,44	94,58	94,58						
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah									96,122	103,200	106,500	109,200	112,600	527,622
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan infrastruktur Wilayah														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	%	80	80	81	82	82	82						
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%	100	100	100	100	100	100						
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	%	80	80	81	82	82	82						
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	91	91	92	92	92	92						
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	%	90,5	90,5	91	91	91	91						
6	Nilai SAKIP Unit Organisasi	%	76,5	76,6	76,8	76,9	77	77						
KOORDINATOR : Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah														
PELAKSANA: Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah									75,195	89,200	91,900	94,600	97,700	448,595
OUTPUT KEGIATAN :														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	1	19	21		28,868	34,000	33,500	33,000	33,000	133,500
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1		1,100	1,200	1,400	1,600	1,700	5,900
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1		45,227	54,000	57,000	60,000	63,000	234,000
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional									3,957	3,500	3,500	3,500	3,500	17,957
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	6	5		2,628	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
2	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1		1,329	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I									5,709	3,500	3,700	3,700	3,800	20,409
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	6	5		4,734	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
2	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1		975	1,500	1,700	1,700	1,800	6,700
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II									5,715	3,500	3,700	3,700	3,800	20,415
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	6	5		4,371	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
2	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1		1,344	1,500	1,700	1,700	1,800	6,700
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III									5,546	3,500	3,700	3,700	3,800	20,246
OUTPUT KEGIATAN :														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	6	5		4,230	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
2	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1		1,316	1,500	1,700	1,700	1,800	6,700

7. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi									725,510	900,000	906,541	913,345	920,354	4,365,749
PROGRAM : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI														
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional														
	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,3	5,6	6,0	5,1	3,4	7,7	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	480,000
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional														
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	70	75	80	85	90	90	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	480,000
KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASIONAL BIDANG KONSTRUKSI														
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	%	81	81	81	65	41	93,2	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	480,000
KOORDINATOR: DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI														
PELAKSANA: BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH														
	OUTPUT KEGIATAN :													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	Orang	30,000	30,000	30,000	24.134	15.300	172.447	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	480,000
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi														
1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	43	51	57	69	76	76	629,510	804,000	810,541	817,345	824,354	3,885,749
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		%												
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		%	43	51	57	69	76	76	629,510	804,000	810,541	817,345	824,354	3,885,749
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	76	80	84	89	93	93						
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	14	21	28	36	39	39						
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	40	51	59	82	97	97						
KEGIATAN 2: PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI														
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi		%	60	65	70	75	80	80	17,810	22,094	22,254	22,421	22,593	107,172
KOORDINATOR: DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														
PELAKSANA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	NSPK	1	1	1	1	1	5	5,937	7,365	7,418	7,474	7,531	35,724
2	Profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	Laporan	1	1	1	1	1	5	5,937	7,365	7,418	7,474	7,531	35,724
3	Profil kerja sama bidang jasa konstruksi	Kesepakatan	1	1	1	1	1	5	5,937	7,365	7,418	7,474	7,531	35,724
KEGIATAN 3 : PEMBINAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI														
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa		%	68	75	83	92.5	98.5	98.5	89,590	111,137	111,944	112,784	113,650	539,105
1	Persentase tender/seleksi tepat waktu	%	80	85	90	95	98	98						
2	Persentase sanggah tidak benar	%	90	91	92	98	99	99						
3	Persentase pengaduan tidak benar	%	90	91	92	98	99	99						
4	Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar	%	90	91	92	93	95	95						
5	Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ	%	60	71	82	91	100	100						
6	Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	%	0	20	50	80	100	100						
KOORDINATOR: DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI														
PELAKSANA: DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Profil pengelolaan NSPK pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi	NSPK	1	1	1	1	1	5	3,116	3,865	3,893	3,922	3,952	18,748
2	Profil kinerja UKPBJ dan UPTPBJ (kelembagaan, kinerja layanan, penerapan NSPK, penerapan SIPBJ)	Laporan	1	1	1	1	1	5	3,116	3,865	3,893	3,922	3,952	18,748
3	Profil kinerja penyedia jasa konstruksi	Layanan	1	1	1	1	1	5	3,116	3,865	3,893	3,922	3,952	18,748
4	Profil Kepatuhan Intern Ditjen Bina Konstruksi	Laporan	1	1	1	1	1	5	3,116	3,865	3,893	3,922	3,952	18,748
PELAKSANA: BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI														
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Layanan pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi	Layanan	1	1	1	1	1	5	77,127	95,677	96,372	97,096	97,841	464,114
KEGIATAN 4 : PEMBINAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI														
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	8,599	10,667	10,744	10,825	10,908	51,742
KOORDINATOR: DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI														
PELAKSANA: DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI														
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Profil pengelolaan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	NSPK	1	1	1	1	1	5	4,299	5,333	5,372	5,412	5,454	25,871

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2 Profil penerapan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Laporan	1	1	1	1	1	5	4,299	5,333	5,372	5,412	5,454	25,871
KEGIATAN 5 : PEMBINAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI														
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi		%	14	21	28	36	39	39	138,738	195,194	197,310	199,512	201,780	932,534
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat		%	9	10	12	9.76	10	10	102,956	150,806	152,599	154,465	156,387	717,214
KOORDINATOR: DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI														
PELAKSANA: BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH														
OUTPUT KEGIATAN :														
	1 Tenaga kerja konstruksi terbina	Orang	95,000	95,000	95,000	15.022	29.890	176.112	82,364	120,645	122,080	123,572	125,110	573,771
	2 Laporan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi	Laporan	7	7	7	7	7	35	20,591	30,161	30,520	30,893	31,277	143,443
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi		%	20	32	44	63	67	67	35,782	44,388	44,711	45,047	45,392	215,321
	1 Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi	%	21	27	33	41	44	44						
	2 Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi	%	18	22	25	24	26	26						
	3 Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi	%	20	40	60	94	100	100						
	4 Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi	%	20	40	60	92	100	100						
PELAKSANA: DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Profil pengelolaan NSPK kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	1	1	1	1	1	5	5,964	7,398	7,452	7,508	7,565	35,887
2	Dokumen SKKNI dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	25	30	30	15	15	115	5,964	7,398	7,452	7,508	7,565	35,887
3	Profil tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor	Layanan	1	1	1	1	1	5	5,964	7,398	7,452	7,508	7,565	35,887
4	Profil mutu pelaksanaan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Lembaga	1	1	1	1	1	5	5,964	7,398	7,452	7,508	7,565	35,887
5	Profil pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan	Layanan	1	1	1	1	1	5	5,964	7,398	7,452	7,508	7,565	35,887
6	Layanan penyetaraan kompetensi (Mutual Recognition Arrangement)	Layanan	1	1	1	1	1	5	5,964	7,398	7,452	7,508	7,565	35,887
KEGIATAN 6 : PEMBINAAN KINERJA KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN MATERIAL, PERALATAN, DAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI														
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi		%	40	51	59	82	97	97	36,914	45,792	46,124	46,471	46,827	222,127
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi		%	16	23	28	61	70	70	18,457	22,896	23,062	23,235	23,414	111,064
1	Persentase terlaksananya tugas jasa konstruksi oleh OPD	%	55	65	75	80	85	85						
2	Persentase Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi	%	21	26	31	86	93	93						
3	Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI	%	50	55	60	80	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)		%	0	41	57	54	65	65						
5	Persentase LSP tercatat dan beroperasi		%	0	0	0	4,6	6,6	6,6						
KOORDINATOR: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI															
PELAKSANA: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Profil pengelolaan NSPK kelembagaan masyarakat dan pemerintah urusan jasa konstruksi		NSPK	1	1	1	1	1	5	6,152	7,632	7,687	7,745	7,805	37,021
2	Profil kinerja OPD sub urusan jasa konstruksi		Laporan	1	1	1	1	1	5	6,152	7,632	7,687	7,745	7,805	37,021
3	Profil kinerja kelembagaan masyarakat jasa konstruksi		Lembaga	2	2	2	2	2	10	6,152	7,632	7,687	7,745	7,805	37,021
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi			%	10	20	30	40	50	50	6,152	7,632	7,687	7,745	7,805	37,021
PELAKSANA: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	SDM Pejabat Fungsional yang terfasilitasi		Orang	100	100	100	100	100	500	6,152	7,632	7,687	7,745	7,805	37,021
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN			%	85	90	95	43	58	58	12,305	15,264	15,375	15,490	15,609	74,042
1	Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK		%	0	0	0	15	20	20						

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2	Persentase ketersediaan data supply berdasarkan subvarian SDMPK di SIMPK	%	0	0	0	10	15	15						
	3	Persentase ketersediaan data BUJK	%	0	0	0	50	100	100						
	4	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	%	0	0	0	95	96	96						
PELAKSANA: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI															
	OUTPUT KEGIATAN :														
	1	Profil pengelolaan NSPK terkait pemanfaatan MPK, teknologi, dan TKDN	NSPK	1	1	1	1	1	5	6,152	7,632	7,687	7,745	7,805	37,021
	2	Profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN	Layanan	1	1	1	1	1	5	6,152	7,632	7,687	7,745	7,805	37,021
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya															
INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR			%	72,39	75,61	77,97	84,50	87,81	87,81						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya															
INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya			%	55,92	63,35	71,54	90,44	94,58	94,58						
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON 1, INFORMASI JASA KONSTRUKSI, DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA															
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya			%	100	100	100	93	95	98	337,860	419,118	422,163	425,332	428,596	2,033,069

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	100	100	94	94	97	330,860	412,118	415,163	418,332	421,596	1,998,069
1	Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan barang milik negara, dan pengelolaan ketatausahaan	%	0	0	0	100	100	100						
2	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	0	0	0	100	100	100						
3	Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai	%	0	0	0	100	100	100						
4	Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran	%	0	0	0	86,11	86,21	86,16						
5	Nilai SAKIP Unit Organisasi	%	0	0	0	78,46	78,56	78,51						
6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	0	0	0	97	98	98						
KOORDINATOR: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSTRUKSI														
PELAKSANA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSTRUKSI														
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	5	14,815	18,453	18,590	18,732	18,878	89,468
2	Layanan Sarana Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	59,612	74,253	74,801	75,372	75,960	359,999
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5	28,077	34,972	35,231	35,499	35,776	169,555
4	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	228,356	284,439	286,542	288,729	290,981	1,379,047
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	68	75	84	91.6	97	97	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	35,000

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi	%	0	20	50	80	100	100						
	2	Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi	%	85	90	95	98	100	100						
	3	Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi	%	100	100	100	100	100	100						
	4	Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi	%	55	65	75	80	85	85						
	5	Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100						
PELAKSANA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSTRUKSI															
	OUTPUT KEGIATAN :														
	1	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	5	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	35,000

8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									525,188,892	563,788,892	933,412,565	1,028,720,865	1,128,313,721	4.179.424.936
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
1	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR	%	70	71	72	84,89	85	85						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR														
		%	70	71	72	84,89	85	85	443,508,817	452,755,892	729,923,590	793,633,173	883,144,273	3,302,965,745
KEGIATAN 1: Penyelenggaraan Pengembangan Talenta														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas pengelolaan penilaian kompetensi, pemetaan karir, manajemen kinerja, dan kepatuhan internal														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Jumlah ASN yang dikembangkan talentanya	Orang	860	860	860	860	860	4,300	55,547,358	39,942,381	80,444,284	88,538,497	95,175,632	359,648,151
KOORDINATOR: Pusat Pengembangan Talenta														
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Talenta														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pengembangan Talenta ASN													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.1	Jumlah ASN yang dinilai kompetensinya	Orang	7,820	6,320	6,820	6,320	6,820	34,100						
1.2	Persentase ASN yang dipantau kinerjanya dan memiliki profil kinerja	%	97	97	97	97	97	97						
1.3	Jumlah ASN yang dipetakan karirnya	Orang	860	860	860	860	860	4,300						
2	Pelaksanaan Kepatuhan Internal													
2.1	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan internal dan manajemen risiko	Laporan	2	2	2	2	2	10						
2.2	Jumlah laporan pengendalian dan pemantauan kepatuhan internal	Laporan	2	2	2	2	2	10						
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Jumlah ASN Bidang PUPR yang dikembangkan kompetensinya	Orang	10.330	10.000	10.063	10.233	10.163	50.789	242,378,158	124,262,241	432,110,706	471,148,916	524,471,906	1,794,371,927
KOORDINATOR: Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman														
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Sumber Daya Air dan Permukiman													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.1	Jumlah ASN Bidang SDA dan Permukiman yang dikembangkan kompetensinya	Orang	2.850	2.700	2.737	2.837	2.757	13.881						
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah													
1.1	Jumlah ASN Bidang Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang dikembangkan kompetensinya	Orang	2.120	2.000	2.006	2.026	2.006	10.158						
1.2	Jumlah Skema Sertifikasi	NSPK	-	1	1	2	3	7						
1.3	Jumlah ASN Bidang PUPR yang tersertifikasi	Orang	-	50	50	100	150	350						
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Manajemen													
1.1	Jumlah ASN Bidang Manajemen yang dikembangkan kompetensinya	Orang	5.360	5.300	5.320	5.370	5.400	26.750						
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR		%	72,39	75,61	77,97	84,50	87,81	87,81						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya		%	55,92	63,35	71,54	90,44	94,58	94,58						
KEGIATAN : Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur PUPR														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:			85,35	85,70	86,20	87,81	91,38	91,38	145,583,301	288,551,270	217,368,600	233,945,760	263,496,736	1,148,945,667
1.	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	%	80	80	81	84	91,75	91,75						
2.	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%	100	100	100	100	100	100						
3.	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	%	80	80	81	84,5	91,75	91,75						
4.	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	89	90	90	91	93	93						
5.	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	%	89	90	90	91	93	93						
6.	Nilai SAKIP Unit Organisasi	%	76	76	77	78,40	81,5	81,5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
KOORDINATOR : Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia															
PELAKSANA: Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
	1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
	2.1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
3	Layanan Manajemen SDM Internal														
	3.1	Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
	4.1	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Politeknik Pekerjaan Umum															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
	1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
2.1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
3	Layanan Manajemen SDM Internal													
3.1	Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
4.1	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Talenta														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
2.1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
3	Layanan Manajemen SDM Internal													
3.1	Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.1	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Layanan	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan	1	1	1	1	1	5						
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
2.1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1	5						
3	Layanan Manajemen SDM Internal														
3.1	Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal		Layanan	1	1	1	1	1	5						
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
4.1	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Layanan	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan	1	1	1	1	1	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
2.1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
3	Layanan Manajemen SDM Internal													
3.1	Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
4.1	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
2.1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
3	Layanan Manajemen SDM Internal													
3.1	Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.1	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: UPT Balai														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
2.1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
3	Layanan Manajemen SDM Internal													
3.1	Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
4.1	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
PROGRAM : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja (BPSDM)														
1	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja	%	25	28	80	90	90	90						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang PUPR Yang Bersertifikat														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan Vokasi Bidang PUPR		%	25	28	80	90	90	90	81,680,075	111,033,000	203,488,976	235,087,692	245,169,448	876,459.191
1	Persentase Nilai Mahasiswa (IPK >3)	%	50	55	60	80	80	80						
2	Persentase Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional	%	0	0	100	100	100	100						
KEGIATAN 4: Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya mutu kuantitas dan kualitas SDM pendidikan vokasi bidang PUPR yang kompeten														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Jumlah peserta didik dan kualitas SDM pendidikan vokasi bidang PUPR yang kompeten		Orang	300	525	800	1.125	1.575	4.325	81,680,075	111,033,000	203,488,976	235,087,692	245,169,448	876,459.191
1.	Jumlah mahasiswa program studi vokasional	Orang	300	525	650	825	1.050	3.350						
2.	Jumlah mahasiswa tersertifikasi kompetensi	Orang	0	0	150	300	525	975						
KOORDINATOR : Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
PELAKSANA: Politeknik Pekerjaan Umum														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum													
1.1	Jumlah mahasiswa program studi pendidikan vokasi bidang PUPR	Orang	300	525	650	825	1.050	3.350						

9. Inspektorat Jenderal

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: INSPEKTORAT JENDERAL														
PROGRAM: Dukungan Manajemen														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	72	75	82	88	91	91	111.744	120.081	123.729	90.265	92.933	538.752
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR	%	72	75	82	88	91	91	111.744	120.081	123.729	90.265	92.933	538.752
	1 <i>Tingkat kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model /IACM);</i>	Level	3	3	4	4	4	4						
	2 <i>Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan</i>	%	66	69	73	82	87	87						
	3 <i>Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR</i>	%	82	85	87	91	93	93						
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR									46.653	40.904	42.131	23,716	25,336	178,741
SASARAN KEGIATAN 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	%	70	74	78	83	87	87	8.791	6.143	6.328	2.850	3.904	28.016
	1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	Nilai	90	90	90	90	90	90						
	2 Persentase pengawasan di Inspektorat I	%	70	75	80	85	90	90						
	3 Tingkat penanganan pengaduan masyarakat	%	75	80	85	90	95	95						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I	%	45	50	55	60	65	65						
5.a	Hasil penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I													
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality assurance)	%	85	87,5	90	-	-	-						
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	Nilai	3	3	3	-	-	-						
	c. Persentase penerapan Manajemen Resiko	%	5	25	45	-	-	-						
5.b	Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi													
	a. Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	%	-	-	-	92,5	95	95						
	b. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1	Nilai	-	-	-	4	4	4						
	c. Persentase penerapan Manajemen Resiko	%	-	-	-	65	85	85						
KOORDINATOR : Sekretariat Inspektorat Jenderal														
PELAKSANA: Inspektorat I														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	8.791	6.143	6.328	2.850	3.904	28.016
SASARAN KEGIATAN 1.2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	%	70	74	78	83	87	87	5.325	6.143	6.328	2.850	3.167	23.813

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	Nilai	90	90	90	90	90	90							
2	Persentase pengawasan di Inspektorat II	%	70	75	80	85	90	90							
3	Tingkat penanganan pengaduan masyarakat	%	75	80	85	90	95	95							
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	%	45	50	55	60	65	65							
5.a	Hasil penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I														
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality assurance)	%	85	87,5	90	-	-	-							
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	Nilai	3	3	3	-	-	-							
	c. Persentase penerapan Manajemen Resiko	%	5	25	45	-	-	-							
5.b	Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi														
	a. Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	%	-	-	-	92,5	95	95							
	b. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1	Nilai	-	-	-	4	4	4							
	c. Persentase penerapan Manajemen Resiko	%	-	-	-	65	85	85							
PELAKSANA: Inspektorat II															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	5	5.325	6.143	6.328	2.850	3.167	23.813
SASARAN KEGIATAN 1.3: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	%	70	74	78	83	87	87	9.561	6.143	6.328	2.850	4.811	29.693
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III	Nilai	90	90	90	90	90	90						
2	Persentase pengawasan di Inspektorat III	%	70	75	80	85	90	90						
3	Tingkat penanganan pengaduan masyarakat	%	75	80	85	90	95	95						
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III	%	45	50	55	60	65	65						
5.a	Hasil penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I													
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality assurance)	%	85	87,5	90	-	-	-						
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	Nilai	3	3	3	-	-	-						
	c. Persentase penerapan Manajemen Resiko	%	5	25	45	-	-	-						
5.b	Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi													
	a. Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	%	-	-	-	92,5	95	95						
	b. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1	Nilai	-	-	-	4	4	4						
	c. Persentase penerapan Manajemen Resiko	%	-	-	-	65	85	85						
PELAKSANA: Inspektorat III														
	OUTPUT KEGIATAN :													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	9.561	6.143	6.328	2.850	4.811	29.693
SASARAN KEGIATAN 1.4: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	%	70	74	78	83	87	87	8.653	6.143	6.328	2.850	3.777	27.751
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV	Nilai	90	90	90	90	90	90						
2	Persentase pengawasan di Inspektorat IV	%	70	75	80	85	90	90						
3	Tingkat penanganan pengaduan masyarakat	%	75	80	85	90	95	95						
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV	%	45	50	55	60	65	65						
5.a	Hasil penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I													
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality assurance)	%	85	87,5	90	-	-	-						
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	Nilai	3	3	3	-	-	-						
	c. Persentase penerapan Manajemen Resiko	%	5	25	45	-	-	-						
5.b	Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi													
	a. Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	%	-	-	-	92,5	95	95						
	b. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1	Nilai	-	-	-	4	4	4						
	c. Persentase penerapan Manajemen Resiko	%	-	-	-	65	85	85						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: Inspektorat IV														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	8.653	6.143	6.328	2.850	3.777	27.751
SASARAN KEGIATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	%	70	74	78	83	87	87	7.254	6.856	7.062	3.850	3.581	28.603
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	Nilai	90	90	90	90	90	90						
2	Persentase pengawasan di Inspektorat V	%	70	75	80	85	90	90						
3	Tingkat penanganan pengaduan masyarakat	%	75	80	85	90	95	95						
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	%	45	50	55	60	65	65						
5.a	Hasil penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I													
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality assurance)	%	85	87,5	90	-	-	-						
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	Nilai	3	3	3	-	-	-						
	c. Persentase penerapan Manajemen Resiko	%	5	25	45	-	-	-						
5.b	Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi													
	a. Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	%	-	-	-	92,5	95	95						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	b. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1	Nilai	-	-	-	4	4	4						
	c. Persentase penerapan Manajemen Resiko	%	-	-	-	65	85	85						
PELAKSANA: Inspektorat V														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	7.254	6.856	7.062	3.850	3.581	28.603
SASARAN KEGIATAN 1.6: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja Inspektorat VI														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	%	62	68	74	84	90	90	5.926	7.881	8.117	8.021	5.496	35.441
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Audit Inspektorat VI	Nilai	90	90	90	90	90	90						
2	Tingkat pelaksanaan Audit Investigatif	%	70	75	80	85	90	90						
3	Presentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti	%	45	50	55	60	65	65						
4	Jumlah Kumulatif Penghargaan/Predikat menuju WBK dan WBBM yang diperoleh Unit Kerja	Unit Kerja	0	1	2	7	9	9						
5	Jumlah Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/diimplementasikan	Rekomendasi	2	2	2	2	2	2						
6	Survei Penilaian Integritas	Nilai	74	76	78	75	77	77						
PELAKSANA: Inspektorat VI														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	5.926	7.881	8.117	8.021	5.496	35.441
SASARAN KEGIATAN 1.7: Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	Dokumen	3	5	5	4	2	19	1.143	1.594	1.642	445	600	5.424
1	<i>Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	5						
2	<i>Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan</i>	Dokumen	2	4	4	3	1	14						
PELAKSANA: Sekretariat Inspektorat Jenderal														
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.143	1.594	1.642	445	600	5.424
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	%	72,39	75,61	77,97	84,50	87,81	87,81						
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%	55,92	63,35	71,54	90,44	94,58	94,58						
KEGIATAN 2: Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan														
SASARAN KEGIATAN: Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	%	82	85	87	91	93	93	65.091	79.177	81.598	66.549	67.597	360.012
1	<i>Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan</i>	%	85	87	90	92	93	93						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	%	67	72	77	82	90	90						
3	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	90	90	90	90	90	90						
4	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	%	90	90	90	90	90	90						
5	Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR	Kategori	BB	BB	BB	A	A	A						
6a	Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR	Nilai	3	3	3	-	-	-						
6b	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 Itjen oleh APIP	Nilai	-	-	-	4	4	4						
7	Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik bidang Pengawasan	Dokumen	-	-	-	1	1	1						
8	Tingkat Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum bidang Pengawasan Intern	Dokumen	-	-	-	1	1	1						
9	Tingkat Layanan Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal	%	-	-	-	75	80	80						
10	Tersusunnya Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHP Pengaduan, IHP, IHP BPKP)	Dokumen	-	-	-	3	3	6						
11	Tersusunnya Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Pemeriksaan BPK RI	Dokumen	-	-	-	2	2	4						
12	Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR	%	-	-	-	100	100	100						
PELAKSANA: Sekretariat Inspektorat Jenderal														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	5	13.643	17.177	17.692	10.643	10.156	69.311
2	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	1	1	1	1	1	5	2.796	2.435	2.509	2.535	1.800	12.075

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	48.653	59.565	61.397	53.371	55.641	278.627

10. Sekretariat Jenderal

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT JENDERAL														
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	%	72,39	75,61	77,97	84,50	87,81	87,81	520.056	665.203	695.853	595.880	600.602	3.077.594
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
	Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%	55,92	63,35	71,54	90,44	94,58	94,58	520.056	665.203	695.853	595.880	600.602	3.077.594
KEGIATAN 1: Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan Umum														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan Umum	%	77,76	80,73	83,71	95,61	96,30	96,30	93.104	90.903	98.507	81.096	66.831	430.441
	Tingkat layanan pengelolaan perencanaan		79,48	80,50	81,52	92,47	93,85	93,85						
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen	%	79,86	80,00	80,10	80,20	80,30	80,30						
2	Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi yang lengkap, akurat dan terkini	%	95,50	96,00	96,50	98,52	99,99	99,99						
3	Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKAKL	%	76,00	77,00	78,00	89,07	92,65	92,65						
4	Tingkat layanan kerja sama luar negeri yang efektif	%	72,00	74,00	76,00	100,00	100,00	100,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
	Tingkat layanan pengelolaan keuangan		81,55	82,43	83,30	91,03	91,34	91,34						
1	Tingkat Kualitas Layanan Perbendaharaan dan PNBP	%	83,00	83,50	84,00	86,90	87,50	87,50						
2	Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian	%	86,00	87,00	88,00	92,16	92,51	92,51						
3	Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Kementerian	%	81,00	81,50	82,00	92,00	92,50	92,50						
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	72,00	74,00	76,00	92,00	91,40	91,40						
5	Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	%	81,00	81,50	82,00	92,00	92,50	92,50						
	Tingkat layanan BMN		70,00	75,00	80,00	100,00	100,00	100,00						
1	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	70,00	75,00	80,00	100,00	100,00	100,00						
2	Tingkat Efektivitas Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penertiban BMN													
	Tingkat layanan umum		80,00	85,00	90,00	98,96	100,00	100,00						
1	Tingkat Kualitas pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	%	80,00	85,00	90,00	98,96	100,00	100,00						
2	Tingkat Kualitas Pengelolaan urusan kesehatan, fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan pegawai	%	80,00	85,00	90,00	98,96	100,00	100,00						
3	Tingkat Kualitas pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan	%	80,00	85,00	90,00	98,96	100,00	100,00						
4	Tingkat Kualitas pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan serta protokoler pimpinan Kementerian	%	80,00	85,00	90,00	98,96	100,00	100,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
KOORDINATOR : Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri														
PELAKSANA: Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri		%	79,48	80,50	81,52	92,47	93,85	93,85	32.909	38.877	40.200	26.182	27.660	165.828
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	15.000	23.609	23.700	16.910	16.960	96.229
2	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Layanan	1	1	1	-	-	3	17.909	15.268	16.500	-	-	49.677
3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	237	240	477
4	Layanan Perencanaan dan Evaluasi Program	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	8.841	10.207	19.048
5	Layanan Penyusunan Laporan Kinerja	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	194	253	447
PELAKSANA: Biro Keuangan		%	81,55	82,43	83,30	91,03	91,34	91,34	17.028	13.350	17.400	13.210	12.686	73.140
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	-	-	3	17.028	13.350	17.400	-	-	47.778
2	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	13.210	12.686	25.362
PELAKSANA: Biro Pengelolaan Barang Milik Negara		%	70,00	75,00	80,00	100,00	100,00	100,00	17.643	16.362	16.362	10.029	10.029	70.425
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	-	-	3	17.643	16.362	16.932	-	-	50.937
2	Layanan BMN	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	10.029	10.029	20.058
PELAKSANA: Biro Umum		%	80,00	85,00	90,00	98,96	100,00	100,00	25.524	22.314	24.545	31.674	16.455	108.100
OUTPUT KEGIATAN :														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
1	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	3	25.524	22.314	24.545	24.346	10.706	94.989
2	Layanan BMN	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	500	600	1.100
3	Layanan Protokoler	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	6.572	4.579	11.185
4	Layanan Data dan Informasi	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	50	250	300
5	Layanan Manajemen SDM	Orang	-	-	-	1	1	2	-	-	-	206	320	526
KEGIATAN 2: Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya pengelolaan dan pengadministrasian pegawai Kementerian PUPR														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai		%	50,00	65,00	75,00	92,00	95,00	95,00	22.164	15.550	15.861	12.299	12.897	78.771
1. Kualitas Layanan Manajemen SDM		%	50,00	65,00	75,00	92,00	95,00	95,00						
2. Tingkat Kesesuaian Kelembagaan														
KOORDINATOR: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana														
PELAKSANA: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan SDM	Layanan	1	1	1	-	-	3	20.589	11.200	11.424	8.623	8.557	60.393

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
2	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	-	-	3	1.575	4.350	4.437	2.394	2.990	15.746
3	Layanan Data dan Informasi	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1.282	1.350	2.632
KEGIATAN 3: Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Advokasi Hukum														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum yang progresif														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum		%	73,88	76,07	77,86	93,06	96,30	96,30	17.102	14.526	17.898	10.492	8.991	69.009
1	Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum	%	75,00	73,68	72,22	100,00	100,00	100,00						
2	Tingkat efektivitas penyebarluasan produk hukum	%	76,92	80,65	81,82	92,12	93,94	93,94						
3	Tingkat efektivitas advokasi hukum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4	Tingkat kepatuhan internal di lingkungan Setjen	%	10,00	20,00	40,00	79,68	85,15	85,15						
5	Tingkat efektivitas penyusunan perjanjian	%	40,00	50,00	50,00	60,00	80,00	80,00						
6	Tingkat efektivitas penyusunan pertimbangan hukum	%	60,00	66,67	66,67	73,33	100,00	100,00						
KOORDINATOR: Biro Hukum														
PELAKSANA: Biro Hukum														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Hukum	Layanan	1	1	1	-	-	3	17.102	14.526	17.898	4.906	4.571	59.003
2	Layanan Bantuan Hukum	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	4.511	3.200	7.711
3	Layanan Manajemen SDM	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	355	500	855

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
4	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	720	720	1.440
KEGIATAN 4: Penyelenggaraan Fasilitas Infrastruktur Daerah														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas fasilitas dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas fasilitas dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah		%	25,00	35,00	55,00	93,00	95,00	95,00	15.856	24.562	30.000	23.024	22.974	116.416
1	Tingkat Kualitas Perencanaan	%	25,00	35,00	55,00	97,00	98,00	98,00						
2	Tingkat kualitas pembinaan	%	25,00	35,00	55,00	93,00	94,00	94,00						
3	Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi	%	25,00	35,00	55,00	90,00	92,00	92,00						
4	Tingkat capaian SPM	%	25,00	35,00	55,00	90,00	-	90,00						
KOORDINATOR: Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah														
PELAKSANA: Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	541,00	541,00	541,00	-	-	1623,00	15.856	24.562	30.000	18.773	22.974	112.165
2	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	-	-	-	541,00	541,00	1082,00	-	-	-	4.251	-	4.251
KEGIATAN 5: Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	%	76,00	77,95	79,75	95,00	95,42	95,42	42.037	39.011	43.000	22.074	32.324	178.446
1	Layanan Hubungan Masyarakat	%	77,00	78,00	79,00	98,48	98,30	98,30						
2	Layanan Publikasi melalui berbagai Media	%	78,00	80,00	82,00	95,80	96,65	96,65						
3	Layanan Informasi Pimpinan	%	75,00	78,00	80,00	95,00	95,10	95,10						
4	Pelayanan Publik	%	70,00	73,00	76,00	85,00	86,18	86,18						
KOORDINATOR: Biro Komunikasi Publik														
PELAKSANA: Biro Komunikasi Publik														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Kehumasan dan Protokoler	Layanan	1	1	1	-	-	3	42.037	39.011	43.000	-	-	124.048
2	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	21.265	31.268	52.533
3	Layanan Manajemen SDM	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	724	927	1.651
4	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	85	129	214
KEGIATAN 6: Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Bidang PUPR														
SASARAN KEGIATAN: Digital Melayani														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan digital	%	24,43	37,61	52,28	67,99	89,47	89,47	34.948	151.926	139.294	111.744	112.203	550.115
1	Menjadi Smart Office	%	32,91	43,51	58,18	72,84	87,50	87,50						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
2	Layanan Handal/Prima (kemudahan dalam pengajuan permohonan layanan, proses cepat, dan layanan yang diberikan sesuai permohonan)	%	24,23	33,82	47,15	63,58	98,00	98,00						
3	Manajemen Perubahan /Tata Kelola	%	19,37	35,49	51,50	67,57	82,91	82,91						
KOORDINATOR: Pusat Data dan Teknologi Informasi														
PELAKSANA: Pusat Data dan Teknologi Informasi														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	-	-	3	34.948	151.926	139.294	-	-	326.168
2	Data dan Informasi Publik	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	3.342	3.756	6.994
3	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	-	-	-	1	1	2	-	-	-	68.940	83.980	152.121
4	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	-	-	-	1	1	2	-	-	-	34.962	19.518	57.597
5	Layanan Manajemen SDM Internal	Orang	-	-	-	1	1	2	-	-	-	211	211	422
6	Sistem Informasi Pemerintahan	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	4.738	2.523	6.812
KEGIATAN 7: Pengkajian dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan kajian dan pemantauan kebijakan														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan kajian dan pemantauan kebijakan		%	42,50	53,75	65,00	91,25	92,88	92,88	-	6.285	7.542	4.955	5.500	24.282
1	Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Menteri secara profesional dan akuntabel	%	30,00	40,00	50,00	85,00	90,45	90,45						
2	Tingkat pelaksanaan telaahan dan kajian untuk mendukung kebijakan Menteri	%	35,00	50,00	65,00	90,00	92,50	92,50						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
3	Tingkat efektivitas penyusunan agenda prioritas Menteri	%	55,00	65,00	75,00	95,00	91,30	91,30						
4	Tingkat kepuasan dukungan pelaksanaan kebijakan Menteri (substantif program dan kegiatan)	%	50,00	60,00	70,00	95,00	97,25	97,25						
KOORDINATOR: Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan														
PELAKSANA: Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan														
1	Layanan Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi kebijakan	1	1	1	-	-	3	-	6.285	7.542	-	-	13.827
2	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	858	-	858
3	Layanan Manajemen SDM	Orang	-	-	-	1	1	2	-	-	-	887	1.000	1.887
4	Layanan Analisis Kebijakan Internal	Dokumen	-	-	-	1	1	2	-	-	-	3.210	4.500	7.710
KEGIATAN 8: Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	294.845	322.440	343.751	330.198	338.883	1.610.273
KOORDINATOR: Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri														
PELAKSANA: Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri														
OUTPUT KEGIATAN :									22.691	22.450	28.539	16.112	18.717	108.509
1	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	16.884	18.950	23.900	14.052	17.207	90.993

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	-	-	3	2.208	958	909	-	-	4.075
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.400	-	1.400	1.122	672	4.594
4	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	699	759	750	488	388	3.084
5	Layanan SDM	Orang	1	1	1	1	1	5	1.200	1.783	1.280	450	450	5.163
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	1	-	1	-	-	2	300	-	300	-	-	600
PELAKSANA: Biro Keuangan														
OUTPUT KEGIATAN :									12.772	12.215	13.150	10.889	12.377	61.403
1	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	10.467	10.071	11.000	10.042	11.540	53.120
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	-	-	3	280	299	500	-	-	1.079
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	858	900	750	602	592	3.702
4	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	150	250	200	245	245	1.090
5	Layanan SDM	Orang	1	1	1	-	-	3	857	620	600	-	-	2.077
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	1	1	1	-	-	3	160	75	100	-	-	335
PELAKSANA: Biro Pengelolaan Barang Milik Negara														
OUTPUT KEGIATAN :									31.557	29.167	29.167	27.754	28.443	146.088
1	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	24.693	27.047	27.047	26.054	26.743	131.584
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	-	-	3	1.000	720	720	-	-	2.440
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.500	600	600	900	900	4.500
4	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	2.750	700	700	100	200	4.450

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
5	Layanan Prasarana Internal	Unit	-	-	-	1	1	2	-	-	-	700	600	1.300
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	1	1	1	-	-	3	1.614	100	100	-	-	1.814
PELAKSANA: Biro Umum														
OUTPUT KEGIATAN :									149.476	139.686	153.655	178.964	159.537	793.731
1	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	138.376	130.336	143.370	159.314	149.287	733.096
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	-	-	3	1.700	1.500	1.650	-	-	4.850
3	Layanan Umum	Layanan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	250	250	500
4	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	6.000	6.600	7.260	19.400	10.000	49.260
5	Layanan SDM	Orang	1	1	1	-	-	3	1.700	1.000	1.100	-	-	3.800
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	1	1	1	-	-	3	1.700	250	275	-	-	2.225
PELAKSANA: Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana														
OUTPUT KEGIATAN :									14.636	16.950	17.050	14.651	29.650	92.937
1	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	12.876	14.500	14.600	12.846	27.845	82.667
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	-	-	3	250	450	450	-	-	1.150
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	460	900	900	1.125	1.125	4.510
4	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	650	600	600	680	680	3.210
5	Layanan SDM	Orang	1	1	1	-	-	3	200	250	250	-	-	700
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	1	1	1	-	-	3	200	250	250	-	-	700
PELAKSANA: Biro Hukum														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
OUTPUT KEGIATAN :									11.798	12.430	12.527	10.668	11.873	59.296
1	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	9.646	9.506	9.900	8.718	9.862	47.632
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	-	-	3	480	380	397	-	-	1.257
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	338	800	900	1.700	1.761	5.499
4	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	100	750	200	250	250	1.550
5	Layanan SDM	Orang	1	1	1	-	-	3	556	594	650	-	-	1.800
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	1	1	1	-	-	3	678	400	480	-	-	1.558
PELAKSANA: Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah														
OUTPUT KEGIATAN :									11.652	10.808	11.700	9.882	11.282	55.324
1	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	7.808	8.823	9.500	8.422	9.632	44.185
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	500	355	450	150	150	1.605
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	979	280	300	960	1.000	3.519
4	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	1.665	900	950	350	500	4.365
5	Layanan SDM	Orang	1	1	1	-	-	3	400	200	300	-	-	900
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	1	1	1	-	-	3	300	250	200	-	-	750
PELAKSANA: Biro Komunikasi Publik														
OUTPUT KEGIATAN :									14.463	16.026	17.640	13.212	14.332	75.673
1	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	11.376	12.800	14.000	12.464	12.834	63.474
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	-	-	3	306	257	280	-	-	843

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	2.031	1.899	2.000	298	498	6.726
4	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	750	750	1.000	450	1.000	3.950
5	Layanan SDM	Orang	-	1	1	-	-	2	-	320	350	-	-	670
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	-	-	1	-	-	1	-	-	10	-	-	10
PELAKSANA: Pusat Data dan Teknologi Informasi														
OUTPUT KEGIATAN :									25.800	28.992	25.597	18.659	22.412	121.460
1	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	19.717	17.344	20.000	13.873	16.085	87.019
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	-	-	3	1.119	1.047	1.180	-	-	3.346
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.684	7.987	1.050	3.765	5.351	19.837
4	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	686	200	500	500	455	2.341
5	Layanan SDM	Orang	1	1	1	-	-	3	1.752	2.067	2.142	-	-	5.961
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	1	1	1	-	-	3	842	347	725	-	-	1.914
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	521	521	1.042
PELAKSANA: Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan														
OUTPUT KEGIATAN :									-	33.715	34.726	29.405	30.260	128.106
1	Layanan Perkantoran	Layanan	1	-	1	1	1	3	-	28.233	29.080	26.616	28.016	111.945
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	-	1	-	-	1	-	1.352	1.393	-	-	2.745
3	Layanan Umum	Layanan	1	-	1	1	1	3	-	1.623	1.672	2.013	2.013	7.321
4	Sarana Internal	Unit	1	-	1	1	1	3	-	2.107	2.170	776	231	5.284
5	Layanan SDM	Orang	1	-	1	-	-	1	-	300	309	-	-	609
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	1	-	1	-	-	1	-	100	103	-	-	203

C. MANUAL INDIKATOR KINERJA

1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
SS	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	(1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%)	Non Komposit	Diukur dari kapasitas air baku yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan air baku (domestik, industri, dan pariwisata) pada wilayah tersebut	Tahunan	Internal
		(2) Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat (%)	Non Komposit	Diukur dari perbandingan antara penambahan luas kawasan terlindungi dari bencana banjir dengan target Renstra 2015-2019 seluas 200.000 hektar	Kumulatif	Internal
		(3) Kapasitas tampung per kapita (m ³ /kapita)	Non Komposit	Diukur dari kumulatif kapasitas tampung air yang sudah beroperasi (waduk, embung, dam upgrading, dan pemanfaatan tampungan alami) dibandingkan dengan jumlah penduduk. Data jumlah penduduk (jiwa) menggunakan data BPS per tahun 2019	Kumulatif	Internal/BPS
		(4) Volume layanan air untuk meningkatkan	Non Komposit	Diukur dari jumlah air yang dialirkan untuk melayani daerah irigasi kewenangan Pusat	Tahunan	Internal

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		produktivitas irigasi (m3/tahun/hektar)		dibandingkan dengan luas daerah irigasi yang dilayani dalam 1 (satu) tahun		
SP	Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	(1) Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun (m3/detik)	Non Komposit	Diukur dari tambahan debit layanan sarana prasarana air baku yang dibangun bersumber dari air tanah dan air permukaan	Tahunan	
		(2) Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir (hektar)	Non Komposit	Diukur dari luas kawasan yang terlindungi dari banjir	Tahunan	
		(3) Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo (%)	Non Komposit	Diukur dari persentase semburan lumpur yang muncul di tahun eksisting dibandingkan dengan semburan lumpur yang ditangani	Tahunan	
		(4) Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun (juta m3)	Non Komposit	Diukur kumulatif kapasitas tampung efektif bendungan pada tahun eksisting (mencakup bendungan, embung, pemanfaatan tampungan alami, dan dam upgrading)	Kumulatif	
		(5) Jumlah potensi tenaga listrik dari	Non Komposit	Diukur dari kumulatif potensi tenaga listrik dari bendungan	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		infrastruktur SDA (MW)		yang selesai pada tahun eksisting		
	(6)	Jumlah DAS yang direvitalisasi (DAS)	Komposit	Diukur dari jumlah DAS yang direvitalisasi (Asahan, Cisadane, Ciliwung, Citarum)	Tahunan	
	(7)	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK (hektar)	Non Komposit	Diukur dari luas Daerah Irigasi yang dibangun mencakup irigasi permukaan, rawa, tambak, non-padi, JIAT (baik melalui pendanaan APBN, APBD maupun DAK)	Tahunan]	
	(8)	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK (hektar)	Non Komposit	Diukur dari luas Daerah Irigasi yang direhabilitasi inc irigasi permukaan, rawa, tambak, non-padi, JIAT (baik melalui pendanaan APBN maupun DAK)	Tahunan	
	(9)	Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi (DAS)	Non Komposit	Diukur dari jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	Tahunan	
	(10)	Tingkat layanan prasarana SDA (%)	Non Komposit	Menggunakan indikator layanan prasarana SDA menuju Layanan OP Bangkit (kelembagaan, aset, ketersediaan peralatan, SDM,	Kumulatif	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
				regulasi, aset, dan pemenuhan AKNOP)		
SK-1	Meningkatnya layanan kesekretariatan Dewan SDA nasional (DSDAN)	Tingkat layanan kesekretariatan manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) (%)		Diukur dari perbandingan jumlah sidang pleno yang difasilitasi dengan yang direncanakan	Tahunan	
SK-2.1	Meningkatnya perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi	(1) Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan UPT (%)		Diukur dari deviasi antara jumlah program prioritas yang direncanakan dengan jumlah program prioritas yang dianggarkan	Tahunan	
		(2) Persentase penurunan jumlah revisi anggaran UPT (%)		Diukur dari penurunan jumlah revisi anggaran UPT tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah revisi anggaran UPT tahun sebelumnya	Tahunan	
		(3) Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Wilayah Kerja UPT (%)		Diukur dari jumlah dokumen pola dan rencana WS wilayah kerja UPT dibandingkan dengan jumlah WS yang menjadi wilayah kerja	Tahunan	
SK-2.2	Meningkatnya pembinaan perencanaan, pemrograman,	1. Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran		Diukur dari deviasi antara jumlah program prioritas yang direncanakan dengan jumlah program prioritas yang	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
	penganggaran, evaluasi dan pengadaan tanah	tahunan Ditjen SDA (%)		dianggarkan di lingkungan Ditjen SDA		
		2. Persentase penurunan jumlah revisi anggaran di lingkungan Ditjen SDA (%)		Diukur berdasarkan pemantauan pada aplikasi SAKTI	Tahunan	
		3. Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Kewenangan Pusat di lingkungan Ditjen SDA (%)		Diukur dari persentase jumlah dokumen pola dan rencana WS Kewenangan Pusat yang sudah ditetapkan (kewenangan pusat = 64 WS)	Tahunan	
		4. Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Ditjen SDA (%)		Diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP Ditjen SDA oleh Itjen	Tahunan	
		5. Persentase progres pengadaan tanah untuk infrastruktur SDA (%)		Diukur dari luas tanah yang akan siap dibayar dibandingkan dengan luas tanah yang akan dibebaskan	Tahunan	
		6. Persentase pencapaian target wilayah sungai yang	Non Komposit	Diukur dari wilayah sungai yang dinilai kinerja pengelolaannya pada 10 WS	Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		dinilai indeks penilaian kinerjanya				
		7. Indeks evaluasi kinerja anggaran	Non Komposit	Diukur dari nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada sistem SmArt DJA	Tahunan	Internal
SK-2.3	Terlaksananya pengadaan tanah untuk infrastruktur	Jumlah luas tanah yang dibebaskan (hektar)		Diukur dari jumlah luas tanah yang dibebaskan untuk infrastruktur SDA	Tahunan	
SK-3.1	Meningkatnya layanan jaringan irigasi	1. Jumlah tambahan panjang jaringan irigasi yang dibangun (km)		Diukur dari jumlah panjang irigasi permukaan dan rawa yang dibangun (dengan pendanaan APBN)	Tahunan	
		2. Jumlah panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi (km)		Diukur dari jumlah panjang irigasi permukaan dan rawa yang direhabilitasi (dengan pendanaan APBN)	Tahunan	
		3. Jumlah lokasi prasarana irigasi nonpadi yang dibangun (lokasi)		Diukur dari jumlah lokasi jaringan irigasi tambak dan nonpadi yang dibangun (dengan pendanaan APBN)	Tahunan	
		4. Jumlah daerah irigasi yang dimodernisasi (daerah irigasi)		Diukur dari jumlah daerah irigasi yang dimodernisasi	Kumulatif	
SK-3.2	Meningkatnya layanan	(1) Persentase pencapaian target		Diukur dari capaian kumulatif luas layanan irigasi padi yang	Kumulatif	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
	pembinaan bidang irigasi permukaan, rawa, dan pertanian nonpadi	kumulatif luas pembangunan irigasi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK (%)		dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK dibandingkan target total pembangunan irigasi pada Renstra		
		(2) Persentase pencapaian target kumulatif luas rehabilitasi irigasi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK		Persentase pencapaian target kumulatif luas rehabilitasi irigasi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK (%)	Kumulatif	
		(3) Jumlah layanan irigasi yang terjamin airnya dari bendungan (hektar)		Diukur dari luas irigasi permukaan yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk atau tampungan buatan	Tahunan	
SK-3.3	Meningkatnya layanan teknis bidang irigasi dan rawa	(1) Jumlah layanan teknis bidang irigasi (layanan)		Diukur dari jumlah layanan teknis bidang irigasi yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Irigasi	Tahunan	
		(2) Jumlah layanan teknis bidang rawa (layanan)		Diukur dari jumlah layanan teknis bidang rawa yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Rawa	Tahunan	
SK-4.1	Meningkatnya layanan infrastruktur SDA	(1) Jumlah panjang bangunan pengendali daya		Diukur dari jumlah panjang normalisasi, tanggul, perkuatan	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
	untuk ketahanan bencana	rusak air yang dibangun (km)		tebing, kanal, drainase, break water, seawall yang dibangun		
		(2) Jumlah bangunan pendukung pengendali daya rusak air yang dibangun (unit)		Diukur dari jumlah pintu air/bendung, pompa, polder yang dibangun	Tahunan	
		(3) Jumlah bangunan pengendali lahar dan sedimen yang dibangun (unit)		Diukur dari jumlah sabo dam, check dam yang dibangun	Tahunan	
		(4) Jumlah kumulatif kawasan strategis di pesisir utara Jawa yang infrastruktur ketahanan bencananya dibangun (kawasan)		Diukur dari jumlah kumulatif normalisasi, tanggul, perkuatan tebing, kanal, drainase, break water, seawall di wilayah utara Jawa yang dibangun	Kumulatif	
		(5) Jumlah sungai pada empat DAS yang direvitalisasi (sungai)		Diukur dari kumulatif jumlah sungai yang ditangani pada empat DAS kritis (Asahan, Cisadane, Ciliwung, Citarum)	Kumulatif	
SK-4.2	Meningkatnya layanan pembinaan infrastruktur SDA	(1) Tingkat pencapaian target penurunan luas kawasan banjir (%)		Diukur capaian penurunan luas kawasan terkena dampak banjir dibandingkan dengan target total penurunan luas kawasan banjir pada Renstra	Kumulatif	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
	untuk ketahanan bencana					
		(2) Tingkat pencapaian target perlindungan pantai rawan abrasi (%)		Diukur dari capaian target perlindungan pantai rawan abrasi dibandingkan dengan target total perlindungan pantai rawan abrasi pada Renstra	Kumulatif	
		(3) Tingkat pencapaian target pembangunan pengendali sedimen dan lahar gunung berapi		Diukur dari pencapaian target pembangunan pengendali sedimen dan lahar gunung berapi dibandingkan dengan total target pembangunan pengendali sedimen dan gunung berapi pada Renstra	Kumulatif	
SK-4.3	Meningkatnya layanan teknis bidang sungai	(1) Persentase layanan advis teknis dan pendampingan bencana banjir (%)	Non Komposit	Diukur dari persentase jumlah layanan advis teknis dan pendampingan bencana banjir yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Sungai	Tahunan	
		(2) Persentase layanan data, informasi dan diseminasi (%)	Non Komposit	Diukur dari persentase jumlah layanan Data, Informasi dan Diseminasi yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Sungai	Tahunan	
		(3) Persentase layanan pengujian laboratorium (%)	Non Komposit	Diukur dari persentase jumlah layanan pengujian laboratorium yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Sungai	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		(4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan balai (nilai)	Non Komposit	Diukur dengan survey kepuasan pelanggan (sesuai Permen PANRB no. 14 Tahun 2017)	Tahunan	
SK-4.4	Meningkatnya layanan teknis bidang pantai	1. Persentase layanan advis teknis dan pendampingan bencana pesisir (%)	Non Komposit	Diukur dari persentase jumlah layanan advis teknis dan pendampingan bencana pesisir yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Pantai	Tahunan	
		2. Persentase layanan data, informasi dan diseminasi (%)	Non Komposit	Diukur dari persentase jumlah layanan Data, Informasi dan Diseminasi yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Pantai	Tahunan	
		3. Persentase layanan pengujian laboratorium (%)	Non Komposit	Diukur dari persentase jumlah layanan pengujian laboratorium yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Pantai	Tahunan	
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan balai (nilai)	Non Komposit	Diukur dengan survey kepuasan pelanggan (sesuai Permen PANRB no. 14 Tahun 2017)	Tahunan	
SK-5.1	Meningkatnya layanan tampungan air	(1) Jumlah bendungan yang selesai dibangun (unit)	Non Komposit	Diukur dari jumlah bendungan lanjutan periode 2015-2019 yang dibangun ditambah dengan bendungan baru periode 2020-2024 dan 6 bendungan baru di luar list RPJMN 2020-2024	Kumulatif	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		(2) Jumlah tampungan alami prioritas yang direvitalisasi (unit)	Non Komposit	Diukur dari jumlah 15 danau prioritas yang direvitalisasi dan dimanfaatkan	Kumulatif	
		(3) Jumlah bendungan berpotensi listrik yang selesai dibangun (unit)	Non Komposit	Diukur dari jumlah tampungan air berpotensi listrik yang selesai dibangun pada tahun eksisting	Tahunan	
SK-5.2	Meningkatnya layanan pembinaan bidang bendungan, danau, bangunan tampungan lainnya	(1) Tingkat pencapaian target kumulatif kapasitas tampung bangunan penampung air (%)		Diukur dari capaian kumulatif jumlah tambahan kapasitas tampung bangunan penampung air dibandingkan dengan target kapasitas tampung yang dibangun pada Renstra	Kumulatif	
		(2) Tingkat pencapaian target tampungan air alami prioritas yang direvitalisasi dan dimanfaatkan (%)	Non Komposit	Diukur dari capaian tampungan air alami yang dikonservasi dibandingkan dengan target tampungan air alami yang direvitalisasi berdasarkan 15 danau prioritas	Kumulatif	
SK-5.3	Meningkatnya layanan teknis bidang bendungan	Jumlah layanan teknis keamanan bendungan yang diselenggarakan (layanan)	Non Komposit	Diukur dari jumlah terselenggaranya pelaksanaan layanan teknis keamanan bendungan	Tahunan	
		Jumlah bimbingan teknis dan penyebarluasan informasi (diseminasi)	Non Komposit	Diukur dari terselenggaranya penyebarluasan informasi keamanan bendungan	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		keamanan bendungan yang diselenggarakan (dokumen)				
SK-6.1	Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku	(1) Jumlah panjang prasarana air baku yang dibangun (km)		Diukur dari panjang saluran pembawa, intake, air tanah untuk air baku yang dibangun	Tahunan	
		(2) Jumlah panjang jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun (km)		Diukur dari panjang JIAT yang dibangun	Tahunan	
SK-6.2	Meningkatnya layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku	(1) Tingkat pencapaian target tambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku (%)		Diukur dari capaian tambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku dibandingkan dengan target tambahan kapasitas air baku pada Renstra	Kumulatif	
		(2) Jumlah penambahan kapasitas air baku yang bersumber dari bendungan (m ³ /detik)		Diukur dari tambahan debit air baku yang bersumber dari waduk	Tahunan	
		(3) Persentase BBWS/BWS yang melaksanakan		Diukur dari jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan konservasi	Kumulatif	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		konservasi air tanah dan air baku (%)				
		(4) Jumlah penerapan sistem integrasi air permukaan dan air tanah untuk air baku yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS (WS)		Diukur dari jumlah WS yang menerapkan sistem integrasi air permukaan dan air tanah (conjunctive use)	Kumulatif	
SK-6.3	Meningkatnya layanan teknis bidang air tanah	Persentase layanan advis teknis dan pendampingan bencana Terkait Air Tanah (%)	Non Komposit	Diukur dari persentase jumlah layanan yang masuk dengan layanan yang terlayani.	Tahunan	
		Persentase layanan Sistem Informasi Air Tanah dan Air Baku (SIATAB) serta Diseminasi (%)	Non Komposit	Diukur dari persentase jumlah layanan advis teknis dan pendampingan bencana Terkait Air Tanah yang dilaksanakan oleh Balai Air Tanah	Tahunan	
		Persentase layanan survey, investigasi, desain, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan sumur pantau di lokasi konstruksi/bangunan PUPR (%)	Non Komposit	Diukur dari persentase jumlah layanan Investigasi, Desain, Operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan Sumur Pantau di lokasi Konstruksi / Bangunan PUPR yang dilaksanakan oleh Balai Air Tanah	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan balai (nilai)	Non Komposit	Diukur dengan survey kepuasan pelanggan (sesuai Permen PANRB no. 14 Tahun 2017) Meliputi 9 komponen : Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana	Tahunan	
SK-7.1	Meningkatnya kinerja layanan OP sarana prasarana SDA	(1) Persentase jumlah prasarana SDA yang di OP sesuai AKNOP (%)	Non Komposit	Diukur dari persentase jumlah sarana prasarana SDA yang di OP terhadap jumlah jumlah sarana prasarana SDA eksisting	Kumulatif	
		(2) Indeks RBO Benchmarking BBWS/BWS (indeks)		Diukur dengan parameter RBO Benchmarking	Kumulatif	
SK-7.2	Meningkatnya layanan pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA	(1) Persentase pencapaian target layanan prasarana SDA (%)		Diukur dari capaian layanan prasarana SDA dibandingkan dengan target capaian layanan prasarana SDA pada Renstra	Kumulatif	
		(2) Persentase Daerah Irigasi dengan indeks		Diukur dari persentase jumlah Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen	Kumulatif	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		kinerja di atas 70 persen (%)				
		(3) Persentase perizinan bidang sumber daya air yang diproses (%)		Diukur dari jumlah izin yang diproses dibagi dengan jumlah izin yang diusulkan	Kumulatif	
		(4) Persentase pencapaian target indeks RBO Benchmarking yang dicapai (%)		Diukur dari capaian target parameter RBO Benchmarking dibandingkan dengan target RBO Benchmarking pada Renstra	Kumulatif	
SK-8.1	Meningkatnya layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo	(1) Jumlah panjang tanggul penahan lumpur Sidoarjo yang direhabilitasi atau ditingkatkan (km)		Diukur dari panjang tanggul penahan lumpur Sidoarjo yang dibangun dan direhabilitasi	Tahunan	
		(2) Jumlah volume luapan lumpur (slurry) yang dialirkan ke Kali Porong (juta m ³)		Diukur dari volumen luapan lumpur yang dialirkan ke Kali Porong	Tahunan	
SK-8.2	Meningkatnya pembinaan layanan pengendalian lumpur Sidoarjo	Persentase pencapaian target pengendalian lumpur sidoarjo (%)		Diukur dari capaian volume luapan lumpur yang dialirkan ke Kali Porong dibandingkan dengan target volume luapan lumpur yang dialirkan ke Kali Porong	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
SK-9.1	Meningkatnya kesiapan teknis infrastruktur SDA	(1) Jumlah laporan hidrologi yang diintegrasikan pada SIH3 (laporan)		Diukur dari laporan hidrologi yang diintegrasikan pada SIH3	Tahunan	
		(2) Tingkat nilai layanan SISDA Unit Pelaksana Teknis (UPT) (nilai)		Diukur dari layanan teknis bidang SDA yg dilaksanakan dibandingkan dengan permintaan layanan teknis yang diajukan	Tahunan	
SK-9.2	Meningkatnya pembinaan layanan teknis bidang SDA	1. Persentase pencapaian target layanan SISDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (%)		Diukur dari capaian layanan SISDA dibandingkan dengan target layanan SISDA pada Renstra	Kumulatif	
		2. Persentase layanan teknis bidang SDA (%)		Diukur dari layanan teknis bidang SDA yg dilaksanakan dibandingkan dengan permintaan layanan teknis yg diajukan	Tahunan	
SK-9.3	Meningkatnya layanan teknis bidang sabo	1. Jumlah layanan advis/pendampingan teknis bidang sabo (layanan)	Non Komposit	Diukur dari jumlah layanan advis teknis yang dilaksanakan	Tahunan	
		2. Jumlah layanan sistem informasi dan basis data bidang sabo (layanan)	Non Komposit	Diukur dari jumlah layanan sistem informasi dan data yang diberikan	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		3. Jumlah layanan pengujian mekanisme tanah, beton, dan hidrolika (layanan)	Non Komposit	Diukur dari jumlah layanan pengujian yang dilakukan	Tahunan	
SK-9.4	Meningkatnya layanan teknis bidang hidrolika dan geoteknik keairan	1. Jumlah layanan advis/pendampingan teknis bidang hidrolika dan geoteknik	Non Komposit	Diukur dari jumlah layanan advis teknis yang dilaksanakan	Tahunan	
		2. Jumlah layanan uji model fisik hidrolik	Non Komposit	Diukur dari jumlah layanan system informasi dan data yang diberikan	Tahunan	
		3. Jumlah layanan laboratorium mektan dan batuan	Non Komposit	Diukur dari jumlah layanan pengujian yang dilakukan	Tahunan	
SK-9.5	Meningkatnya layanan teknis bidang hidrologi dan lingkungan keairan	1. Jumlah layanan advis/pendampingan teknis bidang hidrologi dan lingkungan keairan	Non Komposit	Diukur dari jumlah layanan advis teknis yang dilaksanakan	Tahunan	
		2. Jumlah layanan sistem informasi dan basis data bidang hidrologi dan lingkungan keairan	Non Komposit	Diukur dari jumlah layanan system informasi dan data yang diberikan	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
SK-10	Meningkatnya Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Nilai tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko	Non Komposit	Diukur dari persentase tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko dengan metode reviu dokumen (bobot 80%) dan survei (bobot 20%) berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian PUPR No. PW 0204-IJ/1686 tanggal 30 Desember 2022	Tahunan	
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SK-11.1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Sumber Daya Air	1. Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan		Terdiri dari 3 indikator, yaitu 1. Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan diukur dari persentase pembinaan tata naskah dinas dan persentase pembinaan kearsipan sama dengan jumlah unit kerja yang	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		pengelolaan ketatausahaan (%)		<p>1. Terbina kearsipan dibagi seluruh unit kerja;</p> <p>2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN diukur dari persentase penggunaan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN;</p> <p>3. Tingkat efektivitas penatausahaan, pemanfaatan, dan penertiban BMN diukur dari persentase penatausahaan BMN, pemanfaatan BMN serta penertiban BMN;</p>		
		2. Tingkat layanan pembentukan produk hukum (%)		Diukur tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum, efektivitas advokasi hukum, penyusunan perjanjian, dan penyusunan pertimbangan hukum	Tahunan	
		3. Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai (nilai)		Survey Kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi Kepegawaian	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		4. Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran (%)		Diukur dari persentase indeks nilai IKPA berdasarkan monev PA UNOR, persentase tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RI, tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	Tahunan	
		5. Tingkat layanan komunikasi publik (nilai)	Komposit	Diukur dari tingkat kesuksesan penyelenggaraan publikasi dan kepuasan pemohon informasi publik	Tahunan	Eksternal
SK-11.2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Pelaksana Teknis	1. Tingkat kualitas pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan (%)		Dihitung dari frekuensi rata-rata penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) oleh pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis	Tahunan	
		2. Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara (%)		Dihitung dari persentase jumlah usulan penghapusan BMN yang telah diselesaikan dibandingkan total usulan penghapusan BMN	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		3. Tingkat kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian (%)		Dihitung dari persentase jumlah dokumen kepegawaian yang diusulkan dibandingkan dengan dokumen kepegawaian yang diproses lebih lanjut	Tahunan	

2. Direktorat Jenderal Bina Marga

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	
SS 2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)	Waktu tempuh diperoleh dari hasil pengamatan kecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar dan perkerasan (standar) jalan, volume lalu lintas dan lain-lain. Hasil perhitungan waktu tempuh secara agregat dapat ditampilkan menurut koridor dan pulau dengan menjumlahkan hasil perkalian waktu tempuh masing-masing rute/koridor dengan masing-masing jarak dan membaginya dengan total jarak koridor atau pulau (re-rata tertimbang).	Kumulatif, meningkat setiap tahun nya	Internal dan survey

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SP 2	Infrastruktur Konektivitas	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional 2. Rating Kondisi Jalan Nasional 3. Rating keselamatan jalan nasional 	<p>Tingkat kinerja pelayanan jalan nasional dikatakan tercapai apabila pada akhir tahun 2024, Tingkat aksesibilitas jalan nasional adalah 87,9 persen, Rating kondisi jalan nasional 2,5 dan rating keselamatan jalan nasional adalah 2,82.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator 1: Persentase realisasi pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional pertahun, dibagi target pertahun, dikali 100%. 2. Indikator 2: Nilai realisasi gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional, dibagi target pertahun, dikali 100%. 3. Indikator 3: Nilai realisasi gabungan antara angka kecelakaan 	Kumulatif, meningkat setiap tahun nya	Internal dan survey

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				per populasi dan dan jumlah titik blackspot per populasi, dibagi target pertahun, dikali 100%.		
SK 01	Peningkatan Pelaksanaan Preservasi dan Tingkat Kapasitas Jalan	Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional 2. Rating Kondisi Jalan Nasional 3. Rating Keselamatan Jalan Nasional	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). (Nilai target pada masing masing indikator, mengikuti target SP).	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey
SK 02	Pencapaian pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol	Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan	Panjang Jalan Tol yang beroperasi	Indikator kinerja kegiatan dihitung dari persen realisasi jalan tol beroperasi baik pertahun maupun di akhir tahun 2024 (100%).	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	
<p>SK 03</p>	<p>Peningkatan pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan</p>	<p>Tingkat kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan</p>	<p>Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan jalan 2. Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP 	<p>Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator 1: Terdiri dari kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebiakan penyelenggaraan jalan di bidang keterpaduan sistem jaringan jalan dan jembatan, yang diwujudkan dalam strategi program dan anggaran penyelenggaraan jalan dan jembatan • Pelaksanaan pembinaan, dan penyusunan tatalaksana dan evaluasi terhadap 	<p>Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun</p>	<p>Data survey dan Data internal</p>

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>penanganan jalan dan jembatan daerah yang didanai APBN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan penatalaksanaan kerja sama luar negeri <p>Dihitung dari realisasi implementasi perencanaan penyelenggaraan jalan, dibagi target pertahun, dikali 100%.</p> <p>2. Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP: Dilakukan dengan pelaksanaan pelaporan kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Laporan Kinerja Tahunan. Dihitung dari realisasi Nilai penyelenggaraan SAKIP, dibagi target pertahun, dikali 100%.</p>		
		Tingkat layanan penanggulangan	Tingkat Penyaluran Bantuan Tanggap Bencana	Pengukuran indikator ini di dasarkan pada layanan yang diberikan terhadap	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		darurat akibat bencana		<p>penyaluran bantuan tanggapan bencana. Layanan yang dimaksud berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan penanganan bencana • Pelaksanaan koordinasi penanganan bencana; dan • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan bencana <p>Dihitung dari realisasi pelaksanaan dukungan penanggulangan darurat akibat rencana per tahun, dibagi target pertahun, dikali 100%.</p>		
		Tingkat pencapaian pembangunan jalan	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Panjang jalan yang dibangun	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			2. Panjang jalan yang dilebarkan (14 m)	rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). 1. Indikator 1: Panjang jalan terbangun yang di atur dan dibina, dibagi target pertahun, dikali 100%. 2. Indikator 2: Panjang jalan dilebarkan (14 m) yang di atur dan dibina, dibagi target pertahun, dikali 100%.		
		Tingkat pencapaian kualitas kondisi jalan dan jembatan wilayah I	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Rating kondisi jalan 2. Presentase jembatan dalam kondisi baik	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). 1. Indikator 1: memiliki target dan cara	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal
		Tingkat pencapaian kualitas kondisi jalan dan	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut:			

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		jembatan wilayah II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rating kondisi jalan 2. Presentase jembatan dalam kondisi baik 	<p>perhitungan yang sama dengan SP</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Indikator 2:Target total di akhir tahun 2024 adalah 99%). Diperoleh dari persen kondisi jembatan dalam kondisi baik terhadap seluruh panjang jembatan pada ruas jalan nasional baik di wilayah I maupun di wilayah II. 		
		Tingkat pencapaian pembangunan jembatan	<p>Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang jembatan yang dibangun 2. Panjang Fly Over/Underpass Terbangun 	<p>Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Kegiatan peningkatan pengaturan dan pembinaan pembangunan jembatan akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator 1: Capaian Panjang jembatan dibangun yang duatur 	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				dan dibina, dibagi target pertahun, dikali 100%. Indikator 2: Capaian panjang FO/UP terbangun yang di atur dan dibina, dibagi target pertahun, dikali 100%.		
		Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan	Panjang Jalan Tol yang beroperasi	Indikator kinerja kegiatan dihitung dari persen realisasi jalan tol beroperasi baik pertahun maupun di akhir tahun 2024 (100%).	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal
		Tingkat kualitas layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Persentase NSPK bidang Jalan dan Jembatan yang diterbitkan 2. Pencapaian rating keselamatan jalan 3. Tingkat kualitas data dan sistem	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). Pada target indikator kinerja kegiatan 1, 3, dan	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			informasi jalan dan jembatan 4. Tingkat fasilitasi layanan peningkatan kompetensi fungsional	4 memiliki target pertahun 100%, sedangkan ada kegiatan 2, memiliki target yang sama dengan SP (Sasaran Program).		
		Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan 2. Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). 1. Indikator 1: jumlah dokumen teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan yang dihasilkan, dibagi 4 dokumen (target per tahun), dikali 100% 2. Indikator 2: jumlah dokumen fasilitasi	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				pengujian laboratorium dan advis Teknik yang dihasilkan, dibagi 4 dokumen (target pertahun), dikali 100 %.		
		Tingkat kepatuhan internal dalam penyelenggaraan jalan	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Presentase NSPK pembinaan dan pengendalian kepatuhan intern yang diterbitkan 2. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan SPIP 3. Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). Indikator 1: Jumlah NSPK yang diterbitkan dibagi jumlah NSPK yang seharusnya diterbitkan (10 dokumen pertahun) dikali 100%. Indikator 2: Ketepatan waktu sesuai dengan Permen PUPR tentang SPIP (ketepatan waktu =	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				100% ; penilaian oleh Itjen) Indikator 3. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan masyarakat seluruhnya dikali 100%.		
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SK	Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan (Seditjen Bina Marga)	1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2. Tingkat Fasililtas Produk Hukum	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut:	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		dan Advokasi Hukum 3. Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara 4. Tingkat Pelayanan Kepegawaian DJBM	1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2. Tingkat Fasilitas Produk Hukum dan Advokasi Hukum 3. Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara 4. Tingkat Pelayanan Kepegawaian DJBM	rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). 1. Indikator 1: nilai IKPA yang diperoleh, dibagi target pertahun, dikali 100%. 2. Indikator 2: Jumlah dokumen regulasi yang diterbitkan, dibagi target pertahun, dikali 100%. Target di akhir tahun 2024 adalah 22 dokumen regulasi. 3. Indikator 3: jumlah provinsi yang diberikan layanan, dibagi 34 provinsi , dikali 100%. 4. Indikator 5: jumlah orang yang diberikan pelayanan publik (PNS dan Non PNS) dibagi target orang terlayani pertahun, dikali 100%.		

3. Direktorat Jenderal Cipta Karya

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 3	SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> (DJCK)	Indikator Komposit/Gabungan	Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator 1 (DJCK): indikator 2 (DJP & DJPI) = 50% : 50%	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal
SP 3.1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> ---- dihitung dari rerata gabungan indikator:	Indikator Komposit/Gabungan	Indikator Kinerja SP Kontribusi kinerja indikator 8 (DJCK) : indikator 2 (DJP) : indikator 1 (DJPI) = 50% : 25% : 25% Indikator Kinerja SP Rata-rata penjumlahan dari Indikator 1, indikator 2, indikator 3, indikator 4, indikator 5, indikator 6, dan indikator 7	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal
		1. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak		1. Sesuai angka BPS 2. Apabila hasil perhitungan berdasarkan angka BPS (Susenas) belum diterbitkan	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				sampai dengan batas akhir penyusunan LKj Ditjen Cipta Karya, perhitungan dapat dilakukan secara internal, menghitung capaian kegiatan dari APBN dan Non APBN yang menghasilkan output Liter/detik, SR ataupun BJP, baik dari kegiatan Direktorat Air Minum (Hibah, DAK) ataupun Program PKP lainnya (PISEW, KOTAKU, PKE)		
		2. Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman		Dasar perhitungan mengacu kepada alokasi DIPA Kementerian PUPR untuk sektor sanitasi dengan baseline perhitungan mengacu kepada data Laporan Kinerja	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	
		3. Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan		Dasar perhitungan mengacu kepada alokasi DIPA Kementerian PUPR untuk sektor sanitasi dengan baseline perhitungan mengacu kepada data Laporan Kinerja	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	
		4. Persentase luasan kawasan permukiman yang		Indikator terpilih dari Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		ditingkatkan kualitasnya				
		5. Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal		Indikator terpilih dari Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	
		6. Persentase inisiasi penerapan bangunan gedung hijau		Indikator terpilih dari Persentase dukungan pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	
		7. Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan kualitasnya		Komposit dari rata-rata jumlah nilai kinerja SK 1.3 dan SK 2.1	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	
KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG						
SK 1.1	Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan permukiman	Persentase peningkatan keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan permukiman ---- dihitung dari rerata gabungan indikator:		Indikator Kinerja Kegiatan: Penjumlahan dari Indikator 1 dikalikan dengan 50% dan Indikator 2 dikalikan dengan 50%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
		1. Persentase dokumen keterpaduan perencanaan	Tunggal dari 1 output	Indikator 1: Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman pada	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		kawasan permukiman		tahun tersebut dibagi dengan total target pada 2024 dikalikan 100%		
		2. Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman	Komposit dari 2 output	Indikator 2: Jumlah Luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan Luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat pada tahun tersebut dibagi dengan total target pada 2024 dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
SK-1.2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan ---- dihitung dari rerata gabungan indikator:	Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb: 1. Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal 2. Persentase dukungan pengembangan	Indikator Kinerja Kegiatan: Penjumlahan dari Indikator 1 dikalikan dengan 50%, Indikator 2 dikalikan dengan 25%, dan indikator 3 dikalikan 25%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			penyelenggaraan bangunan gedung 3. Persentase dukungan pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan			
SK 1.3	Meningkatnya kualitas sarana prasarana olahraga dan pasar	Persentase peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga dan pasar yang tertib dan andal --- dihitung dari rerata gabungan indikator:	Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb: 1. Persentase sarana prasarana olahraga yang tertib dan andal 2. Persentase sarana prasarana pasar yang tertib dan andal 3. Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang tertib dan andal	Indikator Kinerja Kegiatan: Rata-rata jumlah Indikator 1, Indikator 2, dan Indikator 3 Catatan : Yang dihitung hanya Gedung yang menjadi tanggung jawab PUPR saja karena masing-masing sarana strategis memiliki Pembina.	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase sarana prasarana olahraga yang tertib dan andal	Tunggal dari 1 output	Indikator 1 : Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga dibagi dengan total target pada 2024 dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
		Persentase sarana prasarana pasar yang tertib dan andal	Tunggal dari 1 output	Indikator 2 : Jumlah pasar yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pasar dibagi dengan total target pada 2024 dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
		Persentase sarana prasarana strategis lainnya bidang permukiman yang tertib dan andal	Tunggal dari 1 output	Indikator 3 : Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana strategis lainnya bidang permukiman dibagi dengan total target hingga tahun 2024 dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
KEGIATAN 2: PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA PENDIDIKAN						
SK 2.1	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan	Persentase peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang tertib dan andal -- - dihitung dari indikator:	Tunggal	Indikator Kinerja Kegiatan: Mengadopsi langsung nilai Persentase sarana prasarana pendidikan yang tertib dan andal Catatan :	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Yang dihitung hanya Gedung yang menjadi tanggung jawab PUPR saja karena masing-masing sarana strategis memiliki Pembina.		
		Persentase sarana prasarana pendidikan yang tertib dan andal	Komposit/ Gabungan dari 5 ouput	Jumlah gedung (pendidikan dasar dan menengah, madrasah dan sekolah keagamaan, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan sarana prasarana strategis lainnya bidang pendidikan) yang mendapatkan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana ditambah jumlah gedung pembangunan baru (pendidikan dasar dan menengah, Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan) dibagi dengan total target hingga tahun 2024 dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN AIR MINUM YANG LAYAK						
SK 3	Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan---- dihitung dari indikator:	Indikator komposit/gabungan dari kegiatan SPAM	Indikator Kinerja Kegiatan: Dihitung berdasarkan jumlah Sambungan Rumah (SR) yang dibangun/dipasang (asumsi 1 SR = 1 Rumah Tangga/RT),	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal dan BPS

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan (JP)		diakumulasikan dengan jumlah RT yang telah terlayani air minum jaringan perpipaan sampai dengan tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan jumlah RT nasional		
KEGIATAN 4: PENYELENGGARAAN SANITASI YANG LAYAK						
SK 4	Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Persentase peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi ---- dihitung pada masing-masing indikator:	Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb: 1. Persentase rumah tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak dan aman 2. Persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola (baik melalui penanganan maupun pengurangan) di perkotaan	Indikator Kinerja Kegiatan: Dihitung pada masing-masing indikator : Jumlah KK yang terlayani dibagi jumlah KK nasional dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal, STBM, dan BPS

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			3. Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan			
		Persentase peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi ---- dihitung pada masing-masing indikator:	Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb: 1. Persentase rumah tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak dan aman 2. Persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola (baik melalui penanganan maupun pengurangan) di perkotaan 3. Persentase rumah tangga yang	Indikator Kinerja Kegiatan: Dihitung pada masing-masing indikator : Jumlah KK yang terlayani dibagi jumlah KK nasional dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal, STBM, dan BPS

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			terlayani infrastruktur drainase lingkungan			
		1. Persentase rumah tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak dan aman	Indikator terpisah dari kegiatan penanganan air limbah domestik yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Indikator 1: Persentase rumah tangga dengan akses layak • Indikator 2: Persentase rumah tangga dengan akses aman 	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 1 : dihitung berdasarkan jumlah KK dengan akses air limbah domestik layak di tahun N-1 ditambah kapasitas infrastruktur pengolahan air limbah domestik setempat (tangki septik) dan terpusat (IPALD Regional, Kota, Permukiman) yang terbangun (KK) di tahun N dibagi dengan total KK di tahun N • Indikator 2 : dihitung berdasarkan jumlah KK dengan akses air limbah domestik aman di tahun N-1 ditambah kapasitas infrastruktur pengolahan air limbah domestik setempat (IPLT) dan terpusat (IPALD Regional, Kota, Permukiman) yang terbangun (KK) di tahun N dibagi dengan total KK di tahun N 	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal dan BPS

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		2. Persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola (baik melalui penanganan maupun pengurangan) di perkotaan	Indikator terpilih	Dihitung berdasarkan jumlah KK dengan akses sampah terkelola di perkotaan di tahun N-1 ditambah kapasitas infrastruktur pengolahan persampahan (WTE, TPA, TPST, TPS3R) yang terbangun (KK) di tahun N dibagi dengan total KK perkotaan di tahun N	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal dan BPS
		3. Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan	Indikator terpilih	Dihitung berdasarkan jumlah KK yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan di tahun N dibagi dengan total target KK yang perlu dilayani selama 5 tahun	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
KEGIATAN 5: PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN						
SK 5.1	Meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman	Persentase peningkatan kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman ---- dihitung dari rerata gabungan indikator:	Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb: 1. Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman	Indikator Kinerja Kegiatan: Dihitung dari rata-rata jumlah 4 (empat) indikator, yaitu indikator 1, indikator 2, indikator 3 dan indikator 4	Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun.	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			2. Nilai kinerja anggaran 3. Nilai realisasi pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri 4. Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Cipta Karya			
		1. Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman	Tunggal	<ul style="list-style-type: none"> Indikator 1: Jumlah rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang diimplementasikan (tahunan) dibagi jumlah rencana pembangunan infrastruktur permukiman dalam Renstra (tahunan) dikalikan 100% 	Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun.	Internal
		2. Nilai kinerja anggaran	Tunggal	<ul style="list-style-type: none"> Indikator 2 : Pengukuran mengacu pada peraturan terkait Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L 	Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun.	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	
		3. Nilai realisasi pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri	Tunggal	<p>Indikator 3: Merupakan rerata persentase capaian pada kinerja penyiapan PHLN dan kinerja pelaksanaan PHLN dikalikan 100%</p> <p>Nilai realisasi kinerja penyiapan dihitung berdasarkan gabungan capaian penyiapan pada kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pinjaman Luar Negeri berdasarkan realisasi kegiatan Blue Book 2020-2024 yang masuk Green Book pada tahun berjalan dibagi dengan target pengusulan kegiatan ke dalam Green Book per tahun dikali 100%; 2. Hibah Luar Negeri berdasarkan realisasi jumlah hibah yang telah ditandatangani dibagi dengan target penandatanganan hibah 	Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun.	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>per tahun (2) dikali 100%. Target penyelesaian hibah yaitu 2 kegiatan, ditentukan berdasarkan rata-rata dokumen hibah yang terselesaikan sampai dengan penandatanganan Grant Agreement pada periode sebelumnya.</p> <p>Nilai realisasi kinerja pelaksanaan PHLN dihitung berdasarkan jumlah kegiatan PHLN yang meningkat status kerjanya (progress variant) dibagi dengan jumlah kegiatan PHLN yang efektif sebelum tahun 2020 dan closing pada 2020-2024 dikalikan 100%</p>		
		Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Cipta Karya	Tunggal	Indikator 4: Rerata dari hasil evaluasi implementasi SAKIP seluruh entitas di lingkungan Ditjen Cipta Karya	Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun.	Internal
SK 5.2	Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan	Persentase dukungan layanan kebencanaan bidang permukiman ---- dihitung dari indikator:	Tunggal dari 1 output	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah paket/laporan tanggap darurat/kebutuhan mendesak dibagi pada tahun tersebut	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	Bidang Permukiman (berada di Setditjen Cipta Karya)	Persentase dukungan layanan tanggap bencana bidang permukiman		dengan total target pada 2024 dikalikan 100%		
SK 5.3	Meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan infrastruktur permukiman	Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan infrastruktur permukiman --- dihitung dari rerata gabungan indikator:	Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb: 1. Persentase NSPK bidang permukiman dan perumahan 2. Persentase rekomendasi teknis keandalan bangunan gedung dan kawasan permukiman 3. Persentase dukungan pengembangan kompetensi dan kontribusi jabatan fungsional bidang permukiman	Indikator Kinerja Kegiatan: Rerata dari nilai indikator 1, indikator 2, dan indikator 3	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Indikator 1, 2, 3 dan 4: Data Internal.
		Persentase NSPK bidang permukiman dan perumahan	Tunggal dari 1 output	Indikator 1 : Jumlah NSPK yang diterbitkan dibandingkan	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				dengan target 2024 dikalikan 100%		
		Persentase rekomendasi teknis keandalan bangunan gedung dan kawasan permukiman	Tunggal dari 1 output	Indikator 2 : Jumlah rekomendasi teknis yang dapat terlayani dibanding permintaan rekomendasi teknis yang masuk dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
		Persentase dukungan pengembangan kompetensi dan kontribusi jabatan fungsional bidang permukiman	Tunggal dari 1 output	Indikator 4 : Jumlah JFT bidang Cipta Karya yang mendapatkan pengembangan profesi dibandingkan Jumlah total JFT bidang Cipta Karya dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
SK 5.4	Meningkatnya kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman	Persentase peningkatan kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman	Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb: 1. Persentase pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman 2. Persentase pengendalian	Indikator Kinerja Kegiatan:	Kumulatif, penambahan setiap tahun	Indikator 1 dan 2 Data Internal.

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman			
		1. Persentase pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman	Tunggal	Indikator 1 dihitung dari rerata jumlah bahan kebijakan teknis, pembinaan teknis, serta kerangka kerja kepatuhan intern dan manajemen risiko dibagi dengan target 2024 dikalikan 100%	Kumulatif, penambahan setiap tahun	Internal
		2. Persentase pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman	Tunggal	Indikator 2 dihitung dari rerata jumlah bahan pengendalian serta pemantauan kepatuhan intern dan manajemen risiko dibagi dengan target 2024 dikalikan 100%	Kumulatif, penambahan setiap tahun	Internal
		Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Tunggal	Dihitung dari Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko yang dinilai	Non Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				oleh Inspektorat Jenderal untuk UPR T-1, Direktorat Kepatuhan Intern untuk UPR T-2, dan Direktorat Kepatuhan Intern dan/atau Unit Kepatuhan Intern UPT untuk UPR T-3.		
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SK	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan infrastruktur permukiman	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	Komposit / Gabungan 4 Indikator	Indikator kinerja 1 dihitung dari penjumlahan: a. Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja (bobot total 25%) b. Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah	Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun.	Indikator 1, 2, 3 dan 4: Data Internal.

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Seluruh Unit Kerja (bobot total 25%)</p> <p>c. Persentase Penyelesaian Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Pemintahtanganan BMN yang telah diselesaikan/ Total Usulan Pemindahtanganan BMN (bobot total 15%)</p> <p>d. Persentase tindaklanjut penyelesaian data anomali BMN = total data anomali BMN / total data anomali BMN yang berhasil diselesaikan (Bobot total 25%)</p>		
		Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	Komposit / Gabungan 3 Indikator	<p>Indikator kinerja 2 dihitung dari penjumlahan:</p> <p>a. dihitung dari jumlah produk hukum yang diselesaikan dibagi dengan jumlah produk hukum yang diusulkan (bobot total 25%)</p> <p>b. dihitung dari jumlah perkara hukum yang ditangani dibagi jumlah perkara hukum diusulkan (bobot total 50%)</p> <p>c. dihitung dari jumlah perjanjian yang diselesaikan dibagi dengan jumlah perjanjian yang diusulkan (bobot total 25%)</p>	Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun.	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Pengadministrasian Pegawai	Tunggal	Indikator kinerja 3 dihitung dari penjumlahan: Survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi Kepegawaian	Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun.	Internal
		Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Tunggal	Indikator kinerja 4 dihitung dari penjumlahan: Berdasarkan nilai 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan	Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun.	Internal
		Tingkat Layanan Komunikasi Publik	Tunggal	Indikator kinerja 5 dihitung dari penjumlahan: Dihitung berdasarkan tingkat kesuksesan penyelenggaraan kegiatan publikasi (rencana kegiatan dibagi realisasi kegiatan dalam 1 tahun)	Non kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal

4. Direktorat Jenderal Perumahan

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman						
SS	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	IKSS (02), merupakan indikator gabungan dalam bentuk persentase (%)	<p>Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator 1 (DJCK) : indikator 2 (DJP & DJPI) = 50% : 50%</p> <p>IKSS (02), dihitung berdasarkan proporsi perbandingan (persentase) penanganan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP dan DJPI terhadap target nasional (11.000.000 unit rumah untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%).</p> <p>Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:</p> $A = Y + \left[\left(\frac{\sum(V + W)}{11.000.000} \right) * 100 \right] * \{X - Y\}$ <p>Keterangan: A: Capaian Kinerja (%)</p>		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>V: jumlah RLH yang dibangun oleh DJP berupa Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Rumah Swadaya (unit)</p> <p>W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit)</p> <p>X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%)</p> <p>Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,51%)</p>		
SP	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	IKSP (02.a), Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	<p>IKSP (02.a), merupakan indikator tunggal dalam bentuk persentase (%)</p> <p>Menyumbang bobot 19% terhadap Indikator Kinerja Sasaran Program Sektor Perumahan dan Permukiman.</p>	<p>Indikator Kinerja SP Kontribusi kinerja indikator 8 (DJCK) : indikator 2 (DJP) : indikator 1 (DJPI) = 50% : 25% : 25%</p> <p>IKSP (02.a) dihitung berdasarkan berdasarkan proporsi perbandingan (persentase) penanganan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP terhadap target nasional</p>		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>(11.000.000 unit rumah untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%).</p> <p>Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:</p> $A = Y + \left[\left\{ \left(\frac{\sum(V)}{11.000.000} \right) * 100 \right\} * \{X - Y\} \right]$ <p>Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP berupa Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Rumah Swadaya (unit) X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%) Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,51%)</p>		
	IKSP (02.b), Jumlah rumah umum yang	IKSP (02.b), merupakan indikator	IKSP (02.b) dihitung berdasarkan perbandingan		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		mendapat bantuan PSU	<p>tunggal dalam bentuk persentase (%)</p> <p>Menyumbang bobot 6% terhadap Indikator Kinerja Sasaran Program Sektor Perumahan dan Permukiman.</p>	<p>(persentase) jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU pada setiap tahunnya dengan target jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU hingga tahun 2024 (262.345 unit).</p> <p>Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:</p> $A = \frac{\sum(X)}{262.345} * 100$ <p>Keterangan: A: Capaian kinerja (%) X: Jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU (unit)</p>		
SK-01	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Komposit dari indikator: (1) Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Fasilitasi Rumah Swadaya bagi MBR	<ul style="list-style-type: none"> Indikator 1 merupakan indikator tunggal dalam bentuk jumlah (unit) Indikator 2 merupakan indikator tunggal dalam bentuk jumlah (unit) 	<ul style="list-style-type: none"> Indikator 1 dihitung berdasarkan kumulatif jumlah rumah swadaya yang dibangun oleh DJP pada tahun tertentu dengan target penanganan rumah swadaya 2020-2024. Skema bantuan rumah swadaya adalah sebagai berikut: 		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		(2) Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui melalui Pembangunan Rumah Khusus (3) Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun	<ul style="list-style-type: none"> Indikator 3 merupakan indikator tunggal dalam bentuk jumlah (unit) 	(1) Bantuan perumahan swadaya sejahtera; (2) Bantuan stimulant perumahan swadaya; dan (3) Bantuan perumahan swadaya sejahtera <ul style="list-style-type: none"> Indikator 2 dihitung berdasarkan kumulatif jumlah rumah khusus yang dibangun oleh DJP pada tahun tertentu. Indikator 3 Dihitung berdasarkan kumulatif jumlah rumah susun yang dibangun oleh DJP 		
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)			

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	(Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SK 02	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	Tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Penatausahaan Barang Milik Negara 2. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran 3. Tingkat Penatausahaan Barang Persediaan Bencana 4. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum 5. Tingkat Layanan Advokasi Hukum 6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik 	Dihitung berdasarkan rata-rata indikator sebagai berikut: Output 1: Persentase jumlah usulan Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/Total Usulan Penghapusan BMN Output 2: Dihitung berdasarkan nilai 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%), 2. Data kontrak (bobot nilai 15%), 3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%), 		Internal dan eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			7. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai 8. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, dan Pengelolaan Ketatausahaan	4. Konfirmasi output (bobot nilai 10%), 5. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang persediaan (bobot nilai 8%), 6. Revisi DIPA (bobot nilai 5%), 7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%), 8. LPJ bendahara (bobot nilai 5%), 9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%), 10. Kesalahan surat perintah membayar (bobot nilai 5%), 11. Retur surat perintah pencairan dana (bobot nilai 5%), 12. Pagu minus (bobot nilai 5%), 13. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%). Output 3:		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>Persentase jumlah Balai Perumahan yang mendapat pembinaan penatanusahaan barang persediaan bencana</p> <p>Output 4: Persentase jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kementerian PUPR)</p> <p>Output 5: Persentase jumlah layanan advokasi hukum dalam 1 tahun dibagi dengan permintaan advokasi hukum pada tahun tersebut</p> <p>Output 6: Survey Kepada <i>counterpart</i> dan masyarakat kepuasan layanan komunikasi publik Ditjen Perumahan</p> <p>Output 7:</p>		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Survey Kepada Pegawai terkait, kepuasan pembinaan jabatan fungsional, pelatihan, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian</p> <p>Output 8: dihitung dari penjumlahan:</p> <p>a. Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja</p> <p>b. Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja</p> <p>c. Persentase terselenggaranya Administrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/Jumlah Seluruh Koresponden</p>		
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal:	Jumlah layanan internal		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Jumlah layanan internal			
			Layanan dukungan manajemen satker: Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan		
			Layanan Perkantoran: Jumlah layanan gaji dan tunjangan Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah layanan gaji dan tunjangan • Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran 		

5. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	1. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	<p>IKSS, merupakan nilai komposit dari indikator IKSS, merupakan nilai komposit dari indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 	<p>IKSS, dihitung pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <p>Indikator 1 (30%) Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan dibandingkan dengan target dikali 100%.</p> <p>Indikator 2 (70%) Perbandingan antara realisasi nilai investasi/pembiayaan kreatif infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dengan target dikali 100% Proyek yang siap dikerjasamakan merupakan</p>		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				proyek yang telah menyelesaikan tahap penyiapan (FBC) dan siap untuk lelang (minimal Tahap Prakualifikasi).		
SP 01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	1. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	<p>IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastuktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%) 	<p>IKSP2, dihitung pejumlahan dari indicator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <p>Indikator 1 (30%) Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target dikali 100%</p> <p>Indikator 2 (35%) Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang masuk Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan dengan target dikali 100%</p>		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan terdiri dari Studi Pendahuluan/Pra FS, OBC, FBC (FS)</p> <p>Indikator 3 (35%) Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan (minimal tahap Prakualifikasi) dengan target dikali 100%</p>		
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	<p>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan 	<p>Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <p>Indikator 1 (40%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (20%) 		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan)		infrastruktur PU dan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 3. Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Indikator 2 (30%)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%) Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) <p>Indikator 3 (30%) Penilaian dari Kementerian PAN dan RB</p>		
SK 02	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air:	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sbb:		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%) 	<p>Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target</p> <p>Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target</p>		
		2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	<p>Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi 	<p>Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sbb:</p> <p>Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang disusun dibandingkan dengan target</p>		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%)	Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target		
		3. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman: 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sbb: Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>4. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan</p> <p>Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%) 	<p>Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Perumahan sbb:</p> <p>Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target</p> <p>Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target</p>		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis Kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	(Mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SK 01	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Setditjen dan BLU PPDPP)	1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip (%) 2. Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan (%) 3. Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran (%) 4. Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi (%) 5. Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan (%) 	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> • Presentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja • Presentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina 		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		6. Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan (%) 7. Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor (%) 8. Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat (%)	Kerasipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja b. Tingkat Efektifitas Pengelolaan BMN Penggunaan <ul style="list-style-type: none"> • $PSP = \frac{\text{Jumlah BMN yang sudah di PSP}}{\text{total jumlah aset yang harus di PSP}}$ • $\text{Alih Status} = \frac{\text{Jumlah BMN yang sudah di alih status}}{\text{total jumlah aset yang harus di alih status}}$ Pemindahtanganan <ul style="list-style-type: none"> • $\text{Hibah} = \frac{\text{Jumlah BMN yang di proses}}{\text{total jumlah usulan}}$ • $\text{Penjualan} = \frac{\text{Jumlah BMN yang disetujui atau ditolak untuk dijual}}{\text{(dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke pengelola barang dan atau mendapat persetujuan penjualan pengguna barang}}$ 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<ul style="list-style-type: none"> Tukar menukar = Jumlah BMN yang dilakukan tukar menukar/ (dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke Menteri / Sekjen selaku pengguna barang <p>Penghapusan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah BMN yang dilakukan penghapusan / (dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke pengelola barang dan/atau mendapat persetujuan penghapusan di pengguna barang <p>c. Tingkat Efektifitas Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penertiban BMN</p> <ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan BMN = Persentase tindak lanjut penyelesaian Data Anomali BMN Pemanfaatan BMN = Jumlah izin prinsip 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Pemanfaatan BMN (KSP/ KPBU/ KSPI/ BSGBGS/ Sewa / Pinjam Pakai) yang telah disetujui dibagi dengan yang telah disampaikan ke pengelola barang dan / atau mendapat persetujuan dari pengguna barang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penertiban BMN = Persentase penanganan pengamanan dan penertiban BMN yang direncanakan 		
		2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum (15%)	<p>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum (%) 2. Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama (%) 3. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (%) 	<p>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <p>Tingkat Efektifitas Penyelesaian Produk Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100 % 		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Tingkat Efektifitas Advokasi Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100% <p>Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100 % <p>Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100 % 		
		3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta	<p>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%) 	<p>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <p>Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu</p>		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	Pengadministrasian Pegawai (15%)	2. Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi (%) 3. Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai (%)			
	4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (%) 2. Laporan Kinerja yang disusun (%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Tingkat Kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian <ul style="list-style-type: none"> • Nilai IKPA berdasarkan aplikasi MONEV-PA UNOR Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP <ul style="list-style-type: none"> Dihitung berdasarkan kriteria: a) Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unor yang tepat waktu (50%), b) Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP yang lengkap (50%) 		
		5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun (%) Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan yang disusun (%) 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: <p>Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengacu PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 		
		6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Pengaduan Masyarakat (%) 2. Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi (%)	Nilai Kesuksesan Penyelenggaraan Publikasi <ul style="list-style-type: none"> Tingkat kehadiran peserta, stakeholder <i>feedback</i> dan/atau persepsi/sentimen positif Tingkat Kepuasan Pemohon Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> Persepsi/sentimen positif stakeholder dan/atau stakeholder <i>feedback</i> 		
		7. Nilai SAKIP Unit Organisasi (10%)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SS	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	IKSS 2, merupakan indikator tunggal dalam bentuk persentase (%)	<p>Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator 1 (DJCK) : indikator 2 (DJP & DJPI) = 50% : 50%</p> <p>IKSS (02), dihitung berdasarkan proporsi perbandingan (persentase) penanganan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP dan DJPI terhadap target nasional (11.000.000 unit rumah untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%).</p> <p>Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:</p> $A = Y + \left[\left(\frac{\sum(V + W)}{11.000.000} \right) * 100 \right] * \{X - Y\}$ <p>Keterangan: A: Capaian Kinerja (%)</p>		Internal dan eksternal (Bank dan Developer)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit)</p> <p>W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit)</p> <p>X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%)</p> <p>Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,51%)</p>		
SP 01	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	IKSP1, merupakan indikator tunggal dalam bentuk prosentase (%) menyumbang bobot 25% terhadap Indikator Kinerja Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Ditjen Perumahan.	<p>Kontribusi Kinerja Unit Organisasi pada pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Program Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Indikator 8 (DJCK) : Indikator 2 (DJP) : Indikator 1 (DJPI) = 50% : 25% : 25%</p> <p>Kontribusi DJPI pada IKSS Program PKP sesuai rumus dibawah ini adalah meliputi kinerja W pada periode satu tahun</p> $A=Y+\{((\sum(V+W))/(11.000.000))*100\} * \{X-Y\}$		Internal dan eksternal (Bank dan Developer)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit) W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit) X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%) Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,51%)</p> <p>Untuk menghitung Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) khususnya DJPI digunakan perbandingan antara jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI meliputi program FLPP, SSB (Akad Baru), BP2BT, SMF dan TAPERA dibandingkan dengan target tahun bersangkutan dikali 100%.</p>		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:</p> $W = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: W = Capaian Kinerja (%) A = Jumlah Realisasi Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP, SSB, BP2BT, SMF dan TAPERA) (unit) B = Target Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP, SSB, BP2BT, SMF dan TAPERA) (unit)</p>		
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	<p>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</p> <p>1. Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera (%)</p>	<p>Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <p>Indikator 1 (30%) Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan</p>		Internal dan eksternal (Bank, PT SMF dan BP Tapera)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			2. Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (%) 3. Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan (%)	Tapera dibandingkan dengan target. Indikator 2 (50%) Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (FLPP, SSB, BP2BT) dibandingkan dengan target. FLPP masuk kedalam Indikator 2 setelah adanya proses likuidasi BLU PPDPP Indikator 3 (20%) Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target		
		2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Prosentase Rumah Tangga yang terfasilitasi kegiatan promosi, kerjasama dan verifikasi (%) 2. Prosentase Lembaga Jasa Keuangan hasil rekonsiliasi yang	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (0%) Jumlah Fasilitasi Penyaluran FLPP yang dilaksanakan melalui promosi, kerjasama dan verifikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target.		Internal dan Eksternal (Bank)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			didukung kegiatan perencanaan, keuangan dan kinerja (%) 3. Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya (%)	Indikator 2 (0%) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang direkonsiliasi dibandingkan dengan target. Indikator 3 (0%) Jumlah kegiatan dukungan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target.		

6. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	
SS 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR	Diperoleh dari jumlah Kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait dibandingkan dengan jumlah kawasan $IKSS = \frac{a}{b} \times 100\%$ Ket: IKSS = Indikator Kinerja Sasaran Strategis a = Jumlah kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait b = Jumlah prioritas kawasan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun • Jumlah kawasan yang menjadi target adalah 249 kawasan prioritas	Internal dan survey

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	Diperoleh dari jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dibandingkan dengan Jumlah Kawasan	<p>Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman akan tercapai apabila tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman dihitung sebagai berikut:</p> $IKSP = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Ket: IKSP = Indikator Kinerja Sasaran Program a = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur b = Jumlah Kawasan</p>	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Internal dan survey
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan	Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:	Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR	pemrograman infrastruktur PUPR	Capaian Renstra dibandingkan dengan target Renstra Unor (ABCP) (30%); dan Persentase program Rakorbangwil yang disepakati menjadi Format Kegiatan Wajib dan Format Kegiatan Pembangunan Baru pada Konsultasi Regional (70%)	<p>Pemrograman dikatakan tercapai apabila:</p> <p>Sub Indikator 1 (30%)</p> $IKSK1 - 1 = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Ket: IKSK1-1 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Sub Indikator 1) a = Capaian Renstra PUPR b = Target Renstra Unor PUPR</p> <p>Sub Indikator 2 (70%):</p> $IKSK1 - 2 = \frac{c}{d} \times 100\%$ <p>Ket:</p>		dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>IKSK1-2 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Sub Indikator 2)</p> <p>c = Jumlah Program Arahkan yang Menjadi Format Kegiatan Wajib dan Format Kegiatan Pembangunan Baru pada Konsultasi Regional</p> <p>b = Jumlah Program Rakorbangwil</p>		
		Tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur kawasan melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan (Non Komposit)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 dihitung dari jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali 100%.	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kawasan yang menjadi target adalah 249 kawasan prioritas PJM harus teruji dengan melalui serangkaian pembahasan 	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			$IKSK2 = \frac{e1}{f1} \times 100\%$ <p>Ket: IKSK2 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Wilayah I) e1 = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan f1 = Jumlah Kawasan Prioritas di Pulau Sumatera dan Kalimantan</p>	bersama para stakeholder terkait dan hasilnya diserahkan kepada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern) • PJM mencakup program-program yang terpetakan prioritasnya serta strategi pembiayaannya (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern)	
	Tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur kawasan melalui	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 dihitung dari jumlah kawasan yang	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun • Jumlah kawasan yang menjadi target	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	<p>perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara</p>	<p>pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara (Non Komposit)</p>	<p>ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali 100%.</p> $IKSK3 = \frac{e2}{f2} \times 100\%$ <p>Ket: IKSK3 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Wilayah II) e2 = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara f2 = Jumlah Kawasan</p>	<p>adalah 249 kawasan prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> • PJM harus teruji dengan melalui serangkaian pembahasan bersama para stakeholder terkait dan hasilnya diserahkan kepada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern) • PJM mencakup program-program yang terpetakan prioritisasinya serta strategi pembiayaannya (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern) 	

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	
			Prioritas di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara			
		Tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur kawasan melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku (Non Komposit)	<p>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 dihitung dari jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali 100%.</p> $IKSK4 = \frac{e3}{f3} \times 100\%$ <p>Ket: IKSK4 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Wilayah III) e3 = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan</p>	<p>Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kawasan yang menjadi target adalah 249 kawasan prioritas PJM harus teruji dengan melalui serangkaian pembahasan bersama para stakeholder terkait dan hasilnya diserahkan kepada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern) PJM mencakup program-program yang terpetakan prioritasnya serta 	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku</p> <p>f3 = Jumlah Kawasan Prioritas di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku</p>	strategi pembiayaannya (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern)	
SS 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis Kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	(Mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SK02	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola penyelenggaraan	Persentase peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola pengembangan wilayah:	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut:	Indikator 1 (15%) 1. Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja	Rata-rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
pengembangan infrastruktur Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan • Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum • Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai • Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran • Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran • Nilai SAKIP Unit Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan • Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum • Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai • Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran • Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran • Nilai SAKIP Unit Organisasi 	<p>yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja</p> <p>2. Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja</p> <p>3. Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/ Total Usulan Penghapusan BMN</p> <p>4. Persentase terselenggaranya Adiministrasi Korespondensi = Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/Jumlah</p>		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>Seluruh Koresponden</p> <p>Indikator 2 (15%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kemen PUPR) dikali 100% 2. Tingkat kesuksesan penyelenggaraan komunikasi Publik 3. Tingkat kepuasan layanan data dan informasi serta layanan sistem informasi 4. Tingkat layanan fasilitasi kerja sama <p>Indikator 3 (15%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survey kepada Pegawai terkait ketepatan 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi kepegawaian 2. Nilai SPIP Penjaminan Kinerja di BPIW Indikator 4 (20%) Dihitung berdasarkan nilai 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan. Indikator 5 (15%) Mengacu PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Kementerian Negara/Lembaga Indikator 6 (20%) Nilai SAKIP Unit Organisasi		

7. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasional						
SS	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional		<p>Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator DJBK: indikator BPSDM = 50% : 50%</p> <p>Indikator dihitung dari: jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi dibagi target jumlah lulusan pelatihan vokasi seluruh K/L per tahun*</p> <p><i>* jumlah lulusan pelatihan vokasi seluruh K/L per tahun sebanyak 400.000 orang (Sumber data: Lampiran I Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024)</i></p>		Internal dan Eksternal
SP	Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi	Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang	Indikator survei penilaian terhadap	Indikator dihitung dari: jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	yang kompeten dan profesional	kompeten dan professional	pencapaian kinerja program (persentase)	tersertifikasi per tahun dibagi potensi lulusan vokasi per tahun** Indikator Kinerja SP Kontribusi kinerja indikator DJBK: indikator BPSDM = 50% : 50%		
SK1	Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	Indikator survei penilaian terhadap pencapaian kinerja kegiatan (persentase)	Indikator dihitung dari: target pelatihan vokasional bidang konstruksi per tahun dibandingkan dengan potensi lulusan vokasi per tahun** <i>**potensi lulusan vokasional bidang konstruksi sebanyak 48.000 orang per tahun (Sumber data: Kemendikbud, 2019)</i>		Internal dan Eksternal
Program Dukungan Manajemen						

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	<p>Komposit dari Sub Indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat keandalan sumber daya konstruksi 2. ...<i>Sub IKS dari unor lainnya</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Indikator 1: dihitung dari penjumlahan dari komponen dengan bobot sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi (60%) 2. Tingkat kapasitas sumber daya konstruksi (40%) 		Internal dan Eksternal
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	<p>Indikator: komposit dari Sub Indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi 3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator dihitung dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi komposit dari ISK 1, ISK 2, dan ISK 3. 2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi dihitung dari ISK 4. 3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa 		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				konstruksi dihitung dari ISK 5.		
SK 1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	Indikator survei penilaian terhadap pencapaian kinerja kegiatan	Indikator ini merupakan nilai rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi yang dihitung dari: Jumlah total nilai proyek dibandingkan dengan jumlah proyek yang disampling (%).		Internal
SK 2	Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa	Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	Indikator komposit dari Sub Indikator sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase tender/seleksi tepat waktu 2. Persentase sanggah tidak benar 3. Persentase pengaduan tidak benar 4. Persentase penetapan 	Indikator dihitung dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb: <ul style="list-style-type: none"> • Sub Indikator 1 dihitung dari: Total Paket yang dilelangkan dikurangi Total Paket Terlambat dibagi Total Paket yang dilelangkan (%). • Sub Indikator 2 dihitung dari: 		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar</p> <p>5. Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ</p> <p>6. Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR</p>	<p>Total Paket yang dilelangkan dikurangi Total sanggah benar dibagi Total Paket yang dilelangkan (%).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Indikator 3 dihitung dari: Total Paket yang dilelangkan dikurangi Total pengaduan benar dibagi Total Paket yang dilelangkan (%). • Sub Indikator 4 dihitung dari: Total Penetapan Pemenang yang Ditolak PPK dikurangi Total Penetapan Pemenang yang Ditolak PPK dan Terbukti Benar dibagi Total Paket yang dilelangkan • Sub Indikator 5 dihitung dari: Jumlah Variabel yang Dipenuhi untuk Mencapai Tingkat Kematangan yang 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Ditetapkan dibagi Total Variabel yang Harus Dipenuhi untuk Mencapai Tingkat Kematangan yang Ditetapkan (%).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Indikator 6 dihitung dari: Realisasi Data Kinerja Penyedia Jasa dengan kontrak SYC di PUPR dibagi Jumlah keseluruhan paket kontrak SYC di PUPR 		
SK 3	Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi (SMKK)	Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	Indikator survei penilaian terhadap pencapaian kinerja kegiatan (persentase)	Indikator dihitung dari: jumlah proyek strategis yang dilakukan pendampingan tanpa kecelakaan dibagi jumlah proyek strategis yang dilakukan pendampingan (%).		Internal dan Eksternal
SK 4	Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat 2. Persentase tingkat 	Indikator 1: Indikator survei penilaian terhadap pencapaian kinerja kegiatan (persentase)	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 1 dihitung dari: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat dibagi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (%). 		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	<p>Indikator 2: Komposit dari Sub Indikator sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi 2. Peningkatan kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi 3. Peningkatan kecukupan asesor kompetensi konstruksi 4. Peningkatan kecukupan instruktur bidang konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 2 dihitung dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Indikator 1 dihitung dari: Jumlah SKKNI Bidang Konstruksi yang Terbarukan dibagi Jumlah Kebutuhan SKKNI Bidang Konstruksi (%). 2. Sub Indikator 2 dihitung dari: Jumlah Modul Bidang Konstruksi yang Terbarukan dibagi Jumlah Kebutuhan Modul Bidang Konstruksi (%). 3. Sub Indikator 3 dihitung dari: Jumlah Asesor Bidang Konstruksi dibagi Jumlah Kebutuhan Asesor Bidang Konstruksi (%). 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				4. Sub Indikator 4 dihitung dari: Jumlah Instruktur Bidang Konstruksi dibagi Jumlah Kebutuhan Instruksi Bidang Konstruksi (%).		
SK 5	Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi 2. Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi 3. Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN 	<p>Indikator 1: Komposit dari Sub Indikator sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase terlaksananya tugas jasa konstruksi oleh OPD 2. Persentase Asosisasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok 	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 1 dihitung dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sub Indikator 1 dihitung dari: Jumlah persentase OPD yang melaksanakan tugas dibagi jumlah OPD Provinsi dan kab/kota (%) ○ Sub Indikator 2 dihitung dari: Jumlah Jumlah LSBU terakreditasi dibagi jumlah LSBU (%) ○ Sub Indikator 3 dihitung dari Jumlah 		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>Konstruksi yang terakreditasi</p> <p>3. Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI</p> <p>4. Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)</p> <p>5. Persentase LSP tercatat dan beroperasi</p> <p>Indikator 2: Indikator survei penilaian terhadap pencapaian kinerja kegiatan (persentase)</p> <p>Indikator 3: Komposit dari Sub Indikator sbb:</p> <p>1. Persentase ketersediaan data dan informasi</p>	<p>BUJK yang ber KBLI 2020 dibagi jumlah BUJK (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sub Indikator 4 dihitung dari Persentase ABU terakreditasi + presentasi AP terakreditasi + presentase ARP terakreditasi + presentase LSBU terlisensi + presentase LSP yang mendapat rekomendasi lisensi + presentase penyetaraan TKA (%) ○ Sub Indikator 5 <ul style="list-style-type: none"> ● Indikator 2 dihitung dari: Jumlah Jabatan Fungsional yang terlibat dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi dibagi Jumlah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			supply-demand MPK 2. Persentase ketersediaan data supply berdasarkan subvarian SDMPK di SIMPK 3. Persentase ketersediaan data BUJK 4. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri	yang terdata di tahun berjalan (%) (25%) • Indikator 3 dihitung dari Total nilai IKK 5.3.1 (Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK) + IKK 5.3.2 (Persentase ketersediaan data supply berdasarkan subvarian SDMPK di SIMPK)+ IKK 5.3.3 (Persentase ketersediaan data BUJK) + IKK 5.3.4 (Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri) dibagi jumlah indikator • Indikator 3 dihitung dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb: o Sub Indikator 1 dihitung dari: Jumlah		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Realisasi data rantai pasok MPK, teknologi dan TKDN dibagi target data rantai pasok MPK teknologi dan TKDN yang harus tersedia (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sub Indikator 2 dihitung dari: Jumlah Ketersediaan data supply berdasarkan subvarian SDMPK yang tercatat di SIMPK dibagi total jumlah subvarian MPK (%) ○ Sub Indikator 3 dihitung dari: Jumlah Data BUJK yang memasukkan laporan tahunan pada AUJK dibagi keseluruhan BUJK (%) ○ Sub Indikator 4 dihitung dari: Jumlah Tingkat capaian penggunaan produk dalam negeri (PDN) + 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) (%)		
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis Kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	(Mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SK 6	Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Setditjen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 2. Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi 	<p>Indikator 1: Komposit dari Sub Indikator sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan barang milik negara dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 1: dihitung dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sub Indikator 1 dihitung dari persentasi pembinaan tata naskah dinas dan kearsipan + PSP dibagi dua (%), dimana hal tersebut dihitung dari dua 		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>pengelolaan ketatausahaan</p> <p>2. Tingkat layanan pembentukan produk hukum</p> <p>3. Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai</p> <p>4. Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran</p> <p>5. Nilai SAKIP Unit Organisasi</p> <p>6. Tingkat layanan komunikasi publik</p> <p>Indikator 2: Komposit dari Sub Indikator sbb:</p> <p>1. Persentase ketersediaan infomasi kinerja</p>	<p>komponen yaitu (1) tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang dihitung dari: Jumlah pembinaan tata naskah dinas dan kearsipan dibagi jumlah seluruh unit kerja (%) dan (2) tingkat efektifitas pengelolaan BMN yang dinilai dari "penetapan status penggunaan (PSP) = jumlah BMN yang sudah di PSP dibagi total jumlah aset yang harus di PSP (%)</p> <p>○ Sub Indikator 2 dihitung dari jumlah perkara litigasi yang didampingi dibagi jumlah perkara litigasi (%)</p>		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			penyedia jasa konstruksi 2. Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) jasa konstruksi 3. Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi 4. Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi 5. Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sub Indikator 3 dihitung dari tingkat layanan kenaikan pangkat yang diselesaikan tepat waktu x 100% ○ Sub Indikator 4 dihitung dari nilai IKPA tahun berjalan dibagi nilai IKPA baseline (%) ○ Sub Indikator 5 dihitung dari nilai akuntabilitas kinerja Unit organisasi x 100% ○ Sub Indikator 6 dihitung dari nilai persepsi/sentimen positif stakeholder dan/atau stakeholder <i>feedback</i> • Indikator 2: dari penjumlahan dari sub indikator kontributor 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>dengan bobot yang sama rata sbb:</p> <ol style="list-style-type: none">Sub Indikator 1 dihitung dari: Realisasi Informasi Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dibagi Target Informasi Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi yang Harus Tersedia (%).Sub Indikator 2 dihitung dari: Realisasi Informasi Rantai Pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang Tersedia dibagi Target Informasi Rantai Pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang Harus Tersedia (%).Sub Indikator 3 dihitung dari: Realisasi Informasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibagi		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Target Informasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Harus Tersedia (%).</p> <p>4. Sub Indikator 4 dihitung dari: Realisasi Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi dibagi Target Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi yang Harus Tersedia (%).</p> <p>5. Sub Indikator 5 dihitung dari Survei Persepsi kepada Stakeholder yang Menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (%).</p>		

8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI						
SS	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang kompeten dan profesional	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja (BPSDM)		Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator DJBK: indikator BPSDM = 50% : 50%		Internal
SP	Meningkatnya SDM Vokasional Bidang PUPR Yang Bersertifikat	Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan Vokasi Bidang PUPR	Komposit dari Indikator-Indikator: 1. Persentase nilai mahasiswa (IPK > 3) 2. Persentase Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional	Rerata dari seluruh indikator: 1. Persentase nilai mahasiswa (IPK > 3) 2. Persentase Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional Indikator Kinerja SP Kontribusi kinerja indikator DJBK: indikator BPSDM = 50% : 50%	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal BPSDM
SK	Meningkatnya mutu kuantitas dan kualitas SDM pendidikan vokasi	Jumlah peserta didik dan kualitas SDM pendidikan vokasi	Komposit dari Indikator-Indikator:	Menghitung total penyelenggaraan pendidikan vokasi:	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	bidang PUPR yang kompeten (Politeknik Pekerjaan Umum)	bidang PUPR yang kompeten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah mahasiswa program studi vokasional 2. Jumlah mahasiswa tersertifikasi kompetensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah mahasiswa program studi vokasional 2. Jumlah mahasiswa tersertifikasi kompetensi 		
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SS 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN kompeten melalui pendidikan & pelatihan 2. Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan 3. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai 4. Tingkat kepuasan pengguna layanan (pasca pelatihan) 	Masing-masing indikator diberi bobot sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN kompeten melalui pendidikan & pelatihan (bobot : 45) 2. Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan (bobot : 15) 3. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai (bobot : 15) 4. Tingkat kepuasan pengguna layanan (pasca pelatihan) (bobot : 25) 	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal BPSDM

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Variabel perhitungan akan dikalikan dengan bobot masing-masing indikator, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai indeks.		
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Persentase ASN kompeten melalui pendidikan & pelatihan 2. Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan 3. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai 4. Tingkat kepuasan pengguna layanan (pasca pelatihan)	Masing-masing indikator diberi bobot sbb: 1. Persentase ASN kompeten melalui pendidikan & pelatihan (bobot : 45) 2. Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan (bobot : 15) 3. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai (bobot : 15) 4. Tingkat kepuasan pengguna layanan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal BPSDM

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				(pasca pelatihan) (bobot : 25) Variabel perhitungan akan dikalikan dengan bobot masing-masing indikator, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai indeks.		
SK-1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir, Manajemen Kinerja, dan Kepatuhan Internal (Pusat Pengembangan Talenta)	Jumlah ASN yang Dikembangkan Talentanya	Non Komposit	Jumlah ASN yang: 1. Dilakukan Asesmen; Data assessmen berlaku selama 3 tahun, sehingga ada pengulangan untuk ASN yang masih menduduki posisi yg sama 2. Jumlah orang yang dipetakan karirnya; Asumsi bahwa yang menduduki kotak 9 dalam matriks talenta ada 20% dari jumlah Pegawai	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal BPSDM

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>3. Persentase ASN yang dipantau kinerjanya dan memiliki profil kinerja</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 97% PNS PUPR dipantau kinerjanya dan memiliki profil kinerja - 3% PNS PUPR tidak terpantau kinerjanya dan tidak memiliki profil kinerja karena bermasalah (Diperbantukan di instansi lain seperti BP Batam, daerah, atau sedang terkena hukuman disiplin) - 2020 = 97% (20.736) - 2021 = 97% (20.520) - 2022 = 97% (20.202) - 2023 = 97% (19.465) - 2024 = 97% (19.465) 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Pelaksanaan Kepatuhan Internal	Non Komposit	1.Menghitung jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan dan manajemen risiko 2.Menghitung jumlah laporan kegiatan pengendalian dan pemantauan kepatuhan internal	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal BPSDM
SK-2	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR	Jumlah ASN Bidang PUPR yang dikembangkan kompetensinya	Non Komposit	Jumlah peserta pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi setiap tahun (orang)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal BPSDM
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis Kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	(Mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR)			

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SK-1	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan SDM Aparatur PUPR (Sekretariat Badan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan 2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum 3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai 4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran 5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran 6. Nilai SAKIP Unit Organisasi 	<p>Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan 2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum 3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai 4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran 5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran 	<p>Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari penjumlahan dari indikator-indikator sbb:</p> <p>Indikator 1 (15%): dihitung dari penjumlahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja b. Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja c. Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan 	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal BPSDM

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			6. Nilai SAKIP Unit Organisasi	<p>Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/ Total Usulan Penghapusan BMN.</p> <p>d. Persentase terselenggaranya Adiministrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/ Jumlah Seluruh Koresponden</p> <p>Indikator 2 (15%):</p> <p>a. Jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kemen PUPR) dikali 100%.</p> <p>b. Nilai SPBE Unor</p>		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>c. Survey kepuasan atas informasi Publik BPSDM</p> <p>d. Survey kepuasan pelanggan stakeholder kerjasama</p> <p>Indikator 3 (15%):</p> <p>a. Nilai survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi Kepegawaian.</p> <p>b. Nilai Survey Indeks BERAKHLAK (baik)</p> <p>c. Nilai Survey <i>Employer Branding</i> (Baik)</p> <p>Indikator 4 (20%): Dihitung berdasarkan nilai Indikator Kinerja</p>		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Pelaksanaan Anggaran dari OM SPAN</p> <p>Indikator 5 (15%): Mengacu pada hitungan Nilai SMART DJA pada komponen</p> <p>Indikator 6 (20%): Penilaian SAKIP Unor oleh tim evaluator Itjen</p>		

9. Inspektorat Jenderal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Persentase Kualitas Pengawasan Intern Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur			Internal dan survei
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR	Komposit dari subIndikator:	Komposit dari Indikator-Indikator:		
			1. Tingkat Kapabilitas Itjen (Level <i>Internal Audit Capability Model/IACM</i>) (25%)	Tingkat kapabilitas Itjen (level <i>Internal Audit Capability Model/ IACM</i>) hasil evaluasi oleh BPKP, dalam hal belum diperoleh maka digunakan nilai tahun sebelumnya	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal / Eksternal
			2. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja Dan Keuangan (50%)	(2.1) Rerata Tingkat Kualitas Pengawasan Inspektorat I-VI (95%), dan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun untuk Tingkat Kualitas Pengawasan Inspektorat I – VI, dan kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				(2.2) Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan (5%)	untuk Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan dibandingkan dengan target 5 tahun	
			3. Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR (25%)	Persentase Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SK-1.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Komposit dari subindikator: (1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I (25%)	(1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(2) Persentase Pengawasan di Inspektorat I (25%)	(2) Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT di Inspektorat I	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(3) Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	(3) Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap pengaduan yang masuk di Inspektorat I	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(4) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I (15%)	(4) Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(5) Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi (10%):	(5) Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi, komposit dari nilai:	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			(5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP) (40%)	(5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP), dalam hal Hasil Evaluasi BPKP Tahun berkenaan belum diperoleh, digunakan data tahun sebelumnya		
			(5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 (30%)	(5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1, Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan MR dibandingkan Nilai Target, menggunakan Hasil Evaluasi Efektivitas		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Penerapan MR Unit Organisasi tahun sebelumnya atau Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Interim Unit Organisasi		
			(5.3) Persentase penerapan Manajemen Risiko (30%)	(5.3) Jumlah UPR-T2 dan UPR-T3 pada Unit Organisasi yang menerapkan Manajemen Risiko, data didapat dari Ikhtisar Hasil Evaluasi Efektifitas Penerapan MR UPR-T2 dan UPR-T3, yang dilakukan oleh UKI Unit Organisasi		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SK-1.2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Komposit dari subindikator: (1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II (25%)	(1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(2) Persentase pengawasan di Inspektorat II (25%)	(2) Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT di Inspektorat II	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(3) Tingkat penanganan pengaduan masyarakat (25%)	(3) Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap pengaduan yang masuk di Inspektorat II	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(4) Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II (15%)	(4) Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (eksternal dan internal) Inspektorat II yang ditindaklanjuti	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(5) Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi (10%):	(5) Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi, komposit dari nilai:	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			(5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP) (40%)	(5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP), dalam hal Hasil Evaluasi BPKP Tahun berkenaan belum diperoleh, digunakan data tahun sebelumnya		
			(5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 (30%)	(5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1, Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan MR dibandingkan Nilai Target, menggunakan Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Unit		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Organisasi tahun sebelumnya atau Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Interim Unit Organisasi		
			(5.3) Persentase penerapan Manajemen Risiko (30%)	(5.3) Jumlah UPR-T2 dan UPR-T3 pada Unit Organisasi yang menerapkan Manajemen Risiko, data didapat dari Ikhtisar Hasil Evaluasi Efektifitas Penerapan MR UPR-T2 dan UPR-T3, yang dilakukan oleh UKI Unit Organisasi		
SK-1.3	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah	Komposit dari subindikator: (1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III (25%)	(1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	Pengawasan Inspektorat III	Pengawasan Inspektorat III	(2) Persentase pengawasan di Inspektorat III (25%)	(2) Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT di Inspektorat III	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(3) Tingkat penanganan pengaduan masyarakat (25%)	(3) Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap pengaduan yang masuk di Inspektorat III	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(4) Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III (15%)	(4) Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III yang ditindaklanjuti	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(5) Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi (10%): (5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan	(5) Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi, komposit dari nilai: (5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP) (40%)	Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP), dalam hal Hasil Evaluasi BPKP Tahun berkenaan belum diperoleh, digunakan data tahun sebelumnya		
			(5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1 (30%)	(5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1, Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan MR dibandingkan Nilai Target, menggunakan Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Unit Organisasi tahun sebelumnya atau Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Interim Unit Organisasi		
			(5.3) Persentase penerapan Manajeen Risiko (30%)	(5.3) Jumlah UPR-T2 dan UPR-T3 pada Unit Organisasi yang menerapkan Manajemen Risiko, data didapat dari Ikhtisar Hasil Evaluasi Efektifitas Penerapan MR UPR-T2 dan UPR-T3, yang dilakukan oleh UKI Unit Organisasi		
SK-1.4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	Komposit dari subindikator: (1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV (25%)	(1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(2) Persentase pengawasan di Inspektorat IV (25%)	(2) Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT di Inspektorat IV		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			(3) Tingkat penanganan pengaduan masyarakat (25%)	(3) Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap pengaduan yang masuk di Inspektorat IV	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(4) Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV (15%)	(4) Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (eksternal dan internal) Inspektorat IV yang ditindaklanjuti	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(5) Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi (10%): (5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP) (40%)	(5) Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi, komposit dari nilai: (5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP), dalam hal Hasil Evaluasi BPKP	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Tahun berkenaan belum diperoleh, digunakan data tahun sebelumnya		
			(5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 (30%)	(5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1, Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan MR dibandingkan Nilai Target, menggunakan Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Unit Organisasi tahun sebelumnya atau Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Interim Unit Organisasi		
			(5.3) Persentase penerapan Manajemen Risiko (30%)	(5.3) Jumlah UPR-T2 dan UPR-T3 pada Unit Organisasi yang menerapkan		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Manajemen Risiko, data didapat dari Ikhtisar Hasil Evaluasi Efektifitas Penerapan MR UPR-T2 dan UPR-T3, yang dilakukan oleh UKI Unit Organisasi		
SK-1.5	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	Komposit dari subindikator: (1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V (25%)	(1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(2) Persentase pengawasan di Inspektorat V (25%)	(2) Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT di Inspektorat V	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(3) Tingkat penanganan pengaduan masyarakat (25%)	(3) Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				terhadap pengaduan yang masuk di Inspektorat V		
			(4) Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V (15%)	(4) Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (eksternal dan internal) Inspektorat V yang ditindaklanjuti	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(5) Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi (10%): (5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP) (40%)	(5) Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi, komposit dari nilai: (5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP), dalam hal Hasil Evaluasi BPKP Tahun berkenaan belum diperoleh,	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				digunakan data tahun sebelumnya		
			(5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 (30%)	(5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1, Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan MR dibandingkan Nilai Target, menggunakan Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Unit Organisasi tahun sebelumnya atau Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Interim Unit Organisasi		
			(5.3) Persentase penerapan Manajemen Risiko (30%)	(5.3) Jumlah UPR-T2 dan UPR-T3 pada Unit Organisasi yang menerapkan Manajemen Risiko, data didapat dari		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Ikhtisar Hasil Evaluasi Efektifitas Penerapan MR UPR-T2 dan UPR-T3, yang dilakukan oleh UKI Unit Organisasi		
SK-1.6	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja Inspektorat VI	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	Komposit dari Indikator-indikator sebagai berikut: (1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Audit Inspektorat VI (25%)	(1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat VI	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(2) Tingkat pelaksanaan Audit Investigatif (25%)	(2) Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan Audit Investigasi terhadap rencana pada PKPT di Inspektorat VI		
			(3) Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti (15%)	(3) Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (internal) Inspektorat VI yang ditindaklanjuti		
			(4) Jumlah Kumulatif Penghargaan/ Predikat menuju WBK dan	(4) Pengembangan Unit Kerja yang mendapatkan penghargaan/ predikat		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			WBBM yang diperoleh Unit Kerja (10%)	menuju WBK dan WBBM sesuai hasil Tim Penilai Nasional Kementerian PAN-RB		
			(5) Jumlah Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/ diimplementasikan (10%)	(5) Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/ diimplementasikan, merupakan komposit dari: (a) Penerapan Teknologi Informasi (b) Prosentase penerapan Manajemen Resiko	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(6) Survei Penilaian Integritas (15%)	(6) Indeks Integritas Kementerian PUPR, berdasarkan Survei Penilaian Integritas oleh KPK	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Eksternal
SK-1.7	Tersedianya dokumen perencanaan dan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan	(1) Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan	(1) Dokumen Rencana Pengawasan Tahunan yang disusun	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	regulasi pengawasan	regulasi pengawasan	(2) Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan	(2) Jumlah regulasi pengawasan yang disusun (Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, dan/atau Surat Edaran Inspektur Jenderal)	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis Kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SK-2	Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	(1) Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan; (10%)	dihitung dari penjumlahan: (1.1) Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja (1.2) Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/ Jumlah Seluruh Unit Kerja (1.3) Persentase Penyelesaian	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data Survei dan Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/ Total Usulan Penghapusan BMN.</p> <p>(1.4) Persentase terselenggaranya Administrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/ Jumlah Seluruh Koresponden</p>		
			(2) Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai; (15%)	<p>Rerata:</p> <p>(2.1) Tingkat kualitas SDM Inspektorat Jenderal (persentase pemenuhan kompetensi terhadap kebutuhan);</p> <p>(2.2) Nilai survei kepada Pegawai terkait</p>	<p>Kumulatif</p> <p>Non Kumulatif</p>	<p>Internal</p> <p>Internal</p>

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				ketepatan perencanaan pegawai, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian.		
			(3) Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (7.5%)	(3) Berdasarkan Data Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Aplikasi OMSPAN DJPB	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Eksternal
			(4) Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran (7.5%)	(4) Berdasarkan Data dari Aplikasi SMART DJA	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Eksternal
			(5) Nilai SAKIP Itjen Kementerian PUPR (5%)	(5) Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi Itjen oleh APIP	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Eksternal
			(6) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 Itjen oleh APIP (5%)	(6) Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 Itjen oleh APIP	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Eksternal
			(7) Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik bidang Pengawasan (10%)	(7) Penyelesaian Laporan PPID Itjen	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			(8) Tingkat Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum bidang Pengawasan Intern (10%)	(8) Penyelesaian Laporan Fasilitasi penyusunan Produk Hukum Itjen	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(9) Tingkat Layanan Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal (5%)	(9) Persentase pelaksanaan Program Kerja Tahunan UKI Itjen	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(10) Tersusunnya Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHP Pengaduan, IHP, IHP BPKP) (10%)	(10) Penyelesaian Dokumen IHP (IHP Pengaduan, IHP Itjen, IHP BPKP) Semester I dan II	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
			(11) Tersusunnya Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Pemeriksaan BPK RI (10%)	(11) Penyelesaian Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Semester I dan II	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			(12) Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (5%)	(12) Penyelesaian Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas (IACM Level) Itjen	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal

10. Sekretariat Jenderal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR Dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (%)	Tingkat Kualitas Tata Kelola	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 1: Tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR (40%) ▪ Indikator 2: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR (60%) 	<i>Take Last</i>	Internal dan Eksternal
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR (%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan Umum 2. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai 3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: <ul style="list-style-type: none"> Indikator 1: dari Indikator SK-1 (25%) Indikator 2: dari Indikator SK-2 (12,5%) Indikator 3: dari Indikator SK-3 (12,5%) Indikator 4: dari Indikator SK-4 (12,5%) 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>dan advokasi hukum</p> <p>4. Tingkat kualitas fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah</p> <p>5. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik</p> <p>6. Tingkat layanan digital</p> <p>7. Tingkat layanan kajian dan pemantauan kebijakan</p>	<p>Indikator 5: dari Indikator SK-5 (12,5%)</p> <p>Indikator 6: dari Indikator SK-6 (12,5%)</p> <p>Indikator 7: dari Indikator SK-7 (12,5%)</p>		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	
SK-1	Meningkatnya layanan pengelolaan, perencanaan, keuangan, BMN, dan Umum	Tingkat layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan Umum. (%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen. (%) 2. Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi yang lengkap, akurat dan terkini (%) 3. Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKAKL (%) 4. Tingkat layanan kerja sama luar negeri yang efektif (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 1: Penilaian SAKIP Setjen oleh tim evaluator Itjen (20%) ▪ Indikator 2: Data pelaporan pemantauan dan evaluasi program yang lengkap, akurat, dan terkini (20%) ▪ Indikator 3: Mengacu PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. (30%) ▪ Indikator 4: Jumlah layanan kerja sama luar negeri yang berjalan dibagi dengan layanan kerja sama luar negeri yang direncanakan. (30%) 	non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	Data internal dan eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kualitas Layanan Perbendaharaan dan PNBP. (%) 2. Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian. (%) 3. Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Kementerian. (%) 	<p>Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 1 (20%): <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase keberhasilan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan (50%) 2. Jumlah laporan penyusunan Target dan Pagu PNBP yg tepat waktu (30%) 3. Penilaian Kinerja Bendahara dan BLU (20%). ▪ Indikator 2: Dihitung Berdasarkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan (30%) <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai IKPA berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) 2. Nilai Pagu Minus (40%) ▪ Indikator 3: Dihitung berdasarkan (25%) <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dengan SAP berdasarkan hasil pemantauan E-Rekon LK Unaudited (40%) 	<p>non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun</p>	<p>Data internal dan eksternal</p>

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI. (%)</p> <p>5. Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP</p>	<p>2. Kecukupan pengungkapan dalam LK berdasarkan hasil telaah LK (40%)</p> <p>3. Efektifitas SPI - Nilai PIPK Kementerian (20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 4: Dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI (15%) ▪ Indikator 5: Dihitung berdasarkan kriteria (10%): <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unor yang Tepat Waktu (40%) - Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Organisasi yang Lengkap (40%) - Nilai Maturitas SPIP Kementerian (20%) 		
			Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	non kumulatif, dihitung	data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 1: dihitung dari penjumlahan: <ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan <ul style="list-style-type: none"> i. $PSP = \frac{\text{Jumlah BMN yang sudah di PSP}}{\text{total jumlah aset yang harus di PSP}}$ ii. $\text{Alih Status} = \frac{\text{Jumlah BMN yang sudah di alih status}}{\text{total jumlah aset yang harus di alih status}}$ b. Pemindahtanganan <ul style="list-style-type: none"> i. $\text{Hibah} = \frac{\text{Jumlah BMN yg di proses}}{\text{total jumlah usulan}}$ ii. $\text{Penjualan} = \frac{\text{Jumlah BMN yang disetujui atau ditolak untuk dijual}}{\text{(dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke pengelola barang dan atau mendapat persetujuan penjualan pengguna barang.}}$ iii. $\text{Tukar menukar} = \frac{\text{Jumlah BMN yang dilakukan tukar menukar}}{\text{(dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke Menteri /}}$ 	peningkatan setiap tahun	

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		2. Tingkat Efektivitas Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penertiban BMN	<p>Sekjen selaku pengguna barang</p> <p>c. Penghapusan= Jumlah BMN yang dilakukan penghapusan / (dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke pengelola barang dan/atau mendapat persetujuan penghapusan di pengguna barang (Bobot Total: 50%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 2: dihitung dari penjumlahan: <ul style="list-style-type: none"> a. Penatausahaan BMN = Persentase Tindak lanjut penyelesaian Data Anomali BMN b. Pemanfaatan BMN yaitu Jumlah izin prinsip Pemanfaatan BMN (KSP/ KPBU/ KSPI/ BSGBGS/ Sewa / Pinjam Pakai) yang telah disetujui dibagi dengan yang telah disampaikan ke pengelola barang dan / atau mendapat persetujuan dari pengguna barang. 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			c. Penertiban BMN yaitu Presentase Penanganan pengamanan dan penertiban BMN yang direncanakan. (Bobot Total: 50%)		
		Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, dan Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: ▪ Indikator 1: dihitung dari penjumlahan: a. Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja b. Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja c. Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Penghapusan BMN	non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>2. Tingkat Kualitas Pengelolaan urusan kesehatan, fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan pegawai.</p> <p>3. Tingkat Kualitas pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung,</p>	<p>yang telah diselesaikan/ Total Usulan Penghapusan BMN. d. Persentase terselenggaranya Adiministrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/Jumlah Seluruh Koresponden (Bobot Total: 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 2: dihitung dari penjumlahan: <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Kepuasan Pelayanan Kesehatan = Jumlah Seluruh Pegawai yang Terpenuhi Pelayanan Kesehatan/ Jumlah Seluruh Pegawai yang Mendaftar Pelayanan Kesehatan b. Persentase Kegiatan Acara Kementerian yang Terlayani = Jumlah Acara Kementerian yang Terlayani/ Jumlah Seluruh Acara Kementerian. (Bobot Total: 25%) ▪ Indikator 3: dihitung dari penjumlahan: 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan	<p>a. Persentase Renovasi dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pusat, Rumah Jabatan (Irjen dan Kabalitbang) = Jumlah Kegiatan Realisasi M² Renovasi dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pusat dan Rumah Jabatan / Target M² Renovasi dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pusat dan Rumah Jabatan</p> <p>b. Persentase Terpeliharanya Chiller, STP, Mechanical Electrical and Plumbing, dan Jaringan Kantor = Jumlah Realisasi Pemeliharaan Chiller, STP, Mechanical Electrical and Plumbing, dan Jaringan Kantor / Jumlah Pemeliharaan Chiller, STP, Mechanical Electrical and Plumbing, dan Jaringan Kantor.</p> <p>c. Persentase Terpeliharanya Taman, Halaman, dan Sarana Prasarana Bangunan Gedung Kantor = Jumlah Realisasi</p>		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		4. Tingkat Kualitas pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan serta protokoler pimpinan Kementerian	Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Sarana Prasarana Bangunan Gedung Kantor/ Jumlah Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Sarana Prasarana Bangunan Gedung Kantor. (Bobot Total: 25%) <ul style="list-style-type: none"> • Indikator 4 dihitung dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pelayanan pengaduan ketidakamanan di lingkungan Kementerian PUPR = jumlah pengaduan ketidakamanan di lingkungan Kementerian PUPR yang Tertangani/ jumlah pengaduan ketidakamanan di lingkungan Kementerian PUPR b. Persentase Terselenggaranya Pengaturan Acara dan Kegiatan Pimpinan dengan Baik dan Lancar Sesuai Aturan = Jumlah 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				dan efisiensi pelaksanaan tugas fungsi (25%)		
SK-3	Meningkatnya Fasilitas Produk Hukum dan Advokasi Hukum yang progresif	Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum. (%)	<p>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum. (%) 2. Tingkat efektivitas penyebarluasan produk hukum. (%) 3. Tingkat efektivitas advokasi hukum. (%) 4. Tingkat Kepatuhan Internal di Lingkungan Setjen 5. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian 6. Tingkat Efektivitas Penyusunan 	<p>Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 1: jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kemen PUPR) dikali 100%. (30%) ▪ Indikator 2: hasil survei persepsi user terhadap kemudahan akses website JDIH Kemen PUPR. (20%) ▪ Indikator 3: jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%. (30%) ▪ Indikator 4: Hasil Survei persepsi user terhadap kepatuhan internal di Lingkungan Setjen (10%) ▪ Indikator 5: jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan 	non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Pertimbangan Materi	<p>dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100 % (5%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 6: jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100 % (5%) 		
SK-4	Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah	Tingkat kualitas fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah	<p>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kualitas fasilitasi Perencanaan 2. Tingkat Kualitas fasilitasi Pembinaan 	<p>Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 1: Tingkat kualitas fasilitasi perencanaan (40%) <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi DAK fisik infrastruktur PUPR (survei) b. Pelaksanaan kegiatan konsultasi program DAK fisik infrastruktur PUPR ▪ Indikator 2: Tingkat Kualitas Fasilitasi Pembinaan (30%) <ol style="list-style-type: none"> a. Audiensi yang dilaksanakan dibagi jumlah permohonan audiensi (kuesioner survei) 	non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			3. Tingkat Kualitas fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> b. Kehadiran menjadi narasumber dibagi permohonan narasumber c. Pelaksanaan sosialisasi/bimtek/workshop/layanan informasi (<i>pre test, post test, dan survei</i>) ▪ Indikator 3: Tingkat kualitas fasilitasi pemantauan dan evaluasi (30%) Surat hasil monev yang disampaikan ke Pemda dibagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi 		
SK-5	Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ul style="list-style-type: none"> 1. Persepsi/sentimen positif artikel/siaran di media 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 1: Persentase persepsi/ sentimen positif artikel/siaran dari volume 	non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	Data Internal dan eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			2. Tingkat kesuksesan penyelenggaraan publikasi 3. Tingkat kepuasan pengguna bahan informasi pimpinan 4. Tingkat kepuasan pemohon informasi publik	pemberitaan Kementerian PUPR di media (35%) ▪ Indikator 2: Tingkat kehadiran peserta, <i>Stakeholder feedback</i> dan/atau persepsi/ sentimen positif. (35%) ▪ Indikator 3: Persepsi/ sentimen positif <i>stakeholder Stakeholder feedback</i> (15%) ▪ Indikator 4: Persepsi/ sentimen positif <i>stakeholder dan/atau Stakeholder feedback</i> . (15%)		
SK-6	Digital Melayani	Tingkat layanan digital	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Menjadi <i>Smart Office</i> . 2. Layanan Handal/Prima (kemudahan dalam pengajuan permohonan layanan, proses cepat, dan layanan	Pejumlahan dari indikator kontributor dibagi pendanaan tahun yang bersangkutan (%) sbb: ▪ Indikator 1: a. Otomatisasi dan Digitalisasi Kegiatan Perkantoran b. Kemudahan dan Kenyamanan Bekerja ▪ Indikator 2: a. Layanan yang Akurat, Cepat, Terkini, Mudah Diakses,	Kumulatif	Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			yang diberikan sesuai permohonan) 3. Manajemen Perubahan /Tata Kelola	Terintegrasi, dan Berbagi Pakai b. Layanan yang Terukur dan Terpantau (Akuntabilitas Kinerja) c. Penyediaan Teknologi Terkini dan Inovasi d. Penanggulangan dan Tanggap bencana serta analisis manajemen risiko bencana terintegrasi ▪ Indikator 3: Peningkatan SDM		
SK-7	Meningkatnya layanan kajian dan pemantauan kebijakan	Tingkat layanan kajian dan pemantauan kebijakan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Menteri secara profesional dan akuntabel	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: ▪ Indikator 1: Ketepatan waktu dan substansi dalam pelaksanaan kebijakan Menteri terhadap target waktu dan substansi yang diharapkan (Bobot: 25%)	non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		2. Tingkat pelaksanaan telaahan dan kajian untuk mendukung kebijakan Menteri 3. Tingkat efektivitas penyusunan agenda prioritas Menteri. 4. Tingkat kepuasan dukungan pelaksanaan kebijakan Menteri (substantif program dan kegiatan).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 2: Jumlah telaahan dan kajian yang dihasilkan terhadap Jumlah telaahan dan kajian yang direncanakan (Bobot: 25%) ▪ Indikator 3: Jumlah agenda prioritas Menteri yang dilaksanakan terhadap agenda prioritas Menteri yang direkomendasikan (Bobot: 25%) ▪ Indikator 4: Survey terhadap persepsi stakeholder untuk menilai kepuasan dukungan pelaksanaan kebijakan Menteri (substantif program dan kegiatan). (Bobot: 25%) 		
Meningkatnya dukungan manajemen manajemen Sekretariat Jenderal	Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	Tingkat kualitas layanan kepegawaian, keuangan, BMN dan Umum	Layanan kepegawaian, keuangan, BMN dan Umum yang telah diselesaikan tepat waktu, akurat, dan terkini (100%)	Non kumulatif	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Pdt. Kepala Biro Hukum,

 Mardiyanto, SH, MH
 NIP. 196605112003121002

MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO